

ACUAN PELATIHAN UNTUK FASILITATOR DESA

Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT (PPSDABM)

Tim Penulis:

Ita Natalia
Bayu Saputro
Nurhidayat Ari Munir
Sutisna
M. Zaki Albarahwi
Inda Fatinaware
Herman Supriyanto
Mohammad Fachrudin
Pipin Noviati Sadikin

Kontributor:

Mohammad Djauhari
Aftrinal Sya'af Lubis
Nurhidayat Ari Munir

Penyunting

Nurhidayat Ari Munir, Bayu Saputro, Pipin Noviati Sadikin

Sampul

Bayu Saputro

Tata Letak

Bayu Saputro

Ilustrasi

Bayu Saputro

Modul ini dikembangkan oleh KpSHK dalam rangka pelaksanaan “Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka”, dalam program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) atas dukungan MCA-Indonesia bekerjasama dengan anggota konsorsium KPSHK yaitu KONSEPSI di Mataram, YAPPI-Sultra dan LaPAK-Sultra. Penerbitan modul ini merupakan kontribusi bersama baik berupa biaya, tenaga, maupun waktu dalam pengembangannya dan ujicoba.

Buku modul ini dapat diperbanyak, digandakan dan disebarluaskan oleh pihak-pihak yang memerlukannya, namun tidak untuk diperjualbelikan. Isi modul dapat dikutip tanpa ijin dengan mencantumkan sumbernya.

Sekapur Sirih Hutan Rakyat, Hutan Lestari, Rakyat Berdaulat, Bangsa Mandiri

~Mohammad Djauhari~

"Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar di dunia. namun bangsa Indonesia, bagaikan ayam kelaparan di lumbung padi. Negara tidak pernah serius dalam mengelola sumberdaya alam nasional, sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya banyak dinikmati sekelompok kecil. Kita membutuhkan lembaga yang mempunyai rasa kepedulian yang tinggi dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Kedaulatan dan kemandirian dalam mengelola sumberdaya alam yang efisien dan produktif yang didukung ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan mendorong peningkatan daya saing bangsa. Tujuan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata bukanlah sebuah kemuskilan yang hendak dicapai bangsa ini di masa mendatang".

Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka merupakan salah satu bagian dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat (PPSDABM), dengan Tipe Proyek [1] Pengelolaan Penataan Hutan yang lebih baik dan [2] Prakarsa Pembangunan Rendah Karbon. Tujuan dari proyek ini adalah **"Meningkatnya kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan"**. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 komponen proyek yang harus dilakukan, yakni:

1. **Peningkatan akses kelola dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat.** Target dari upaya ini adalah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di lahan HKm dan ijin pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial (IUPHKm, IUPHD, IUPHTR, hutan kemitraan).
2. **Peningkatan tata kelola hutan oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari.** Hal ini menggunakan Standard Plan Vivo, yakni sistem sertifikasi hutan lestari untuk reduksi emisi carbon dari deforestasi dan degradasi hutan.

Hasil tersebut dapat dicapai jika, output dari proyek dapat dicapai, yang mencakup:

- ❖ Kesepahaman antar pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat dan para pihak terkait tujuan utama proyek;
- ❖ Peta tata guna lahan dan dokumen perencanaan wilayah kelola hutan oleh masyarakat;
- ❖ Akses kelola hutan skema perhutanan sosial dan ijin pemanfaatan hasil hutan;
- ❖ Peningkatan kapasitas manajerial dan jaringan kader kelompok pengelola hutan;
- ❖ Tersedianya produk dan potensi pasar komoditi unggulan HHK, HHBK dan Imbal Jasa Ligkungan;
- ❖ Rehabilitasi lahan dan DAS di wilayah kelola hutan masyarakat; dan
- ❖ Penerapan Prinsip Tata Kelola Hutan Lestari Rendah Emisi Standar Plan Vivo.

Pendekatan umum yang digunakan menggunakan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial atau lebih umum dikenal PIAPS berlandaskan kepada RPJMN 2015-2019 **"Meningkatkan akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan minimal seluas 12,7 juta ha"**. Data PIAPS disusun bersama dengan para pihak yang berkecimpung di bidang perhutanan sosial baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah (KPSHK, BRWA dan JKPP).

Untuk mencapai output yang direncanakan terdapat tiga belas (13) kegiatan utama yang akan dilaksanakan di tingkat desa, kabupaten, propinsi dan nasional. Seluruh kegiatan utama tersebut

dilakukan secara partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di desa, di kabupaten dan di nasional, yang meliputi:

1. Persiapan pelaksanaan proyek di tingkat manajemen proyek (nasional - regional)
2. Sosialisasi implementasi proyek ke pemangku kepentingan utama
3. Perumusan kesepahaman kerjasama implementasi proyek antar pemangku kepentingan utama.
4. Pemetaan tata guna lahan tradisional secara partisipatif
5. Perumusan dokumen rencana pengelolaan dan perijinan perhutanan sosial
6. Pengusulan ijin kelola dan pemanfaatan hasil hutan
7. Dialog dan Lobby Kebijakan
8. ToT kader kelompok pengelola hutan (perempuan dan KTH).
9. Pendampingan kelompok usaha pengelola hutan
10. Penerapan teknologi pasca panen
11. Promosi dan pengembangan jaringan pasar
12. Pembibitan dan penanaman tanaman kayu dan MPTS (perencanaan, pembibitan dan penanaman)
13. Registrasi Proyek Idea Note (PIN) dan Proyek Design Document (PDD) Carbon Reduction Standar Plan Vivo

"Kesulitan bukan terletak dalam gagasan baru, namun dalam usaha melepaskan diri dari gagasan lama yang merusak ke dalam setiap sudut benak kita". John Maynard Keynes

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dalam kerangka *community forestry* (kehutanan masyarakat) merupakan salah satu strategi pengelolaan sumberdaya hutan menuju pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*). Beberapa kerangka kelembagaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan diatur melalui beberapa mekanisme seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD). Disamping itu juga masih ada pengelolaan hutan adat di wilayah adat, serta model desa konservasi di sekitar hutan konservasi. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memanfaatkan hutan untuk memberdayakan masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan dengan meningkatkan keterlibatannya agar kesejahteraannya meningkat.

Namun demikian, dalam perkembangannya, praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat cenderung berjalan lambat bahkan praktik pengelolaan hutan adat menjadi terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan sektoral dan investasi skala besar yang seringkali tidak konsisten dan saling berbenturan. Namun demikian, bentuk PHBM yang berjalan hingga saat ini dapat bertahan dan menunjukkan kemampuannya dalam mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan, mencegah konflik, dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi titik masuk (*entry point*) akselerasi pembangunan PHBM mengingat besarnya jumlah penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang mencapai 20% dari total jumlah penduduk Indonesia. KPH sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan baik hutan negara, hutan adat, maupun hutan hak secara efektif dan efisien.

Terkait dengan perkembangan PHBM ke depan, pengembangan jasa lingkungan merupakan suatu alternatif yang dapat diimplementasikan dalam praktek pemanfaatan hutan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kegiatan dalam **pemanfaatan jasa lingkungan** ini antara lain adalah pemanfaatan jasa aliran

air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan/penyimpanan karbon. Atas kegiatan tersebut, bisa diterapkan suatu mekanisme pembayaran yang disebut dengan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan kepada pihak penyedia jasa lingkungan.

***"Ekonomi bukan sekedar memperoleh penghasilan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan penghasilan itu dengan baik untuk meningkatkan penghidupan dan kebebasan kita".
Amartya Sen***

Akibat keterbatasan penguasaan teknologi dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia, menyebabkan potensi sumberdaya alam tidak bisa dikelola secara optimal. Pemerintah masih belum optimal mendorong pengembangan industri hulu dan hilir, sehingga rente ekonomi sumberdaya alam tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, munculnya peraturan dan kebijakan pemerintah belum mampu mengatasi hambatan-hambatan untuk pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal. Peraturan atau kebijakan pemerintah, justru dinilai cenderung lebih memperkaya investor-investor yang akhirnya lebih banyak mengeksploitasi kekayaan alam, karena orientasi pemerintah hanya kepada ekspor tanpa memandang kecukupan dalam negeri. Hal ini diperparah adanya tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kekayaan alam, sehingga membuat semakin kacau dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pengeksplotasian sumberdaya alam yang salah dan berlebihan oleh pihak-pihak tertentu mengakibatkan kerusakan alam, sehingga membuat potensi alam semakin berkurang, akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam dan kurangnya pengawasan pemerintah.

Untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan sumberdaya alam, diperlukan paradigma baru bagi pemerintah, pengusaha maupun masyarakat, sehingga pemerintah lebih serius mengatasi permasalahan. Di samping itu, perlu penghapusan kebijakan pemerintah yang merugikan dalam pengembangan sumberdaya alam, melalui kebijakan pemerintah yang baru yang bermanfaat bagi pemanfaatan sumberdaya alam, sehingga menjadi lebih maksimal dan bernilai tambah tinggi. Pengawasan ketat terhadap kebijakan pemerintah diperlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan kebijakan.

Di sisi lain, diperlukan inovasi teknologi dalam negeri sehingga tidak tergantung dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan industri hulu dan hilir. Untuk hal ini, pemerintah harus memfokuskan peningkatan mutu pendidikan atau kualitas sumber daya manusia, Perbaikan kualitas sumberdaya manusia diharapkan mendorong pengembangan teknologi dan inovasi yang akan berguna bagi pembangunan. Dengan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi masalah sumber daya alam dan lingkungan, maka sangat muskil untuk tidak dapat mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pemantauan hutan yang lestari, modul Training of Trainer (ToT) untuk Fasilitator Desa ini cukup bermanfaat sebagai landasan awal dan peningkatan wawasan. Kemudian, fasilitator perlu mengemas modul ToT secara sederhana, agar mudah dilatihkan kembali kepada Kader Kelompok tani Hutan dan Kader Kelom;pok Perempuan.

Bogor, September 2016
Penanggung Jawab Program

Mohammad Djauhari
Ketua Pengurus KPSHK

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

AHH	: Angka Harapan Hidup
AMDAL	: Analisis Dampak Lingkungan
AMH	: Angka Melek Huruf
APL	: Areal Penggunaan Lain
BAI	: Bentang Alam Investasi
BAP	: Bentang Alam Pembangunan
BEB	: Break Even Point
BKM	: Badan Keswadayaan Masyarakat
BPDAS	: Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPTH	: BPTH, Balai Perbenihan Tanaman Hutan
BUB	: Batas Ujung Banir
CBNRM	Green Prosperity-Community Based Natural Resources Management
CBO	: Community Base Organization
CDM	: Clean Development Mechanism
CTJ	: Ceramah Tanya Jawab
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DED	: Detail Engineering Design
Deforestasi	: Proses Hilangnya Tutupan Hutan Secara Berkala
DPPI-KLHK	: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
EMM	: EuroConsult Mott MacDonald
ERR	: Economic Rate of Return
ESMS	: Sistem Pengelolaan Dampak Lingkungan dan Sosial
FAO	: Food and Agriculture Organization
Fasilitator	: Pemandu Kegiatan
FGD	: Focus Group Discussion
FPIC	: Free Prior And Informed Consent
FS	: Feasibility Study
GAPOKTAN	: Gabungan Kelompok Tani
GHG	: Greenhouse Gas
GIS	: Geographic Information System
GMP	: Grand Management and Procurement
GPM	: Grant Program Managers/ Manajer Pengelola Hibah
GRK	: Gas Rumah Kaca
HD	: Hutan Desa
HD	: Hutan Desa
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HHK	: Hasil Hutan Kayu

HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HL	: Hutan Lindung
HLKP	: Hutan Lahan Kering Primer
HP	: Hutan Produksi
HPB	: Hutan Produksi Biasa
HPK	: Hutan Produksi Konversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HSA	: Hutan Suaka Alam
HSAD	: Hutan Suaka Alam Darat
HSAL	: Hutan Suaka Alam Laut
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
HTR	: Hutan Tanaman Rakyatd
IBCSD	: Indonesia Business Council for Sustainable Development
IBEKA	: Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan
IFC	: International Finance Corporation
IIEE	: Institute of Integrated Electrical Engineers
IJL	: Imbal Jasa Lingkungan
Inviltrasi	: Proses Masuknya Air Kedalam Tanah
IPM	: Indek Pembangunan Manusia
IRR	: Internal Rate of Return
ITT	: Proyek Kemakmuran Hijau
IUCN	: International Union for Conservation of Nature
IUP PS	: Izin Usaha Pengelolaan Pemerintah Pusat
IUPHHK	: Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
IUPHHK-HA	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
IUPHTR	: Izin Usaha Pemanfaatan Hutan tanaman Rakyat
IUPPHD	: Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa
KAPET	: Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Karbon Sink	: Pelepasan Karbon dari Ekosistem
KK	: Kepala Keluarga
KKB	: Kajian Kelayakan Bisnis
KKF-PRLSBL	: Kerangka Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Ramah Lingkungan di Sektor Berbasis Lahan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KONSEPSI	: Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi
KOORWIL	: Koordinator Wilayah
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHKm	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

KPI	: Key Performance Indicators
KPSHK	: Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan
KRT	: Kepala Rumah Tangga
KS	: Koefisien Spesialisasi
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KUT	: Kredit Usaha Tani
LaPAK	: Lembaga Peduli Aneka Komoditi
LLA	: Landscape and Lifescape Analysis
LLA	: Lifescape-Landscape Analysis
Lo	: Koefisien Lokalisasi
LPPSLH	: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup
LQ	: Location Quotient
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LULC	: Land Use and Land Cove
M&E	: Monitoring dan Evaluasi
MCAI	: Millenium Challenge Account Indonesia
MDK	: Model Desa Konservasi
MPTS	: Multi Purpose Trees Species
MSF	: Forum Multi-pihak
NDVI	: Normalized Difference Vegetation Index
NGO	: Non-Governmental Organization
NPV	: Net Present Value
NTFPs	: Non Timber Forest Products
PBP	: Payback Period
PDD	: Proyek Design Document
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PERDA	: Peraturan Daerah
PERDES	: Peraturan Desa
PES	: Payment Enviromental Services/ Imbal jasa Ekosistem
PHBM	: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PIN	: Proyek Idea Note
PJ	: Penanggung Jawab
PKIP	: Pusat Kawasan Industri Pertambangan
PKP	: Pengembangan Kawasan Pertanian
Plan Vivo	: Lembaga Non Profit yang Mengeluarkan Sertivikat Imbal Jasa Lingkungan
PM	: Project Manager
Podes	: Potensi Desa
Poktan	: Kelompok Tani

PP	: Pemetaan Partisipatif
PPA	: Participatory Poverty Assessment
PPI	: Pengendalian Perubahan Iklim
PPMK	: Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas
PPP	: Purchasing Power Parity
PRA	: Participatory Rural Appraisal
PS	: Perhutanan Sosial
PSDA	: Pengelolaan Sumber Daya Alam
PSDABM	: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PSKL KLHK	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PSPSDM	: Pusat Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia
PUG	: Pengarusutamaan Gender
RAN GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
REDD+	: Reducing Emission from Deforestation and Degradation
RFP	: Request for Proposal
RHL	: Rehabilitasi Hutan dan Lahan
RIM	: Rumah Informasi Masyarakat
RKL	: Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
RLHA	: Rona Lingkungan Hidup Awal
RMU	: Rattan Monitoring Unit
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJM Des	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPL	: Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
RTP	: Rumah Tangga Pertanian
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SFM	: Application of sustainable forest management
SGIP	: Social and Gender Integration Plan
SHK	: Sistem Hutan Kerakyatan
SHK	: Sistem Hutan Kerakyatan
SIRG	: Sistem Informasi Rawa Gambut
SKB	: Studi Kelayakan Bisnis
SKKL	: Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLVK	: Sertifikasi Legalitas Verifikasi Kayu
SOP	: Standard Operasional Prosedur
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Surface Run off	: Aliran Permukaan Air yang Mengalir di Permukaan Tanah Disebabkan

	Karena Hujan
System IJON	: Budaya Masyarakat Tani Tempo Doeloe
TA	: Tenaga Ahli
TAP	: Technical Appraisal Panel
TKPKD	: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TNGR	: Taman Nasional Gunung Rinjani
TNGR	: Taman Nasional Gunung Rinjani
TORA	: Tanah Objek Reforma Agraria
TOT	: Training of Trainer
TPKD	: Tim Pengelola Kegiatan Desa
UKL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan
UMKM	: Usaha Mikro Kecil Menengah
UNDP	: United Nation Development Programs
UNFCCC	: United Nations Framework Convention on Climate Change
UPKD	: Unit Pengelola Keuangan Desa
UPL	: Upaya Pemantauan Lingkungan
WKP Migas	: Wilayah Kerja Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
YAPPI	: Yayasan Pemberdayaan Potensi Pemuda Indonesia
YLP2EM	: Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Caption

keterangan atau tulisan dibawah gambar atau foto

Garis Horison

cakrawala, kaki langit, horizon (berasal dari bahasa Yunani *orizein* yang bermakna "membatasi"), atau **ufuk** adalah garis yang memisahkan bumi dan langit. Lebih tepatnya, horizon adalah garis yang membagi arah garis pandang kita ke dalam dua kategori: arah garis pandang yang memotong permukaan Bumi, dan yang tidak. Di banyak lokasi, *horizon benar* terhalangi oleh pohon, bangunan, gunung, dan sejenisnya, yang membuat perpotongan antara bidang permukaan bumi dan bidang langit kemudian dikenal sebagai *horizon tampak*.

Human interest:

ketertarikan manusia. Dalam konteks media Human Interest adalah aspek cerita di media yang mengulas tentang minat orang karena menggambarkan pengalaman atau emosi individu.

Cross check :

pemeriksaan kembali

Slide Power point :

adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh perusahaan **Microsoft PowerPoint** atau **Microsoft Office PowerPoint**. **PowerPoint** adalah sebuah program computer untuk membuat sebuah presentasi yang menarik yang bisa memuat teks, gambar, foto, tabel, foto, film dan elemen-elemen media visual atau audio visual lainnya. Sesuai namanya, Power Point atau poin-poin atau topik-topik yang memiliki kekuatan. Sebuah laporan atau dokumen yang dipresentasikan dengan Power Point bisa menjadi kekuatan yang menonjolkan aspek-aspek yang ingin kita tekankan.

LCD:

merupakan kependekan dari proyektor LCD. **Proyektor** LCD ini adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Bahan presentasi power

point hanya bisa dipresentasikan dengan menggunakan proyektor LCD. **Proyektor LCD** merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video gambar atau data dari computer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok, dsb. Proyektor LCD biasanya digunakan untuk menampilkan gambar pada presentasi atau perkuliahan, tapi juga bisa digunakan sebagai aplikasi home theater.

Genetic

secara genetik ini berkaitan dengan susunan kromosom dan DNA benih serta jenis protein yang ada dalam benih, dengan tolak ukur kemurnian genetik benih. Selain itu, tolak ukur lain adalah kemurnian mekanis benih yaitu persentase kontaminasi jenis atau varietas lain

Fisiologis,

fisiologis benih berkaitan dengan aktivitas perkecambahan benih, yang di dalamnya terdapat aktivitas enzim, reaksi-reaksi biokimia serta respirasi benih.

Nursery,

tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih (atau bahan lain dari tanaman) menjadi bibit/semai yang siap ditanam di lapangan.

Fungisida .

jenis pestisida yang secara khusus dibuat dan digunakan untuk mengendalikan (membunuh, menghambat atau mencegah) jamur atau cendawan patogen penyebab penyakit

Insektisida

bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga.

Germinator box,

Kotak alat pengecambah benih

Paranet,

salah satu bahan pembuat naungan

Polybag,

salah satu bahan wadah pot tanaman

Generative,

Pembiakan generatif (reproduksi generatif) adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau seksual. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif in

Vegetative,

Perkembangbiakan dengan setek dilakukan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar baru lebih dahulu

Purpose Tree Species (MPTS),

sistem pengelolaan lahan dimana berbagai jenis kayu ditanam dan dikelola, tidak saja untuk menghasilkan kayu, akan tetapi juga daun-daunan dan buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan ataupun pakan ternak

Biofisik,

terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain

Viable,

daya hidup benih yang dapat ditunjukkan melalui gejala metabolisme dan atau gejala pertumbuhan, selain itu daya kecambah juga merupakan tolak ukur parameter viabilitas potensial benih

Dormansi benih,

suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Dengan demikian, dormansi merupakan suatu reaksi atas keadaan fisik atau lingkungan tertentu. Pemicu dormansi dapat bersifat mekanis, keadaan fisik lingkungan, atau kimiawi.

Berkecambah,

tumbuhan kecil yang baru tumbuh

Ortodoks,

benih yang pada masak panen / fisiologi memiliki kandungan kadar air yang relatif rendah. Kelompok **benih** ini dapat disimpan pada keadaan kandungan air **benih** rendah dan suhu rendah.

Embrio, sebuah eukariota diploid multisel dalam tahap paling awal dari perkembangan. Dalam organisme yang berkembang biak secara seksual, ketika satu sel sperma membuahi ovum, hasilnya adalah satu sel yang disebut zigot yang memiliki seluruh DNA dari kedua orang tuanya

Rekalsitran,

benih yang memiliki kadar air tinggi yang tidak dapat disimpan lama.

Aquades,

air murni atau H₂O, yaitu air hasil destilasi atau air hasil penyulingan. H₂O hampir tidak mengandung mineral

Perlakuan mekanis,

perlakuan mekanis dipergunakan untuk memecahkan benih yang mempunyai kulit benih bersifat impermeabel terhadap air dan oksigen serta kulit benih yang terlalu keras menyebabkan resistensi mekanis.

Porositas,

perbandingan volum rongga – rongga pori terhadap volum total seluruh batuan. Perbandingan ini biasanya dinyatakan dalam persen dan disebut porositas.

Organic,

segala sesuatu yang berasal dari unsur makhluk hidup entah itu hewan atau tumbuhan dimana dampaknya pasti berhubungan juga dengan organisme hidup

Volume,

bisa juga disebut kapasitas adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek

Komposisi,

berarti kecakapan bagaimana menyusun

Cocopeat,

media tanam yang dibuat dari sabut kelapa

Transparent,

material yang dapat dilihat tembus pandang

Sprayer,

alat/mesin yang berfungsi untuk memecah suatu cairan, larutan atau suspensi menjadi butiran cairan (droplets) atau spray

Dosis,

merupakan kadar dari sesuatu (kimiawi, fisik, biologis) yang dapat mempengaruhi suatu organisme secara biologis; makin besar kadarnya, makin besar pula dosisnya.

Kultur jaringan,

suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali.

Gulma,

tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi

Sterilisasi,

proses penghilangan semua jenis organisme hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme (protozoa, fungi, bakteri, mycoplasma, virus) yang terdapat dalam suatu benda. Proses ini melibatkan aplikasi biocidal agent atau proses fisik dengan tujuan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme.

Label,

tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus Pestisida

Seed treatment, Pestisida berbentuk tepung yang khusus digunakan untuk perawatan benih.

Pestisida

semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk Polong, berbagai jenis tanaman yg buahnya bersekat-sekat

Investasi,

adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi

Persentase,

suatu angka yang dinyatakan dalam bentuk pecahan perseratus. Persentase dinyatakan dalam satuan persen yang biasa ditulis dengan lambang "%". Setiap bilangan atau angka dapat dinyatakan sebagai perbandingan dengan angka 1

Preventif,

pengecahan timbulnya suatu kejadian yang biasanya merugikan

Spesifik,

hal yang lebih khusus

Andosol,

tanah yang berasal dari bahan induk abu vulkanik. Jenis tanah ini memiliki ciri-ciri berwarna hitam, gembur, dan mudah diolah dengan tingkat kesuburan tinggi. Dikarenakan tingkat kesuburannya relatif tinggi, andosol banyak dimanfaatkan sebagai areal pertanian dan perkebunan, terutama pertanian hortikultur dan pertanian lahan kering. ANDosol disebut juga tanah gembur atau tanah organik.

Regosol,

tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Tanah regosol berupa tanah aluvial yang baru diendapkan. Tanah jenis ini banyak terdapat di Bengkulu, pantai Sumatera Barat, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Material jenis tanah ini berupa abu vulkan dan pasir vulkan

Podsolik Merah kuning,

tanah yang terjadi dari pelapukan batuan yang mengandung kuarsa pada iklim basah dengan curah hujan antara 2.500 - 3.500 mm per tahun. Sifatnya mudah basah jika kena air

pH,

ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan. Pengukuran pH (potensial Hidrogen) akan mengungkapkan jika larutan bersifat asam atau alkali (atau basa).

Fermentasi,

proses yang mengacu pada mikroorganisme untuk memecah bahan organik untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk tetap hidup, dan membuat senyawa organik seperti alkohol dan asam organik, serta senyawa anorganik seperti karbon dioksida dan hidrogen.

Media tanam,

bahan yang digunakan sebagai tempat tumbuh berkembangnya tanaman, baik menggunakan tanah maupun nontanah.

Penyulaman,

kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman yang mati/diduga akan mati

Cangkok,

menguliti hingga bersih dan menghilangkan kambium pada cabang atau ranting sepanjang 5-10 cm. Tumbuhan dikotil yang dicangkok akan memiliki akar serabut, bukan akar tunggang. Menyetek Adalah reproduksi vegetative suatu tumbuhan dari potongan batang, daun, dahan, atau ranting yang kemudian di tanam

Gembur,

berderai-derai tidak keras dan tidak padat (tentang tanah)

Stek,

sebagai suatu perlakuan pemisahan, pemotongan beberapa bagian dari tanaman seperti akar, batang, daun dan tunas dengan maksud agar bagian-bagian tersebut membentuk akar

Piringan,

lokasi berbentuk lingkaran disekeliling areal sebuah tanaman

Entres,

Batang atas tanaman bibit

Kalus,

sekumpulan sel amorphous (tidak berbentuk atau belum terdiferensiasi) yang terbentuk dari sel-sel yang membelah terus menerus secara in vitro atau di dalam tabung. Kalus dapat diperoleh dari bagian tanaman seperti akar, batang dan daun.

Okulasi,

salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yg bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru.

Komoditas,

sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

Parafin,

nama umum untuk hidrokarbon alkan dengan formula C_nH_{2n+2} . Lilin **parafin** merujuk pada benda padat dengan $n=20-40$. Molekul **parafin** paling simpel adalah metana, CH_4 , sebuah gas dalam temperatur ruangan.

Grafting,

seni menyambungkan 2 jaringan tanaman hidup sedemikian rupa sehingga keduanya bergabung dan tumbuh serta berkembang sebagai satu tanaman gabungan

Monokultur,

salah satu cara budidaya di lahan pertanian dengan menanam satu jenis tanaman pada satu areal. Cara budidaya ini meluas praktiknya sejak paruh kedua abad ke-20 di dunia serta menjadi penciri pertanian intensif dan pertanian industrial.

Kontur, (garis sama tinggi)

garis khayal di permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik yang sama tingginya dari atas permukaan laut yang terdapat di peta topograf

Lereng,

bagian yang miring atau sisi yang landai pada sebuah gunung, bukit, pegunungan, atau perbukitan. Drainase, pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.

Ajir,

alat penegak yang terbuat dari batang babu atau tongkat bilahan bambu berfungsi sebagai penyangga batang, tempat bersandar pohon atau merambatnya untuk tanaman peredu dan sejenisnya, dapat di pasang setelah selesai membuat pembubunan dan selesai mensterilkan.

Cover Crops,

tanaman penutup tanah

Mulsa,

sisa tanaman, lembaran plastik, atau susunan batu yang disebar di permukaan tanah. Mulsa berguna untuk melindungi permukaan tanah dari terpaan hujan, erosi, dan menjaga kelembaban, struktur, kesuburan tanah, serta menghambat pertumbuhan gulma (rumput liar).

Fotosintesis,

pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui suatu proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari

Integrasi, dari bahasa inggris "integration"

kesempurnaan atau keseluruhan. integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi.

Konservasi,

upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang.

Penyiangan,

istilah umum di indonesia dalam kegiatan pertanian, yaitu kegiatan mencabut gulma yang berada diantara sela-sela tanaman pertanian dan sekaligus menggemburkan tanah
Irigasi , adalah pemberian air kepada tanah untuk menunjang curah hujan yang tidak cukup agar tersedia lengas bagi pertumbuhan tanaman.,

Erosi,

peristiwa pengikisan padatan (sedimen, tanah, batuan, dan partikel lainnya) akibat transportasi angin, air atau es, karakteristik hujan, creep pada tanah dan material lain di bawah pengaruh gravitasi, atau oleh makhluk hidup semisal hewan yang membuat liang

Ekosistem

suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

DAFTAR ISI

<i>Sekapur Sirih</i>	D-1
<i>Daftar Istilah dan Singkatan</i>	D-5
<i>Daftar Isi</i>	D-15
<i>Daftar Tabel</i>	D-19
<i>Daftar Gambar</i>	D-21
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Permasalahan Utama	1-1
1.3. Tujuan dan Sasaran	1-2
1.4. Konsep dan Pendekatan	1-2
1.5. Metodologi	1-5
BAB II RANCANGAN PELATIHAN	
2.1. Konsep Dasar Pelatihan	2-1
2.2. Tahapan Umum Pelatihan PSDABM	2-5
2.3. Konteks Umum Pelatihan PSDABM	2-5
2.4. Tujuan Umum Pelatihan PSDABM	2-5
2.5. Hasil yang Diharapkan PSDABM	2-6
2.6. Strategi Pelatihan PSDABM	2-6
2.7. Kurikulum Pelatihan PSDABM	2-7
BAB III MODUL PENDOKUMENTASIAN WILAYAH SHK	
3.1. Deskripsi Singkat	3-1
3.2. Tujuan Pembelajaran	3-1
3.3. Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan	3-1
3.4. Persyaratan Peserta	3-2
3.5. Bahan Belajar	3-2
3.6. Metode Pembelajaran	3-2
3.7. Langkah-Langkah Pembelajaran	3-2
3.8. Uraian Materi	3-3
3.9. Lampiran Bahan Tayang	3-21
BAB IV MODUL PENGORGANISASIAN KELOMPOK	
4.1. Deskripsi Singkat	4-1
4.2. Tujuan Pembelajaran	4-1
4.3. Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan	4-1
4.4. Persyaratan Peserta	4-2
4.5. Bahan Belajar	4-2
4.6. Metode Pembelajaran	4-2
4.7. Langkah-Langkah Pembelajaran	4-2
4.8. Uraian Materi	4-3
4.9. Lampiran Bahan Tayang	4-28
BAB V MODUL PEMETAAN DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF	
5.1. Deskripsi Singkat	5-1
5.2. Tujuan Pembelajaran	5-3

5.3. Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan	5-4
5.4. Persyaratan Peserta	5-5
5.5. Bahan Belajar	5-5
5.6. Metode Pembelajaran	5-5
5.7. Langkah-Langkah Pembelajaran	5-5
5.8. Uraian Materi	5-6
5.9. Lampiran Bahan Tayang	5-24

BAB VI MODUL PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

6.1. Deskripsi Singkat	6-1
6.2. Tujuan Pembelajaran	6-1
6.3. Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan	6-2
6.4. Persyaratan Peserta	6-2
6.5. Bahan Belajar	6-2
6.6. Metode Pembelajaran	6-2
6.7. Langkah-Langkah Pembelajaran	6-3
6.8. Uraian Materi	6-4
6.9. Lampiran Bahan Tayang	6-8

BAB VII MODUL PENGEMBANGAN PERHUTANAN RAKYAT

7.1. Deskripsi Singkat	7-1
7.2. Tujuan Pembelajaran	7-1
7.3. Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan	7-1
7.4. Persyaratan Peserta	7-1
7.5. Bahan Belajar	7-2
7.6. Metode Pembelajaran	7-2
7.7. Langkah-Langkah Pembelajaran	7-2
7.8. Uraian Materi	7-3
7.9. Lampiran Bahan Tayang	7-11

BAB VIII MODUL PERAN GENDER DALAM PSDABM

8.1. Deskripsi Singkat	8-1
8.2. Tujuan Pembelajaran	8-1
8.3. Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan	8-1
8.4. Persyaratan Peserta	8-1
8.5. Bahan Belajar	8-2
8.6. Metode Pembelajaran	8-2
8.7. Langkah-Langkah Pembelajaran	8-2
8.8. Uraian Materi	8-4
8.9. Lampiran Bahan Tayang	8-10

BAB IX MODUL PEMBERDAYAAN EKONOMI

9.1. Deskripsi Singkat	9-1
9.2. Tujuan Pembelajaran	9-2
9.3. Pokok Bahasan dan Sub-Pokok Bahasan	9-3
9.4. Persyaratan Peserta	9-4
9.5. Bahan Belajar	9-4
9.6. Metode Pembelajaran	9-4
9.7. Langkah-Langkah Pembelajaran	9-4
9.8. Uraian Materi	9-6
9.9. Lampiran Bahan Tayang	9-46

BAB X	PENUTUP	10-1
BAB XI	SUMBER BACAAN	11-1
BAB XII	BIOGRAFI	12-1

DAFTAR TABEL

Tabel	Isi	Hal
Tabel 2.1	Kurikulum Pelatihan untuk Fasilitator Desa Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) di Kawasan Lombok Timur, Lombok Utara & Kolaka	2-9
Tabel 3.1	Perbandingan Jurnalisme “Biasa” dengan Jurnalisme Warga	3-16
Tabel 5.1	Jenis Peta Rona	5-7
Tabel 5.2	Persiapan Survei dan Pemetaan	5-12
Tabel 5.3	Pelaksanaan Survei dan Pemetaan	5-13
Tabel 5.4	Standar Organisasi <i>Plan Vivo</i>	5-23
Tabel 6.1	Kategori Dampak Lingkungan dalam Pelaksanaan Proyek	6-6
Tabel 7.1	Jadwal Pembenihan dan Pembibitan	7-9
Tabel 9.1	Nilai dan Potensi dalam Pembangunan Kawasan	9-19
Tabel 9.2	Komponen dan Proses Pengembangan Wilayah	9-24
Tabel 9.3	Pengukuran Kekuatan Supply Komoditas Pertanian	9-28
Tabel 9.4	Penetapan Komoditas Unggulan (Terpilih)	9-30

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Isi	Hal
Gambar 1.1	Kegiatan Pelatihan dalam Siklus Manajemen Proyek	1-8
Gambar 2.1	Diagram Alur Penyelenggaraan Pelatihan	2-2
Gambar 5.1	Alur Pelatihan Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif	5-2
Gambar 5.2	Hasil Rrekana Foto Udara Peta landsat	5-18
Gambar 5.3	Hasil Analisa Menggunakan Algoritma NDVI	5-19
Gambar 5.4	Hasil analisa huta yang tersisa menggunakan fotoudara landsat	5-20
Gambar 5.5	Peralatan Pengukuran Data Lapangan	5-21
Gambar 5.6	Bentuk dan ukuran Petak Ukur	5-22
Gambar 9.1	Pemberdayaan Ekonomi sebagai bagian Proses Transformasi Sosial	9-17
Gambar 9.2	Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Penghidupan	9-18
Gambar 9.3	Produk Unggulan dengan Keterkaitan Berbagai Kegiatan Ekonomi dan Komponen Pendukung	9-20
Gambar 9.4	Rantai Kegiatan Ekonomi dan Ikutannya	9-24
Gambar 9.5	Metode Seleksi Komoditas Unggulan	9-27
Gambar 9.6	Kajian Kelayakan Bisnis	9-31
Gambar 9.7	Tahapan Kajian Kelayakan Bisnis	9-32
Gambar 9.8	Penyusunan Perencanaan Bisnis	9-37
Gambar 9.9	Kedudukan <i>Business Plan</i> dalam Manajemen Strategis	9-38
Gambar 9.10	Analisis Keuangan dalam Perencanaan Usaha	9-39
Gambar 9.11	Perencanaan Bisnis dan Action Plan – Rencana Investasi	9-40

●BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Modul ini disusun untuk para pengembang, perencana dan manajer program di lembaga pemerintah, LSM, serta organisasi lainnya yang menyadari pentingnya pemahaman mengenai pendekatan berkelanjutan yang terintegrasi dalam program yang dikembangkan. Modul ini disusun sedemikian rupa berdasarkan pengalaman dan praktik pengembangan program Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDABM) dalam skema Perhutanan Sosial. Meskipun pembahasan dan contoh-contoh dalam modul ini bertema Hutan Kemasyarakatan (HKm), namun metode dan contoh tersebut dapat diterapkan dalam penyelenggaraan program terkait isu lingkungan di daerah lain. Secara umum modul ini dapat diterapkan dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam modul.

Modul ini dibuat dalam format rangkaian, sehingga antar satu modul dengan modul lainnya saling terkait dan menjadi pelengkap satu sama lain. Modul ini terdiri dari MODUL UMUM yang berisi tentang konsep dasar PSDABM dalam skema HKm dan payung besar pendekatannya, kemudian dilengkapi dengan MODUL 1-6 yang masing-masing berisi teknis dari setiap metode dalam program PSDABM dalam skema HKm.

Modul ini bermanfaat bagi pembaca untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana menerapkan pengorganisasian masyarakat (*Community Organizing*) yang sekaligus memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Tujuannya adalah agar masyarakat bisa mencari solusi bagi permasalahan-permasalahan lingkungan yang dihadapinya ketika mengembangkan Hutan Kemasyarakatan.

1.2. PERMASALAHAN UTAMA

Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, serta di Kabupaten Kolaka, Kelurahan Sakuli masih bergantung pada sektor pertanian yakni sawah dan pertanian lahan kering (ladang dan kebun).

Permasalahan utama yang diangkat dalam program PSDABM ini sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diakibatkan oleh:

- ❖ Tidak adanya kepastian mengenai akses tenurial dan pengaturan pengelolaan hutan, pemanfaatan hasil hutan berbasis masyarakat dengan skema perhutanan sosial seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau pola kemitraan. Dampaknya akan langsung mengenai ekonomi RTP (Rumah Tangga Petani) yang membutuhkan lahan dan pada perbaikan tata kelola hutan secara lestari. Kondisi ini juga berpotensi terhadap eksploitasi kawasan hutan di luar daya dukung ekosistem bahkan rawan menimbulkan konflik vertikal dengan pemerintah atau pihak lainnya.
- ❖ Tidak adanya skema perhutanan sosial sebagai langkah mengatasi kebutuhan akses masyarakat atas kawasan hutan.

- ❖ Keterbatasan lahan sawah di desa, kebutuhan pemenuhan ekonomi rumah tangga, kondisi lahan dan upaya perluasan area perkebunan. Kepemilikan lahan pertanian relatif di area usulan project sangat rendah yaitu rata-rata 0,5 Ha/KK di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur.
- ❖ Perluasan area perkebunan rakyat tanaman semusim mendominasi pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Kolaka.
- ❖ Ancaman ekologis bagi DAS karena dibukanya Ijin Penambangan Pasir untuk pemenuhan bahan bangunan masyarakat di Kabupaten Kolaka.
- ❖ Pemanfaatan hutan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian yang mengakibatkan kehilangan tutupan hutan di Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.050,33 ha atau 80,79 ha/tahun, 1.544,30 ha atau 118,79 ha/tahun di Kabupaten Lombok Utara dan di Kabupaten Kolaka mencapai 55.587,66 ha atau sekitar 4.275,97 ha/tahun pada kurun waktu tahun 2001-2013 (Hansen).
- ❖ Kelompok Tani Hutan belum memiliki keterampilan untuk melakukan ekspansi usaha karena terbentur permasalahan klasik yaitu, modal dan kemampuan manajerial.
- ❖ Kelompok Tani Hutan belum menguasai teknologi pasca panen dan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengolahan Sumber Daya pasca panen bagi jenis tanaman andalan setempat dan tanaman unggul lokal.

1.3. TUJUAN DAN SASARAN

Berangkat dari kondisi ekonomi masyarakat pinggir hutan dan praktek pemanfaatan hutan, maka tujuan utama upaya PSDABM dalam skema Perhutanan Sosial ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan, yaitu dengan (i) mengurangi kemiskinan (ii) mengurangi Efek Gas Rumah Kaca dengan cara menerapkan (1) peningkatan akses kelola dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat, dan (2) peningkatan tata kelola hutan oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari.

Untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan, keluaran dari proyek ini adalah (1) kesepahaman antar pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat dan para pihak tujuan utama proyek; (2) peta tata guna lahan berkelanjutan dan dokumen perencanaan tata kelola hutan oleh masyarakat; (3) akses kelola hutan skema perhutanan sosial dan ijin pemanfaatan hasil hutan; (4) peningkatan kapasitas manajerial dan jaringan kader kelompok pengelola hutan; (5) Tersedianya produk dan potensi pasar komoditi unggulan HHK, HHBK dan imbal jasa lingkungan (payment environmental service's); (6) rehabilitasi lahan dan DAS di wilayah kelola hutan masyarakat; (7) Penerapan Prinsip Tata Kelola Hutan Lestari Rendah Emisi Standar Plan Vivo; Seluruh proses pelaksanaan project ini akan dilaksanakan secara partisipatif dan melalui pelibatan multi pihak (*multi stakeholder engagement approach*).

1.4. KONSEP DAN PENDEKATAN

Seluruh proses pelaksanaan proyek ini akan dilaksanakan dalam cara pandang Bentang Alam, baik Bentang Alam Investasi maupun Bentang Alam Pembangunan, secara partisipatif dan melalui pelibatan multi pihak (*multi stakeholder engagement approach*).

1.4.1. BENTANG ALAM DAN BENTANG INVESTASI

Pemahaman Bentang Alam bisa saja berbeda-beda bagi kelompok yang berbeda. Misalnya ahli ekologi berpendapat tentang ekologi bentang alam, ahli geografi lebih menekankan pada bentuk

tanah, perencanaan tata guna lahan yang bekerja dengan poligon dan zona penyangga, sementara ahli hidrologi mempertimbangkan adanya tangkapan air pada dataran yang sama bentang alam, bahkan seorang pelukis bisa melukis sebuah bentang alam dari sudut pandangnya sendiri. Secara mendasar Bentang Alam adalah sebuah daerah yang heterogen, dan ukurannya bisa besar atau luas, bisa juga kecil atau sempit.

Karena bersifat heterogen, maka manfaat dan dampak dari suatu aktivitas bisa berasal dari beragam dimensi. Misalnya dimensi ekologi yaitu kehutanan, pertanian, hidrologi dll, yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh dimensi lainnya seperti ekonomi dan sosial pada masyarakat dan lingkungan yang lebih jauh. Oleh karena itu, pendekatan Bentang Alam perlu dikaji tidak saja dari aspek biofisik, namun perlu lebih holistik dan terpadu dari berbagai dimensi termasuk sosial dan ekonomi, dalam kajian analitis secara multipihak.

Dalam program PSDABM pengertian Bentang Alam ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan lestari dan mengurangi efek Gas Rumah Kaca dalam bentang alam yang terpilih. Ketika menetapkan suatu bentang alam maka perlu pertimbangan dalam skala ruang dalam kajian-kajian aspek biofisik, administratif dan sosial yang cukup kecil agar bisa dikelola dan cukup besar untuk memungkinkan pengembangan kegiatan

Ada tiga prinsip penting yang menjadi penentu untuk mengenali bentang alam pembangunan yang tepat, yang dijabarkan dalam terbitan Badan Pangan Dunia (FAO)¹, yaitu:

- ❖ Struktur, yang menyangkut interaksi antara ciri-ciri lingkungan hidup, pola penggunaan lahan, dan obyek buatan manusia;
- ❖ Fungsi, yaitu penyediaan layanan lingkungan hidup bagi masyarakat;
- ❖ Nilai, yaitu nilai-nilai yang disematkan masyarakat pada bentang alam pertanian serta biaya untuk menjaga dan meningkatkan penyediaan bentang alam oleh pertanian.

Penetapan bentang alam pembangunan yang tepat bergantung pada ketiga unsur konseptual tersebut, serta lima unsur berikut:

- ❖ Tujuan-tujuan bersama manajemen, yang meliputi berbagai manfaat yaitu, kisaran lengkap barang dan jasa yang dibutuhkan – dari suatu bentang alam;
- ❖ Pola-pola di lapangan, ladang, dan hutan dirancang untuk membantu berbagai tujuan, termasuk kesejahteraan manusia, produksi serat dan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan konservasi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem;
- ❖ Interaksi ekologis, sosial, dan ekonomi di antara berbagai bagian bentang alam dikelola demi sinergi positif di antara aktor dan pemangku kepentingan, atau untuk dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan;
- ❖ Proses-proses kolaboratif yang melibatkan masyarakat untuk dialog, perencanaan, negosiasi, dan pemantauan keputusan; dan
- ❖ Pasar dan kebijakan publik dirancang untuk mencapai berbagai tujuan bentang alam serta syarat-syarat kelembagaan

Program PSDABM ini bergantung pada kualitas barang dan jasa ekologis yang diperoleh dalam bentang alam tertentu. Oleh karena itu, program ini akan berlangsung apabila dilakukan investasi yang memadai dalam bentang alam tersebut yang menggunakan barang dan jasa didalamnya sebagai masukan bagi kegiatan ekonomi, seperti penyediaan energi terbarukan atau perbaikan praktik pengelolaan sumber daya alam.

Pendekatan bentang alam menjadi sebuah strategi investasi untuk mencapai tujuan-tujuan PSDABM dan memberikan keunggulan yang nyata dibandingkan pendekatan konvensional yang lazimnya sangat fokus pada sektor tertentu, seperti kehutanan, pertanian, perikanan, tanah, dan pengelolaan sumber daya air. Pendekatan bentang alam untuk perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan ekonomi dapat memberikan insentif bagi masyarakat, ekosistem setempat, serta ekonomi.

Yang menjadi inti program PSDABM ini adalah ada siklus positif yang tercipta antara lingkungan hidup dan pertumbuhan yang lestari. Mengupayakan ketergantungan antara kesehatan ekologis dan pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan hijau yang memperkaya peri kehidupan masyarakat dan melindungi kelestarian masyarakat yang berada dalam bentang alam.

Pendekatan bentang alam mendorong inklusi sosial serta kerja sama berbagai kelompok masyarakat di seluruh bentang alam. Proyek Kemakmuran Hijau bukan saja menekankan inklusi sosial, tetapi juga menciptakan sinergi positif di antara kelompok masyarakat dan penerima manfaat, termasuk pekebun rakyat dan rimbawan masyarakat. Pendekatan bentang alam dibangun berdasarkan hubungan saling terkait antara tata kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pendekatan bentang alam dalam program PSDABM ini terdiri dari investasi pada bauran strategis proyek individual yang mempromosikan strategi perikehidupan masyarakat dan pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Program berikut komponennya akan dipilih untuk bekerja sama dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut sebaiknya:

- ❖ Meningkatkan pendapatan rumah tangga, khususnya masyarakat miskin yang pengetahuan, aset sosial dan manusianya memberi nilai tambah bagi bentang alam tempat mereka hidup;
- ❖ Merangkul masyarakat luas di dalam dan di antara desa, tak hanya satu kelompok sosial atau sektor ekonomi, sehingga mendorong inklusi sosial;
- ❖ Meningkatkan tekanan sosial untuk mencegah praktik lingkungan hidup yang merusak melalui upaya menikmati manfaat proyek secara luas;
- ❖ Lewat suatu ikatan multi-sektoral, mengurangi bias sektoral yang mengakibatkan ketegangan di antara lembaga pembangunan, donor, dan peneliti dalam bentang alam tertentu; dan
- ❖ Memperkuat kondisi kondusif untuk investasi melalui perencanaan tata guna lahan partisipatif, termasuk penetapan batas desa, perizinan sumber daya alam secara transparan, dan perbaikan rencana tata ruang

1.4.2. PARTISIPATIF

Sumber daya alam merupakan kepentingan masyarakat dimana sumber daya alam itu berada, baik masyarakat lokal, kelompok-kelompok masyarakat termasuk kelompok difabel atau yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut, serta masyarakat luas yang berkepentingan dan terkena dampak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, karena menyangkut kepentingan masyarakat sendiri, maka baik masyarakat lokal, kelompok-kelompok masyarakat, maupun masyarakat yang lebih luas perlu terlibat di dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam wujud Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM).

1.4.3. PELIBATAN MULTISTAKEHOLDER

Keluasan wilayah pengelolaan dan keberagaman para pihak yang berkepentingan, serta multi sektor pengelolaan sumber daya alam menuntut dilaksanakannya proses pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara multipihak. Pendekatan multipihak berarti bahwa semua pihak memiliki solusi untuk sebuah permasalahan dan saling melakukan pendekatan ke semua pihak dalam suatu wadah kolaborasi untuk mencari solusi dan

kesepakatan yang paling sesuai dan tepat. Pendekatan ini diyakini bisa meningkatkan penerimaan sosial oleh masyarakat lokal atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil.

1.5. METODOLOGI

Modul yang terdiri dari modul umum dan modul teknis ini dalam format rangkaian saling berkaitan satu dengan yang lainnya. MODUL UMUM yang berisi tentang konsep dasar PSDABM dalam skema HKm dan payung besar pendekatannya, kemudian dilengkapi dengan MODUL 1-6 yang masing-masing berisi teknis dari setiap metode dalam program PSDABM dalam skema HKm.

Penekanan pada Modul Umum adalah pendekatan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat agar siap mengorganisir dirinya dan kelompoknya, ketika menerapkan program PSDABM agar menjadi berkelanjutan. Selain itu, kegiatan PSDABM yang berkelanjutan ini bukan saja ditujukan untuk diri dan kelompoknya saja, melainkan juga untuk diberitakan, diwartakan, di"suara"kan, serta dibagikan kepada khalayak yang lebih luas. Dengan demikian, dengan demikian ada pertukaran informasi yang diharapkan bisa menjadi jembatan agar tercipta suatu jejaring kerjasama yang lebih luas dan potensial bagi pengembangan PSDABM berkelanjutan di tempatnya.

Penyajian modul ini bertujuan agar Pengguna Modul Umum dapat memahami:

- ❖ Bagaimana melakukan pendekatan masyarakat yang partisipatif yang terintegrasi dalam program PSDABM
- ❖ Bagaimana melakukan pengorganisasian masyarakat dalam pengembangan program PSDABM di tingkat kelompok tani hutan HKm.
- ❖ Bagaimana memulai pengalihan peran dari orang luar kepada masyarakat lokal atau kelompok

Secara umum, Modul Umum membahas mengenai aspek social yang menjadi dasar dari seluruh kegiatan program PSDABM dan perlu dipahami terlebih dulu ketika mengembangkan kegiatan PSDABM. Modul Umum ini lebih banyak berbicara tentang aspek peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat serta mengembangkan suatu media komunikasi lingkungan terkait PSDABM yang bisa menjadi alat pengembangan program PSDABM yang tengah berlangsung. Selain itu, Modul Umum ini memuat ringkasan materi dalam isu PSDABM. Dengan demikian, khalayak diharapkan mendapat pemahaman secara umum mengenai program PSDABM.

Penekanan pada Modul Teknis 1-6 adalah langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan ketika memulai dan melakukan program PSDABM. Dengan demikian, khalayak diharapkan mendapat pemahaman secara umum mengenai program PSDABM secara lebih menyeluruh dan rinci.

1.5.1. TOPIK DAN KELOMPOK STRATEGIS

Topik yang diangkat dalam Modul Teknis untuk Training of Trainer (ToT) meliputi:

1. Modul #1 ESMS (Environmental Social Management System) & LLA (Landscape and Lifescape Analysis)
2. Modul #2 PP (Pemetaan Partisipatif)
3. Modul #3 Inventory Plot untuk Sertifikasi Plan Vivo
4. Modul #4 SGIP (Social and Gender Integration Plan)
5. Modul #5 Teknik Pemibitan dan Penanaman Agroforestry

6. Modul #6 Metode Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Ekonomi Kreatif

Modul-modul tersebut sebagai bahan utama untuk meningkatkan kapasitas lembaga beberapa kelompok strategis. Kelompok-Kelompok strategis tersebut meliputi:

1. Lembaga/instansi para pendamping
2. Ketua dan anggota kelompok petani hutan HKM
3. Kepala Keluarga/Bapak
4. Kelompok ibu-ibu
5. Kelompok pemuda
6. Tokoh Masyarakat Adat dan Agama
7. Petugas instansi terkait
8. Aparat/tokoh Pemerintah Daerah Tingkat Lokal (Desa & Kecamatan)

1.5.2. SUMBERDAYA YANG DIBUTUHKAN

Kebutuhan mengenai Sumber Daya (baik material dan Sumber Daya manusia) dapat bervariasi atau berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya program, serta seberapa besarnya kontribusi masyarakat untuk program ini. Ketika awal program bisa saja tidak ada kontribusi masyarakat, namun dengan berkembangnya program dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat maka masyarakat akan memberikan kontribusi sebagai salah satu wujud partisipasinya.

Kebutuhan material pada dasarnya adalah kebutuhan yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya alat bantu untuk diskusi, pelatihan, lokakarya atau pun kegiatan lainnya. Kebutuhan lain yaitu pengadaan sarana pendukung kegiatan program, misalnya dalam program PSDABM ini adalah Rumah Pengering Kakao atau bibit untuk pembibitan. Kebutuhan berikutnya adalah dana untuk biaya pengembangan program oleh masyarakat. Ketika masyarakat mulai berpartisipasi dalam program PSDABM yang akan semakin terfokus kepada pengelolaan program oleh masyarakat sendiri, maka program perlu mengalokasikan sejumlah dana untuk membantu kelancaran terselenggaranya program oleh masyarakat.

Kebutuhan akan Sumber Daya manusia juga perlu disiapkan. Pelaksanaan kegiatan pengorganisasian masyarakat akan membutuhkan Kelompok pendamping desa yang akan mendampingi masyarakat mulai dari tahap awal ketika memasuki sebuah wilayah, melakukan pendekatan dan motivasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan masyarakat hingga menyiapkan masyarakat agar bisa mengembangkan dan mengorganisir dirinya sendiri. Selain itu, dibutuhkan pula pelatih-pelatih atau narasumber-narasumber topikal terkait isu program PSDABM. Ketika program telah berjalan, maka pelatih atau narasumber tersebut memberikan pelatihan atau menjadi narasumber misalnya untuk ESMS, LLA, pemetaan partisipatif, ekonomi kreatif, wanatani atau gender.

1.5.3. METODE YANG DITERAPKAN

Terdapat tiga metode dasar yang diterapkan dalam kegiatan proyek ini, yakni [1] Community Organizing / Pengorganisasian Masyarakat, [2] Pendokumentasian, Penulisan Laporan, Presentasi, dan [3] Jurnalisme Warga

❖ **Community Organizing / Pengorganisasian Masyarakat**

Pengorganisasian Masyarakat dimaknai sebagai kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil, ketika masyarakat menyaksikan dan mengalami ketidakadilan, penindasan, ketidaksetaraan,

ketidakmerataan atau kesenjangan di lingkungan sekitarnya. Ada elemen-elemen mendasar dalam pengorganisasian masyarakat, beserta alur umum dan siklus langkah-langkahnya agar pengorganisasian masyarakat menjadi tepat guna dan bisa memfasilitasi masyarakat agar menjadi pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi dan teraktualisasi.

❖ **Pendokumentasian, Penulisan Laporan, Presentasi**

Dokumentasi dalam bentuk laporan atau presentasi bisa berfungsi sebagai media komunikasi dan pembelajaran para peserta kegiatan, fasilitator atau para pemangku kepentingan dalam kerangka multipihak agar memiliki pemahaman yang sama mengenai sebuah persoalan. Isi dokumentasi ini menjadi sumber informasi, referensi dan acuan bersama untuk melakukan pengkajian, diskusi, perencanaan dan mengembangkan proses dan tindakan kegiatan selanjutnya. Di dalam dokumentasi dimuat tentang tahap dan proses kegiatan, juga tentang hasil dan kesepakatan dari sebuah kegiatan.

❖ **Jurnalisme Warga**

Jurnalisme warga adalah pemberitaan atau laporan yang dibuat oleh jurnalis warga yang adalah warga masyarakat sendiri. Laporan kejadian dalam konteks ini dibuat oleh petani, nelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa atau siapa saja. Tujuannya adalah melaporkan atau memberitakan apa yang dianggap penting untuk diketahui orang lain, baik di dalam kelompok atau komunitas tersebut atau pun orang lain di luar komunitas. Hasil laporan atau berita ini disampaikan melalui media komunitas berupa poster atau bulletin, papan pengumuman, selebaran. Bisa juga melalui media elektronik berupa blog, facebook, twitter, radio komunitas, youtube, namun bisa juga kemudian dikutip oleh media massa yaitu televisi, radio, atau Koran.

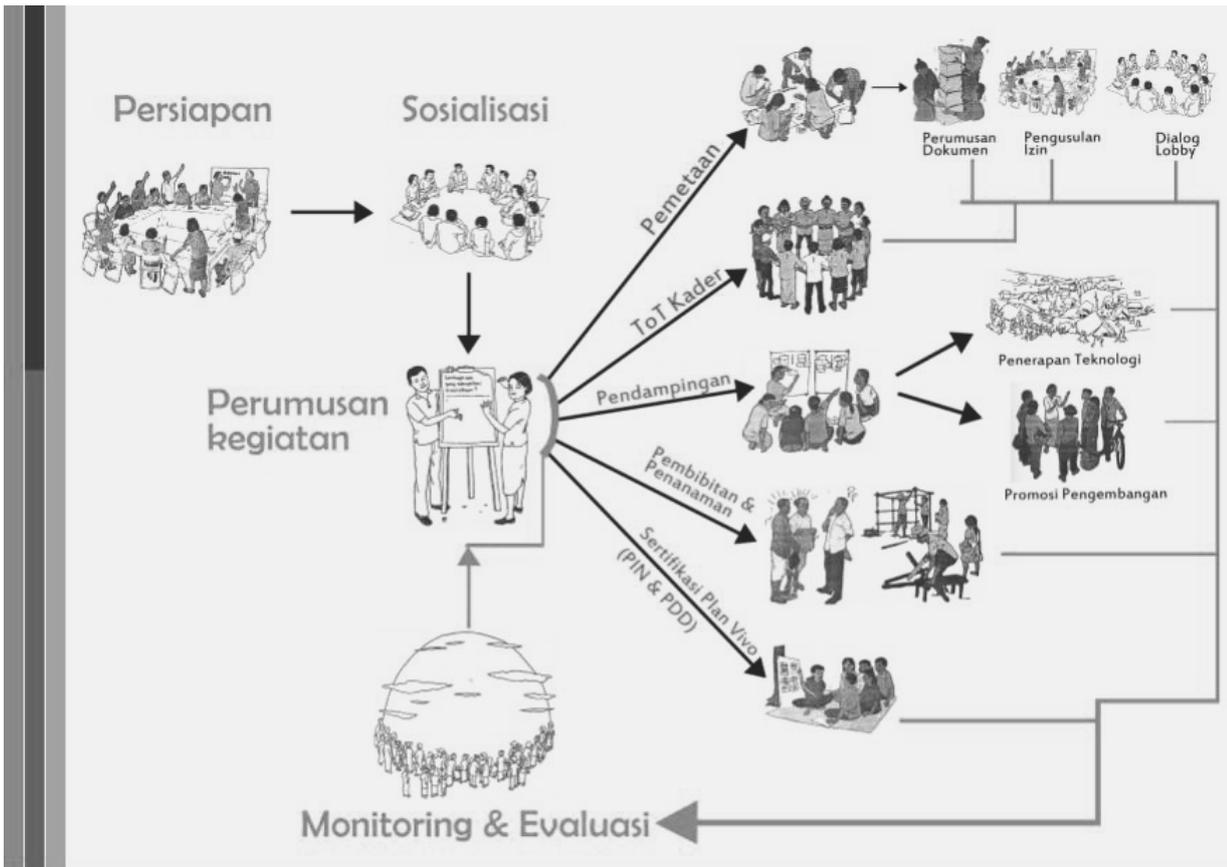
1.5.4. PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Proses pemberdayaan masyarakat meliputi tahapan persiapan, sosialisasi, perumusan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan monitoring dan evaluasi. Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan konteks pendekatan partisipatif masyarakat dan gender.

Terdapat 5 kegiatan utama dalam **Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka** yang merupakan salah satu bagian dari **Program Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat (PPSDABM)**. Kegiatan tersebut meliputi:

- ❖ Pemetaan partisipatif
- ❖ ToT Kader
- ❖ Pendampingan kelompok
- ❖ Pembibitan dan Penanaman
- ❖ Sertifikasi Plan Vivo

Melalui proses pemetaan partisipatif dan ToT Kader diharapkan masyarakat mempunyai kapasitas dalam [1] Menyusun Dokumen Perencanaan, [2] Penyusunan Ijin (IUPH) dan [3] Melaksanakan Dialog Kebijakan dan Advokasi (Lobby). Di sisi lain, proses pendampingan masyarakat diharapkan mampu mendorong penerapan teknologi tepat guna serta promosi pengembangan jaringan pasar. Selanjutnya diharapkan masyarakat mempunyai akses kelola dan pemantauan hasil hutan dan peningkatan kapasitas tatakelola hutan oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari. Pada akhirnya, proyek ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan ekosistem hutan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.



Gambar 1.1: Kegiatan Pelatihan dalam Siklus Manajemen Proyek

●BAB 2

RANCANGAN PELATIHAN

2.1. KONSEP DASAR PELATIHAN

Tiga hal utama dalam menyusun desain dan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang perlu diperhatikan, yakni [1] tujuan pemberian program pelatihan, [2] mekanisme, proses dan prosedur serta [3] program pelatihan yang komprehensif.

2.1.1. TUJUAN PELATIHAN

Tujuan dari pemberian program pelatihan adalah untuk menyajikan program pelatihan yang komprehensif dalam upaya peningkatan kapasitas seluas-luas yang kurang formal (*less formal capacity building program*) dan program pengalihan pengetahuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan perilaku kelompok sasaran / peserta yang berasal dari organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Pelatihan itu sendiri merupakan bagian dari metode pengembangan kapasitas dan transfer pengetahuan; sedangkan peningkatan kapasitas itu sendiri juga merupakan bagian dari transfer pengetahuan.

2.1.2. MEKANISME, PROSES DAN PROSEDUR

Kegiatan pelatihan mencakup [1] proses perencanaan dan pelaksanaan, termasuk need assesment; dan [2] desain dan perencanaan pelatihan, termasuk menentukan kelompok sasaran, materi pelajaran, tujuan, pendekatan dan metode, pelatih / fasilitator, tempat, pengembangan kurikulum, jadwal program, dan monitoring dan evaluasi dan pelaporan.

2.1.3. PROGRAM PELATIHAN KOMPREHENSIF

Program pelatihan yang komprehensif akan terdiri dari [1] Training Need Assessment,, [2] Desain dan Perencanaan Pelatihan, [3] Persiapan dan Pelaksanaan Pelatihan, [4] Monitoring dan Evaluasi Pelatihan, dan [5] Program Pasca Pelatihan.

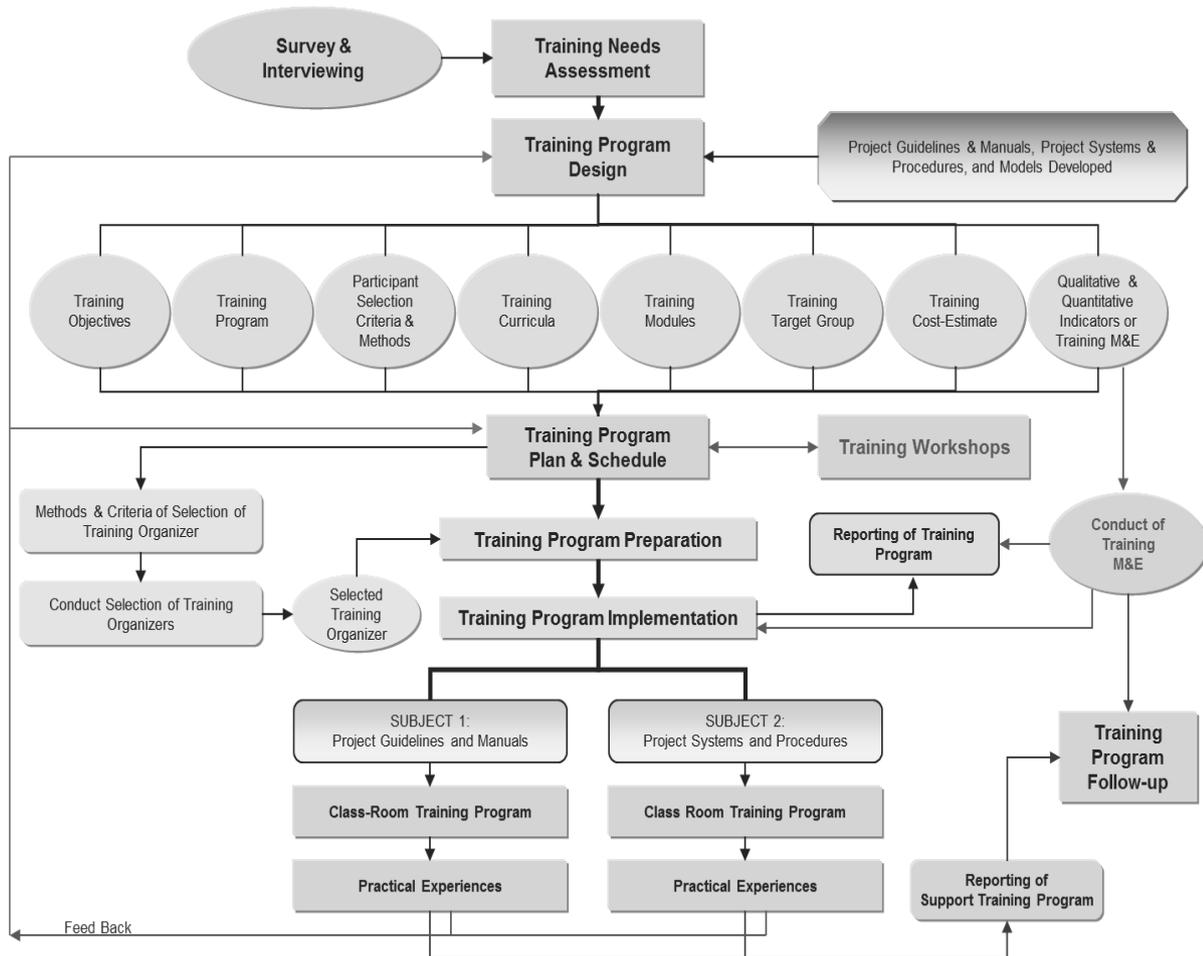
TRAINING NEED IDENTIFICATION (TNI) DAN TRAINING NEED ASSESMENT (TNA)

Kegiatan pertama adalah untuk melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan (*Training Need Identification, TNI*) dan penilaian kebutuhan pelatihan (*Training Need Assessment, TNA*). TNI disusun berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui: (i) wawancara dengan dan / atau survei untuk kelompok sasaran; (ii) masalah, kendala dan rekomendasi dari laporan Quartalan, Laporan tahunan dan Laporan Supervisi; dan (iii) menentukan target pelatihan. Mengacu pada TNI ini, Penyelenggara Pelatihan (*Training Provider*) atau Konsultan akan melaksanakan TNA untuk mengetahui kebutuhan pelatihan masing-masing kelompok sasaran.

DESAIN DAN PERENCANAAN PELATIHAN

Penyelenggara Pelatihan (*Training Provider*) atau Konsultan akan melaksanakan perencanaan pelatihan dan desain berdasarkan hasil TNA. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi: (i) memilih

dan menentukan peserta dari masing-masing kelompok sasaran, (ii) memilih dan menentukan materi yang paling relevan yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok sasaran, (iii) menentukan tujuan utama dari setiap materi pelajaran, (iv) memilih dan menggunakan pendekatan pelatihan yang paling efektif dan efisien dan metodologi, (v) memilih dan menentukan kualifikasi pelatih / fasilitator, (vi) memilih dan menentukan tempat pelatihan yang paling tepat, (vii) mengembangkan kurikulum yang efektif dari masing-masing materi pelajaran, (viii) mempersiapkan pelatihan jadwal pelaksanaan, (ix) menyiapkan sistem dan prosedur kegiatan monitoring dan evaluasi, (x) memilih dan menentukan organizer / penyedia kegiatan pelatihan, dan (xi) memasukkan program pelatihan.



Gambar 2.1: Diagram Alur Penyelenggaraan Pelatihan

PESERTA DAN MATERI PELATIHAN

Para peserta dari masing-masing program pelatihan harus antara 20-25 orang dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar serta materi yang dipilih harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran.

TUJUAN KHUSUS PELATIHAN

Para konsultan akan menentukan tujuan khusus dari setiap pelatihan materi dan masing-masing kelompok sasaran. Tujuan khusus akan disusun berdasarkan pengetahuan yang ada dan keterampilan peserta sebelum mengikuti pelatihan.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PELATIHAN

Pendekatan pelatihan dan metodologi harus lebih menggunakan pendekatan partisipatif dan pengalaman praktis, termasuk mentoring dan / atau pelatihan kerja.

BAHAN PELATIHAN

Materi pelatihan yang harus disiapkan HAND-out, modul, lembar transparan, bahan simulasi, praktis bahan pengalaman, dll

PELATIH/FASILITATOR

Pelatih / Fasilitator harus memiliki pengalaman yang berhubungan dengan mata pelajaran dan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang terkait dengan materi pelatihan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan tidak akan efektif jika pelatih / fasilitator tidak memiliki pengalaman terhadap materi yang akan dilatihkan..

PENYEDIA JASA PELATIHAN

Pengalaman-pengalaman sebelumnya juga menunjukkan bahwa pelatihan dapat hanya diatur dan dikelola secara efektif dan efisien jika pelatihan dilakukan dengan penyedia pelatihan yang memiliki pengalaman yang berhubungan dengan materi dan proyek terkait. Banyak program pelatihan sebelumnya tidak dilakukan oleh organisasi yang berpengalaman, sehingga program pelatihan tidak bisa efektif untuk mencapai tujuan pelatihan. Proses pemilihan, penetapan dan pengadaan penyedia pelatihan harus mempertimbangkan anggaran dari setiap jenis pelatihan. Tidak semua program pelatihan harus dilakukan melalui jasa konsultasi.

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN JADWAL PELATIHAN

Karena tanggung jawab melakukan program pelatihan menjadi MCAI, oleh karena itu, jadwal pelatihan harus ditentukan setelah berkonsultasi dengan MCAI. Selain itu, karena keterbatasan kualifikasi pelatih / fasilitator, jadwal pelatihan harus mempertimbangkan ketersediaan pelatih yang berkualitas. Tujuan dari pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar selama pelatihan dilaksanakan melalui pengelolaan jam belajar dan metode yang digunakan masing-masing sub-materi pokok / topik.

TEMPAT PELATIHAN

Pertimbangan utama memilih dan menentukan tempat pelatihan adalah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus diadakan di tempat tertutup untuk kegiatan proyek.

MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN

Tujuan dari monitoring dan evaluasi pelatihan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan baik selama persiapan dan pelaksanaan. Monitoring dan evaluasi akan dilakukan untuk para peserta, pelatih / fasilitator, manajemen pelatihan dan organisasi, output pelatihan, fasilitas pelatihan, dan subjek pelatihan materi / isi. Instrumen monitoring dan evaluasi pelatihan disusun pada tahap perencanaan pelatihan.

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PELATIHAN

Penyelenggara pelatihan harus mempersiapkan fasilitas, bahan, pelatih / fasilitator, bantu, dan akomodasi yang diperlukan untuk setiap program pelatihan. pelaksanaan pelatihan harus mempertimbangkan rencana pelatihan dan desain seperti yang disebutkan di atas.

PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN

Dengan menggunakan instrument monitoring dan evaluasi pelatihan yang dikembangkan, penyelenggara pelatihan harus bertanggung jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan. Hasil monitoring dan evaluasi pelatihan akan digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki rencana pelatihan dan desain ini rencana pelatihan dan pelatihan dan desain program pelatihan lainnya.

PROGRAM PASCA PELATIHAN

Tujuan dari program pasca pelatihan adalah untuk meningkatkan efektivitas output, outcome dan manfaat dari program pelatihan melalui penyediaan kegiatan menjembatani kepada para peserta kembali di tempat kerja seperti penyediaan fungsi yang jelas dan peran peserta kembali, ketentuan posisi yang jelas dari para peserta kembali, pemberian *reward* yang jelas dan hukuman dari para peserta kembali, penyediaan sistem dan prosedur di tempat kerja yang jelas, dan penyediaan lingkungan yang kondusif di tempat kerja.

EVALUASI DAN KINERJA PELATIHAN

Kinerja diukur akan bersandar mereka dirasakan. Evaluasi akan mencakup indikator seperti: [1] peningkatan keterampilan yang memungkinkan fasilitator untuk kegiatan ditugaskan dilakukan lebih efektif dan [2] perbaikan kompetensi dan sentimen yang membantu tim tampil lebih baik sebagai sebuah kelompok. Secara umum, indikator kunci untuk evaluasi kinerja adalah: [1] kompetensi teknis, [2] manajemen dan kepemimpinan, [3] hubungan sosial dan motivasi, [4] komitmen, dan [5] keterampilan komunikasi.

2.1.4. KEBERHASILAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM PELATIHAN

Kebhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan proyek tergantung pada pengetahuan, keterampilan, kesadaran, komitmen dan partisipasi masyarakat dalam manajemen proyek, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, transfer pengetahuan dan keterampilan yang efektif dan efisien dari konsultan ke petugas proyek dan staf di berbagai tingkat manajemen proyek akan sangat penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan proyek.

2.1.5. KETERLIBATAN COUNTERPAT

Sejak TNI masuk dalam program pelatihan, stakeholder yang relevan yang akan terlibat secara intensif dalam program pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Mereka tidak hanya akan terlibat sebagai peserta, tetapi juga sebagai desainer pelatihan, pelatih dan / atau fasilitator.

2.2. TAHAPAN PELATIHAN PSDABM

Dalam Pelatihan Fasilitator Desa (*Training of Trainers*) perlu dirumuskan Tim Fasilitator Desa PSDABM yang cekatan dan memahami terhadap pekerjaan pengorganisasian di tingkat desa, khususnya dalam hal memfasilitasi aktivitas program, baik program desa maupun pelatihan yang bisa dibagi bersama dengan masyarakat di desa.

Pelatihan dibagi kedalam 3 tahap, yaitu :

1. **Tahap Persiapan Pelatihan** yaitu tahapan untuk menyiapkan hal-hal teknis, seperti kurikulum, materi, waktu pelaksanaan serta calon peserta yang telah dipilih dan ditentukan oleh lembaga mitra/anggota; serta memberikan pemahaman tentang materi yang akan disampaikan dengan cara memberi bahan bacaan
2. **Tahap Pelaksanaan Pelatihan** yaitu tahap membuat kontrak belajar bagi fasilitator desa, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan TOT untuk menilai jalannya TOT; seperti keadaan peserta, penyampaian materi, dan yang lainnya. Selain itu, hal yang harus juga dilakukan adalah membuat notulensi dari materi yang disampaikan beserta dengan proses tanya-jawab ataupun diskusi yang terjadi.
3. **Tahap Pasca Pelaksanaan Pelatihan** yaitu tahap panitia dan tim trainer, tim ahli atau narasumber untuk membuat suatu penilaian bersama mengenai kemampuan fasilitator desa ketika mengembangkan materi yang diperolehnya pada saat pelaksanaan TOT. Kemudian memberikan kritik terhadap diri sendiri terhadap pelaksanaan dan pengembangannya oleh fasilitator desa sendiri sesuai dengan kondisi nyata pelaksanaan di lapangan.

2.3. KONTEKS PELATIHAN PSDABM

Pelatihan ini dirancang sebagai upaya mewujudkan pendekatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM), yaitu Bentang Alam Investasi, Bentang Alam Pembangunan, Partisipatif, serta Multipihak. Persyaratan untuk itu adalah tersedianya Sumber Daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan segi pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilannya. Salah satu cara pengembangan Sumber Daya manusia untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan adalah melalui pelatihan ini.

Dalam program ini KPSHK bekerjasama dengan mitra lokal di 3 wilayah Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka (KONSEPSI, YAPPI-Sultra dan LaPAK Sultra) melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Lot.2 MCA-Indonesia selama Enam Quartal (18 bulan : Juli 2016 s/d Desember 2017), yang berjudul "Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka".

2.4. TUJUAN PELATIHAN PSDABM

Secara umum tujuan Pelatihan bagi Fasilitator Desa adalah agar:

1. Peserta mampu memahami diri dan posisinya di tengah masyarakat sehingga semakin teguh dalam menempatkan diri sebagai tulang punggung dalam perubahan melalui suatu agenda dan memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan kelompok masyarakat
2. Peserta mampu melakukan pendokumentasian yang dapat berguna untuk menceritakan kondisi terkini dan perubahan yang ada di setiap wilayah desa. Sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu teknis penulisan laporan maupun pendokumentasian sebagai bahan berita.

3. Peserta meningkatkan pengetahuan serta kemampuan praktek/skill terhadap fasilitator desa mengenai metode, taktik dan strategi didalam membangun organisasi rakyat sebagai kekuatan pokok perubahan
4. Peserta meningkatkan kemampuan untuk penggalan data dan informasi lapangan yang berkaitan dengan kegiatan PSDABM.
5. Peserta meningkatkan pemahaman terhadap potensi-potensi yang dimiliki oleh rakyat desa melalui pemetaan dan penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dalam berjuang mencapai perbaikan kesejahteraan dan kualitas lingkungannya melalui wilayah kelola BAI dan BAP.
6. Peserta memahami cara untuk mengamati dan merespon perubahan yang terjadi disekitar masyarakat desa dalam melakukan penilaian, pengelolaan dan pemantauan kondisi lingkungan serta menganalisisnya
7. Peserta memahami peran perempuan dalam perubahan sosial – ekonomi – lingkungan di tengah masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif yang dimiliki dan dihasilkan

2.5. HASIL YANG DIHARAPKAN DARI PELATIHAN PSDABM

Hasil yang diharapkan dari kegiatan TOT Fasilitator Desa ini meliputi:

1. Peserta menempatkan diri ditengah masyarakat ketika melakukan pengorganisasian masyarakat dan kegiatan bersama masyarakat.
2. Peserta mampu melakukan pendokumentasian dari setiap proses kegiatan yang dilaksanakan serta menuliskan dalam sebuah laporan maupun cerita atau berita.
3. Peserta mampu memadukan antara teori dan praktek dalam melakukan kerja-kerja pengorganisasian masyarakat agar kegiatan PSDABM bisa berkelanjutan.
4. Peserta mampu melakukan penggalan data dan informasi lapangan yang berkaitan dengan kegiatan PSDABM.
5. Peserta memahami potensi-potensi dan ancaman yang ada disekitar masyarakat menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan wilayah kelola rakyat yang adil dan lestari melalui pemetaan wilayah – penyusunan RTRW Desa – peka terhadap perubahan kondisi lingkungan – serta peran perempuan dan golongan minoritas lainnya dalam mewujudkan pembangunan desa melalui pengembangan ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat.

2.6. STRATEGI PELATIHAN PSDABM

Strategi pelatihan dalam TOT untuk Fasilitator Desa untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) ini meliputi metode: [1] Kelas Ruangan, [2] Praktik Luar Ruangan, dan [3] Kelas Lapangan.

Kelas Ruangan.

Yang dimaksud dengan kelas ruangan adalah kegiatan TOT tersebut dilakukan dalam kelas dan dalam satu kesatuan waktu untuk menyampaikan seluruh materi.

Praktek Luar Ruangan.

Yang dimaksud dengan Praktek Luar Ruangan adalah kegiatan ToT mempraktekkan beberapa materi yang diperoleh di dalam kelas ruangan untuk diterapkan di luar ruangan dan disampaikan dalam ruangan untuk dipresentasikan bersama, sesuai kesepakatan.

Kelas Lapangan.

Yang dimaksud dengan Kelas Lapangan adalah mempraktekkan beberapa materi yang di sepakati yang didapat di dalam kelas ruangan diterapkan di lapangan sehingga peserta memiliki kemampuan untuk memadukan teori yang di sampaikan dalam ruangan dengan praktek yang dilakukan di lapangan. Untuk kelas lapangan akan dilakukan selama 18 bulan yang tiap bulan dilakukan pelaporan, Penyimpulan Kerja, Penilaian Kerja dan Kritik Oto Kritik.

2.7. KURIKULUM PELATIHAN

Konsorsium KPSHK bekerjasama dengan mitra lokal di 3 wilayah Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka sebagai anggota Konsorsium yaitu KONSEPSI, YAPPI-Sultra dan LaPAK Sultra akan melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) Lot.2 MCA-Indonesia selama 6 Quartal (18 bulan, terhitung Juli 2016 s/d Desember 2017), dengan tema “Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka”. Hasil yang diharapkan dari intervensi proyek ini adalah: (1) Peningkatan akses kelola dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat; dan (2) Peningkatan tata kelola hutan berbasis masyarakat sesuai prinsip hutan lestari rendah emisi.

Adapun output dari proyek ini adalah: (1) Kesepakatan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat dan para pihak di tujuan utama proyek; (2) Peta penggunaan lahan berkelanjutan dan dokumen perencanaan tata kelola hutan berbasis masyarakat; (3) Akses kelola hutan skema perhutanan sosial dan draft izin pemanfaatan hasil hutan kayu; (4) Peningkatan kapasitas manajemen dan jaringan kader kelompok pengelola hutan; (5) Ketersediaan produk dan potensi pasar komoditi unggulan dari hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu serta jasa lingkungan; (6) Rehabilitasi lahan dan DAS di wilayah kelola hutan masyarakat; (7) Penerapan pengelolaan hutan lestari (SFM) rendah emisi sesuai standard Planvivo.

Untuk mensukseskan pelaksanaan program PSDABM ini diperlukan Fasilitator Desa ataupun Community Organizer yang handal, sehingga segala aktivitas dapat terlaksana dalam pencapaian indikator output kegiatan. Hal ini menjadi penting, karena Fasilitator Desa / CO menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan, yang mampu memimpin dalam perubahan sosial di desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan pelatihan untuk Fasilitator Desa ditujukan agar fasilitator:

1. Mempunyai kemampuan pendokumentasian dalam membuat suatu laporan kerja di tengah masyarakat.
2. Memahami diri dan posisi diri dalam masyarakat.
3. Memahami proses pengorganisasian sebagai agenda perubahan di desa.
4. Meningkatkan kemampuan dalam penggalan data dan informasi lapangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berbasis masyarakat sesuai prinsip hutan lestari.
5. Memahami analisa sosial dan gender sebagai arah memahami perubahan dalam masyarakat.
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat hutan.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka dalam kurikulum pelatihan fasilitator desa terdapat 6 modul pelatihan, yang meliputi:

1. Pendokumentasikan Wilayah SHK

2. Pengorganisasian Kelompok serta Kemampuan Memfasilitasi Pertemuan
3. Pemetaan Partisipatif, Perencanaan Tata Ruang Desa dan Inventory Plot
4. Pengelolaan, Pemantauan dan penilaian Lingkungan dan Sosial melalui dengan Menggunakan Pendekatan LLA & ESMS
5. Pengembangan Agroforestry
6. Peran Perempuan dan Kelompok Minoritas dalam Pembangunan Desa
7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan melalui Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Kelompok

Tabel 2.1: Kurikulum Pelatihan untuk Fasilitator Desa Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) di Kawasan Lombok Timur, Lombok Utara & Kolaka

No.	Materi	Tujuan Materi	Outline materi	Summary	Waktu	PIC
I	Pendokumentasian wilayah SHK 1. Peserta memahami cara melakukan pendokumentasian dalam suatu moment 2. Peserta mampu mencertiakan setiap pendokumentasian yang dikakukan 3. Peserta mampu menggali data dan informasi 4. Peserta mampu membuat penulisan laporan kegiatan		1. Pendokumentasian SHK 2. Teknik penulisan laporan kegiatan 3. Metode penggalan data dan informasi berkaitan dengan kegiatan MCAI 4. Teknik penyampaian dan Penulisan berita	Memberikan pengetahuan mengenai teknik2 dalam melakukan pendokumentasian di wilayah SHK dalam mendukung kegiatan promosi Penyampaian teknik dalam melakukan penulisan laporan kegiatan yang dapat menjadi referensi pelaporan program/proyek Memberikan pengetahuan penggalan data dan informasi dengan metode survey maupun observasi dan teknik pengisian tools data dan informasi tersebut. Penyampaian mengenai cara-cara menyampaikan suatu peristiwa dalam masyarakat dan kegiatan melalui teknik penulisan berita yang dapat disampaikan kepada pihak lain	45' 45' 45' 45'	Tim KM KPSHK Tim KM KPSHK Tim KM KPSHK Tim KM KPSHK
II	Pengorganisasian Kelompok serta Kemampuan Memfasilitasi Pertemuan	1. Peserta mampu memahami dirinya sebagai pelaku perubahan 2. Peserta mampu memahami dirinya sebagai pelaku sejarah 3. Peserta mampu memahami arah perubahan dalam masyarakat 4. Peserta mampu menempatkan rakyat sebagai kekuatan pokok perubahan	1. Orientasi Kegiatan (program yang akan dilaksanakan) 2. Perumusan kerja CO dan dampak terhadap komunitas dan SDAH (Analisa lingkungan dan Sosial) 3. Desiminasi Pengetahuan peserta mengenai CO	Peserta memahami Program dan kaitannya dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh KPSHK Peserta Membuat Standar indikator keberhasilan CO terhadap komunitas dan SDAH 1. Pemetaan pengalaman CO peserta 2. Pemetaan pengetahuan dan Keterampilan CO peserta 3. Deskripsi hasil CO yang dilaksanakan selama ini oleh peserta dengan standar indikator	30' 60' 120'	Ita Natalia Ita Natalia Ita Natalia

No.	Materi	Tujuan Materi	Outline materi	Summary	Waktu	PIC
			<p>4. Perumusan pelaksanaan CO di kaitkan dengan program yang akan dilaksnaakan</p> <p>5. Perumusan Issue Penting dalam Pengorganisasian dan Strategi pencapaian</p> <p>6. Korelasi Issue dengan Perspektif terkait (gender, agraria, adat)</p> <p>7. Kesepakatan Nilai dan Prinsip dalam pelaksanaan CO</p> <p>8. Strategi bersama dalam pelaksanaan program (khusus CO)</p>	<p>Peserta memahami Program yang akan di laksanakan dan memahami alat kerja CO (model, metode, keterampilan, pengetahuan,) untuk memperlancar kerja lapangan dan pencapaian tujuan program</p> <p>Peserta memahami Issue penting di lingkungannya dan mampu membangun strategi pengorganisasian untuk pencapaian strategi</p> <p>Peserta mempunyai pemahaman akan issue terkait dalam pelaksanaan CO</p> <p>Peserta memahami nilai dan prinsip dalam pelaksanaan CO berkaitan dengan program yang dilaksanakan</p> <p>Agenda bersama dalam pelaksanaan program berkaitan dengan CO</p>	<p>90'</p> <p>60'</p> <p>60'</p> <p>30'</p> <p>30'</p>	<p>Ita Natalia</p> <p>Ita Natalia</p> <p>Ita Natalia</p> <p>Ita Natalia</p> <p>Ita Natalia</p>
III	Pemetaan Partisipatif, Perencanaan Tata Ruang Desa dan Inventory Plot	Memberikan pemahaman kepada fasilitator pentingnya suatu peta partisipatif dalam melakukan perubahan di masyarakat melalui perencanaan desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa	<p>1. Pentingnya Pemetaan partisipatif dalam Mengenal karakteristik wilayah kelola SHK</p> <p>2. Ruang lingkup yang perlu diperhatikan : a) pola ruang & struktur</p>	<p>Karakteristik wilayah dampingan (Fisik dan non fisik) dalam memberikan gambaran potensi wilayah dampingan</p> <p>Lahirnya konsep pemetaan dan perencanaan di dalam masyarakat mempunyai tujuan dalam nilai – nilai antara manusia dengan alamnya, sehingga mempunyai suatu nilai/potensi ilmiah, sosial – budaya, ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kondisi lingkungan.</p> <p>Pengakuan atas wilayah kelola rakyat di wilayah SHK merupakan bagian dari menuju tata kelola hutan</p>	<p>60'</p> <p>60'</p>	<p>Ari / Bayu</p> <p>Ari / Bayu</p>

No.	Materi	Tujuan Materi	Outline materi	Summary	Waktu	PIC
			<p>ruang kawasan</p> <p>b) strategi kebijakan dan langkah pengelolaan kawasan</p> <p>c) kelembagaan pengelolaan kawasan</p> <p>d) Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat</p> <p>3. Teknik Inventory Plot dalam keperluan pelaksanaan skema Plan Vivo & Perhutanan sosial</p>	<p>dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menuju pembangunan di wilayah pedesaan sesuai dengan karakteristik wilayahnya dalam mencapai kesejahteraan dan perbaikan kondisi lingkungan.</p> <p>Pengembangan skema plan vivo dan perhutanan sosial dalam perluasan wilayah kelola rakyat</p>	60'	Ari / Bayu, Bimbim, Sahsa
IV	Penilaian, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Melalui Penggalan Data LLA & ESMS	<p>Memberikan pemahaman kepada fasilitator pentingnya suatu kondisi lingkungan yang lebih baik sebagai prinsip dasar warga Negara</p> <p>Memberikan keterampilan penggalan data LLA & ESMS</p>	<p>1. Pengertian tentang kebijakan lingkungan</p> <p>2. Penjelasan ESMS</p> <p>3. Penjelasan LLA</p> <p>4. Metode penggalan penggalan data - informasi untuk analisis LLA dan ESMS</p>	<p>Pemahaman kebijakan lingkungan dalam pengelolaan SDA</p> <p>Dampak perubahan lingkungan dari aktivitas yang merusak</p> <p>Bagaimana peserta dapat memahami kondisi Bentang Alam Pembangunan di wilayahnya serta bentang alam investasi yang akan dilakukan</p> <p>Teknik pengumpulan data terkait LLA dan ESMS</p>	45'	Boim / Dona
V	Pengembangan Agroforestry	<p>Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tahapan dan metode pembibitan jenis tanaman hutan yang akan dilakukan dalam pengembangan PSDABM MCAI - KPSHK</p>	<p>Proses dan Metode melakukan Pembibitan</p> <p>Metode Penanaman</p> <p>Aspek Budidaya & MRV</p>	<p>Tahapan dalam melakukan penanaman dengan memulai melalui pembibitan dan pembenihan</p> <p>Metode melakukan monitoring tanaman</p>	60'	Zaky
VI	Peran Perempuan dan Kelompok Minoritas dalam Pembangunan Desa;	<p>Memberikan pemahaman kepada fasilitator pentingnya peran perempuan/kaum minoritas dalam pembangunan ekonomi kerakyatan</p>	<p>Panduan Gender Dalam pengembangan program</p>	<p>Perspektif gender dalam pelaksanaan dan pengembangan program kegiatan</p>	120'	Inda

No.	Materi	Tujuan Materi	Outline materi	Summary	Waktu	PIC
VII	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan melalui Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta memahami proses dan arah pemberdayaan ekonomi masyarakat hutan 2. Peserta memahami ekonomi sumberdaya hutan 3. Peserta memahami Teknis Identifikasi Produk Unggulan 4. Peserta memahami Teknis Identifikasi Kelayakan Usaha 5. Peserta memahami Teknis penyusunan perencanaan usaha 6. Peserta memahami proses mengembangkan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan 2. Ekonomi Sumberdaya Hutan 3. Identifikasi Produk Unggulan 4. Proses Identifikasi Kelayakan Usaha 5. Proses Penyusunan Perencanaan Usaha 6. Pengembangan Usaha melalui Penerapan teknologi dan perluasan pasar 	Memberikan pengetahuan kepada fasilitator tentang pemberdayaan ekonomimasayarakat hutan, proses identifikasi produk unggulan, menyusun kelayakan dan perencanaan usaha serta mengidentifikasi potensi pengembangan usaha melalui pengembangan teknologi pasca panen dan pengembangan pasar	210'	Nesti / Herman

○BAB 3

MODUL PENDOKUMENTASIAN

3.1. DESKRIPSI SINGKAT

Fakta dan data lapang akan dapat bermanfaat kepada pihak lain jika dapat digali, didokumentasikan, dan ditulis dengan baik, sehingga proses *knowledge sharing* dapat dengan mudah dilakukan. Oleh karena itu, kemampuan untuk menggali informasi dan data, proses dokumentasi, membuat suatu tulisan laporan dan proses sosialisasi menjadi prasyarat utama dalam menjalankan suatu proyek data program. Fakta-fakta tersebut dapat berupa *good practices*, maupun *bad practices* yang keduanya sangat penting dalam manajemen proyek. Praktik-praktik yang baik dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk ditiru dan dimplementasikan, sedangkan praktik-praktik yang uruk dapat menjadi pelajaran tentang kegagalan agar tidak terulang kembali.

3.2. TUJUAN PEMBELAJARAN

3.2.1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Tujuan Pembelajaran Umum untuk kegiatan pelatihan Pendokumentasian, Pelaporan dan Presentasi serta Jurnalisme Warga agar:

1. Peserta memahami pentingnya dokumentasi, pelaporan dan presentasi.
2. Peserta meningkatkan keterampilannya dalam melakukan pendokumentasian, diantaranya yaitu menulis laporan, merekam proses, membuat foto yang baik, dan mempresentasikan proses dan temuannya
3. Peserta memahami pentingnya jurnalisme warga dalam konteks program PSDABM.
4. Peserta meningkatkan keterampilannya dalam melakukan jurnalisme warga, baik melalui media masa, media lokal maupun *social media* (media social).

3.2.2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) ini, peserta mampu:

1. Menuliskan dan memperbaiki catatan lapangan
2. Memperbaiki pengambilan foto / film dokumentasi
3. Menyusun laporan
4. Mempresentasikan proses dan temuan secara efektif
5. Peserta berlatih membuat artikel atau feature untuk jurnalisme warga

3.3. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Pokok Bahasan dalam pelatihan Pendokumentasian, Pelaporan dan Presentasi, yakni:

1. Teknik Penulisan dan Perbaikan Catatan Lapangan
2. Pengambilan Foto / Film Dokumentasi
3. Penyusunan Laporan

4. Presentasi Proses dan Temuan secara Efektif
5. Menulis artikel dan feature untuk jurnalisme warga
6. Membuat atau memproduksi hasil penulisan artikel atau feature tersebut agar siap dimuat

3.4. PERSYARATAN PESERTA

3.4.1. PERSYARATAN PENDIDIKAN PESERTA

Peserta mempunyai pendidikan minimal Diploma dan telah lulus minimal 3 tahun.

3.4.2. PERSYARATAN PENGALAMAN PESERTA

Peserta bersungguh-sungguh untuk belajar dalam kegiatan pelatihan terkait: [1] Pendokumentasian, [2] Pelaporan, [3] Presentasi serta [4] Jurnalisme Warga

3.5. BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, flip chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi Lembar Latihan dan Lembar Rencana Dokumentasi.

Di samping itu, alat dan bahan ajar yang diperlukan:

1. Kertas flipchart atau kertas plano
2. Kertas HVS
3. Komputer dan printer
4. Tinta printer
5. Spidol dan ballpoint
6. Kamera foto / Handphone camera
7. Buku Catatan

3.6. METODE PEMBELAJARAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui [1] Diskusi umum, [2] Curah pendapat, dan [3] Penugasan individual

3.7. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 4 jam pelajaran per hari (T=4jp, P=0jp, PL=0jp) @45menit, selama 1 hari jangka waktu Training of Trainer (ToT). Untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta maka, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

❖ Langkah 1: Pengkondisian (15 Menit)

1. Penyebaran dan pencairan suasana (*ice-breaking*),
2. Pemandu/pengajar menggali harapan peserta tentang materi dan keterampilan yang ingin dicapai melalui sesi ToT ini,

3. Pemandu/pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan metode yang akan digunakan,
4. Menggali pendapat peserta tentang “Pendokumentasian, Pelaporan dan Presentasi”. Proses pembelajaran menggunakan metode dimana semua peserta terlibat secara aktif,
5. Berdasarkan pendapat peserta, pemandu/pengajar menjelaskan tentang “Pendokumentasian, Pelaporan dan Presentasi”.

❖ **Langkah 2: Pengkajian Pokok Bahasan (180 Menit)**

1. Pemandu/pengajar menyampaikan pokok bahasan:
 - ❖ Teknik Penulisan dan Perbaikan Catatan Lapangan
 - ❖ Pengambilan Foto / Film Dokumentasi
 - ❖ Penyusunan Laporan
 - ❖ Presentasi Proses dan Temuan secara Efektif
2. Pemandu/pengajar member kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta.
3. Pemandu/pengajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga antar peserta juga terjadi diskusi dan interaksi yang baik.
4. Pemandu/pengajar menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok tentang:
 - ❖ Teknik Penulisan dan Perbaikan Catatan Lapangan
 - ❖ Pengambilan Foto / Film Dokumentasi
 - ❖ Penyusunan Laporan
 - ❖ Presentasi Proses dan Temuan secara Efektif

❖ **Langkah 3: Rangkuman (15 Menit)**

1. Pemandu/pengajar merangkum sesi pembelajaran.
2. Peserta dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan pengajar memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari pengajar maupun dari peserta lain.
3. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan.
4. Pemandu/pengajar menutup sesi pembelajaran dengan memastikan bahwa TPU dan TPK sesi telah tercapai.

3.8. URAIAN MATERI

3.8.1. PENDOKUMENTASIAN

PENGANTAR

Terdapat 5 hal yang harus dilakukan fasilitator, yakni:

1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengingat kegiatan lapangan yang terakhir mereka lakukan di lapangan lembaganya masing-masing. Kegiatan apa saja yang dikerjakan di lapangan yang sudah dilaksanakan? Data-data atau informasi apa saja yang dicatat dalam kegiatan lapangan itu? Untuk ini fasilitator membagikan Formulir Catatan Kegiatan Lapangan untuk diisi oleh peserta. Peserta diharapkan dapat mengisi formulir dengan informasi yang spesifik dan konkrit seperti yang terdapat dalam contoh.

Pertanyaan kunci untuk pembahasan:

- Adakah hal-hal yang terlewatkan dan tidak sempat dicatat?
- Apakah Anda yakin catatan Anda benar? Bagaimana cara membuktikan catatan itu benar? Adakah hal-hal yang janggal?
- Apakah Anda yakin bahwa yang Anda catat bukan pandangan, pendapat (opini), atau kesimpulan Anda?
- Bagaimanakah Anda membedakan pencatatan pandangan dan pendapat para peserta kajian dengan pandangan dan pendapat Anda sendiri?

2. Fasilitator mengambil beberapa contoh formulir dan membahasnya satu persatu.
3. Berdasarkan hasil diskusi, fasilitator menjelaskan prinsip-prinsip dokumentasi dan penulisan temuan kegiatan lapangan.
4. Fasilitator meminta para peserta kembali ke kelompoknya masing-masing yang sesuai kelompok pada saat kegiatan lapangan. Fasilitator menugaskan setiap kelompok untuk menyusun rencana dokumentasi dan pencatatan temuan-temuan di lapangan, dengan menggunakan panduan LB-11.2. Formulir Rencana Dokumentasi Kegiatan Lapangan.
5. Setelah setiap kelompok menyelesaikan rencana dokumentasi mereka, rencana-rencana hasil diskusi kelompok itu dibahas bersama dalam pleno.

DOKUMENTASI

Apa itu dokumentasi?

Dokumen adalah segala barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting. Dokumentasi adalah proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis. Mendokumentasikan adalah mengatur dan menyimpan sebagai dokumen.

Melakukan dokumentasi biasanya dikatakan sebagai rangkaian kegiatan mencatat, mengamati, merekam proses, memotret / memfoto sebuah kegiatan atau peristiwa. Yang didokumentasikan adalah data, peristiwa, fakta atau informasi tertentu yang dianggap penting dalam kegiatan tersebut. Pendokumentasian sebaiknya dilakukan secara terus menerus, terencana, teliti dan akurat.

Mengapa perlu dokumentasi?

Hasil kegiatan pendokumentasian umumnya adalah dokumen laporan. Namun, saat ini dokumentasi bisa juga berupa foto-foto maupun film. Dokumentasi yang berupa visual atau audio visual biasanya lebih menarik dan mudah diingat. Meskipun demikian, dokumen berupa laporan juga penting karena bisa mengulas sebuah topic permasalahan dengan lebih rinci dan mendalam.

Pendokumentasian perlu dilakukan dalam suatu kegiatan, karena kemampuan manusia untuk mengingat sesuatu hal berupa informasi atau data, serta peristiwa sangat terbatas. Oleh karena itu, kita perlu dokumentasi yang telah disusun sistematis dan lengkap untuk membantu proses pengembangan kegiatan dan analisis.

Tujuan dan Manfaat Dokumentasi

Dokumentasi atau laporan bisa berfungsi sebagai media komunikasi dan pembelajar para peserta kegiatan, fasilitator atau para pemangku kepentingan agar memiliki pemahaman yang sama mengenai sebuah persoalan. Dokumentasi dan laporan ini menjadi sumber informasi dan acuan bersama untuk melakukan pengkajian dan mengembangkan proses dan tindakan kegiatan selanjutnya. Dokumentasi selain memuat mengenai tahapan dan proses kegiatan, juga memuat hasil dari suatu kegiatan atau kesepakatan yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, maka isi dari dokumentasi atau laporan menjadi referensi atau acuan dalam proses diskusi, perencanaan dan pengkajian kegiatan.

Siapa yang harus membuat dokumentasi?

Biasanya para peneliti yang membuat dokumentasi. Tapi dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya alam partisipatif ini, yang melakukan pendokumentasian adalah fasilitator desa dan peserta kegiatan atau warga masyarakat sendiri. Pada tahap awal pembuatan dokumentasi dilakukan oleh fasilitator desa. Fasilitator desa melibatkan warga masyarakat dalam kegiatan pendokumentasian. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan pendokumentasian bisa ditularkan kepada para peserta kegiatan. Pada akhirnya, peserta kegiatan yaitu warga masyarakat bisa melakukan sendiri pembuatan dokumentasi atau laporan.

Bagaimana membuat dokumentasi?

Jenis dokumentasi sangat banyak, yaitu berupa laporan, foto-foto, maupun rekaman video. Pembuatan dokumentasi pada mulanya adalah kegiatan mencatat secara detil tahap dan proses kegiatan di lapangan, kemudian menyusunnya dalam bentuk notulen. Setelah itu, disusun sebuah laporan lapangan yang didalamnya dimuat selain hasil atau ringkasan notulen, termasuk juga pembahasan, analisis dan kesepakatan dalam kegiatan. Setelah itu, bila dibutuhkan laporan lapangan ini disertai dengan foto-foto atau rekaman film / video dokumentasi.

MEMBUAT CATATAN LAPANGAN HARIAN

Setiap hari dan setiap diadakan kegiatan fasilitator harus membuat catatan tentang tahap dan proses kegiatan yang sudah diamati atau catatan hasil diskusi. Yang dituliskan dalam catatan harian ini adalah nama peserta kegiatan, tahap kegiatan, data, angka, pernyataan-pernyataan peserta dalam diskusi, hasil diskusi misalnya berupa gambar transek dan hasil transek, hasil diskusi dan kesepakatan di antara peserta kegiatan.

Bagi fasilitator partisipatif, notulensi dan laporan ini sangat penting untuk menentukan kegiatan dan pendekatan yang tepat pada tahap dan proses kegiatan sesudahnya. Pada pendokumentasian tahap awal ini catatan harus dibuat sesuai apa yang terjadi dan akurat, baik angka atau pendapat yang disampaikan orang lain. Sebaiknya, untuk menjaga ketinggalan pencatatan bisa digunakan alat rekam yang bisa didengarkan kembali ketika kita tidak yakin mengenai suatu data atau pernyataan. Dari catatan ini, maka akan dikembangkan laporan yang memuat analisis, argumen dan kesimpulan dalam kegiatan tersebut. Ketika terjadi kesalahan dalam pencatatan atau perekaman, maka analisis dan argumentasi pun menjadi bias.

FOTOGRAFI ATAU REKAMAN FILM

Foto adalah alat dokumentasi yang sangat penting. Sebuah foto bisa menceritakan situasi atau keadaan suatu kegiatan atau peristiwa, tanpa terlalu banyak penjelasan berupa kata dan kalimat. Foto bisa dimanfaatkan dengan baik untuk merekam gambaran proses dan data visual yang terjadi di lapangan.

Sebuah kondisi lingkungan hutan yang rusak bisa ditangkap oleh sebuah foto. Misalnya tanah yang kering, hutan yang mengalami pembalakan liar, DAS yang rusak, masyarakat yang miskin dan lain-lain.

Selain memotret gambaran situasi atau emosi dalam kegiatan, foto juga bisa dimanfaatkan untuk merekam hasil proses diskusi dan ditampilkan dalam laporan dokumentasi. Misalnya foto hasil transek, diagram hasil diskusi, peta hasil pemetaan partisipatif, sekaligus dengan proses pembuatannya. Dengan demikian, maka dokumentasi lebih mendekati hasil yang nyata sebuah kegiatan atau peristiwa.

Saat ini kamera bukan lagi sebuah barang mewah. Sebuah *smartphone* sederhana bisa menghasilkan foto yang memadai untuk sebuah laporan dokumentasi. Foto-foto yang dihasilkan bisa membantu kita untuk mengingat kembali suasana pada suatu peristiwa, suatu tahap atau proses kegiatan, untuk melengkapi laporan, menjadi ilustrasi atau bahkan menjelaskan sebuah data / informasi yang lebih mudah dijelaskan dengan gambar seperti hasil pemetaan partisipatif. Pada era teknologi komunikasi saat ini, rekaman video juga bisa dilakukan dengan mudah, singkat dan sederhana dengan menggunakan *smartphone*. Untuk kebutuhan di lingkup program, media rekaman video ini sudah cukup memadai. Peserta program yang terdiri dari masyarakat pun bisa memanfaatkannya dan menyebarkan di media lokal. Sementara, apabila ingin menghasilkan sebuah dokumentasi untuk ditayangkan secara massal untuk promosi, documenter atau untuk kepentingan advokasi, perlu dibuat film yang lebih profesional dengan menggunakan kamera dan peralatan yang lebih canggih khusus untuk pembuatan film.

MEMPRODUKSI MEDIA VISUAL DAN AUDIO VISUAL

Untuk menghasilkan kualitas media visual atau foto dan audio visual atau film yang baik dan bisa dipahami maka kita perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Sumber cahaya

Dalam pengambilan foto dan pembuatan media audio visual atau film, kita perlu memperhatikan sumber cahaya di lokasi pengambilan foto atau film. Posisi pengambilan foto atau film yang tidak tepat bisa mengakibatkan foto menjadi gelap, terlalu banyak cahaya bahkan buram atau tidak jelas karena terlalu jauh atau terlalu dekat. Perhatikan sumber cahaya pada obyek, apakah datang melalui cahaya alami atau matahari atau cahaya buatan atau lampu. Selain itu, arah cahaya terhadap obyek juga penting. Arah cahaya biasanya datang dari depan, dari samping atau dari atas. Sisi mana arah cahaya yang paling banyak intensitasnya akan memberi pengaruh yang kuat pada hasil foto.

Jenis cahaya

Hard light

- Hard light atau cahaya keras adalah jenis cahaya yang cenderung memiliki intensitas tinggi. Hard light biasanya diperoleh dari sumber cahaya yang terpusat langsung menerpa objek seperti matahari, blitz (lampu kilat), dan senter.
- Hard light akan menimbulkan bayangan yang tegas dan berpotensi menimbulkan pantulan pada objek dan akan membuat tekstur objek tampak lebih kuat.
- Pada pemanfaatan cahaya natural (alami), kondisi hard light biasanya terjadi saat matahari cerah antara pukul 10.00-15.00.

Soft Light

- Soft light atau cahaya lembut adalah jenis cahaya yang cenderung memiliki intensitas yang rendah. Soft light biasanya diperoleh dari sumber cahaya yang lebih luas atau menyebar.
- Soft light tidak akan berpotensi menimbulkan pantulan, bayangan yang kuat dan tidak terlalu menonjolkan tekstur objek.
- Pada pemanfaatan cahaya natural (alami), kondisi soft light terjadi pada pagi atau sore, dan pada cuaca berawan. Namun biasanya untuk menghasilkan soft light, diperlukan beberapa alat bantu seperti diffuser.

Memmingkai objek

Sebelum membuat foto atau film, sebaiknya kita merancang dan memilih obyek yang akan dibingkai (*framing*) seperti apa. Pembingkai objek berkaitan dengan pemahaman ukuran dalam fotografi.

Ukuran objek foto dibagi menjadi:

- *Close up*: membingkai hanya sepertiga bagian dari obyek
- *Medium shot*: membingkai hanya dua pertiga bagian dari obyek.
- *Long shot*: membingkai keseluruhan obyek

Untuk penempatan obyek sebagai pusat perhatian utama dalam foto, sebaiknya ukuran diselaraskan dengan komposisi, yaitu menempatkan posisi obyek ke dalam bingkai.

Komposisi obyek yang umum digunakan dalam fotografi adalah:

- *Rule of Third*: pengaturan komposisi dengan cara membagi bingkai menjadi 9 bagian yang sama dan menempatkan obyek pada titik potong garis pembagiannya.
- *Diagonal*: menempatkan obyek mengikuti garis diagonal bingkai
- *Triangle*: menempatkan obyek di tengah bingkai dan membentuk luasan segitiga

KIAT PRAKTIS PENDOKUMENTASIAN

1. Lengkapi catatan atau dokumentasi sesegera mungkin, agar tahap dan proses kegiatan masih segar dalam ingatan.
2. Pisahkan, data, fakta dan opini.
3. Jangan campurkan data atau informasi hasil pemikiran peserta dengan informasi fasilitator atau pihak lain.
4. Jagalah agar data atau pernyataan peserta kegiatan tetap asli atau otentik. Jangan memindahkan atau mengganti atau mengubah suatu kata atau istilah.

5. Data atau informasi bisa dipertanggungjawabkan
6. Berilah keterangan pada gambar, foto, atau informasi berupa grafik dan lain-lain.
7. Buatlah analisis dan argumen dengan baik dan tajam, serta tidak mengandung bias.
8. Pilihlah media foto yang baik, yaitu gambar yang bisa bercerita, dengan cahaya yang baik dan fokus atau tidak buram.

3.8.2. PELAPORAN

PENGANTAR

Terdapat 7 hal yang harus dilakukan fasilitator, yakni:

- 1) Fasilitator memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan catatan / notulensi lapangan, melengkapi dan memperbaikinya.

Panduan diskusi kelompok untuk memperbaiki catatan lapangan dan penulisan laporan:
Apakah catatan sudah lengkap? Apakah ada hal yang terlewatkan dan belum dicatat? Apakah temuan-temuan yang paling menarik dan unik? Apakah hal-hal itu sudah tercatat dengan baik?

- 2) Setelah catatan dilengkapi, beri kesempatan setiap kelompok mempresentasikannya. Fasilitator memandu diskusi dengan pertanyaan kunci:
- 3) Apakah catatan ini sudah benar? Apa yang belum lengkap? Bisakah kelompok lain melengkapi? Apakah fakta, data dan informasi yang dicatat sudah cukup rinci? Apakah semua bisa dibuktikan kebenarannya di lapangan? Kalau temuan ini disampaikan kepada masyarakat apakah mereka bisa menerimanya? Dan seterusnya.
- 4) Ajak peserta untuk kembali ke dalam kelompok masing-masing. Beri mereka tugas untuk menuliskan kembali catatan-catatan tersebut dalam sebuah laporan deskriptif. Katakan kepada peserta bahwa mereka bebas membuat format laporan. Yang penting laporan ini mengandung: (1) Apa masalah yang menonjol di desa / dusun itu, dan apa buktinya, (2) Apakah desa / dusun memiliki potensi (kelembagaan, sumberdaya dll) untuk menyelesaikan masalah itu, dan apa buktinya? (3) Seberapa penting dan realistis masalah itu bisa diselesaikan dengan kolaborasi? Apa buktinya?, (4) apa gagasan-gagasan kerjasama yang mungkin bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Apa argumentasinya?
- 5) Mintalah kepada setiap peserta untuk menempelkan laporannya di dinding dan beri kesempatan kepada setiap orang untuk membacanya.
- 6) Ajak peserta untuk menganalisis dan membahas masing-masing laporan. Pertanyaan kunci untuk diskusi: (1) Apakah laporan ini sudah runtut, baik antar kalimat, antar paragraph, dan antar pokok pikiran?, (2) Apakah laporan ini sudah memuat seluruh temuan lapangan?, (3) apakah laporan ini enak dibaca dan tidak membosankan?, (4) Apakah kalimat-kalimat dalam laporan ini efektif?, (5) Apakah masyarakat memahami laporan ini? (6) Apa sumbangan laporan ini bagi penyusunan rencana PSABM-MCAI? Dan seterusnya.
- 7) Berdasarkan analisis laporan dan contoh-contoh kasus, fasilitator memberikan tips-tips tentang: (1) outline / kerangka penulisan, (2) koherensi laporan dan pengembangan paragraf, (3) kalimat efektif.

Di akhir sesi, fasilitator menegaskan kembali bahwa masyarakat adalah orang pertama yang harus diberi laporan, dan kepada mereka laporan itu didedikasikan. Laporan harus bisa mereka baca. Hindari kata-kata yang rumit dan abstrak. Masyarakat juga lah yang harus selalu diminta untuk menguji kebenaran dan kelayakan isi laporan.

APA DAN MENGAPA PELAPORAN?

Setelah catatan harian lapangan atau notulensi lapangan, tahap pendokumentasian berikutnya adalah menyusun laporan. Perlu disampaikan bahwa laporan PSABM ini bukan merupakan catatan administratif. Perlu dicamkan bahwa fasilitator membantu peserta kegiatan dalam membuat laporan. Oleh karena itu, proses analisis temuan dan pengambilan kesimpulan selama penyusunan laporan harus menyertakan peserta kegiatan.

Lebih dari sekadar catatan administrative, laporan PSABM ini adalah sebuah dokumen politik, dimana didalamnya berisi rekaman proses, kesepakatan-kesepakatan dan aspirasi-aspirasi para pihak tentang PSABM, mengenai aksi atau rencana kerja tertentu. Bahkan bisa saja dokumen ini berisi mengenai saran atau tuntutan agar suatu pihak melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di kemudian hari, bisa saja janji-janji kesepakatan akan ditagih. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan laporan ini sesuai fakta dan akurat.

Selain itu, laoran ini juga bisa dikatakan dokumen akademik karena memuat cara atau metode bagaimana sebuah pengetahuan, kebenaran, atau proses diperoleh, dikonstruksikan, disampaikan dan dikembangkan. Sebagai sebuah dokumen akademik, bisa saja ada temuan yang bisa mengubah paradigma lama sebuah ilmu pengetahuan, dan ditemukannya paradig baru. Laporan ini perlu berisi bagaimana temuan diperoleh atau proses, data-data yang dikaji, dan kesimpulan yang diambil,

Perlu diperhatikan ketika menyusun laporan: (1) siapa yang akan membaca laporan, (2) Bagaimana profil khalayak pembaca laporan, (3) apa tujuan yang ingin dicapai laporan ini, (4) Bagaimana laporan akan digunakan. Pertimbangan itu akan menentukan format, isi dan kerangka laporan.

SISTEMATIKA PELAPORAN?

Sistematika laporan umumnya terdiri dari pendahuluan, batang tubuh atau inti, dan penutup.

- Pendahuluan, biasanya memuat tentang latar belakang permasalahan yang dihadapi atau kesenjangan yang ditemui dalam program. Perlu juga ditambahkan beberapa data yang dibutuhkan untuk memperkuat argument bahwa permasalahan dan kesenjangan tersebut memang sedang terjadi.
- Batang tubuh atau inti laporan, biasanya di dalamnya dibahas mengenai dasar pemikiran atau teori yang mendasari dilakukannya sebuah kegiatan. Setelah itu, bisa dimasukkan metode dalam kegiatan tersebut. Apabila berupa penelitian maka disini diulas mengenai metode penelitian. Apabila mengenai sebuah kegiatan maka dibahas mengenai metode dalam kegiatan tersebut. Dalam bagian ini dimuat Hasil atau Pembahasan, dalam bagian ini selain kita memasukkan berbagai hal yang berupa temuan lapangan atau hasil wawancara, kita juga melakukan analisis atau memberikan argument mengenai topic yang kita angkat.

Gagasan untuk solusi permasalahan juga bisa diangkat pada bagian ini beserta alasan-alasan dan analisisnya.

- Penutup biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran atau Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan. Kesimpulan harus menjawab apa yang sudah disampaikan pada bagian pendahuluan, sehingga benang merah laporan ini tetap terjaga.

Pendokumentasian dengan menggunakan media audio visual perlu menggunakan perencanaan yang lebih matang. Oleh karena itu, riset dan survey terlebih dahulu untuk bisa menyusun sebuah perencanaan dengan baik. Sebelum mulai mengambil gambar atau shooting, kita membuat sebuah synopsis dan scenario film terlebih dahulu. Sinopsis adalah ringkasan dari film yang akan kita buat. Sinopsis biasanya tidak terlalu panjang, sekitar 3-5 paragraf saja. Sementara scenario adalah perencanaan pengambilan gambar atau shooting yang sangat rinci. Di dalam scenario sudah dicantumkan siapa dan kegiatan apa yang akan dishooting, termasuk di dalamnya adalah posisi kamera terhadap obyek yang dishooting, serta cahaya.

KIAT PRAKTIS PENULISAN LAPORAN

Terdapat 8 kiat praktis penulisan laporan, meliputi:

1. Jaga agar laporan tetap singkat tetap lengkap.
2. Gunakan kalimat efektif dan pendek-pendek, tidak lebih dari 15 kata dalam 1 kalimat. Hindari memasukkan banyak topic atau gagasan dalam 1 kalimat.
3. Perhatikan pembaca utama laporan. Bila pembacanya para peserta program atau warga masyarakat, maka hindari penggunaan bahasa yang rumit, istilah teknis dan jargon.
4. Gunakan judul-judul dan subjudul-subjudul untuk mempermudah memahami sistematika laporan.
5. Gunakan elemen visual seperti foto, ilustrasi, diagram, bagan dan lain-lain untuk menjelaskan konsep yang abstrak.
6. Gunakan ilustrasi, kutipan wawancara atau pernyataan dalam suatu kotak
7. Sunting laporan dengan cermat
8. Usahakan agar biayanya tetap murah.

3.8.3. PRESENTASI

PENGANTAR

Materi ini disarankan diberikan ketika peserta sudah melengkapi, memperbaiki, dan membereskan laporan-laporan mereka. Proses belajarnya dapat dirancang sebagai berikut:

- 1) Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan pentingnya sebuah presentasi temuan lapangan dalam program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Melalui presentasi ini fasilitator meyakinkan banyak orang mulai dari masyarakat awam hingga pejabat pemerintah.
- 2) Fasilitator menjelaskan metode, teknik dan media presentasi. Caranya, mintalah peserta untuk mengingat presentasi siapa dalam pelatihan ini yang paling disukai, paling meyakinkan, paling mudah dimengerti, dan tidak membosankan. Mengapa?

- 3) Mintalah peserta untuk melakukan kerja kelompok. Tugas kelompok adalah: (1) Menyusun rancangan presentasi dari bahan dasar laporan dengan metode, teknik, dan media yang mereka pilih sendiri. (2) Melakukan simulasi dan praktek presentasi
- 4) Sepakatilah kelompok mana yang hendak mempresentasikan kepada siapa. Misalnya ada 4 kelompok, maka 2 kelompok merancang presentasi kepada pihak pemerintah, 2 kelompok lainnya merancang presentasi kepada masyarakat.
- 5) Praktek dan simulasi presentasi. Beri kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikannya. Ketika kelompok presentasi untuk pemerintah, anggaplah kelompok-kelompok yang lain bermain peran sebagai lembaga-lembaga pemerintah, dan sebaliknya.
- 6) Fasilitator memandu proses refleksi dan analisis presentasi. Sangat disarankan agar proses ini dilakukan segera setelah sebuah presentasi berlangsung.
- 7) Kepada peserta yang berperan sebagai pemerintah tanyakan: (1) Apakah anda merasa jelas dengan apa yang sudah dipresentasikan, (2) Apakah cukup argumentative, (3) Apakah anda teryakinkan, (4) Apakah presentasi mendorong Anda untuk mengambil sebuah keputusan, dan seterusnya.
- 8) Kepada kelompok yang berpresentasi untuk pemerintah tanyakan: (1) Apakah Anda cukup mempersiapkan materi, (2) Dimana anda merasa argumentasi anda bolong? Dan seterusnya
- 9) Kepada peserta yang berperan sebagai masyarakat tanyakan: (1) apakah Anda memahami materi presentasi? (2) Apakah bahasanya mudah dimengerti? Dan seterusnya.
- 10) Kepada peserta yang berpresentasi untuk masyarakat tanyakan: (1) apakah Anda bisa menyederhanakan topic yang sulit? (2) Apakah presentasinya cukup sistematis bagi masyarakat? Dan seterusnya
- 11) Fasilitator menutup sesi dengan memberikan tips-tips praktis presentasi berdasarkan hasil dari refleksi latihan presentasi peserta.

APA DAN MENGAPA PRESENTASI

Apa dan mengapa presentasi?

Setelah laporan selesai dibuat, maka inilah saatnya untuk mempresentasikan proses dan temuan lapangan tersebut. Presentasi diperlukan untuk memastikan bahwa laporan yang sudah dibuat benar-benar dibaca dan dipahami oleh para pihak. Presentasi juga merupakan sebuah wahana bagi para pihak untuk memahami, melakukan *cross check*, memverifikasi, memberikan informasi tambahan, mengklarifikasi apa yang sudah dibuat dalam laporan dan presentasi.

Perlu diingat bahwa sebagian besar masyarakat kita masih erat dengan budaya tutur dan bukan budaya baca. Oleh karena itu, presentasi ini merupakan tahap yang penting dalam pengembangan program agar setiap tahap dan proses perkembangan kegiatan ini bisa dipahami secara jelas.

Siapa yang harus mempresentasikan hasil kegiatan dan kajian ?

Pada dasarnya, dalam sebuah proses partisipatif sebuah kegiatan atau temuan adalah merupakan milik dari setiap pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses pengembangan program ini. Dengan demikian, yang berhak untuk mempresentasikan adalah peserta program tersebut, dan bukan pihak lain seperti fasilitator.

Namun demikian, adakalanya fasilitator perlu turut berperan dalam presentasi mengenai hasil tersebut ketika ada data atau persoalan yang kontroversial atau yang dipersengketakan. Demikian pula ketika ada informasi yang sifatnya lebih ke arah metodologis.

Kepada siapa memberikan presentasi?

Program yang partisipatif biasanya melibatkan banyak pihak dan pemangku kepentingan. Mereka biasanya terdiri dari masyarakat, LSM, lembaga pemerintah, bahkan perusahaan. Jika peserta begitu beragam dan wilayah program begitu luas, maka presentasi bisa dilakukan oleh perwakilan dari tim-tim yang ada dalam program. Misalnya mengenai ekonomi, pengelolaan HKM, kelembagaan dan lain-lain.

Mempersiapkan presentasi

Siapa khalayak pendengar, dan bagaimana karakteristik, dan untuk apa tujuan dilakukannya presentasi perlu menjadi pertimbangan ketika membuat sebuah presentasi. Presentasi sebetulnya ada rangkuman atau ringkasan dari laporan atau pendokumentasian yang telah dibuat, yang disusun dalam bentuk visual, serta audio visual.

Setiap khalayak pendengar memiliki preferensi mengenai apa yang ingin didengarnya dari sebuah presentasi. Misalnya Masyarakat lebih menyukai presentasi yang membahas mengenai kegiatan masyarakat dan gagasan yang diusungnya. Lembaga pemerintah memilih lebih focus pada presentasi yang terkait dengan bidang hukum, kebijakan dan kelembagaan. LSM lebih tertarik kepada proses dan metodologi, serta hasil kegiatan secara keseluruhan.

ALUR PRESENTASI

Hampir sama dengan penulisan laporan, maka pada presentasi juga terdapat pendahuluan, batang tubuh atau inti, dan penutup. Total presentasi sebaiknya paling lama adalah 20 menit. Bila lebih dari itu, maka khalayak pendengar akan cepat bosan dan tidak lagi tertarik dengan presentasi. Pendahuluan cukup 5 menit, sementara sisanya lebih ditekankan kepada isi presentasi. Untuk kesimpulan dan penutup cukup diulas secara singkat saja.

METODE PRESENTASI

Umumnya kita membayangkan presentasi berlangsung dalam suatu ruangan tertutup dengan media audio visual atau computer. Ada beberapa orang yang memberika penjelasan mengenai satu topik. Sebagian besar peserta menjadi pendengar. Setelah penjelasan selesai maka terjadi sesi tanya jawab. Namun dalam metode partisipatif, presentasi tidaklah selalu demikian. Presentasi bisa dilakukan dimana saja, misalnya di kantor desa atau di luar ruangan dengan media dan metode presentasi yang sesuai.

MEDIA, ALAT DAN BAHAN PRESENTASI

Penggunaan media sangat tergantung dari metode yang dipilih oleh penyaji presentasi. Berdasarkan metode yang digunakan, jenis-jenis media presentasi antara lain adalah gambar/poster, kartu metaplan, file data digital computer, LCD, tayangan video, kaset cerita. Beberapa bahan dan alat yang bisa digunakan adalah papan tulis, kertas plano, proyektor, (OHP, LCD), computer/laptop, kartu metaplan dan alat peraga. Ketika memilih salah satu media maka, kita harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media dan alat/bahan yang kita pilih agar sesuai dengan suasana atau keadaan presentasi.

Tabel 3.1: Penggunaan Media Presentasi

1. KASET REKAMAN	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ dapat dibuat dalam waktu yang singkat (untuk hal ini memerlukan keterampilan khusus) ❖ dapat dibuat lebih hidup dan lebih menarik ❖ dapat dibuat seperti keadaan/ percakapan yang sesungguhnya ❖ tidak memerlukan keterampilan baea lulis. hanya kemampuan untuk mendengar ❖ bisa herhenti manakala perlu, alau dimainkan lagi, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ perlu keterampilan membuat skenario bila ingin benar -henar bagus dan menarik ❖ perlu orang yang memili suara bagus dan dapat membacakan skenario ❖ biaya yang diperlukan unluk pembuatan dan penggandaannya eukup mahal ❖ memerlukan listrik dan perlengkapan khusus untuk menggunakannya ❖ memerlukan ruangan yang tidak bising (dalam pembuatan dan penggunaan)
2. FILM - TAYANGAN SLIDE - VIDEO	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ dapat merekam/menampilkan keadaan sesungguhnya ❖ ceakupan informasi yang dibuat eukup banyak ❖ tidak memerlukan keterampilan baca tulis ❖ sangat hidup, merangsang minat serta memusalkan perhatian ❖ efektif unluk kelompok sedang, besar, bahkan untuk khalayak ramai 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ perlu keterampilan khusus unluk pembuatannya ❖ biaya pembuatan dan penggandaannya relalif mahal ❖ memerlukan listrik dan peralatan khusus untuk menggunakannya ❖ masa penayangannya terbatas, karena konsentrasi penonton juga terbatas ❖ tidak praktis untuk dipindah-tempatkan
3. ALAT PERAGA	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ bahan peraga yang diambil dari lokasi setempat akan lebih murah dan mudah diperoleh ❖ bisa dipercaya, karena barangnya terlihat nyata ❖ dapat diidentifikasi dan mudah diingat, karena bisa dilihat, dipegang, dirasakan, dicium, dsb 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ untuk alat peraga yang ukurannya besar atau terlalu kecil menjadi tidak praktis ❖ mudah hilang atau dipindah-tempatkan ke tas peserta
4. POSTER	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ dapat dibuat dalam waktu yang relatif sigkat ❖ lebih merangsang minat untuk diperhatikan ❖ 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ beberapa poster memerlukan keterampilan baca tulis ❖ perlu keahlian untuk menafsirkan
5. KARTU METAPLAN	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tersedia dalam berbagai warna dan ukuran yang bisa dimanfaatkan untuk membedakan makna ❖ Bisa ditempel satu per satu sesuai uraian penyaji ❖ Mudah dibawa 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sulit dilihat dari jarak jauh ❖ Hanya efektif untuk tulisan bukan gambar

6. TAYANGAN DATA KOMPUTER (Power Point)

- ❖ Tersedia software yang memiliki efek visual menarik
- ❖ Bisa diubah-ubah, ditambah atau dikurangi
- ❖ Bisa didaur ulang sesuai kebutuhan
- ❖ Bisa menyajikan berbagai jenis presentasi (audio atau visual)
- ❖ Membutuhkan alat khusus untuk ditayangkan (computer, proyektor LCD)
- ❖ Membutuhkan keterampilan penggunaan komputer yang memadai

KIAT PRAKTIS PRESENTASI

Beberapa kiat praktis melaksanakan presentasi, sebagai berikut:

1. Sebelum memberikan presentasi, sebaiknya pemrasaran berlatih terlebih dahulu di hadapan rekan-rekannya agar lebih siap ketika melakukan presentasi sebenarnya
2. Kuasai dengan baik materi presentasi. Bila perlu hafal di luar kepala sehingga tidak perlu membaca bahan presentasinya.
3. Periksa dengan teliti bahan presentasi dan ujicoba secara terbatas bahan tersebut, apakah sudah bisa dibaca dari jarak tertentu, atau apakah warnanya tidak terlalu mencolok atau gelap.
4. Berbicaralah dengan efektif, tatap para pendengar dan gunakan bahasa tubuh.
5. Buatlah kerangka presentasi.
6. Gunakan istilah teknis secara hati-hati
7. Tunjukkan bahwa data, angka dan fakta saling berkaitan
8. Gunakan kata-kata pembuka yang menarik perhatian dan bersikap antusias.
9. Jawab pertanyaan dengan jujur. Jika kurang menguasai atau tidak tahu, maka bisa dikatakan bahwa kita tidak mendalami persoalan itu dan kita bisa merujuk kepada seseorang atau fasilitator untuk membantu jawaban kita. Kita juga bisa mengatakan tidak tahu mengenai suatu hal dan akan berusaha mencari tahu dan mempelajarinya dengan lebih seksama. Meskipun demikian, sebaiknya jangan terlihat tidak menguasai bahan presentasi. Oleh karena itu buatlah persiapan presentasi dengan baik.

3.8.4. JURNALISME WARGA**PENGANTAR**

- 1) Fasilitator mengajak peserta untuk mengembangkan gagasan mengenai sebuah topic yang akan dijadikan berita. Tujuannya adalah untuk memberitakan kegiatan-kegiatan PSABM (Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis masyarakat), untuk membantu menyuarakan aspek-aspek local PSABM, misalnya sejarah local yang unik yang terkait dengan konteks PSABM. Outputnya adalah berita tentang PSABM.
- 2) Cara pembagian kelompok: per desa atau diacak agar bisa mengenal. Setiap desa melaporkan masing-masing berita di desa. Pembagian kelompok berdasarkan desa agar bisa mengangkat berita masing-masing lokasi desa.

- 3) Fasilitator mengajak peserta yang telah dibagi kelompok mengingat dan mengidentifikasi media massa dan media local / warga di tempatnya masing-masing, baik media cetak maupun media audio visual, dan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya.
- 4) Kerja Kelompok mendiskusikan tentang apa saja ciri-ciri Jurnalisme Warga dan Jurnalisme Biasa. Berdasarkan hasil diskusi, fasilitator menjelaskan prinsip-prinsip Jurnalisme Warga dan Jurnalisme Biasa (Input).
- 5) Fasilitator menjelaskan mengenai Sembilan Kewajiban Jurnalisme, Jurnalisme warga sebagai kekuatan (Input).
- 6) Fasilitator menjelaskan mengenai perbedaan antara fakta dan opini, serta memberikan contoh-contoh.
- 7) Fasilitator meminta peserta kembali merencanakan proyek pelatihan: per kelompok membuat produk media, majalah dinding, seperti koran. Di 4 desa ini punya berita untuk di media massa atau untuk di social media.
 - Teknik menulis dengan menggunakan rumus 5 W + 1 H (What, Where, When, Who, Why + How)
 - Struktur tulisan: LEAD, berupa bentuk piramida, yaitu hal-hal yang penting dan ingin ditonjolkan diletakkan di awal tulisan (LEAD)
- 8) Fasilitator membahas hasilnya satu persatu

PERTANYAAN KUNCI DISKUSI

Terdapat dua pertanyaan kunci untuk diskusi, yakni:

1. Bisakah membuat berita penting menjadi menarik dan relevan, bagaimana caranya?
2. Bagaimana membuat berita kegiatan, misalnya kegiatan ibu-ibu, dan hal-hal kecil agar bisa dimuat menjadi sebuah berita di media.

Jurnalisme warga adalah pemberitaan atau laporan yang dibuat oleh jurnalis warga yang adalah warga masyarakat sendiri. Laporan kejadian dalam konteks ini dibuat oleh petani, nelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa atau siapa saja. Jurnalisme warga merupakan kegiatan atau peran warga (*citizen*) dalam mencari, mengumpulkan, mengolah fakta, data atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya dan menyebarkan dalam bentuk berita atau informasi.

Jurnalisme warga bukan bermaksud untuk menjadikan masyarakat biasa bekerja sebagai jurnalis atau wartawan seperti mereka yang bekerja di media massa seperti Koran atau TV pada umumnya. Tujuannya adalah melaporkan atau memberitakan apa yang dianggap penting untuk diketahui orang lain, baik di dalam kelompok atau komunitas tersebut atau pun orang lain di luar komunitas. Hasil laporan atau berita ini disampaikan melalui media komunitas berupa poster atau bulletin, papan pengumuman, selebaran. Bisa juga melalui media elektronik berupa blog, facebook, twitter, radio komunitas, youtube, namun bisa juga kemudian dikutip oleh media massa yaitu televisi, radio, atau Koran.

Hal-hal yang mendorong berkembangnya Jurnalisme Warga:

- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi lahan tumbuh sumburnya kegiatan Jurnalisme Warga di belahan dunia.
- Ada kebutuhan warga menyebarkan informasi tentang lingkungan di sekitarnya.

Untuk memulai kegiatan Jurnalisme Warga dimulai karena adanya:

- Kegelisahan
- Keingintahuan

- Kesenjangan
- Ketidakadilan
- Permasalahan
- Keraguan

BERDAYA DENGAN JURNALISME WARGA

Jurnalisme warga adalah berita di media yang ditulis sendiri oleh warga. Awalnya sebelum jadi industri media, warga yang membuat berita. Jurnalisme biasa adalah jurnalisme yang ada di industri media. **Perbandingan** ciri-ciri Jurnalisme “biasa” dengan Jurnalisme Warga dipaparkan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1: Perbandingan Jurnalisme “Biasa” dengan Jurnalisme wWarga

Jurnalisme “Biasa”	Jurnalisme Warga
Laporan kejadian yang dibuat oleh profesi wartawan, baik freelance maupun yang bekerja untuk media massa tertentu	Laporan kejadian yang dibuat oleh petani, nelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa atau siapa saja
Pembuat laporan/ penulisnya mendapatkan imbalan materi atas tulisan/laporan yang dia buat.	Semua laporan yang dibuat akan tayang, karena penulisnya bisa menampilkannya sendiri, tanpa melalui editor
Melaporkan apa yang dianggap penting dan menarik oleh wartawan, dengan berbagai standar jurnalistik yang ketat.	Penulis tidak berharap imbalan materi atas tulisan atau laporan yang dibuatnya, karena melaporkannya lebih untuk tujuan sosial atau politik
Tidak semua laporan yang dibuat oleh wartawannya akan diterbitkan, karena harus melalui proses saringan dari editor	Penulis bertanggungjawab langsung kepada pembacanya.
Laporan ditujukan untuk siapa saja, mulai dari anak-anak hingga kalangan dewasa; dari awam hingga berpendidikan tinggi	Laporan ditujukan untuk siapa saja, mulai dari anak-anak hingga kalangan dewasa; dari awam hingga berpendidikan tinggi
Produk tulisan yang sudah terbit menjadi tanggungjawab bersama, antara penulis dan medianya	Melaporkan apa yang dianggap penting untuk diketahui orang lain, baik di dalam komunitas itu atau pun orang lain di luar komunitas
Laporan ditampilkan di koran, majalah, radio, televisi	Disampaikan melalui blog, facebook, twitter, papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, youtube, namun bisa juga kemudian dikutip oleh televisi, radio, atau Koran

Sembilan Kewajiban Jurnalisme (Bill Kovach 2001)

- Kewajiban pertama jurnalisme: kebenaran
- Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga
- Harus menjadi pemantau kekuasaan
- Jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi
- Independen terhadap sumber berita
- Menjaga agar berita proporsional
- Mengutamakan hati nurani

- Menyediakan forum bagi masyarakat
- Berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan.

ETIKA DALAM JURNALISME WARGA

Etika dalam jurnalisme warga:

- 1) Jujur dan terbuka
- 2) Tidak melakukan penyimpangan informasi
- 3) Tidak mendramatisir fakta
- 4) Memisahkan dengan tegas antara fakta dan opini
- 5) Tidak melakukan penjiplakan atau plagiat
- 6) Tidak memanipulasi foto atau video untuk kepentingan penyebaran berita atau informasi
- 7) Tidak menyerang kepribadian seseorang.

Jurnalisme warga sebagai kekuatan:

- Jurnalisme warga:
 - ✓ Kekuatan warga untuk bersuara
 - ✓ Bos media berpolitik
 - ✓ Perang opini vs fakta
 - ✓ Ada wartawan yang tidak berani menulis fakta
- Ada aspek Ekonomi –Politik dalam jurnalisme.
- Media ada dua kaki yang diletakkan ke publik dan industri (iklan dan pesan) → menentukan apakah berita hasil tulisan jurnalis independen atau tidak.

Praktik-praktik cemar jurnalisme biasanya mengarang berita agar menjadi menarik namun melupakan kebenaran.

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Media sosial sangat berpengaruh, sangat murah, dan pembacanya banyak. Misalnya Facebook, twitter, youtube. Social media atau media sosial sama dengan Jurnalisme warga, dimana Jurnalisme warga: Radio komunitas, social media.

Media Sosial dalam Industri Media berarti ada wadah bagi jurnalisme warga di media sosial. Dilema Media Sosial adalah terlalu banyaknya informasi sampah (Hoax), tak terkontrol, banyak info menyesatkan, membuat orang kecanduan dll. Sesuai dasar jurnalistik, yang penting dari jurnalistik, sebuah berita memisahkan antara fakta dan opini.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji terlebih dahulu apakah sebuah berita itu merupakan fakta atau opini semata. Biasanya sebuah berita akan menjadi bias bila tidak disertai data yang akurat. Karena itu, pilahlah terlebih dulu, berita yang akan ditampilkan atau ditayangkan merupakan fakta atau opini.

Peran Jurnalisme Warga

- (1) mengawal media mainstream dan pemerintah,
- (2) menggalang solidaritas global dengan cepat,

- (3) terminal info untuk penyaluran bantuan,
- (4) panduan informasi bencana terkini.

DASAR JURNALISTIK

Memulai kegiatan Jurnalisme Warga, dilakukan dengan:

- 1) Mengembangkan gagasan yang ingin disampaikan dari peristiwa atau fenomena yang ada.
- 2) Mengamati dan mengenali setiap kejadian atau peristiwa atau fenomena di lingkungan sekitar.
- 3) Mencari tau lebih jauh terhadap isu dengan mengumpulkan fakta-fakta dan data pendukung dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Mencatat atau merekam fakta-fakta dan data pendukung.
- 5) Memverifikasi fakta-fakta dan data.

Membuat dan Menyebarkan berita atau Informasi;

- 1) Menentukan topic atau tema isi berita atau informasi yang akan disebarakan
- 2) Menuliskan dengan menyusun dan merangkai fakta-fakta dan data yang saling berkaitan sesuai topic atau tema yang sudah ditentukan
- 3) Memilih media yang akan dipergunakan untuk disebarakan.

Bentuk karya jurnalisme warga

- News atau berita
 - ✓ Bersifat actual atas sebuah peristiwa
 - ✓ Disampaikan secara lugas dan langsung
- Features
 - ✓ Tidak selalu actual
 - ✓ Lebih mendalam daripada berita
 - ✓ Biasanya berisi topic-topik yang berkaitan dengan human interest
- Opini atau pendapat
 - ✓ Berisi pikiran-pikiran atau pendapat yang biasanya bersifat subjektif.

Menulis dalam jurnalisme warga

- 1) Menggunakan kata-kata yang tepat yang tidak menimbulkan kemungkinan bermakna ganda
- 2) Menulis secara jelas sesuai dengan maksud yang akan disampaikan tanpa bertele-tele
- 3) Menulis sebaiknya menggunakan kalimat aktif dengan tata bahasa yang baik sehingga jelas Subjek-Predikat-Objek-Keterangan
- 4) Kalimat terdiri paling banyak dari 15 kata saja.
- 5) Hindari kalimat yang panjang karena dikhawatirkan justru bisa mengaburkan maksud yang ingin disampaikan.

Praktik observasi: Tulis observasi kejadian yang pernah Anda alami. Minimal dua paragraf.

Perbedaan deskripsi dan observasi.

- Deskripsi adalah hasil observasi. Bila observasi dilakukan dengan baik, maka deskripsi yang dihasilkan bisa baik.
- Tergantung tabloidnya. Harus dilakukan informasi melalui wawancara. Untuk tahu, bagaimana kejadiannya. Feature: sudah lebih dalam. Menceritakan lebih jauh dalam wawancara.

Observasi Lapangan

- Pengamatan dipakai bila pewarta warga menyaksikan peristiwa secara langsung. Ia berada secara fisik di lokasi kejadian
- Pewarta biasanya menggunakan ketajaman inderawinya untuk mengungkapkan fakta, yaitu yang dilihat, didengar, dibaui, dirasa, diraba, ataupun dicecap.

Contoh Observasi Lapangan:

Pagi ini suhu udara di Dara Kunci mencapai 30 derajat Celcius. Udara di dalam kamar terasa pengap, bahkan di luar ruangan sangat menyengat. Matahari mulai terbit sekitar pukul 06.15. Seiring terbitnya matahari, terdengar bunyi kokok ayam. Di jalan di depan hotel, suara kendaraan yang lewat juga mulai terdengar.

Praktik Observasi: Tuliskan observasi kejadian yang pernah Anda alami. Minimal dua paragraf

Wawancara

Mencari fakta, alasan, opini atau penjelasan terhadap suatu masalah dari nara sumber. Wawancara terutama sangat diperlukan jika pewarta tidak berada di lokasi saat kejadian

Tiga Jenis Narasumber:

- Narasumber utama (primer)
- Narasumber kedua (sekunder)
- Narasumber ketiga (tersier)

Semakin banyak narasumber dalam sebuah berita semakin baik.

Pertanyaan-pertanyaan penting wawancara (5W+1H):

1. Apa yang terjadi?
2. Siapa yang terlibat dalam peristiwa
3. Kapan peristiwa terjadi
4. Dimana peristiwanya?
5. Mengapa atau apa sebab terjadi?
6. Bagaimana peristiwanya?

Kerangka penulisan:

- 5 W 1 H (what, who, when, where, why + how)
- Struktur tulisan: LEAD, berupa bentuk piramida, yaitu hal-hal yang penting dan ingin ditonjolkan diletakkan di awal tulisan (LEAD)

Wawancara = kemampuan mendengar

Melakukan wawancara bukan sekadar melakukan tanya jawab dengan narasumber kita. Wawancara adalah kemampuan mendengar sang jurnalis ketika sedang melakukan tanya jawab dengan narasumber. Berikut adalah cara bagaimana agar kemampuan mendengar kita meningkat:

1. Perhatikan kondisi badan Anda sendiri
2. Dengarkan dengan aktif
3. Tunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan
4. Ulangilah pertanyaan yang penting
5. Carilah kejelasan
6. Dengar dan tunggu

Menulis berita cukup 2 paragraf.

- Paragraf 1: Seberapa besar, Kapan dan Dimana terjadinya kegiatan atau peristiwa.
- Paragraf 2: Apa dampak kegiatan tersebut, atau rencana aksi apa, atau harapan apa.
- Berdasarkan observasi & wawancara yang dilakukan, kemudian kita membuat tulisan, maka itu berarti mengkontruksi atau membangun sebuah cerita atau peristiwa sebuah realita.

3.9. BAHAN TAYANG



Slide 1: Title slide for 'Pendokumentasian, penulisan laporan dan presentasi'. It features the K.P. SHK logo on the top left and a circular emblem on the top right. The title is centered in a large font. At the bottom right, it says 'PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, PSDABM'. The background has a faint topographic map pattern on the left side.

Dokumen

segala barang, gambar, ataupun tulisan sebagai bukti dan dapat memberikan keterangan yang penting.



Dokumentasi

proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis.

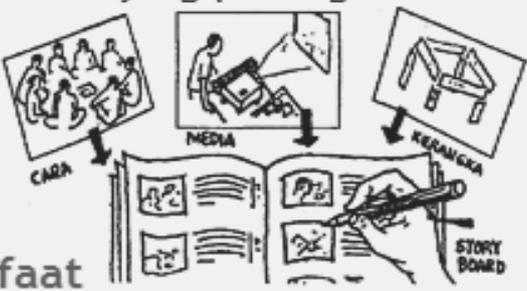


Mendokumentasikan

mengatur dan menyimpan sebagai dokumen.



Apa?
data, peristiwa, fakta, informasi tertentu
yang penting



Tujuan & manfaat dokumentasi

- media komunikasi
- media belajar
- sumber informasi
- acuan bersama

Melakukan dokumentasi

- mencatat,
- mengamati,
- merekam proses,
- memotret / memfoto
- memfilmkan



Bagaimana melakukan dokumentasi?



1. Menulis catatan lapangan
2. Memotret / merekam film
3. Memilih bentuk laporan
4. Menulis laporan atau menyusun foto/ film
5. Presentasi laporan / film

Kerangka Pendokumentasian

Menuliskan Fakta-Fakta dan Data

5W + 1H

□ Who □ What □ Where □ When □ Why □ How

- Who —————> siapa yang melakukan, siapa saja yang terlibat ... dsb
- What —————> apa yang terjadi, apa yang terpenting dari kejadian itu
- Where —————> dimana peristiwa itu terjadi (tempat)
- When —————> kapan peristiwa terjadi (waktu)
- Why —————> latar belakang mengapa peristiwa itu terjadi
- How —————> bagaimana peristiwa itu terjadi, proses peristiwanya seperti apa...

Kiat praktis penulisan laporan

1. laporan tetap singkat tetap lengkap.
2. kalimat efektif dan pendek-pendek,
3. Perhatikan pembaca utama laporan.
4. Gunakan judul-judul dan subjudul-subjudul
5. Gunakan elemen visual seperti foto, ilustrasi, diagram, bagan
6. Gunakan ilustrasi, kutipan wawancara atau pernyataan dalam suatu kotak
7. Sunting laporan dengan cermat
8. Usahakan agar biayanya tetap murah.

Fotografi atau rekaman film

Sumber cahaya

Jenis cahaya

1. *Hard light*
2. *Soft Light*

Membangkai objek

Ukuran objek foto dibagi menjadi:

1. *Close up*: membingkai hanya sepertiga bagian dari obyek
2. *Medium shot*: membingkai hanya dua pertiga bagian dari obyek.
3. *Long shot*: membingkai keseluruhan obyek

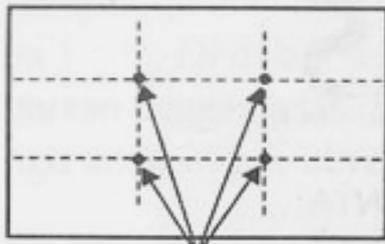


Foto atau ilustrasi (2 dimensi)

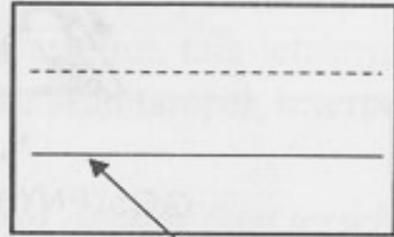


- ▶ Foto harus bermutu tinggi - tajam, cahaya, komposisi.
- ▶ keterangan pendek (caption) disekitar foto.
- ▶ Ilustrasi kontras, tanpa Jatar belakang
- ▶ Obyek mudah dikenali. Bila perlu pembanding dan caption
- ▶ Gaya ilustrasi sesuai preferensi khalayak.

Membangkai objek



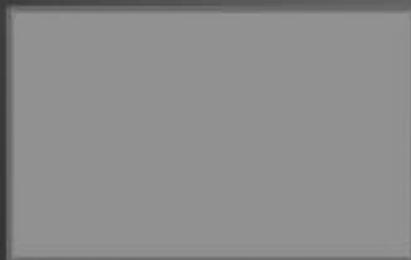
Titik-titik Kuat



Garis Horizon 1/3 ruang

Orientasi

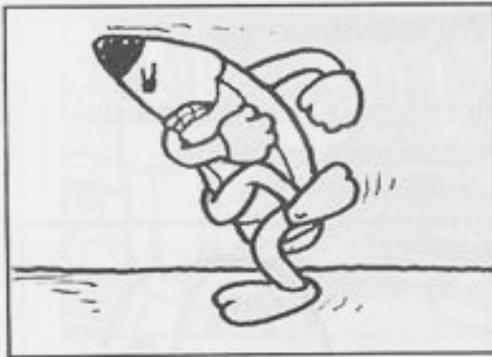
► Horizontal



► vertikal



Ruang gerak



Tidak/Kurang terasa ← Ruang Gerak → Terasa

Ilustrasi untuk Fakta atau Konsep

Fakta (kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan kita). Misalnya, orang sedang memikul.



Konsep (sesuatu yang dibendakan dan diberi nama, seperti kereta, meja, silat, demokrasi dll). Misalnya, konsep tentang pendidikan masyarakat.



Prinsip (hubungan antar konsep yang membentuk suatu kaidah/pola). Misalnya, "Nikah dulu, baru punya Anak".

Foto Yang Baik

- Foto yang baik adalah yang tidak kelebihan / kekurangan data → yang terpotret adalah hal yang memang harus ada dalam foto
- Hal yang tidak penting yang ikut terpotret bisa dipotong, sehingga hanya hal utama yang sesuai tema yang masuk dalam bidang foto
- Pemotongan foto dilakukan agar menyisakan hal penting disebut kroping (*cropping*) bisa menjadi salah satu cara menghasilkan foto yang baik.
- Saat memotret tepat?
- Komposisinya bagus?
- Ekspresi objek yang baik dan sesuai?

Tips Tata Letak

- ▶ Dua obyek yang ditata-letak saling berdekatan berarti memiliki hubungan lebih erat
- ▶ Obyek yang ditampilkan lebih besar berarti lebih dekat
- ▶ Tulisan yang lebih besar cenderung dipahami
- ▶ membedakan ukuran obyek-obyek cenderung mengarahkan perhatian

Contoh

Virus Zika

Virus zika merupakan sejenis virus dan keluarga flaviviridae yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang juga sebagai vektor DDT.

Klasifikasi virus

- Group: Group IV (ssRNA)
- Famili: Flaviviridae
- Genus: Flavivirus
- Spesies: Virus zika

Gejala

Apakah itu Virus Zika?

Virus zika adalah sejenis virus yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.

Diduga mampu mengakibatkan cacat otak pada bayi yang baru lahir.

Nyamuk zika berdarah putih bisa menghisap darah seseorang yang telah terinfeksi. Nyamuk yang berdarah putih bisa menyebarkan virus ke orang lain.

Pencegahan

- Gunakan pembasmi serangga/nyamuk
- Gunakan penjaja udara (AC) atau jaring nyamuk
- Gunakan baju lengan panjang dan celana panjang

Cara mengobati

Belum ada vaksin atau pengobatan yang mampu mencegah atau mengubati Zika jika terinfeksi cukup.

Hindari dehidrasi dengan minum cukup.

Minum obat antiinflamasi atau parasetamol untuk meredakan demam dan nyeri.

Contoh

Kompensasi dan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Penerbangan

Sesuai Permenhub Nomor PM 89 Tahun 2015

Jadwal keberangkatan awal

- delay 30 menit: minuman
- delay 60 menit: minuman, snack box
- delay 120 menit: minuman, heavy meal
- delay 180 menit: minuman, snack box, heavy meal
- delay 240 menit: minuman, snack box, heavy meal, Ganti rugi Uang tunai Rp.300.000,-
- Penerbangan dibatalkan: Dinalihkan ke penerbangan berikutnya atau Refund ticket

Pada keterlambatan 61 - 240 menit, Penumpang dapat:

- minuman
- snack box
- heavy meal

Apabila penerbangan dibatalkan, Maskapai wajib:

- Reschedule ke penerbangan berikutnya
- Refund ticket

Sampaikan keluhan dan saran anda melalui:

Info151@dephub.go.id

(Kompensasi bisa diklaim oleh penumpang apabila delay disebabkan oleh faktor manajemen maskapai penerbangan)

11/10/16/DEK/2016 AIN.RDP/18/168

©Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2016

Dokumentasi AUDIO/AUDIO VISUAL

Cara penyajian:



- ▶ Pokok terpenting disampaikan terlebih dahulu
- ▶ Menyertakan fakta-fakta (kejadian) yang bukan opini (pendapat)
- ▶ Penuturan secara obyektif dan berimbang
- ▶ Lengkap, memuat 5W + 1H tanpa harus kronologis
- ▶ Kalimat-kalimat singkat & sederhana, hingga mudah didengar khalayak
- ▶ Intonasi jelas dan tidak terlalu cepat

Format :

- ▶ Time (unsur waktu) aktual
- ▶ Nearness (unsur kedekatan)
- ▶ Conflict (unsur pertentangan)
- ▶ Impact (unsur akibat)
- ▶ Important (unsur penting)
- ▶ Change (unsur perubahan)
- ▶ Human Interest



Kiat praktis pendokumentasian

- Lengkapi catatan atau dokumentasi sesegera mungkin, agar tahap dan proses kegiatan masih segar dalam ingatan.
- Pisahkan, data, fakta dan opini.
- Jangan campurkan data atau informasi hasil pemikiran peserta dengan informasi fasilitator atau pihak lain.
- Jagalah agar data atau pernyataan peserta kegiatan tetap asli atau otentik. Jangan memperindah atau mengganti atau mengubah suatu kata atau istilah.
- Data atau informasi bisa dipertanggungjawabkan
- Berilah keterangan pada gambar, foto, atau informasi berupa grafik dan lain-lain.
- Buatlah analisis dan argumen dengan baik dan tajam, serta tidak mengandung bias.
- Pilihlah media foto yang baik, yaitu gambar yang bisa bercerita, dengan cahaya yang baik dan focus atau tidak buram.

PRESENTASI

Manfaat presentasi:

1. memastikan laporan dibaca & dipahami
2. wahana untuk:
 - memahami,
 - melakukan *cross check*,
 - memverifikasi,
 - memberikan informasi tambahan,
 - mengklarifikasi

Persiapan presentasi

1. Siapa khalayak pendengar,
2. bagaimana karakteristik khalayak pendengar,
3. tujuan presentasi

Alur presentasi

1. Pendahuluan 5 menit,
2. Penekanan pada isi
3. kesimpulan penutup singkat

Metode presentasi

1. Presentasi di ruang tertutup
2. Presentasi di ruang terbuka
3. Alat/bahan yg dibutuhkan

Beberapa kiat praktis presentasi

1. Berlatih terlebih dahulu
2. Kuasai dengan baik materi presentasi. Berbicaralah dengan efektif, tatap para pendengar, gunakan bahasa tubuh.
3. Buatlah kerangka presentasi.
4. Gunakan istilah teknis secara hati-hati
5. Tunjukkan bahwa data, angka dan fakta saling berkaitan
6. Gunakan kata-kata pembuka yang menarik perhatian dan bersikap antusias.
7. Jawab pertanyaan dengan jujur



PLUS MINUS MEDIA PRESENTASI



KASET REKAMAN

KEUNGGULAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">•dapat dibuat dalam waktu yang singkat (untuk hal ini memerlukan keterampilan khusus)•dapat dibuat lebih hidup dan lebih menarik•dapat dibuat seperti keadaan/ percakapan yang sesungguhnya•tidak memerlukan keterampilan baea lulis. hanya kemampuan untuk mendengar•bisa herhenti manakala perlu, alau dimainkan lagi, dsb.	<ul style="list-style-type: none">•perlu keterampilan membuat skenario bila ingin benar -henar bagus dan menarik•perlu orang yang memili suara bagus dan dapat membacakan skenario•biaya yang diperlukan unluk pembuatan dan penggandaannya eukup mahal•memerlukan listrik dan perlengkapan khusus untuk menggunakannya•memerlukan ruangan yang tidak bising (dalam pembuatan dan penggunaan)

FILM - TAYANGAN SLIDE - VIDEO

KEUNGGULAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">• dapat merekam/menampilkan keadaan sesungguhnya•Cakupan informasi yang dibuat cukup banyak•tidak memerlukan keterampilan baca tulis•sangat hidup, merangsang minat serta memusatkan perhatian•efektif unluk kelompok sedang, besar, bahkan untuk khalayak ramai	<ul style="list-style-type: none">•perlu keterampilan khusus unluk pembuatannya•biaya pembuatan & penggandaannya relatif mahal•memerlukan listrik dan peralatan khusus untuk menggunakannya•masa penayangannya terbatas, karena konsen-trasi penonton juga terbatas•tidak praktis untuk dipindah-tempatkan

POSTER

KEUNGGULAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">•dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat•lebih merangsang minat untuk diperhatikan	<ul style="list-style-type: none">•beberapa poster memerlukan keterampilan baca tulis•perlu keahlian untuk menafsirkan

TAYANGAN DATA KOMPUTER (power point)

KEUNGGULAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none">•Tersedia software yang memiliki efek visual menarik•Bisa diubah-ubah, ditambah atau dikurangi•Bisa didaur ulang sesuai kebutuhan•Bisa menyajikan berbagai jenis presentasi (audio atau visual)	<ul style="list-style-type: none">•Membutuhkan alat khusus untuk ditayangkan (computer, proyektor LCD)•Membutuhkan keterampilan penggunaan komputer yang memadai

Contoh presentasi dengan Film pendek / dokumen audio visual





- Kegelisahan
- Keingintahuan
- Kesenjangan
- Ketidakadilan
- Permasalahan
- Keraguan



Jurnalisme Warga vs Jurnalisme ‘Biasa’

Jurnalisme “Biasa”	Jurnalisme Warga
Laporan kejadian yang dibuat oleh profesi wartawan, baik freelance maupun yang bekerja untuk media massa tertentu	Laporan kejadian yang dibuat oleh petani, nelayan, ibu rumah tangga, mahasiswa atau siapa saja
Pembuat laporan/ penulisnya mendapatkan imbalan materi atas tulisan/laporan yang dia buat.	Semua laporan yang dibuat akan tayang, karena penulisnya bisa menampilkannya sendiri, tanpa melalui editor
Melaporkan apa yang dianggap penting dan menarik oleh wartawan, dengan berbagai standar jurnalistik yang ketat.	Penulis tidak berharap imbalan materi atas tulisan atau laporan yang dibuatnya, karena melaporkannya lebih untuk tujuan sosial atau politik
Tidak semua laporan yang dibuat oleh wartawannya akan diterbitkan, karena harus melalui proses saringan dari editor	Penulis bertanggungjawab langsung kepada pembacanya.
Laporan ditujukan untuk siapa saja, mulai dari anak-anak hingga kalangan dewasa; dari awam hingga berpendidikan tinggi	Laporan ditujukan untuk siapa saja, mulai dari anak-anak hingga kalangan dewasa; dari awam hingga berpendidikan tinggi
Produk tulisan yang sudah terbit menjadi tanggungjawab bersama, antara penulis dan mediana	Melaporkan apa yang dianggap penting untuk diketahui orang lain, baik di dalam komunitas itu atau pun orang lain di luar komunitas
Laporan ditampilkan di koran, majalah, radio, televisi dll	Disampaikan melalui blog, facebook, twitter, papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, youtube, namun bisa juga kemudian dikutip oleh televisi, radio, atau Koran



Sembilan Kewajiban Jurnalisme (Bill Kovach 2001)

1. Kewajiban pertama jurnalisme: kebenaran
2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga
3. Harus menjadi pemantau kekuasaan
4. Jurnalisme itu disiplin menjalankan verifikasi
5. Independen terhadap sumber berita
6. Menjaga agar berita proporsional
7. Mengutamakan hati nurani
8. Menyediakan forum bagi masyarakat
9. Berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan.

Jurnalisme warga sebagai kekuatan:

- Jurnalisme warga:
 - Kekuatan warga utk bersuara
 - Bos media berpolitik
 - Perang opini vs fakta
 - Ada wartawan yang tidak berani menulis fakta

- Aspek Ekonomi-Politik dalam

- Dua kaki media:
 - publik vs industri (iklan dan pesan)



Peran Jurnalisme Warga

(1) mengawal media mainstream dan pemerintah,

(2) menggalang solidaritas global dengan cepat,

(3) terminal info untuk penyaluran bantuan atau kerjasama,

(4) panduan informasi PSDABM terkini.





DASAR JURNALISTIK

(Observasi Lapangan dan
Wawancara)

Observasi Lapangan:

Pengamatan dipakai bila
pewartawarga menyaksikan
peristiwa secara langsung. Ia
berada secara fisik di lokasi
kejadian





Pewarta biasanya menggunakan ketajaman inderawinya untuk mengungkapkan fakta, yaitu yang dilihat, didengar, dibaui, dirasa, diraba, ataupun dicecap.

Contoh Observasi Lapangan:

Pagi ini suhu udara di Dara Kunci mencapai 30 derajat Celcius. Udara di dalam kamar terasa pengap, bahkan di luar ruangan sangat menyengat. Matahari mulai terbit sekitar pukul 06.15. Seiring terbitnya matahari, terdengar bunyi kokok ayam. Di jalan di depan hotel, suara kendaraan yang lewat juga mulai terdengar.



Praktik Observasi

Tuliskan observasi kejadian
yang pernah Anda alami.
Minimal dua paragraf



Wawancara

Mencari fakta, alasan, opini
atau penjelasan terhadap
suatu masalah dari nara
sumber. Wawancara
terutama sangat diperlukan
jika pewarta tidak berada di
lokasi saat kejadian

Tiga Jenis Narasumber:



- Narasumber utama (primer)
- Narasumber kedua (sekunder)
- Narasumber ketiga (tersier)

Ctt: Semakin banyak narasumber dalam sebuah berita semakin baik.

Pertanyaan penting wawancara:



1. Apa yang terjadi?
2. Siapa yang terlibat dalam peristiwa
3. Kapan peristiwa terjadi
4. Dimana peristiwanya?
5. Mengapa atau apa sebab terjadi?
6. Bagaimana peristiwanya?

5 W 1 H

(what, who, when, where, why + how)

Wawancara = kemampuan mendengar



1. Perhatikan kondisi badan Anda sendiri
2. Dengarkan dengan aktif
3. Tunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan
4. Ulangilah pertanyaan yang penting
5. Carilah kejelasan
6. Dengar dan tunggu

Menulis berita cukup 2 paragraf.



Paragraf 1:
Seberapa besar, Kapan dan Dimana terjadinya kegiatan atau peristiwa.

Paragraf 2:
Apa dampak kegiatan tersebut, atau rencana aksi apa, atau harapan apa.



Berdasarkan observasi & wawancara, kemudian kita membuat tulisan maka itu berarti mengkontruksi atau membangun sebuah cerita atau peristiwa sebuah realita.



Bahan Bacaan

KPSHK. Modul Pendokumentasian SHK.

Moeliono Ilya, Djohani Rianingsih. 2007. *Kajitindak Partisipatif untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSABM) pada Skala Kawasan*. Studio Driya Media. Bandung

Moeliono Ilya, Nur Tjahjo. 2007. *Studio Driya Media*. Bandung

Bahan Jurnalisme Warga Oxfam. *Pelatihan Jurnalisme warga*. Sembalun. Lombok Timur

●BAB 4

MODUL PENGORGANISASIAN KELOMPOK

4.1. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat hutan berbasis kelompok, khususnya dalam PPSDABM, pemahaman tentang pengorganisasian masyarakat, teknik dan metode fasilitasi dalam mendampingi masyarakat serta kemampuan teknis berkomunikasi yang efektif menjadi persyaratan utama keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan fasilitator desa dalam pengetahuan dan keterampilan dalam pengorganisasian masyarakat, teknik fasilitasi dan teknik dan metode berkomunikasi yang efektif akan sangat menentukan keberhasilan program.

4.2. TUJUAN PEMBELAJARAN

4.2.1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Tujuan Pembelajaran Umum untuk kegiatan pelatihan pengorganisasian masyarakat, teknik fasilitasi masyarakat dan kelompok kelompok serta teknik dan metode berkomunikasi yang efektif agar:

1. Peserta memahami pentingnya pengorganisasian kelompok.
2. Peserta memahami pentingnya teknik fasilitasi kelompok dan masyarakat
3. Peserta memahami pentingnya teknik dan metode komunikasi dengan masyarakat dan kelompok

4.2.2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) ini, peserta mampu:

1. Melakukan pengorganisasian masyarakat
2. Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap masyarakat dan kelompok
3. Melakukan berbagai teknik berkomunikasi dengan masyarakat yang efektif

4.3. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Pokok Bahasan dalam pelatihan pengorganisasian masyarakat, teknik fasilitasi kelompok dan teknik berkomunikasi, yakni:

1. Pengorganisasian masyarakat
2. Teknik fasilitasi dan pendampingan masyarakat
3. Teknik dan metode komunikasi masyarakat

4.4. PERSYARATAN PESERTA

4.4.1. PERSYARATAN PENDIDIKAN PESERTA

Peserta mempunyai pendidikan minimal Diploma dan telah lulus minimal 3 tahun.

4.4.2. PERSYARATAN PENGALAMAN PESERTA

Peserta telah mempunyai pengalaman dalam pendampingan masyarakat dalam proyek pemberdayaan.

4.5. BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, flip chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi Lembar Latihan dan Lembar Rencana Dokumentasi.

Di samping itu, alat dan bahan ajar yang diperlukan:

1. Kertas flipchart atau kertas plano
2. Kertas HVS
3. Komputer dan printer
4. Tinta printer
5. Spidol dan ballpoint
6. Kamera foto / Handphone camera
7. Buku Catatan

4.6. METODE PEMBELAJARAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui [1] Diskusi umum, [2] Curah pendapat, dan [3] Penugasan individual

4.7. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 4 jam pelajaran per hari (T=4jp, P=0jp, PL=0jp) @45menit, selama 1 hari jangka waktu Training of Trainer (ToT). Untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta maka, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

❖ Langkah 1: Pengkondisian (15 Menit)

1. Penyegaran dan pencairan suasana (*ice-breaking*),
2. Pemandu/pengajar menggali harapan peserta tentang materi dan keterampilan yang ingin dicapai melalui sesi ToT ini,
3. Pemandu/pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan metode yang akan digunakan,
4. Menggali pendapat peserta tentang “pengorganisasian masyarakat, teknik fasilitasi masyarakat dan kelompok kelompok serta teknik dan metode berkomunikasi yang efektif”. Proses pembelajaran menggunakan metode partisipatif dimana semua peserta terlibat secara aktif,

5. Berdasarkan pendapat peserta, pemandu/pengajar menjelaskan tentang “pengorganisasian masyarakat, teknik fasilitasi masyarakat dan kelompok kelompok serta teknik dan metode berkomunikasi yang efektif”.

❖ **Langkah 2: Pengkajian Pokok Bahasan (180 Menit)**

1. Pemandu/pengajar menyampaikan pokok bahasan:
 - ❖ Pengorganisasian masyarakat,
 - ❖ Teknik fasilitasi masyarakat dan kelompok kelompok serta
 - ❖ Teknik dan metode berkomunikasi yang efektif
2. Pemandu/pengajar member kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta.
3. Pemandu/pengajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga antar peserta juga terjadi diskusi dan interaksi yang baik.
4. Pemandu/pengajar menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok tentang:
 - ❖ Pengorganisasian masyarakat,
 - ❖ Teknik fasilitasi masyarakat dan kelompok kelompok serta
 - ❖ Teknik dan metode berkomunikasi yang efektif

❖ **Langkah 3: Rangkuman (15 Menit)**

1. Pemandu/pengajar merangkum sesi pembelajaran.
2. Peserta dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan pengajar memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari pengajar maupun dari peserta lain.
3. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan.
4. Pemandu/pengajar menutup sesi pembelajaran dengan memastikan bahwa TPU dan TPK sesi telah tercapai.

4.8. URAIAN MATERI

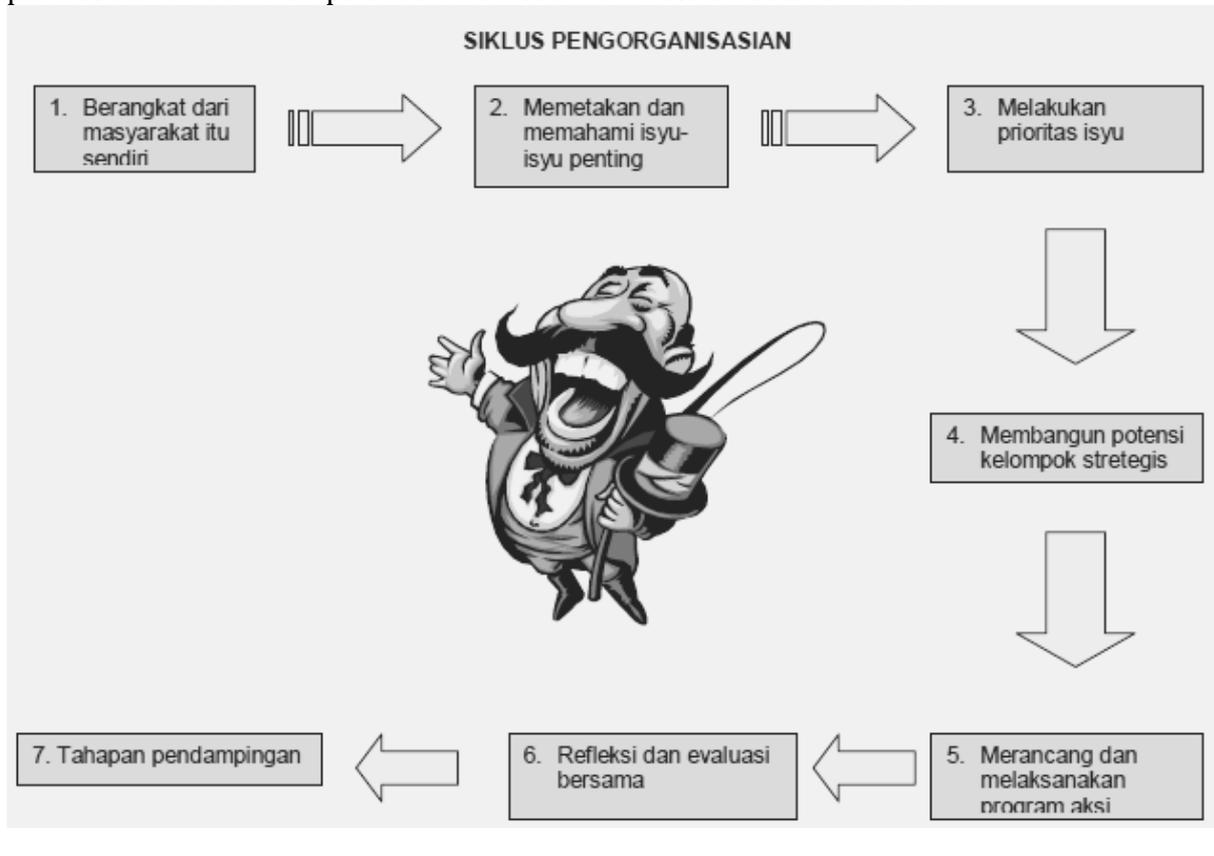
4.8.1. LANGKAH-LANGKAH PENGORGANISASIAN MASYARAKAT

PENGERTIAN

Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu teknik dan strategi untuk membangun kekuatan rakyat yang kuat dan mandiri, yang digunakan untuk mencapai perubahan-perubahan sosial, politik dan ekonomi yang semula tidak menguntungkan masyarakat, berubah menjadi kondisi yang menguntungkan dan berpihak pada masyarakat tersebut. Pengorganisasian masyarakat merupakan suatu kerangka kerja yang menyeluruh dan komprehensif untuk memecahkan masalah yang dialami oleh masyarakat dengan cara-cara yang direncanakan (disengaja) untuk memecahkan masalah tersebut.

Hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengorganisasian masyarakat adalah bukan suatu pekerjaan yang membawa keuntungan kebendanaan atau kemashuran nama, atau kalau berhasil mengorganisir masyarakat kemudian mendapat tanda jasa, atau akan disanjung-sanjung sebagai pahlawan rakyat, bukan itu out-put dari pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat sendiri kemudian mampu menyelesaikan masalah. Masyarakat mampu membangun suatu tindakan dimana masyarakat itu sendiri yang akhirnya akan menjadi pahlawan.

Salah satu indikator keberhasilan suatu pengorganisasian masyarakat ialah apabila masyarakat tersebut mampu menganalisis keberadaan dan posisi diri dalam menghadapi permasalahan dan mampu untuk memecahkan masalah secara mandiri.



TAHAPAN PENGORGANISASIAN

a. Tinggal dan hidup bersama masyarakat (live-in)

Sesuai dengan visi pengorganisasian yang bertumpu pada kekuatan masyarakat, maka mau tidak mau seorang organiser harus bersedia untuk tinggal dan hidup bersama masyarakat yang hendak diorganisir. Tinggal bersama masyarakat (live-in) merupakan syarat pokok dan penting apabila seorang organiser ingin berhasil menggerakkan masyarakat. Seorang organiser harus mengetahui jantung persoalan masyarakat setempat, dan selain itu organiser juga harus ikut merasakan pahit getir, atau manisnya hidup bersama masyarakat. Dengan live in, akan terbangun suatu jaringan simpati, empati dan jaring sosial antara seorang organiser dengan masyarakat setempat.

b. Mengenal dan dikenal masyarakat

Bagaimana seorang organiser mampu menggerakkan masyarakat apabila dia tidak dikenal atau mengenal masyarakat. Maka itu, seorang organiser harus berusaha keras untuk mengenal dan dikenal oleh masyarakat setempat. Teknik mengenal dan dikenal dilakukan dengan cara membaurkan diri sebagai warga biasa. Ikut jagong bayen, ikut arisan, ikut ngobrol di cakruk dan sebagainya.

C. Dipercayai oleh masyarakat

Kepercayaan masyarakat kepada seorang organiser harus diperoleh. Hal ini membutuhkan syarat-syarat bahwa seorang organiser harus memiliki kepribadian dan integritas yang kuat. Seorang organiser harus dapat dipercaya, disiplin, berpihak kepada kaum bawah, dan yang terpenting adalah jujur dan tepat waktu apabila membuat komitmen dengan masyarakat. Kepercayaan merupakan bekal utama bagi seorang organiser dalam membangun relasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok di masyarakat. Sekali seorang organiser melakukan tindakan yang tidak jujur, misalnya bertindak kriminal, berlaku jahat dan menipu masyarakat, maka legitimasi organiser sudah tidak ada lagi di masyarakat tersebut.

d. Melakukan Pemetaan isu bersama

Seorang organiser yang baik adalah apabila dia mampu mengajak masyarakat untuk mampu melakukan pemetaan isu-isu pokok dan penting bersama masyarakat. Isu penting harus ditemukan bersama. Tidak dilakukan sendiri oleh seorang organiser. Model-model riset akademik yang dilakukan oleh seorang konsultan dari luar untuk menemukan masalah pokok di masyarakat, tidak relevan dilakukan dengan pola pengorganisasian masyarakat. Intinya, masalah pokok harus ditemukan sendiri oleh organiser dengan masyarakat. Teknik untuk memetakan masalah bisa dilakukan dengan teknik riset aksi, Partisipatory Rural Appraisal (PRA) atau dengan mapping.

e. Analisa potensi dan pemetaan kelompok strategis

Di suatu desa atau wilayah tertentu sudah pasti ada potensi yang bersumber pada sumber daya alam, sumber daya manusia, relasi sosial dan institusi-institusi setempat. Untuk melakukan pengorganisasian masyarakat sebaiknya perlu dipetakan dan diidentifikasi potensi-potensi yang ada di wilayah itu. Analisa potensi kelompok strategis perlu dilakukan untuk mendapatkan data akurat dan data tersebut dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh wilayah tersebut memiliki resources untuk dapat berkembang. Potensi yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk membangun organisasi masyarakat yang kuat dan mandiri.

f. Membangun kesadaran kritis atas isu dan masalah

Kesadaran kritis masyarakat mengenai suatu isu maupun potensi penting untuk dibangun. Ruang lingkup kesadaran masyarakat di wilayah pedesaan atau terbelakang biasanya masih terhegemoni oleh kesadaran naif. Kesadaran naif adalah kesadaran yang melihat permasalahan adalah sesuatu yang *given*. Ya sudah seperti itu keadaannya mau diapakan lagi? Demikian biasanya masyarakat melihat persoalan. Nah, kesadaran naif itu harus dibongkar, diganti dengan kesadaran kritis. Arti kesadaran kritis adalah kesadaran masyarakat untuk selalu mempertanyakan keadaan. Mengapa di desa bisa terjadi banjir, mengapa hutan gundul, mengapa petani selalu dirugikan. Mengapa harga gabah turun? Apa sebabnya? Dan seterusnya. Kesadaran kritis adalah kesadaran yang secara terus menerus mempertanyakan keadaan tertentu atau sesuatu hal secara rasional. Seorang organiser yang baik adalah yang mampu menjembatani proses kemunculan kesadaran kritis di masyarakat.

g. Melakukan analisa dan prioritas isyu

Seorang organiser selalu mengedepankan kesadaran kritis dan potensi masyarakat. Untuk melakukan analisa dan bagaimana memilih prioritas isyu, penting sekali seorang organiser untuk melibatkan masyarakat secara aktif. Yang dimaksud dengan analisa bersama adalah masyarakat dilibatkan mulai sejak mengenali masalah, menganalisis, memetakan dan mengambil kesimpulan kritis. Analisa yang dilakukan sendiri oleh organiser, atau dilakukan oleh seorang ekspert tanpa melibatkan masyarakat hanya menghasilkan kesimpulan sepihak, yang mungkin hasilnya malah bertentangan dengan hasil analisa masyarakat

h. Merancang program aksi untuk penanganan (pemecahan) isyu

Selain digunakan untuk memetakan berbagai masalah, kesadaran kritis masyarakat dapat ditingkatkan untuk merancang suatu program aksi. Perancangan program aksi harus berbasis pada kepemilikan potensi, institusi, kemauan, harapan, dan masalah yang ada di wilayah setempat. Prioritas pertama bagi seorang organiser untuk melakukan fasilitasi perencanaan aksi dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang ada di tempat tersebut. Hindari suatu proses perencanaan yang dirancang dengan menggunakan sumber-sumber potensi yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Program aksi yang dirancang sebaiknya berpedoman pada istilah SMART. (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound). Artinya, desain suatu rencana aksi atau program sebaiknya spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan mempunyai jangka waktu yang dibatasi.

S	:	Spesific (Spesifik dan Focus)
M	:	Measurable (Terukur)
A	:	Achievable (Dapat Dicapai)
R	:	Realistic (Realistis)
T	:	Timebound (Berdasarkan pada target waktu)

i. Melaksanakan program aksi bersama masyarakat (kelompok)

Kalau rancangan program aksi sudah disetujui oleh masyarakat untuk dilakukan, maka hal yang paling urgen dilakukan adalah bagaimana masyarakat dan organiser memanager pelaksanaan program aksi secara tepat waktu. Pelaksanaan program aksi tetap diupayakan untuk melibatkan masyarakat dengan cara pembagian peran dan fungsi yang ada di masyarakat. Entah dia itu berperan sebagai tokoh, institusi, Ornop, anggota partai dalam kerja melaksanakan program aksi harus disesuaikan dengan kapasitas dan ekspertise masing-masing pihak.

j. Refleksi dan evaluasi bersama

Pelaksanaan program aksi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dengan pendamping organiser seringkali tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ada saja hal-hal yang muncul dan menjadi penghambat sehingga rencana aksi tidak bisa dijalankan dengan baik. Sebagai misal, dalam rencana program tidak ada aksi unjuk rasa pada pihak industri pencemar lingkungan yang merugikan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya karena pihak industri tidak memenuhi tuntutan masyarakat akhirnya unjukrasa dilakukan.

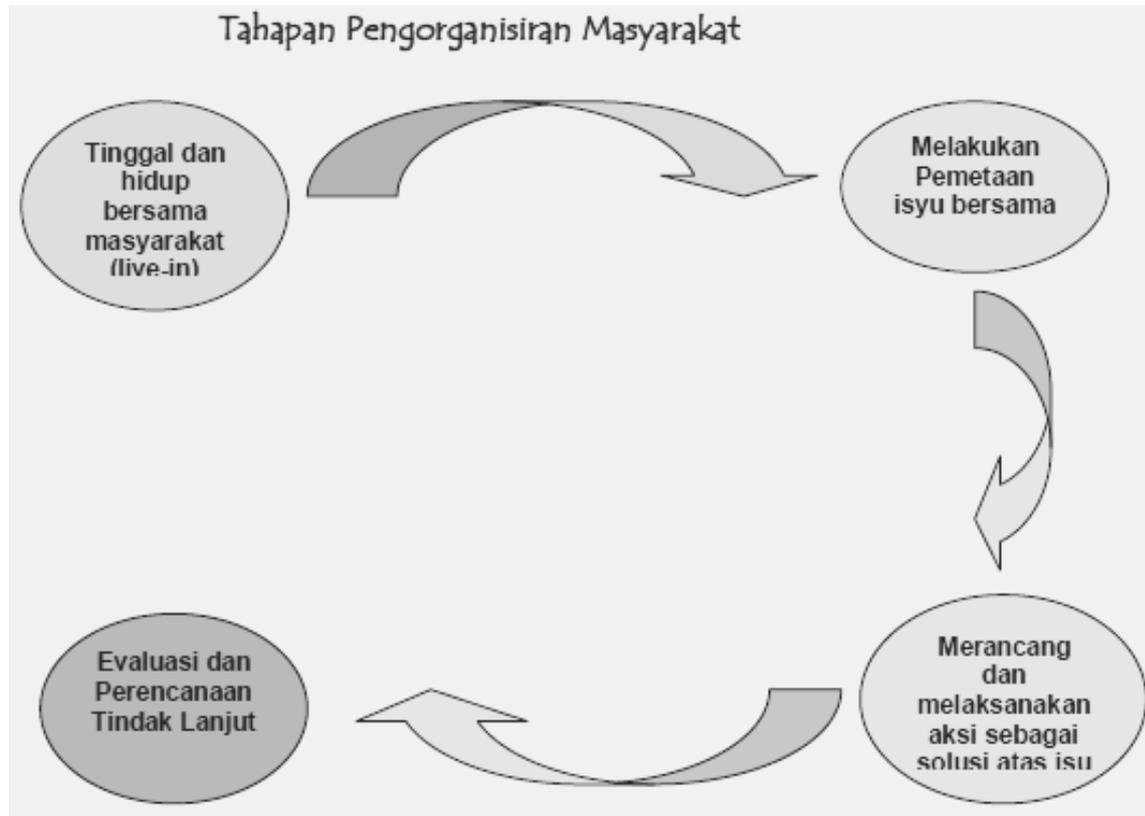
Padahal dalam rencana awal strategi yang akan dilakukan adalah melalui pendekatan kemitraan. Ini misalnya saja. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidak konsistenan antara perencanaan dan pelaksanaan, maka perlu dilakukan refleksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program aski di masyarakat. Tujuan dari refleksi dan evaluasi tidak lain agar pelaksanaan program tidak berjalan melenceng dari perencanaan yang sudah di susun sebelumnya. Strategi refleksi dan evaluasi yang baik adalah dengan pendekatan evaluasi partisipatif. Tekniknya bisa menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD), lokakarya masyarakat dan sebagainya.

k. Menyusun rencana tindak lanjut

Meskipun sudah direflekasi dan dievaluasi secara partisipatif program-program aski yang dilaksanakan oleh masyarakat telah berhasil dan dinilai membawa manfaat besar kepada masyarakat, namun satu tahapan yang tidak boleh ditinggalkan ialah sesudah diadakan refleksi dan evaluasi perlu dilakukan langkah yang disebut rencana tindak lanjut (RTL). Bukan rencana *tidak* lanjut. Sesuai dengan siklus proses pengorganisasian, hasil akhir sebuah evaluasi, meskipun seberhasil apapun, jika tidak ditindak lanjuti dengan aksi lanjutan, seringkali keberhasilan yang sudah dicapai dapat merosot kualitasnya. Seringkali kita terjebak pada kepuasan atas hasil evaluasi. Namun sebaiknya, hasil-hasil evaluasi apakah itu menghasilkan hasil positif tetap harus dilakukan lagi tahapan tindak lanjut. Karena seberhasil apapun suatu program aksi, tetap saja masih terdapat lobang-lobang kekurangan yang menjebak kita ke arah kegagalan.

TAHAPAN PENDAMPINGAN

Tahapan pendampingan merupakan tahapan dimana seorang organiser tetap mendampingi kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbangun dan mandiri. Tahapan pendampingan yang baik adalah tetap berinteraksi dengan aktifitas masyarakat yang sedang menangani suatu masalah atau sedang melaksanakan suatu program tertentu. Tahapan pendampingan berbeda dengan tahapan untuk „mengarahkan“, memberi petunjuk atau memberi instruksi kepada masyarakat. Tahapan pendampingan adalah memberikan fasilitasi menemukan teknik-teknik tertentu manakala kelompok-kelompok masyarakat tersebut menemui jalan buntu „dead-lock ketika hendak memutuskan suatu masalah



4.8.2. PEMETAAN MASALAH DAN ISU

PENGERTIAN

Pemetaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat penting untuk dilakukan oleh seorang organiser bersama - sama dengan komunitas yang didampingi. Inti dari kegiatan pemetaan masalah adalah untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat, dan tepat, mengenai berbagai masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Masalah seringkali tidak bisa terdeteksi dengan baik, bukan karena masalah itu tidak ada, akan tetapi cara pandang penglihatan masyarakat atas masalah biasanya masih bertingkat-tingkat. Ada anggota masyarakat yang mengetahui bahwa hal itu suatu masalah dengan baik, akan tetapi ada anggota masyarakat yang sama sekali buta terhadap masalah. Tidak jarang masyarakat tidak mengetahui apa penyebab, sumber, pelaku kemunculan masalah dengan baik. Bahkan tidak jarang masih banyak anggota masyarakat yang *awam* tentang apa itu masalah.

Proses pemetaan masalah adalah suatu kegiatan merangkum suatu kondisi wilayah tertentu ntuk mendapatkan gambaran masalah secara lebih utuh (situasi dan kondisi) wilayah yang kita petakan. Dengan membuat peta masalah bersama masyarakat, maka kita dapat mengajak masyarakat untuk „mempelajari“ situasi dan kondisi dan masyarakat diajak untuk merenungkan secara lebih jernih peta masalah yang ada diwilayahnya. Peta d igunakan sebagai informasi penting untuk „merancang“ suatu program aksi yang akan disusun di wilayah tersebut. Karena tanpa memahami suatu peta masalah tertentu, maka sulit bagi seorang organiser untuk menentukan cara,

strategi dan teknik memecahkan masalah di masyarakat. Peta masalah penting juga bagi seorang „anggota partai politik“ untuk nantinya data itu dapat digunakan sebagai perencanaan langkah penanganan yang lebih tepat, dan cara penyelesaian yang tepat dapat mendekatkan sang organiser atau anggota partai politik dalam mendapatkan simpati masyarakat.

Peta masalah merupakan data yang terbuka untuk digunakan siapa dan untuk apa saja. Tergantung pada siapa yang akan menggunakan data tersebut. Bagi yang berpikir untuk memajukan masyarakat, peta masalah dapat digunakan sebagai data awal untuk melangkah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. pemetaan juga dapat digunakan untuk melihat secara mendalam adanya masalah yang terindikasi manifest atau masalah latent. Seringkali, masalah-masalah itu sangat sulit untuk digali dengan cara biasa.

Pemetaan yang baik bilamana dibuat dan disusun secara bersama antara organiser dengan masyarakat secara partisipatif. Tetapi jangan dilupakan bahwa peran organiser hanya sebagai „orang luar“ yang memfasilitasi proses pemetaan bersama masyarakat. Organisr bukan penentu apa yang menjadi dan tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Biar masyarakat sendiri yang menemukan peta masalah yang ada di wilayahnya

TUJUAN

1. Tujuan seorang organiser bersama masyarakat untuk melakukan pemetaan masalah terutama sekali adalah untuk mendapatkan informasi, data-data dan gambaran secara utuh mengenai berbagai masalah di masyarakat.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi (latent) dan masalah yang ada (manifest) yang ada di masyarakat.
3. Untuk mengetahui sejauh mana atau daya kritis masyarakat untuk „mengetahui dan memetakan“ masalah-masalah yang tersembunyi dan yang terbuka diantara mereka.

POKOK BAHASAN

1. Pemetaan masalah berdasarkan gambaran lingkungan wilayah
2. Pemetaan masalah berbasis kasus

METODE

1. Studi kasus
2. Diskusi kelompok (Focus Group Discussion)
3. Role play
4. Menggambar peta

LANGKAH-LANGKAH

Untuk melakukan pemetaan berbagai masalah yang ada di suatu masyarakat da beberapa cara dan langkah yang dapat dilakukan oleh seorang organiser. Adapun beberapa langkah dan cara adalah sebagai berikut;

1. Bersama masyarakat menggambar peta umum wilayah (peta berbasis pengetahuan dan ketrampilan masyarakat) yang menyangkut kondisi sarana, prasara, keadaan fisik, lingkungan, kondisi topografi, luas lahan, daerah subur dan mana yang tidak subur, mata air dan sebagainya. Teknik menggambar dapat dilakukan dengan membuat peta ditanah, dikertas (diberi warna warni untuk membedakan mana peta jalan, lahan, masjid dan sebagainya).
2. Bersama masyarakat menggali topik-topik yang banyak dibahas dan banyak dikeluhkan oleh anggota masyarakat setempat. Topik-topik yang digali dapat dilakukan dengan mendengarkan semua informasi yang dimiliki oleh masyarakat termasuk pula keluhan-keluhan yang disampaikan akan tetapi tidak pernah mendapat respon yang positif dari berbagai pihak. Topik-topik yang dibahas oleh masyarakat sebaiknya berbasis pada temuan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam kesehariannya. Misalnya seorang petani yang merasa kesulitan untuk mendapatkan air, harga jual gabah yang dikuasai tengkulak sehingga harga turun, dan seterusnya.
3. Studi kasus dapat dilakukan oleh seorang organiser dan masyarakat untuk memberikan atau menuliskan (menceritakan karena budaya menulis masih awam di masyarakat kita) kasus-kasus yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

ALAT DAN MEDIA

Alat yang digunakan untuk melakukan pemetaan masalah dimasyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan kertas, tanah, papan tulis, dan media yang digunakan misalnya adalah rapat kampung, arisan warga, atau secara sengaja menyelenggarakan suatu diskusi kelompok dan lokakarya desa.

CATATAN

Dalam setiap pemetaan masalah seringkali hasilnya adalah berupa shopping list masalah atau isu yang berkembang di masyarakat. Bagi seorang anggota masyarakat yang kebetulan seorang petani, maka masalah dan isu yang menurut mereka paling penting adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya seorang petani akan mempertahankan argumen bahwa persoalan sempitnya lahan, harga jual gabah yang murah, bahan-bahan sarana produksi padi (saprodi) yang mahal merupakan masalah yang urgen untuk ditangani. Sementara, ada beberapa anggota masyarakat yang bekerja di sektor nelayan pasti akan mengatakan bahwa persoalan kenelayanan yang paling penting. Demikian pula persoalan perburuhan, kerusakan lingkungan, pembabatan hutan, pencemaran dan sebagainya pasti akan muncul ketika seorang organiser melakukan pemetaan bersama masyarakat. Shopping list permasalahan itu yang kemudian harus ditindak lanjuti oleh organiser dan masyarakat untuk menemukan prioritas masalah atau isu yang paling penting untuk segera ditangani

4.8.3. MENENTUKAN PRIORITAS MASALAH DAN ISU STRATEGIS

PENGERTIAN

Pada tahap lalu disebutkan sesudah masyarakat mampu memetakan masalah yang muncul dan tersembunyi di masyarakat, maka perlu ada tindak lanjut bagaimana temuan masalah yang kadang masih berbentuk shopping list (daftar masalah) diorganisir dan dikelola untuk menemukan mana masalah yang paling prioritas dan mana yang menjadi isu strategis di masyarakat tersebut. Langkah penentuan prioritas dan penentuan isu strategis penting dilakukan untuk menentukan arah perencanaan program aksi yang akan dilakukan. Dengan mengetahui prioritas masalah dengan tepat maka akan ditemukan pula rencana aksi yang tepat pula. Hal ini untuk menghindari bahwa masalah yang kurang urgen dan tidak menjadi prioritas penanganan malah dibuat program aksinya. Bagi masyarakat yang plural dan demokratis, tentu banyak perbedaan diantara mereka dalam memandang urgen dan tidak suatu prioritas. Jika perbedaan ini tidak diselesaikan tentu saja akan menghambat seorang organiser untuk membangun langkah strategis dalam menyelesaikan masalah.

TUJUAN

1. Mengajak masyarakat untuk melakukan analisa dan mengelola informasi kedalam bentuk informasi yang terstruktur dan dapat terbaca oleh semua kalangan.
 2. Membantu masyarakat dalam memahami tentang perenang berbagai masalah untuk bersama-sama dinilai, dikaji, dilihat hubungan sebab akibat berbagai masalah secara menyeluruh.
 3. Memudahkan masyarakat untuk menentukan masalah prioritas dan hal-hal yang secara cepat dan segera perlu ditangani dengan mempertimbangkan aspek-aspek potensi sumber daya alam dan SDM, kelembagaan, yang ada sesuai dengan kemampuan mereka.
-

POKOK BAHASAN

1. Teknik memprioritaskan masalah dan isu strategis
 2. Syarat-syarat memprioritaskan masalah dan isu strategis
-

METODE

1. Musyawarah antar anggota di kelompok
 2. Menggunakan teknik matrik
 3. Sharing (FGD)
-

LANGKAH-LANGKAH

1. Pengumpulan Masalah.

Proses pengumpulan masalah dapat menengok kembali pada hasil-hasil kegiatan pemetaan masalah yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana sudah disinggung di langkah sebelumnya bahwa pemetaan masalah dilakukan dengan teknik mapping, gambar, studi kasus dan lain-lain, yang hal itu dapat digunakan sebagai materi dalam tindak lanjut kegiatan pengumpulan masalah. Salah satu teknik untuk pengumpulan masalah adalah dengan teknik brainstorming. Adapun langkah brainstorming adalah sebagai berikut;

- ❖ **GAGASANDIMUNCULKAN SECARA BEBAS**
- ❖ **TIDAK DIBATASI BENARATAU SALAH**
- ❖ **JANGAN DITANGGAPI SESUDAH TERKUMPUL BARU DAPAT DIBAHAS BERSAMA-SAMA**

2. Pengelompokan Masalah (Clustering)

Proses pengelompokan masalah bertujuan untuk menyederhanakan permasalahan yang muncul di masyarakat menjadi kelompok-kelompok sesuai dengan kategori masing-masing masalah. Teknik pengelompokan masalah sebaiknya ditentukan sendiri oleh masyarakat, apa yang menjadi indikator, kategori dan sebagainya. Misalnya pengelompokan masalah disatukan dalam unit/item masalah sosial ekonomi, budaya criminal, lingkungan dan sebagainya. Cara untuk mengkategorikan/ pengelompokan permasalahan sebaiknya diserahkan saja kepada tingkat kekritisian masyarakat.

3. Prioritas Permasalahan dan Isyu Strategis

Masalah yang sudah dikelompokkan dalam kategori yang disepakati oleh masyarakat, yang tentu saja dengan proses pemikiran kritis, maka selanjutnya dapat dilanjutkan dengan mendiskusikan mana-mana permasalahan yang dianggap paling prioritas dan strategis untuk ditangani. Pemilihan prioritas penanganan nantinya yang akan ditindak lanjuti dengan penyusunan program. Program yang dimaksudkan adalah suatu program yang sudah menjadi prioritas, yang apabila tidak atau dilaksanakan akan membawa dampak besar terhadap masyarakat.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa teknik memprioritaskan masalah dapat menggunakan teknik matrik, perankingan atau masalah didiskusikan secara demokratis oleh masyarakat setempat. Dalam kerangka untuk menyusun matrik atau ranking maupun musyawarah antar anggota masyarakat penting sekali untuk dibuat kesepakatan mengenai kriteria dari prioritas permasalahan atau isyu strategis. Misalnya saja kriteria masalah yang diprioritaskan jika masalah tersebut mengandung aspek;

- ❖ Menjadi masalah yang dirasakan oleh banyak orang tidak hanya di wilayah tertentu saja.
- ❖ Masalah yang ada mendesak untuk segera ditangani, karena jika tidak segera ditangani akan membawa dampak (korban) yang lebih besar kepada masyarakat.

- ❖ Masalah dapat ditangani karena ketersediaan potensi sumber-sumber daya alam, SDM, maupun kelembagaan yang ada di masyarakat tersebut.
 - ❖ Apabila tidak segera ditangani akan membawa dampak kerusakan lingkungan yang besar di wilayah tersebut.
 - ❖ Dan tentu saja kriteria diatas hanya contoh, karena kriteria dapat disusun sendiri atas kesepakatan masyarakat setempat.
-

ALAT DAN MEDIA

1. Kertas plano, spidol, papan tulis,
 2. Media diskusi kelompok, FGD, lokakarya masyarakat local, dll
-

CATATAN

1. Bagi seorang organiser proses untuk menyusun prioritas permasalahan maupun untuk menentukan isu strategis memang tidak mudah dilakukan dalam waktu yang singkat. Apalagi jika prosesnya dilakukan dengan cara diskusi kelompok, FGD atau lokakarya, maka akan muncul berbagai perdebatan yang setiap anggota masyarakat akan mengedepankan masalah mereka yang paling penting. Untuk itu, seorang organiser haruslah arif dalam melihat kondisi ini, karena jika kemudian perdebatan dianggap bertele-tele dan organiser kemudian membuat keputusan sendiri mana yang dianggap paling pening dan strategis untuk kemudian pilihan itu diberikan kepada masyarakat, maka dalam jangka panjang hal itu akan merugikan proses pembelajaran di masyarakat.
2. Untuk menentukan isu-isu strategis, seorang organiser bersama masyarakat dapat melakukan sama dengan proses dan langkah yang sama (tidak jauh berbeda) dengan langkah yang dilakukan dalam proses memprioritaskan suatu masalah

4.8.4. KEGIATAN PERENCANAAN PROGRAM

PENGERTIAN

Salah satu langkah penting dari keseluruhan proses pengorganisasian masyarakat adalah bagaimana seorang organiser kemudian mampu mengajak masyarakat merancang suatu perencanaan program yang diharapkan out-put dari program tersebut hasilnya mampu digunakan untuk menyelesaikan masalah serta dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Penyusunan program aksi tidak bisa dipisahkan dengan proses sebelumnya ketika masyarakat sudah diajak untuk memetakan masalah, memprioritaskan masalah, kemudian pilihan masalah tersebut digunakan sebagai alat untuk merancang program aksi.

Dari proses pengorganisasian yang telah dilakukan oleh seorang organiser yang telah mampu mengorganisir permasalahan masyarakat, selanjutnya masyarakat diajak untuk melangkah ke tindak lanjut yaitu merancang program aksi atau perencanaan suatu kegiatan bersama. Dengan telah tersusunnya suatu program aksi berdasarkan atas prioritas masalah dan isu-isu strategis, maka masyarakat akan segera langsung melakukan tindakan-tindakan nyata untuk memecahkan masalah atau melakukan

pembangunan di wilayah mereka. Secara konkrit program aksi yang disusun terdiri dari bagaimana cara kegiatan dilaksanakan, bagaimana strategi akan dilakukan, siapa yang akan terlibat, kapan hal itu dilakukan, dengan dana dan potensi apa, apa yang menjadi out-put dari program akan dijalankan, lalu dengan kelompok mana dan siapa stakeholders akan dilibatkan untuk mensukseskan program aksi tersebut. Semua detail itu yang nantinya akan di susun oleh masyarakat dalam penyusunan program aksi ke depan.

Paling tidak terdapat dua sarana dan bahan yang dapat digunakan untuk menyusun suatu program, yaitu pertama adalah input dari a) penentuan prioritas masalah yang sudah ditemukan oleh masyarakat, b) pilihan isu strategis sebagai titik masuk „ entry-point „ untuk merancang program aksi secara bersama

TUJUAN

1. Perencanaan program bertujuan untuk menghasilkan suatu rencana kerja yang jelas yang dibuat dengan batasan waktu tertentu, yang kemudian digunakan sebagai pedoman kerja masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan atau digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi masyarakat
2. Untuk menggali berbagai sumber informasi dan data potensi-potensi yang ada dimasyarakat yang kemudian digerakkan secara optimal sebagai resources pencapaian tujuan sebuah perencanaan program aksi.
3. Masyarakat menjadi terbiasa dengan pendekatan penyelesaian masalah atau pembangunan secara terprogram dengan jelas, serta masyarakat dapat mengetahui perkiraan hasil yang akan dicapai dengan rencana tersebut. Harus kita akui bersama bahwa konsep perencanaan suatu program aksi atau perencanaan kegiatan tertentu belum membudaya di kalangan masyarakat kita. Apa yang sering dilakukan oleh masyarakat biasanya hanya sebatas bertindak reaktif dengan keadaan sekelilingnya. Dalam konteks budaya Jawa, masyarakat sering bertindak *nrimo ing pandum*, tidak usah *nggege mongso*, dan sebagainya, karena budaya perencanaan yang *tirik-tirik* dan rasional masih dianggap sebagai kemauan untuk melawan arus

POKOK BAHASAN

1. Proses dan Teknis Perencanaan Program
2. Peran Organizer dan Masyarakat dalam Perencanaan Program
3. Output Program

METODE

1. Diskusi Kecil
2. Lokakarya Bersama Masyarakat
3. Pembentukan Kelompok Kerja

LANGKAH-LANGKAH

Suatau perencanaan program yang disusun merupakan suatu hubungan tindak lanjut dari proses-proses sebelumnya yaitu proses pemetaan masalah, prioritas masalah, analisa potensi, yang kemudian kesemua temuan tersebut dianalisa, dihubungkan dan dirangkum untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu perencanaan program.

1. Kegiatan Pemetaan dan Prioritas Masalah

Sebagaimana sudah dijelaskan didepan bahwa proses pemetaan dan prioritas masalah merupakan langkah untuk mencapai perencanaan program. Langkah penetapan suatu masalah atau isu strategis yang akan ditangani kemudian tidak bisa berhenti hanya sebatas itu, karena untuk menyusun program perlu diketahui pula informasi dan data-data mengenai potensi sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan yang ada sebagai sarana pendukung keberhasilan suatu program

Pertama, manakala komunitas petani melakukan pemetaan masalah dan disana ditemukan berbagai masalah, misalnya masalah kekeringan, irigasi rusak, kekurangan pasokan benih, kekurangan pembagian air, harga pestisida naik dan seterusnya, maka komunitas petani bersama dengan organiser sebaiknya berani memilih untuk menentukan prioritas apa yang menjadi masalah utama petani itu. Apakah itu masalah pestisidan, harga naik atau kekurangan air. Jika pilihan pruioritas adalah kekuarangan air, maka perencanaan program yang disusun diharapkan dapat memecahkan masalah kekurangan air di komnunitas tersebut.

Yang kedua, jika masalah air merupakan masalah yang dihadapi oleh semua komunitas petani dan akan berdampak luas pada masyarakat, maka masalah air dapat dikategori sebagai isu strategis di komunitas petani. Isyu kelangkaan air bisa dijadikan alat advokasi bagi organiser untuk mendesakkan pada para pengambil kebijakan untuk memperhatikan masalah tersebut. Isyu strategis barangkali penting diketahui dan dipahami oleh para organiser, termasuk pula anggota partai politik, juga dalam rangka melakukan advokasi petani agar nasib petani-petani mendapat perhatian dari kalangan masyarakat luas maupun para pengambil kebijakan negara.

2. Kegiatan analisa potensi sumber daya dan kelembagaan

Sesudah dilakukan prioritas masalah, maka untuk mencari potensi apa ssaja yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah perlu dilakukan analisa potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalanya saja masalah pokok yang dialami oleh masyarakat setempat adalah kekurangan air untuk pertanian, maka perlu digali apakah di wilayah tersebut terdapat sumber-sumber air, sungai, mata air, danau, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air masyarakat. Tetapi ingat, sesuatu dapat dikatakan potensi apabila sumber daya itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, di wilayah tersebut ada sumber air yang dapat digunakan untuk memecahkan kekurangan air, tetapi ternyata sumber air tersebut sudah dikuasai oleh industri dan masyarakat tidak bisa mengambil air ditempat itu, maka sumber air itu tidak dapat dikategorikan sebagai potensi, karena meskipun tersedia tetapi tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Adapun teknik untuk melakukan analisa potensi SDA, SDM dapat dilakukan dengan teknik yang sama ketika dilakukan pemetaan masalah. Artinya, teknik pemetaan potensi bisa dilakukan dengan cara mapping (menggambarkan peta), riset partisipatif, dan menggali data dari monografi wilayah. Sedangkan untuk teknik analisa potensi kelembagaan dapat dilaksanakan dengan teknik sederhana yaitu dengan membuat *diagram venn*

3. Penyusunan dan perencanaan program

Menyusun sebuah perencanaan penting dilakukan oleh masyarakat sendiri. Fungsi dan tugas seorang organiser adalah sekedar sebagai pendamping „orang luar“ yang tidak boleh mengintervensi apa yang menjadi keputusan rencana masyarakat. Penyusunan perencanaan sebenarnya bukan barang asing di masyarakat, dalam kegiatan sehari-hari mereka sudah melakukannya. Acara „kumbokarnan“ yang disiapkan sebagai langkah awal perhelatan perkawinan merupakan bentuk „perencanaan program“ yang familiar dengan warga masyarakat. Sama dengan itu, maka perencanaan program sesungguhnya adalah bagaimana masyarakat merencanakan program adalah mengisi apa tindakan yang harus dilakukan, oleh siapa, kapan dilakukan, bagaimana hal itu dilakukan, apa indikator keberhasilan dari kegiatan, beberapa dibutuhkan waktu, dana dan siapa yang akan jadi pendukung program tersebut.

Sebagaimana kami tuliskan di depan bahwa untuk menyusun sebuah perencanaan program sebaiknya mengacu pada pedoman SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realsitic, Timebound). Spesifik artinya program yang direncanakan adalah terfokus, pokok, dan penting. Hasil dari program dapat terukur, misalnya, berapa sasaran yang ingin dicapai, berapa kelompok yang akan diorganisir, berapa jumlah orang yang akan terlibat, dan sebagainya. Dapat dicapai, artinya setiap program sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan (dana, SDM,waktu) dengan wilayah setempat, dengan demikian setiap program dapat segera dilakukan sesuai dengan kemampuan setempat. Realistis, ya artinya program tersebut tidak terlampau ngoyoworo. Sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang ada, jadi realistik. Sedangkan time bound memberikan kita pengertian bahwa setiap program sebaiknya diberi batas waktu yang jelas. Kapan dimulai dan kapan berakhir.

4. Monitoring dan Evaluasi

Satu hal terpenting dari aspek perencanaan program adalah kegiatan monitoring dan evaluasi (refleksi). Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mendeteksi dan mengetahui seberapa jauh rencana program dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan apa saja kendala dan hambatan yang ditemukan sehingga program tidak berjalan. Aspek monitoring dan evaluasi (monev) tidak boleh dilupakan karena hal ini penting untuk mengukur sejauh mana program sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Teknik dan pendekatan monev ini bermacam-macam, mulai dari teknik riset yang dilakukan oleh orang luar (ekspert, konsultan) dan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan pendekatan monevpartisipatif.

ALAT DAN MEDIA

1. Kertas plano
 2. Kertas metaplan
 3. Spidol, papan tulis, dan lain-lain
 4. Media menggunakan rapat desa, lokakarya renstra
-

CATATAN

1. Untuk penyusunan perencanaan program disarankan dengan menggunakan teknik yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, misalnya dengan menggunakan kerangka perencanaan dalam bentuk matrik. Bahasa untuk organiser juga penting untuk disederhanakan, istilah asing perlu dikurangi, misalnya menggunakan istilah feasibility studi, logical framework, dan sebagainya diusahakan untuk dibumikan.
2. Dalam menyusun perencanaan seorang organiser perlu memperhatikan munculnya kepentingan-kepentingan individu, kelompok dan komunitas tertentu yang hanya ingin menguntungkan diri mereka sendiri. Misalnya, untuk membangun jalan, mereka hanya mengusulkan didepan rumahnya, diwilayahnya dan sebagainya.
3. Tidak jarang dalam perencanaan diantara masyarakat sering berdebat tentang banyak hal misalnya, apa yang harus dibangun, mana yang lebih penting, besarnya dana, dan sebagainya akan selalu menimbulkan potensi konflik di masyarakat. Nah, untuk itu, teknik rekonsiliasi (resolusi konflik) perlu digunakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul ketika menyusun sebuah perencanaan program

4.8.5. ANALISIS POTENSI KELEMBAGAAN

PENGERTIAN

Analisa potensi kelembagaan merupakan salah satu teknik untuk mengetahui potensi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Yang dimaksud lembaga adalah organisasi-organisasi, wadah, paguyuban, kelompok seni atau lembaga apapun namanya, yang dijadikan sarana oleh sekelompok masyarakat dalam mencapai tujuan secara bersama-sama. Ada lembaga yang mandiri, dibentuk oleh masyarakat dan ada lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah LKMD, PKK, HKTI, partai politik, swasta dan sebagainya. Dalam merancang suatu program pembangunan masyarakat atau *program aksi*, penting bagi seorang organiser untuk mengenal potensi kelembagaan dalam mengoptimalkan suatu rencana program di masyarakat tersebut.

Analisa potensi kelembagaan harus dilakukan paling tidak untuk mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga yang ada itu nantinya dapat dipotimalkan sebagai potensi apakah sebagai mitra, kawan, pendukung atau justru sebagai penghambat program yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam analisis yang lebih sederhana, apa potensi lembaga tersebut terhadap masyarakat. Apakah lembaga tersebut dekat dengan masyarakat? Dibutuhkan? Sering membantu? Atau malah memanipulasi kepentingan masyarakat? Sebagaimana diketahui bahwa tingkat penerimaan dan kedekatan masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada sering tidak sama.

Analisa potensi pada dasarnya digunakan selain untuk melihat kedekatan, penerimaan, tetapi juga untuk melihat hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat

TUJUAN

1. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi tentang hubungan kelembagaan, manfaat, dan mudarat lembaga-lembaga dengan masyarakat.
 2. Mempelajari keterlibatan masyarakat dalam lembaga tersebut.
 3. Menggali informasi tentang peran dan fungsi lembaga dalam membantu pemberdayaan di masyarakat
-

POKOK BAHASAN

1. Mempelajari hubungan antara lembaga-lembaga dengan masyarakat setempat.
 2. Menggali potensi lembaga-lembaga untuk mendukung pelaksanaan program yang sudah disusun oleh masyarakat.
-

METODE

1. Menggambar bagan (teknik diagram venn)
 2. Diskusi kelompok
 3. Pleno
-

LANGKAH-LANGKAH

1. Organiser menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan analisa potensi kelembagaan dan manfaatnya kepada masyarakat. Mengapa masyarakat diajak untuk membuat gambar, tidak mendiskusikan saja bagaimana bentuk, pola dan hubungan kelembagaan di masyarakat. Pada dasarnya teknik membuat bagan dengan gambar hanya untuk memudahkan saja bagi masyarakat untuk melihat relasi antara lembaga dengan masyarakat.
2. Bersama dengan masyarakat membuat daftar lembaga-lembaga yang ada, dan mendiskripsikan profil lembaga-lembaga tersebut dalam forum. Selanjutnya setiap lembaga diberi symbol berupa lingkaran. Untuk lingkaran masyarakat ditaruh ditengah bagan. Gambar yang lingkarannya besar mensymbolkan kedekatan dengan masyarakat. Jarak yang dibuat semakin dekat artinya semakin dekat dengan masyarakat.
3. Mengajak masyarakat menggambar bagan (lingkaran besar dan kecil) untuk menandai profil lembaga yang sudah diidentifikasi. Misalnya, lembaga yang dekat dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat diberi tanda lingkaran yang lebih besar. Semakin besar lingkaran maka lembaga tersebut artinya dikenal dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, untuk memberikan tanda kedekatan dengan masyarakat disymbolkan dengan kedekatan gambar lingkaran-lingkaran dengan masyarakat.

4. Sesudah gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran dibuat, sebaiknya organiser mengajak masyarakat untuk mendiskusikan apa arti lingkaran-lingkaran tersebut bagi pembangunan masyarakat. Atau diskusikan mana lembaga yang penting dan tidak penting bagi masyarakat.
 5. Diskusikan dengan masyarakat apakah lembaga-lembaga yang sudah dilingkari dengan lingkaran besar tersebut betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Apakah lembaga-lembaga tersebut dapat dioptimalkan sebagai pendukung program yang direncanakan oleh masyarakat. Kalau ya apa peran yang akan diberikan pada lembaga tersebut? Apa bentuk dukungan dan partisipasi lembaga tersebut pada rencana program masyarakat. Ajak masyarakat untuk mendiskusikan lebih detil dan kritis peran-peran lembaga tersebut. Lalu biarkan masyarakat untuk membuat kesimpulan terhadap hasil analisa potensi kelembagaan dikaitkan dengan rencana program mereka
-

ALAT DAN MEDIA

1. Kertas, spidol, papan tulis
 2. Media diskusi kelompok
 3. Musyawarah masyarakat
 4. Dan lain-lain
-

CATATAN

1. Barangkali alat bedah potensi kelembagaan dengan teknik menggambar bersama masyarakat tidak memberi kesan akademik dan kurang ilmiah. Apalagi bagi seorang organiser yang berangkat dari insitusi partai politik atau seorang sarjana dari perguruan tinggi. Namun perlu diingat bahwa komunitas yang kita hadapi di masyarakat mempunyai kemampuan intelektual dan akademik yang tidak sama, apalagi jika constituent kita berada di wilayah pedesaan, masyarakat pinggir hutan, atau komunitas nelayan yang masih „miskin“. Maka bentuk pembelajaran dengan gambar seringkali lebih efektif dibanding dengan metode ceramah dan indoktrinasi.
2. Teknik membuat gambar bagan menurut pengalaman lebih komunikatif dibandingkan dengan teknik ceramah. Tapi perlu diingat, tidak semua masyarakat mau begitu saja dan menerima teknik yang kita sarankan. Hal ini sering terjadi pada kelompok-kelompok elit yang merasa sudah pintar dan mumpuni dibanding dengan yang lain

4.8.6. TEKNIS DAN STRATEGI PENGORGANISASIAN

MEMILIH ENTRY POINT

Ketika seorang organiser sudah live-in di masyarakat, seringkali mengalami kebingungan untuk berbuat sesuatu di suatu wilayah desa, Kecamatan atau di wilayah Kabupaten tempat dia diterjunkan. Sebelum diterjunkan di desa, biasanya organiser sudah memiliki gagasan ideal (planning) untuk membentuk dan menggerakkan masyarakat desa untuk menangani suatu masalah tertentu. Seringkali gagasan yang ada adalah gagasan yang besar-besaran dan spektakuler. Padahal ketika organiser masuk ke desa, ternyata yang dialami di desa itu *ya adem ayem* dan tenang-tenang saja. Lalu bagaimana memulai sesuatu di wilayah yang adem-ayem seperti itu? Untuk memulai sesuatu seorang

organiser sebaiknya memilih kegiatan sebagai pintu masuk - entry-point. Contoh kegiatan entry point adalah, misalnya, mengadakan kegiatan pelatihan beternak bagi petani peternak, membuat pupuk kompos, pra-koperasi ibu-ibu dan sebagainya. Kegiatan entry-point merupakan strategi agar seorang organiser mendapat *pijakan awal* untuk dikenal, dipercaya dan diterima oleh masyarakat setempat

MEMULAI DENGAN YANG KECIL

Entry point atau pintu masuk tidak perlu dilakukan dengan kegiatan berskala besar yang menghabiskan energi, serta dana yang besar. Mulailah dengan kegiatan yang kecil-kecil, tetapi bermanfaat bagi masyarakat setempat. Sebagai contoh, entry-point yang kami lakukan di sebuah desa di Jawa Timur yaitu dengan mengadakan lomba pekarangan pada saat tujuhbelas Agustusan. Pemenang lomba diberi hadiah kambing dan burung puyuh. Ternyata dengan mengadakan lomba pekarangan ini diterima dan mendapat simpati masyarakat dan selanjutnya kami dengan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Jangan mulai masuk ke masyarakat dengan tema-tema besar dan mengagetkan. Misalnya melawan penggusuran tanah, isu land reform, penggantian kepala desa dan sebagainya. Kalau toh itu merupakan tujuan kita, lakukan dengan pelan dan tidak kentara. Yang penting diterima dan dipercaya dulu oleh masyarakat

MENDAHULUKAN YANG TERBELAKANG

Seperti yang dikatakan Robert Chambers, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mendahulukan yang terbelakang (*the last first*). Karena merasa didahulukan maka mayoritas masyarakat miskin dan pinggiran pasti akan mendukung apa yang dilakukan oleh seorang organiser. Seorang organiser patut megikuti anjuran bijak tersebut

Alangkah indahnya jika organiser yang datang di masyarakat kemudian bertindak mengutamakan orang-orang yang terbelakang, „wong-cilik“ dan orang-orang pinggiran yang selama ini tidak tersentuh pembangunan. Mendahulukan komunitas yang terpinggirkan bukanlah sikap *romantisme* seorang pejuang, tetapi pendekatan ini sangat strategis bagi organiser yang ingin mendapatkan dukungan masyarakat kecil. Mengapa ini penting, karena selama ini organiser sering terlena ketika di suatu wilayah sudah mempunyai jaringan dengan tokoh-tokoh atau kelompok elite masyarakat. Dengan menggandeng elite diharapkan masyarakat akan mengikutinya. Saya kira seorang organiser sejati harus berani untuk merubah strategi elite approach ini

MEMBUMIKAN BAHASA LANGIT

Seorang organiser pemula sering bangga jika dapat memamerkan kepiawaian diri mereka dalam menggunakan bahasa- bahasa intelek dan kata asing did epan forum pertemuan masyarakat. Membuat terheran-heran dan kekaguman masyarakat atas bahasa langit yang dikenalkan merupakan kepuasan tersendiri bagi pejuang pemula ini. Dengan bahasa langit seorang organiser ingin dilihat sebagai orang yang modern, berpendidikan dan tahu segala-galanya. Tapi pengalaman menunjukkan bahwa bahasa yang melangit sering tidak dipahami oleh masyarakat awam, apakagi masyarakat kecil yang miskin. Komunikasi lewat gambar, gerak drama, potongan kertas, foto-foto dan permainan peran yang sederhana

lebih mudah ditangkap dan diterima oleh masyarakat. Alangkah baiknya jika komunikasi organiser dibumikan dan disederhanakan sehingga bahasa organiser jadi lebih komunikatif dengan masyarakat

KETERAMPILAN BERDAYA GUNA

Meskipun seorang organiser dituntut berpengetahuan luas dan bijak, akan tetapi lebih baik lagi apabila organiser memiliki ketrampilan praktis yang dapat berdaya guna langsung membantu kesulitan masyarakat. Kemampuan pertukangan, akupuntur, ketrampilan membuat alat-alat pertanian, mengolah kompos, juru dakwah, pokoknya kemampuan yang berhubungan dengan kebutuhan praktis sehari-hari seringkali dibutuhkan oleh masyarakat. Kemampuan organiser untuk dapat memnuhi kebutuhan praktis masyarakat merupakan modal sosial yang besar untuk mendapatkan simpati dari komunitas masyarakat tersebut

KEPERBIHAKAN PADA YANG LEMAH

Kata orang pandai tidak ada sesuatu yang netral di dunia ini. Setiap pemikiran, langkah dan tindakan seseorang pasti didorong oleh latar belakang oleh pandangan dan kepentingan tertentu dari orang tersebut. Jadi, tidak ada yang netral dari tindakan kita ini. Selalu ada keberpihakan. Berpihak pada keuntungan. Berpihak pada kelompok atas, kepada penguasa, wakil rakyat, berpihak pada pengusaha dan seterusnya. Nah, bagi seorang organiser yang baik dituntut kejelasan keberpihakannya (komitment) mereka pada keadilan, kebajikan dan kebenaran. Sayangnya, kaum lemah, kaum duafa dan kaum terpinggirkanlah yang sering kali menjadi korban ketidakadilan, ketidakjujuran dan ketidakbenaran dari kelompok penindas. Oleh sebab itu wajar jika seorang organiser harus berpihak pada mereka-mereka yang selalu menjadi korban ketidakadilan dan kesewenang-wenangan

JANGAN LUPAKAN KAUM PEREMPUAN

Akibat struktur sosial dan politik yang tidak adil, orang miskin dan lemah sering terlempar menjadi kaum pinggiran. Tapi bicara soal pinggir meminggirkan, masih ada yang lebih terpinggirkan lagi jika dibandingkan dengan kaum miskin, yaitu kaum perempuan. Apa benar demikian? Coba saja lihat, jika ada pertemuan warga tingkat RT, RW dan di kalurahan, meskipun dia datang dari komunitas miskin, tetap saja yang datang bapak yang kaum laki-laki, bukan istrinya yang perempuan. Dalam keluarga miskinpun, peluang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat tetap saja diwakili bapak-bapak kaum laki-lakinya. Jadi, kapan kaum perempuan mendapat peluang untuk sama-sama bermasyarakat dengan kaum laki-laki?

Jika pendekatan terhadap perempuan dilakukan secara optimal dan membawa manfaat yang besar pada mereka, bukan tidak mungkin potensi perempuan akan memiliki arti strategis bagi pengorganisasian masyarakat. Apalagi jika dilihat data statistik nasional menunjukkan jumlah perempuan lebih besar ketimbang kaum laki-laki, maka potensi pelibatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat tidak boleh lagi ditinggalkan.

Berdasarkan hal itu, kiranya perlu diupayakan kiat untuk melibatkan perempuan dalam ruang publik/pembangunan, yaitu dengan strategi ; a) mulai dengan kegiatan (entry-point) yang kecil dan menyentuh kebutuhan perempuan, b) galang pertemuan-pertemuan khusus kaum perempuan untuk membahas isu-isu yang dekat dengan kebutuhan mereka, misalnya soal kesehatan reproduksi, pendidikan anak, peningkatan pendapatan keluarga, dan seterusnya, c) mulai ajak mereka untuk mendiskusikan hal-hal keluarga yang terkait dengan permasalahan publik, d) eksposure (berkunjung) ke lain desa, kampung, kota, yang tujuannya untuk meningkatkan wawasan dan kepercayaan diri mereka

MEMBANGUN PRODUK UNGGULAN

Orang luar menyebut sebagai „best-practise“. Best praktis adalah out-put unggulan yang menjadi hasil kinerja pengorganisasian seorang organiser di suatu wilayah. Kadang di dalam masyarakat tidak hanya satu organiser, atau satu golongan tertentu yang melakukan kegiatan sama dengan kita semua. Misalnya saja, seorang organiser kebetulan mengerjakan program yang sama dengan organiser yang berasal dari institusi lain (atau seorang anggota partai A kebetulan mengerjakan program yang sama dengan anggota partai B) di suatu wilayah tertentu. Contohnya adalah pihak- pihak organiser mengerjakan kegiatan pengorganisasian atau mengelola suatu isu atau masalah yang sama, misalnya isu pertanian, nelayan, kehutanan, buruh, dan sebagainya di suatu wilayah yang sama, lalu apa langkah yang sebaiknya diambil oleh organiser menghadapi situasi tersebut?

Langkah pertama kiranya diupayakan supaya tidak muncul konflik diantara organiser yang ada di wilayah itu. Mungkin kedua belah pihak organiser ketemu dan membangun kekuatan bersama. Bergabungnya kekuatan-kekuatan pembela masyarakat akan semakin memperkuat posisi masyarakat menghadapi masalah. Tapi, memang hal ini agak berbeda dengan organiser yang berasal dari kalangan partai politik. Karena tujuan partai politik biasanya adalah untuk menarik calon konstituent agar tertarik pada partai politik tersebut. *Nah*, ketika pihak organiser suatu partai politik tertentu bertemu dengan organiser dari partai lain pada ruang, waktu dan wilayah yang sama. Apa yang sebaiknya dilakukan? Jika organiser menghadapi situasi tersebut maka solusi yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai berikut ;

- ❖ Lakukan kajian ulang pada isu yang sedang dikelola
- ❖ Cari dan tentukan aspek-aspek tertentu yang belum disentuh oleh organiser dari kelompok lain
- ❖ Cari dan temukan solusi-solusi yang lebih atraktif, praktis dan memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat
- ❖ Rubah dan temukan fokus isu yang berbeda. Misalnya saja, sama-sama menggarap isu di bidang pertanian, mungkin organiser bisa mencari aspek-aspek isu yang belum tergarap oleh organiser lain, apakah isu itu mengenai kebijakannya, proses produksi, dampak lingkungan, mengkampanyekan teknologi tepat guna dan sebagainya.
- ❖ Cari dan temukan solusi sebagai yang akhirnya melahirkan produk unggulan dari program (best-practice) kita di masyarakat petani.

Misalnya saja jika organiser dari institusi lain (partai politik lain) mengkampanyekan isu mengenai rendahnya harga gabah, mungkin kita akan berusaha untuk mengkampekan tentang isu pertanian organik. Meskipun isu yang diusung sama, tetapi aspek yang kita kaji dan kita lakukan berbeda. Isu pertanian organik akan menjadi

produk unggulan dari program (best-practice) pengorganisasian masyarakat yang kita lakukan

4.8.7. TEKNIK DAN STRATEGI KAMPANYE

Apabila komunikasi dipandang dalam arti luas, tidak hanya diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan saja, akan tetapi juga kegiatan perorangan maupun institusi untuk menyampaikan pesan, tukar menukar data, fakta, ide, cerita, gagasan dan program dalam sistem sosial masyarakat, maka komunikasi dapat kita mengerti sebagai suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengemasan dan penyebaran informasi/data kepada masyarakat luas. Dalam era modern seperti sekarang ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat. Komunikasi merupakan proses dimana masyarakat memberikan dan mendapatkan suatu pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kehidupannya. Komunikasi telah mengantarkan manusia ke peradaban yang maju dan modern. Banyak pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, karena adanya sistem komunikasi modern sekarang ini. Akibat kemajuan sistem komunikasi, dunia diibartkan sebuah kampung saja.

Mengingat arti penting dari komunikasi, maka sistem dan teknik berkomunikasi selalu dikembangkan oleh manusia agar dapat memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Sistem komunikasi yang modern sekarang ini sangat diperlukan, tidak saja oleh individu, tetapi juga oleh berbagai insititusi-institusi seperti Pemerintah, militer, perguruan tinggi, partai politik, termasuk pula organiser di masyarakat agar semua pesan, berita, tindakan yang mereka lakukan diterima dan dipahami oleh masyarakat (target group). Bentuk komunikasi sendiri bermacam-macam, ada yang bentuknya massif, individul, dialogis, top-down, partisipatif, dan masih banyak lagi. Kampanye merupakan salah satu bentuk atau jenis komunikasi massa. Kampanye adalah jenis komunikasi massa yang didisain dan disengaja untuk menyampaikan berita, pesan, informasi kepada masyarakat luas. Tujuan kampanye sendiri bermacam-macam tergantung pada siapa dan apa out put yang ingin dicapai. Ada yan gtujuannya adalah untuk mempengaruhi, mencari dukungan, mendidik, menyadarkan, mencari respon, menarik konsumen, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tidak salah jika ketrampilan teknik dan stretagi kampanye penting dimiliki oleh seorang oganiser. Ada beberapa teknik kampanye yang kami paparkan dibawah ini (ada pengalaman yang pernah kami lakukan dan penting kami share-kan disini), diantaranya

MEDIA RUTIN

Yang kami maksud dengan media rutin adalah media-media kampanye yang sejak lama kami gunakan dalam melakukan kampanye dalam proses pengorganisasian masyarakat yaitu dengan memproduksi:

- ❖ Leaflet Buletin
- ❖ Koran Desa
- ❖ Spanduk-Spanduk
- ❖ TV Lokal
- ❖ Koran
- ❖ Radio
- ❖ Aksi unjuk Rasa
- ❖ Seminar Lokakarya
- ❖ Kesenian Tradisional (Wayang, Ketoprak, Drama, dll)

- ❖ Pertemuan Masyarakat
- ❖ Pos Informasi dan pengaduan Masyarakat Radio
- ❖ TV Komunitas
- ❖ Diklat-Diklat

MEMBANGUN TRADEMARK

Inti kampanye adalah bagaimana kita mengirim informasi kepada publik yang kemudian mendapat respon (dukungan, simpati, partisipasi) dari masyarakat luas untuk menerima, atau mendukung gagasan program kita. Kampanye dapat dilakukan dengan menggunakan media-media rutin seperti yang kami sebut diatas. Namun di beberapa tempat, media-media untuk melakukan kampanye dilakukan dengan berbagai teknik dan strategis yang bervariasi. Salah satu bentuk kampanye adalah bagaimana sebuah lembaga membentuk citra diri yang spesifik, khas, dan belum dilakukan oleh orang lain, atau mencoba berbuat berbeda dengan orang lain. Bagaimana strategi membentuk citra diri ini yang juga kami sebut sebagai cara membangun *trade-mark*.

Dewasa ini beberapa Ornop juga mulai kampanye untuk membangun citra diri, dengan melakukan program-program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya spesifik, khas, belum banyak dilakukan oleh orang lain, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Model kampanye dengan membangun trade mark ini tidak hanya dilakukan oleh Ornop, di beberapa negara hal itu juga dilakukan oleh Pemerintah atau partai politik. Sebagai contoh ; Di Brasil terdapat kota yang namanya Porto Alegre. Kota yang kecil ini sekarang terkenal didunia karena memiliki program yang disebut sebagai "*Participatory Budgeting*". Participatory budgeting merupakan program untuk membangun ekonomi masyarakat dengan melibatkan kalangan grass-root dalam menyusun dan membelanjakan anggaran daerah (APBD). Yang menarik, program ini diinisiasi oleh Partai Buruh, pimpinan Lula yang sekarang menjadi presiden Brasilia. Participatory Budgeting menjadi *trade mark* dan *tema kampanye program partai buruh*, yang kemudian menjadi terkenal tidak hanya di Brasilia saja, akan tetapi juga didunia.

Contoh yang lain, di Thailand beberapa Ornop sudah mampu mempengaruhi perhatian dan dukungan masyarakat lewat program yang namanya " Magic Eyes" . Magic Eyes merupakan tema kampanye untuk konsent pada isu lingkungan yang sekarang menjadi trade mark kota Bangkok, karena keberhasilan menggalang dukungan masyarakat untuk peduli padalingkungan.

Termasuk kota Solo, selain sejak dulu selalu dikenal dengan mitos kota perusuh, sekarang ciri khas perusuh mulai berubah sejak Solo mengubah konsep pembangunan sentralistik menjadi model partisipatif. Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan tema kampanye Pemerintah dalam meningkatkan citra dan penerimaan warga Solo. Trade mark Solo sebagai kota partisipatif sekarang mulai dikenal oleh kota lain di Indonesia, termasuk beberapa kota dari negara lain.

DIRECT ACTION

Direct action merupakan kegiatan advokasi yang sering digunakan oleh Green Peace dalam mengkampanyekan isu-isu lingkungan. Misalnya isu mengenai pembantaian ikan paus, anti limbah nuklir, dan sebagainya. Direct action merupakan kegiatan kampanye biasa. Yang membedakan dengan kampanye-kampanye lain adalah model yang digunakan. Intinya, direkt aksi merupakan kampanye yang memadukan antara advokasi dan entertainment. Direct Action biasanya dilakukan secara serentak, dengan memobilisir media (TV, pers, radio), seminar-seminar, lobby, wawancara dengan stake holders (yang berkepentingan) menyelenggarakan diskusi-diskusi, pemasangan poster-poster, leaflet dengan menggerakkan para simpatisan dan aktivis lingkungan, *dalam waktu yang sama, serentak dan bersamaan.*

Titik dan fokus yang menjadi inti kampanye adalah aktivitas-aktivitas yang mampu menarik perhatian publik, tetapi tidak dilakukan dengan kekerasan, misalnya dengan memasang balon ikan paus raksasa di depan gedung putih. Menghadang kapal-kapal pengangkut sampah nuklir ditengah laut, dan seterusnya. Aksi-aksi yang dilakukan adalah untuk menarik publik tetapi dengan bentuk kegiatan yang atraktif, menarik, bersifat menghibur, tetapi tidak meninggalkan substansi penyampaian pesan dan isi advokasinya kepada publik

CATATAN-CATATAN

Dari beberapa masukan dan pengalaman yang selama ini kami dapat, sebuah kampanye yang baik selalu memiliki unsur dan dampak:

- ❖ **PESANDITERIMA**
- ❖ **DISEBAR LUASKAN OLEH PENERIMA**
- ❖ **MENJADI BAHAN DISKUSI DIPERDEBATKAN**
- ❖ **MERUBAH PERSEPSI**
- ❖ **MERUBAH PERILAKU**
- ❖ **MUNCUL IDE/GAGASAN BARU**
- ❖ **MUNCUL PRODUK BARU**

TYPOLOGI PENGORGANISASIN MASYARAKAT

NO	CIRI-CIRI	KONVENSIONAL	PROGRESIF	PEMBEBASAN
1	Fungsi organisier	Konformis/mempertahankan status quo	Untuk mengadakan reformasi	Untuk mengadakan transformasi
2	Tujuan	Menghambat perubahan, menjaga stabilitas nasional	Merubah rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (people) society	Merubah rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyat (society - people)

Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka

NO	CIRI-CIRI	KONVENSIONAL	PROGRESIF	PEMBEBASAN
3	Strategi	Mengajar rakyat untuk menerima dan merasa aman dalam situasi sosial tanpa perubahan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat tersebut	Bekerja untuk peningkatan hal-hal tertentu tanpa melakukan perubahan aspek- aspek yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat	Aktif menentang ketidakadilan sosial, ketimpangan dan KKN dan bekerja untuk melakukan perubahan mendasar
4	Perhatian terhadap rakyat kecil	MENGAWASI mereka khususnya rakyat kecil, graas root (desa-kota)	DAMAI dan LUNAK terhadap mereka khususnya mereka yang dapat mendorong protes atau revolusi	MEMBEBASKAN mereka dari penindasan sistemik, dan eksploitasi
5	Pendekatan Umum	Otoriter dengan melakukan kontrol dari atas ke bawah Secara kaku dengan pendekatan kekerasan (militeristik)	Paternalistik dengan melakukan kontrol dari atas Ke bawah tetapi dengan cara yang bijak	Humanistik dengan pendekatan demokratis dan kontrol oleh rakyat
6	Efek Terhadap Rakyat kecil dan masyarakat	Opresif – wewenang pusat secara kaku, birokratis, memberikan sedikit/tidak memberikan kesempatan partisipasi kepada terdidik/masyarakat	Desepatif – berpretensi, suportif, tetapi menolak perubahan nyata di masyarakat	Suportif – mendorong rakyat kecil untuk menemukan jalan untuk lebih memahami keberadaan mereka sendiri
7	Bagaimana masyarakat/ target group dilihat	Pada dasarnya pasif diibaratkan sebagai tong kosong yang harus diisi dengan pengetahuan standart Kedua adalah terdidik/rakyat dijejali 'ilmu' teus menerus	Pada dasarnya tidak bertanggung jawab mesti diperlakukan secara hati-hati	Pada dasarnya aktif mampu mengambil tugas dan menjadi percaya diri
8	Bagaimana sikap terdidik/masyarakat terhadap organiser	TAKUT- organiser adalah orang yang tahu segalanya, boss, absolut dan berposisi terpisah dengan masyarakat	MENGHORMATI- organiser/fasilitator adalah bersahabat, ngemong, menjadi mediator, seperti orang tua yang tahu apa yang terbaik bagi terdidik atau	PERCAYA – organiser adalah fasilitator yang mendorong setiap orang untuk mencari dan menemukan jawaban masalah secara bersama- sama

NO	CIRI-CIRI	KONVENSIONAL	PROGRESIF	PEMBEBASAN
9	Siapa yang menentukan apa dan siapa yang harus dipelajari?	Materi pendidikan baku dari pusat	Materi pendidikan baku tetapi berangkat dari bahan-bahan lokal	Organiser/Fasilitator dan masyarakat bersama-sama menentukan materi dan bahan-bahan untuk pendidikan
10	Metode Mengajar	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Organiser ceramah ❖ Masyarakat mengajukan pertanyaan sedikit ❖ Dari atas ke bawah ❖ Sering membosankan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Organiser/fasilitator mendidik mengajari dan menyenangkan di terdidik/masyarakat ❖ Dialog dan diskusi kelompok tetapi guru/fasilitator tetap yang menentukan jawaban benar salahnya 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Dialog terbuka dengan beberapa pertanyaan dan jawaban yang bersumber dari pengalaman masyarakat/terdidik sendiri ❖ Setiap orang saling belajar mengajar
11	Cara Belajar yang utama	PASIF – si terdidik/masyarakat menerima pengetahuan secara given. Memorisasi/hafalan fakta-fakta	Aktif – tetapi hafalan masih tetap menjadi dasar dari pendidikan masyarakat	AKTIF – setiap orang ikut menyumbang. Belajar melalui bekerja berdasarkan atas pengalaman
12	Teori-teori penting atau konsep-konsep yang dipelajari	<p>Kekuatan dan kebenaran dari kondisi sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sejarah nasional sehingga sering terdistorsi tentang kepahlawanan lokal ❖ Aturan-aturan ❖ Kesetiaan ❖ Meskipun kadang tidak praktis dan kurang relevan tetapi tetap diajarkan sebab sudah ada sejak dulu ❖ Mempelajari kata-kata besar yang tidak perlu dan informasi yang kurang faktual 	<p>Pendekatan berintegrasi dengan pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bagaimana memanfaatkan pelayanan pemerintah dan para profesional ❖ Mengisi kekurangan ❖ Keterampilan praktis dan berjangka pendek 	<p>Analisis kritis atas kondisi social</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ masyarakat ❖ Kesadaran sosial ❖ Keterampilan mengajar bersama, komunikasi dialogis, organisasi ❖ Perencanaan bersama ❖ Mengungkapkan sejarah dan konsep lokal ❖ Memberdayakan manfaat adat/locality ❖ Mengembangkan metode-metode grassroot dan wong cilik agar mereka menjadi kuat dan mandiri
13	Aliran pengetahuan dan gagasan	Sekolah Guru Murid/terdidik/masyarakat (satu arah)	Sekolah Guru Terdidik/masyarakat	Sekolah Murid/Masyarakat Terdidik (dua arah)
14	Ruang belajar	kelas	Kelas dan situasi lain yang terkontrol	Kelas adalah kehidupan itu sendiri. Hidup adalah sekolah.
15	Bagaimana ruang belajar diatur?			

4.9. BAHAN TAYANG

Pelatihan Untuk Pelatih

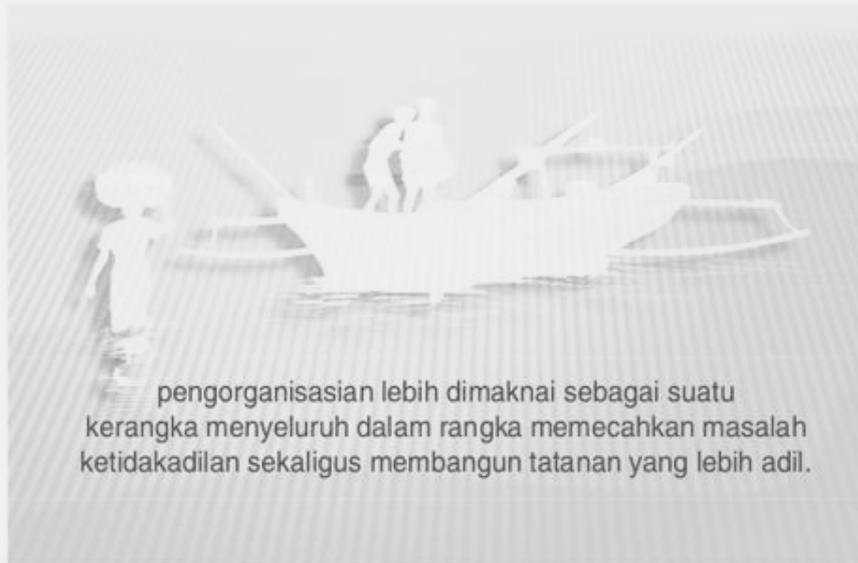
Pengorganisasian Komunitas
Untuk Program Green Prosperity-KpSHK_MCAI
Juli 2016



Istilah 'Pengorganisasian Rakyat' atau yang lebih dikenal dengan 'Pengorganisasian Masyarakat'. Mengandung pengertian yang luas dari kedua akar katanya. Istilah rakyat tidak hanya sekedar mengacu pada perkamaan (*community*) yang khas dalam konteks yang lebih luas, juga pada masyarakat (*society*) pada umumnya.



pengorganisasian lebih dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan sekaligus membangun tatanan yang lebih adil.

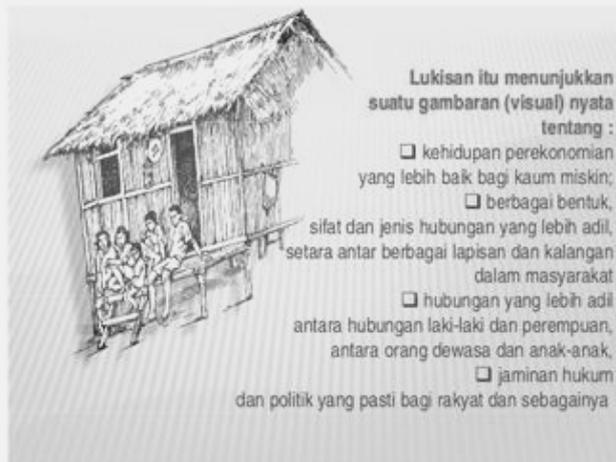


Merupakan AKIBAT Logis....

Mengorganisir masyarakat sebenarnya merupakan akibat logis dari analisis tentang apa yang terjadi, menyangkut cara pandang (paradigma) terhadap ketidakadilan dan penindasan disekitar kita.



Visualisasi Situasi Masyarakat



TIDAK NETRAL..

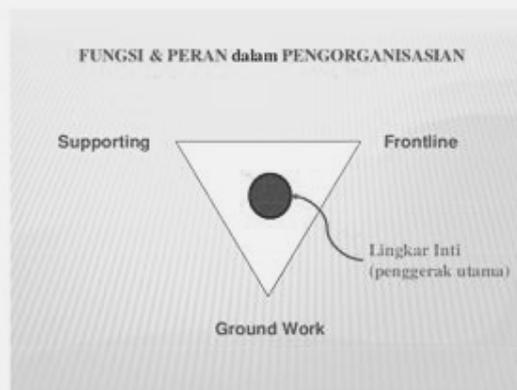
Maka

Seorang *Community Organizer (CO)* harus menentukan pilihan yang jelas dan tegas untuk berpihak kepada rakyat yang dizalimi dan tertindas atau menentang sama sekali.

Karena proses pengorganisasian sama sekali tidak netral, sarat dengan pilihan-pilihan nilai, mengandung sejumlah azas, prinsip keyakinan dan pemahaman tentang rakyat dan bagaimana agar keadilan, perdamaian dan hak-hak asasi manusia ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan rakyat.



ELEMEN-ELEMEN DALAM CO



ELEMEN PEKERJA LAPANGAN

GROUND WORK

seluruh proses pengorganisasian harus dirumuskan se jelas mungkin, baik oleh rakyat itu sendiri maupun oleh orang-orang luar yang terlibat dalam pengorganisasian tersebut. Peran sejenis itu biasanya disebut sebagai pekerja-pekerja lapangan, yang melakukan kerja-kerja langsung di tengah rakyat (*ground work*). Mereka itulah para CO atau para pengorganisir inti.



ELEMEN GARIS DEPAN



FRONTLINE

memfasilitasi proses-proses kerjasama dan membangun jaringan persekutuan dengan berbagai kalangan, termasuk berurusan dengan pemerintah atau politisi melalui lobi-lobi, dan dengan kalangan media massa untuk keperluan kampanye dan penyebaran informasi

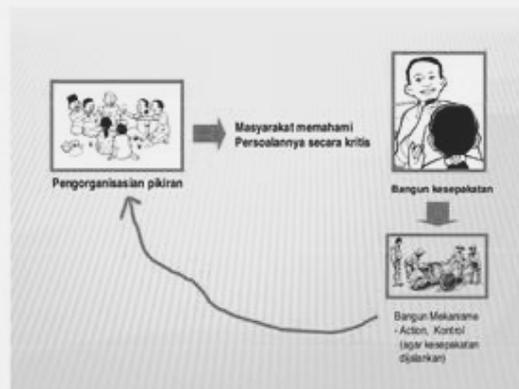
Yang menjalankan peran di garis depan (*frontline*). Mereka adalah para juru runding, juru bicara, atau delegasi yang ditunjuk rakyat untuk berhadapan langsung dengan pihak-pihak luar

ELEMEN PENDUKUNG

Kemudian, ada peran pendukung (*supporting*). Mereka inilah yang menjalankan peran-peran lebih teknis seperti, pengelolaan pembukuan keuangan, data, pengemas informasi, pencarian/menggali dana, bahan-bahan perbekalan, riset dsb.



ALUR UMUM PENGORGANISASIAN



LANGKAH-LANGKAH.....

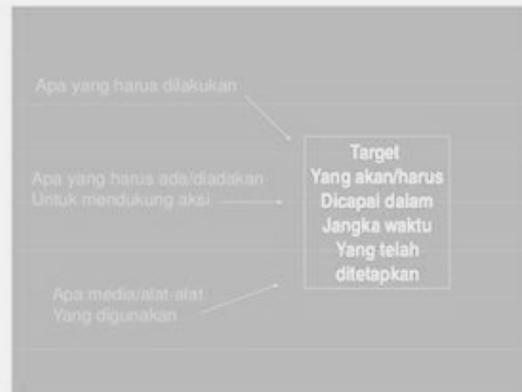


TAHAPAN PENGORGANISASIAN

- Pendekatan awal
- Proses memfasilitasi
- Penyusunan strategi
- Pengerahan tindakan bersama
- Pengembangan organisasi dan keberlangsungan



MEMBUAT RENCANA....



MENILAI PROSES...



Di sarikan dari Modul Pengorganisasian
Komunitas ..



DAUR YANG TAK PERNAH SELESAI.....



TERIMA KASIH



APA ITU FASILITASI

- Berasal dari kata “Facile” = Mudah
- Fasilitasi = Bikin Semua Jadi Mudah
- Fasilitator = Pemudah cara



PERAN FASILITATOR

- Memandu proses
- Memberi alat bantu
- Menantang ide-ide
- Netral pada isi



PERBANDINGAN PERAN

Bertanya

Fasilitator	Pelatih
Pengamat	Narasumber

Memberi tahu

Rumah Fasilitator



Rumah Fasilitator

Lantai 3	Ketrampilan Merancang Proses - merancang struktur dan alur pertemuan
Lantai 2	Ketrampilan Mengelola Dinamika Kelompok - mendorong dialog multarah
Lantai 1	Ketrampilan Komunikasi Interpersonal - menyimak, bertanya, menggali, merangkum
Lantai Dasar	Sikap Dasar Fasilitator - minat, empati, berfikir positif, percaya pada kelompok

Sikap Dasar FASILITATOR

Percaya pd Kekuatan Kelompok

Kemampuan berfikir positif pada gilirannya Anda percaya seseorang/kelompok selalu bisa menemukan jalan terbaiknya

Berfikir Positif

Bagaimana memanfaatkan empati Anda untuk selalu berfikir positif

Empati

Menemukan apa yang membuat motivasi diri Anda berlebihan dan melahirkan empati

Minat

Menemukan kesadaran diri dan kontrol diri dg menemukan apa yang Anda suka dan tidak suka





Tehnik Verbal

Effectiveness comes from understanding

Questioning (bertanya)

mengapa bertanya

- Agar semua peserta terlibat
- Mendukung proses refleksi
- Memperoleh lebih jelas isi gagasan
- Membangun saling memahami pandangan para pihak
- Melibatkan peserta yang diam
- Menghargai sumbangan pikiran peserta
- Mengelola waktu

contoh pertanyaan

- bagaimana perasaan Anda tentang...
- apa pengamatan Anda.. Mengapa Anda berfikir itu bisa terjadi..? Apa langkah selanjutnya?
- bagaimana ide Anda tentang...? Apa pendapat Anda tentang...
- Martin, apa yg sedang Anda pikirkan?
- Melly, itu gagasan menarik. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut.
- OK, kita sudah diskusi panjang ttg hal ini. Apakah kita bisa berganti topik?

Tertutup vs Terbuka

Jawaban sederhana Ya dan Tidak	Mulai dengan Siapa, Apa, Kapan, Dimana, Mengapa
Mudah bertanya, mudah menjawab, tidak makan waktu	Memperoleh jawaban kongkrit, diskusi berkualitas, paham lebih jelas, analisis situasi yg kompleks
Tidak memperoleh hal yang lebih rinci atau informasi baru. Tidak memperbaiki kualitas diskusi.	Beberapa pertanyaan kadang sulit dijawab. Pertanyaan seringkali dilihat sebagai ancaman. Bila fasilitator tidak merespon dg baik, bisa jadi malapetaka atau memperburuk keadaan.

model bertanya





Teknik Verbal

Trust build with giving people freedom to be who they are

probing
(bertanya lebih jauh)

probing

bertanya lebih jauh untuk memperoleh pemahaman lebih dalam:

- bisa anda menjelaskan lebih lanjut?
- bisakah anda berfikir dg cara lain?
- tetapi mengapa begitu?
- ada hal lain?

probing...mengapa?

- merangsang orang berfikir lebih dalam
- mengklarifikasi pernyataan, masukan atau pendapat orang
- menciptakan dialog
- memecahkan masalah

probing....laksana

- mengupas sebutir bawang. tujuannya mengupas tuntas apa yang ingin kita cari atau pahami lebih jauh.
- mengapa, mengapa, mengapa, mengapa, mengapa... biasanya bisa memperoleh akar masalah yang ingin dipahami...5 M

Tehnik Verbal

Without trust, they won't feel comfortable enough revealing everything they have to reveal

paraphrasing
(mengulang dg cara lebih mudah)

Teknik Verbal

We want to make a difference, a positive and lasting impact on our world

reframing
(membingkai dengan cara +)

Teknik Verbal

Dialogue is a collaboration toward mutual discovery and action

dialogue



Tehnik Non Verbal

Seeing the future open our eyes to seeing new opportunities and possibilities

observing
(mengamati)

apa yang diamati?

- Perasaan dan sikap peserta.
- Dinamika proses: partisipasi peserta, bukan hanya yang dominan saja.
- Individu: suara, gaya bicara, raut muka, kontak mata, gerakan tubuh.
- Kelompok: siapa bicara apa, siapa melakukan apa, bagaimana semangat kelompok.
- Saat mengamati tidak menghakimi.

Tehnik No Verbal

Listening start with showing up

listening
(menyimak)

apa itu menyimak?

- mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan seseorang.
- memperhatikan apa yang dikatakan seseorang.
- menyimak adalah teknik paling dasar dalam komunikasi.
- buruk menyimak, buruk pula komunikasi.

kiat menyimak

- tunjukkan minat dan empati.
- mendengar dengan aktif.
- perhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah pembicara.
- saat menyimak, hati-hati bila akan bertanya.
- gunakan pertanyaan terbuka.

saat menyimak dilarang

- meminta pembicara cepat-cepat menyelesaikan pembicaraan.
- berargumentasi dengan pembicara.
- memotong pembicaraan orang.
- memberikan nasihat tanpa diminta.
- loncat ke solusi.

Teknik Non Verbal

Compassion is understanding. It's seeing the truth of each other's perspective and trust in each other's best

compassion
(empati plus)

Teknik Non Verbal

The number one requirement for success in any relationship is trust

matching
(nyambung)

●BAB 5

MODUL PEMETAAN DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF

5.1. DESKRIPSI SINGKAT

Pemetaan Partisipatif adalah salah satu alat (tools) peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengenali dan memahami kondisi wilayahnya serta merencanakan pengelolaan wilayahnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayahnya. Syarat utamanya dari pemetaan ini adanya partisipasi dari sebanyak mungkin warga masyarakat dalam proses pemetaan. Proses dan hasil pemetaan partisipatif bisa digunakan masyarakat sebagai dokumen internal, alat untuk bernegosiasi dengan berbagai pihak, dan lebih jauh, meningkatkan kedaulatan masyarakat lokal atas wilayah kelolanya.

Pemetaan partisipatif merupakan alat yang telah digunakan berbagai kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat, dan gerakan akar rumput dalam kurun waktu 30 tahun terakhir di Indonesia. Peta Partisipatif bukanlah hal statis (kecuali batas wilayah) namun merupakan hal dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat desa.

Arti penting dari kawasan meliputi:

- ❖ Nilai ilmiah, berkaitan dengan ilmu kebumihant, litologi, struktur geologi dan mineral, situs-situs fosil, arkeologi dan paleontologi, serta tempat berlindung flora dan fauna endemis.
- ❖ Nilai sosial budaya, yang mencakup aspek spiritual keagamaan; terutama menyangkut kepentingan ritual, bernilai estetika, rekreasi dan pendidikan.
- ❖ Nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi sumber air sungai bawah tanah, penghasil produk Hasil Hutan Bukan Kayu, pariwisata dan jasa lingkungan lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Substansi Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan, yaitu :

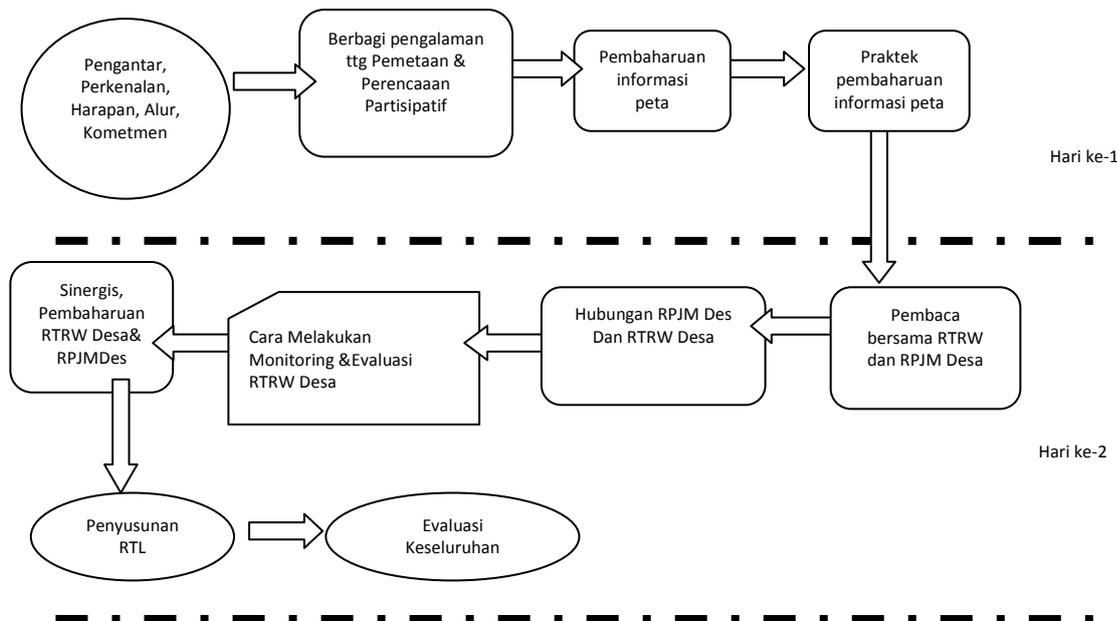
- ❖ Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan secara terpadu.
- ❖ Sebagai pedoman untuk meningkatkan upaya perlindungan bentang-alam yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya.
- ❖ Sebagai upaya perlindungan sumberdaya alam dan hutan

Pelibatan banyak pihak dalam mendukung pembangunan yang rendah karbon dan pengurangan emisi dengan mencegah deforestasi dan degradasi lahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusianya maupun kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Keberterimaan warga menjadi hal yang dipastikan, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang optimal. Selain itu juga pembangunan rendah karbon untuk mendukung perencanaan pengelolaan dalam kawasan ekosistem melalui partisipasi masyarakat desa secara langsung.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan arahan pemanfaatan dan pengelolaan perlu di monitoring dan dievaluasi sesuai dengan tujuannya. Karena perkembangan di desa maka proses

evaluasi bisa dilakukan setiap tahun dan tiap lima tahun. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan evaluasi RTRW yang telah mereka susun.

Pelatihan berorientasi pembelajaran adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang ditata dalam bentuk rencana proses pembelajaran pada pelatihan dengan penekanan pada penggunaan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pelatihan sehingga setelah pelatihan peserta memperoleh peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.



Gambar 5.1: Alur Pelatihan Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif

Keterangan :

- Diawal hari akan ada review harian oleh peserta pelatihan mengenai materi di hari sebelumnya
- Setiap sesi akan ada evaluasi untuk peserta melalui pengamatan dan penugasan
- Di akhir hari akan ada evaluasi dari peserta mengenai serapan materi, proses pelatihan, penyampaian, materi dan hal pendukung lainnya
- Lama pembelajaran 8 jam/hari (termasuk istirahat)
- Sesi malam dapat digunakan untuk pendalaman materi sebelumnya

Paradigma pelatihan yang digunakan berupa *learning* yaitu pelatihan yang berorientasi pada peserta (*learner's oriented*) ditandai dengan:

- ❖ Keterlibatan penuh dari pesertanya (peserta merupakan subyek)
- ❖ Memberikan kebebasan kepada peserta dalam mengeksplorasi pengetahuan
- ❖ Variasi dan keragaman dalam metode belajar
- ❖ Motivasi internal (bukan semata-mata eksternal)
- ❖ Adanya kegembiraan dan kesenangan dalam belajar
- ❖ Integrasi belajar yang lebih menyeluruh ke dalam segenap kehidupan organisasi

Kompetensi merupakan potensi seseorang yang ditampilkan setelah dilatih melalui pelatihan. Tampilan dalam aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tersebut dapat dilihat dan diukur setelah pelatihan. Harapannya peserta memiliki peningkatan pengetahuan dalam teknologi pembuatan dan pengelolaan peta, terampil dalam menggunakan tools/peralatan yang ada dan yang terakhir adalah sikap yaitu akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk kerja-kerja selanjutnya.

Pelatihan ini menekankan pada "*Learning by doing*" yaitu belajar sambil melakukan sehingga memungkinkan peserta untuk:

- ❖ Diberikan kesempatan untuk mengolah data-data yang sedang kerjakan, mempelajari studi kasus yang berkaitan dengan pengolahan data peta menggunakan metode pembelajaran antarlain demonstrasi/ peragaan, studi kasus, dan praktik baik secara individu maupun kelompok.
- ❖ Melakukan pengulangan ataupun perbaikan yang dirasaperlu.

5.2. TUJUAN PEMBELAJARAN

5.2.1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Secara umum, tujuan pelatihan ini adalah masyarakat mengetahui, memahami dan melaksanakan terkait:

1. Pentingnya Pemetaan partisipatif dalam Mengenal karakteristik wilayah kelola SHK
2. Ruang lingkup yang perlu diperhatikan :
 - ❖ pola ruang & struktur ruang kawasan
 - ❖ strategi kebijakan dan langkah pengelolaan kawasan
 - ❖ kelembagaan pengelolaan kawasan
 - ❖ Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat
3. Teknik Inventory Plot dalam keperluan pelaksanaan skema Plan Vivo & Perhutanan social

Dengan perkataan lain, pelatihan ini dapat memberikan pemahaman kepada fasilitator pentingnya suatu peta partisipatif dalam melakukan perubahan di masyarakat melalui perencanaan desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa

Tujuan Pembelajaran Umum untuk kegiatan pelatihan Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan, baik dalam konteks pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skills*) dan Sikap (*Attitude*):

Terkait dengan perubahan pengetahuan, peserta diharapkan:

1. Memiliki pengetahuan mengenai hubungan kegiatan pemetaan partisipatif sebagai alat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
2. Memiliki pengetahuan mengenai cara membaca peta dan memperbaharui informasi pada peta secara partisipatif
3. Memiliki pengetahuan cara membaca dokumen dan peta rencana tata ruang wilayah desa secara partisipatif
4. Memiliki pengetahuan mensinergiskan RTRW Desa dengan RPJM Des
5. Memiliki pengetahuan mengenai cara melakukan monitoring dan evaluasi RTRW

Terkait dengan perubahan pengetahuan, peserta diharapkan:

1. Mampu membaca peta partisipatif dan peta lainnya
2. Mampu melakukan pengambilan data spatial dengan GPS dan non spatial di masyarakat
3. Mampu mengolah data lapangan menjadi peta manual dalam hal pembaharuan informasi peta partisipatif
4. Mampu melakukan review RTRW Desa
5. Mampu melakukan sinergisasi dan sinergi antara RTRW Desa dengan RPJM Desa
6. Mampu melakukan monitoring RTRW Desa
7. Mampu melakukan evaluasi RTRW Desa

Terkait dengan perubahan sikap, peserta diharapkan memiliki rencana kerja dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dalam pelatihan ini.

5.2.2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) peserta mampu:

Pelatihan ini bertujuan:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil pemetaan partisipatif dan melakukan pembaharuan informasi peta partisipatif
2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami, monitoring dan evaluasi RTRW untuk menuju green village
3. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam teknik mengukur karbon melalui pendekatan Plot Inventory

5.3. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Pokok Bahasan dalam pelatihan Pemetaan dan Peencanaan Partisipatif, yakni:

1. Pemetaan Partisipatif
2. Perkembangan Pemanfaatan Lahan dan Pembaharuan Informasi Peta
3. Teknik Pengambilan Data Spatial dan Non-Spatial
4. Monitoring dan Evaluasi RTRW menuju Desa Hijau
5. Teknik Pengukuran Karbon melalui Plot Inventory Vegetasi

Untuk Pokok Bahasan Pemetaan Partisipatif, akan dibahas (Sub-Pokok bahasan) tentang:

- ❖ Berbagi Cerita Mengenai Pemetaan Partisipatif
- ❖ Pemanfaatan Hasil Pemetaan Partisipatif
- ❖ Pendalaman tentang Peta dan Pemetaan Partisipatif

Untuk Pokok Bahasan Perkembangan Pemanfaatan Lahan dan Pembaharuan Informasi Peta, akan berisi tentang:

- ❖ Identifikasi tingkat dinamisasi penggunaan lahan, dan
- ❖ Identifikasi perubahan dan potensi perubahan penggunaan lahan dan informasi peta lainnya

Untuk Pokok Bahasan Teknik Pengambilan Data Spatial dan Non-Spatial, berisi tentang:

- ❖ Teknis Pengambilan data Spatial dan Non Spasial dalam pembaharuan informasi peta
- ❖ Review Penggunaan GPS (Kalibrasi, Pengambilan, penyimpanan, pencarian data)
- ❖ Praktek pengambilan data lapangan untuk pembaharuan informasi
- ❖ Praktek Pembaharuan informasi peta

Pokok Bahasan Monitoring dan Evaluasi RTRW menuju Desa Hijau, berisi tentang:

- ❖ Review RTRW Desa dan RPJM Desa
- ❖ Mensinergiskan RTRW dan RPJM Desa
- ❖ Cara melakukan Monitoring & Evaluasi RTRW Desa

Pokok Bahasan Teknik Pengukuran Karbon, berisi tentang:

- ❖ Pengenalan Alat
- ❖ Pengukuran Karbon
- ❖ Cara melakukan Monitoring & Evaluasi RTRW Desa

5.4. PERSYARATAN PESERTA

5.4.1. PERSYARATAN PENDIDIKAN PESERTA

Peserta mempunyai pendidikan minimal Diploma dan telah lulus minimal 3 tahun.

5.4.2. PERSYARATAN PENGALAMAN PESERTA

Peserta bersungguh-sungguh untuk belajar dalam kegiatan pelatihan terkait:

- ❖ Pemetaan Partisipatif
- ❖ Perkembangan Pemanfaatan Lahan dan Pembaharuan Informasi Peta
- ❖ Teknik Pengambilan Data Spatial dan Non-Spatial
- ❖ Monitoring dan Evaluasi RTRW menuju Desa Hijau
- ❖ Teknik Pengukuran Karbon

5.5. BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, flip chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi Lembar Latihan dan Lembar Rencana Dokumentasi.

Di samping itu, alat dan bahan ajar yang diperlukan:

1. Kertas flipchart atau kertas plano
2. Kertas HVS
3. Komputer dan printer
4. Tinta printer
5. Spidol dan ballpoint
6. Kamera foto / Handphone camera
7. Buku Catatan

5.6. METODE PEMBELAJARAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui [1] Diskusi umum, [2] Curah pendapat, dan [3] Penugasan individual

5.7. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 4 jam pelajaran per hari (T=10 jp, P=0jp, PL=0jp) @45 menit, selama 2 hari jangka waktu Training of Trainer (ToT). Untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta maka, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- ❖ **Langkah 1: Pengkondisian (45 Menit)**
 1. Penyegaran dan pencairan suasana (*ice-breaking*),
 2. Pemandu/pengajar menggali harapan peserta tentang materi dan keterampilan yang ingin dicapai melalui sesi ToT ini,
 3. Pemandu/pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan metode yang akan digunakan,

4. Menggali pendapat peserta tentang “Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif”. Proses pembelajaran menggunakan metode dimana semua peserta terlibat secara aktif,
5. Berdasarkan pendapat peserta, pemandu/pengajar menjelaskan tentang “Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif”.

❖ **Langkah 2: Pengkajian Pokok Bahasan (360 Menit)**

1. Pemandu/pengajar menyampaikan pokok bahasan:
 - ❖ Pemetaan Partisipatif
 - ❖ Perkembangan Pemanfaatan Lahan dan Pembaharuan Informasi Peta
 - ❖ Teknik Pengambilan Data Spasial dan Non-Spasial
 - ❖ Monitoring dan Evaluasi RTRW menuju Desa Hijau
 - ❖ Teknik Pengukuran Karbon
2. Pemandu/pengajar member kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta.
3. Pemandu/pengajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga antar peserta juga terjadi diskusi dan interaksi yang baik.
4. Pemandu/pengajar menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok tentang:
 - ❖ Pemetaan Partisipatif
 - ❖ Perkembangan Pemanfaatan Lahan dan Pembaharuan Informasi Peta
 - ❖ Teknik Pengambilan Data Spasial dan Non-Spasial
 - ❖ Monitoring dan Evaluasi RTRW menuju Desa Hijau
 - ❖ Teknik Pengukuran Karbon

❖ **Langkah 3: Rangkuman (45 Menit)**

1. Pemandu/pengajar merangkum sesi pembelajaran.
2. Peserta dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan pengajar memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari pengajar maupun dari peserta lain.
3. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan.
4. Pemandu/pengajar menutup sesi pembelajaran dengan memastikan bahwa TPU dan TPK sesi telah tercapai.

5.8. URAIAN MATERI

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perencanaan secara umum dikelompokkan menjadi empat (4) bagian, yakni:

- ❖ Pola ruang dan struktur ruang kawasan di tingkat desa - Kabupaten.
- ❖ Strategi, kebijakan dan langkah pengelolaan kawasan pada tingkat Desa - Kabupaten.
- ❖ Kelembagaan pengelolaan kawasan di tingkat Desa.
- ❖ Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat

KETENTUAN UMUM PEMETAAN

Survey dan Pemetaan Kawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan survey pengumpulan data potensi dan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berbasis kawasan dan ruang (*spatial*) di tingkat Desa dan kawasan-kawasan prioritas. Survey dan Pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsure-unsur pemerintahan desa, unsure adat, anggota masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. Hasil survey disajikan dalam peta-peta tematik, sebagai bahan dasar perumusan perencanaan pembangunan wilayah Desa ataupun kawasan.

Persyaratan dalam pemetaan meliputi:

- a. Menindaklanjuti dan melengkapi hasil kesepakatan, khususnya terkait perencanaan pengelolaan kawasan.
- b. Melengkapi produk pemetaan sebelumnya yang dihasilkan sebelumnya, menjadi hasil survei dan pemetaan yang berbasis ruang (*spatial*) dan kawasan. Hasil survei dan pemetaan tersebut disajikan pada peta-peta tematik sesuai kebutuhan.
- c. Ada kemauan masyarakat untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.
- d. Tersedia atau dapat diadakan peta dasar dan penggunaan tanah eksisting berskala 1:10.000 untuk wilayah Desa dan 1 : 5.000 untuk kawasan prioritas perencanaan pembangunan.
- e. Tersedia peta-peta sarana dan prasarana Desa.
- f. Tersedia dokumen RPJMDes yang dihasilkan melalui survei dan pemetaan perencanaan pembangunan.
- g. Terbentuknya tim survey yang melibatkan organisasi lokal, perangkat desa, Tim Inti Perencanaan dan kelompok peduli lainnya (relawan) yang tergabung dalam kelompok kerja (tata ruang dan lingkungan, permukiman, sarana & prasarana, ekonomi, kelembagaan dan lainnya yang dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan).
- h. Adanya dukungan/bantuan dari Pemerintah Kabupaten serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan kawasan, yaitu:
 - ❖ Bantuan pengadaan peta dasar, peta rencata tata ruang dan kebijakan-kebijakan pembangunan
 - ❖ Bimbingan teknis pelaksanaan Survey data dan pemetaan kawasan.
 - ❖ Menyelenggarakan forum konsultasi untuk menyepakati proses dan hasil-hasil survei dan pemetaan kawasan ditingkat Desa dengan rencana-rencana dan kebijakan pembangunan Kabupaten,
 - ❖ Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi/uji publik hasil survei dan pemetaan Desa / kawasan ditingkat Kabupaten.
- i. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan uji publik hasil survei dan pemetaan kawasan secara lengkap di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, agar hasil survei dan pemetaan tersebut diketahui dan dipahami masyarakat yang lebih luas.

Tabel 5.1: Jenis Peta Rona

Kedalaman Sekala Peta	Tema Peta/Judul Peta	Muatan/Isi Peta
Tingkat Wilayah Desa (1 : 10.000)	Pola Penyebaran Pemukiman	Kondisi pemukiman Sebaran kondisi pemukiman Jumlah dan pengelompokan kondisi pemukiman
	Situasi Kelompok Sosial	Sebaran kelompok sosial Karakteristik atau budaya masyarakat yang mempengaruhi kehidupan lokal Dominasi sumber mata pencaharian setiap kelompok sosial

Kedalaman Sekala Peta	Tema Peta/Judul Peta	Muatan/Isi Peta
	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk di tiap dusun atau RW/RT dls Jumlah penduduk menurut suku Jumlah penduduk menurut jenis kelamin Jumlah penduduk menurut umur dan agama
	Penggunaan Tanah	Jenis penggunaan tanah : pemukiman, sawah, kebun, hutan, pekarangan, jalan, sungai, danau, lapangan, dll
	Pola Ruang Eksisting	a. Kawasan konservasi/lindung (Luas dan kondisinya) : sepadan sungai, sepadan danau, sekitar mata air, sekitar pintu goa dll) b. Kawasan Permukiman/ Perumahan (lokasi, luas, kondisi, sarana dan prasarana dan perkembangannya) c. Kawasan potensial (nama lokasi, luas, kondisi dan perkembangannya) <ul style="list-style-type: none"> ❖ perbukitan atau pegunungan ❖ Goa/liang/lubang ❖ sungai, danau, air terjun ❖ situs (peninggalan arkeologis) ❖ hutan ❖ rawa ❖ mangrove koridor pengamatan flora fauna d. Kawasan pertanian (kebun, ladang, pengembalaan, padang dll) e. Identifikasi persoalan dan potensi di setiap kawasan f. dll
	Struktur Ruang Eksisting	a. Pelayanan sistem jaringan jalan dan angkutan (internal desa, antar desa dan pelayanan tingkat Kabupaten/Kota b. Kondisi sistem pelayanan drainase (jenis/klasifikasi, konstruksi, arah aliran, sistem pelayanan dan identifikasi persoalan yang muncul (genangan, banjir dll) c. Sistem Pelayanan Air Minum (sumber air, kondisi air, kapasitas, sistem distribusi dll) d. Sanitasi: [1] Permasalahan dan sistem pengelolaan sampah dan [2] Permasalahan dan sistem pengelolaan air limbah & MCK e. Fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum) f. Prasarana & sarana penerangan dan lainnya

Kedalaman Sekala Peta	Tema Peta/Judul Peta	Muatan/Isi Peta
	Jenis Kegiatan sumber ekonomi	a. Jenis kegiatan ekonomi lokal/sumber penghidupan b. Jenis produk utama termasuk jumlah produksinya c. Tingkat pendapatan masyarakat/kelompok masyarakat/komunitas d. Jejaring pemasaran produk local e. Kelembagaan pengelolaan ekonomi lokal
	Kelembagaan kearifan lokal	sosial/ a. Kelompok kekerabatan/komunitas b. Karang Taruna c. Kelompok gotong royong d. Kelompok kelembagaan sosial lainnya yang mempengaruhi pembangunan kawasan desa
Pengaruh kebijakan kawasan desa	Rencana dan pembangunan	a. Rencana tata ruang kabupaten b. Rencana sistem jaringan jalan dan angkutan c. Rencana prasarana dan sarana dengan skala pelayanan kabupaten/Kawasan/Lingkungan d. Rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang mempengaruhi pembangunan desa e. Rencana program dan kegiatan kehutanan f. Rencana proyek perkebunan, pertambangan, perusahaan hutan dll
Kawasan Bencana	Potensi Rawan	a. Deliniasi kawasan potensi longsor, erosi, kebakaran, hama dan penyakit b. Deliniasi kawasan yang terindikasi terkena dampak bencana longsor, erosi, banjir, kekeringan dll c. Indikasi dampak bencana longsor, kebakaran, wabah penyakit dan dampak perubahan iklim (kekeringan, kebakaran, banjir, hama dan penyakit dll)
Dampak Kehadiran Kawasan Desa	Konsesi di	Identifikasi kegiatan sosial, ekonomi dan fisik lingkungan di wilayah desa dari kehadiran konsesi (perusahaan penebangan hutan, perkebunan, pertambangan dll) yang berdampak positif dan negatif. a. Limbah pembuangan dari konsesi b. Sampah rumah tangga, c. hiburan malam, dan d. Lainnya
Perencanaan Kawasan Prioritas/Lokasi di tingkat Tapak (1 : 5.000)	Ruang Utama Desa	a. Fungsi sosial, keagamaan, upacara atau tempat pertemuan seluruh anggota masyarakat. b. Permasalahan sosial kawasan prioritas c. Potensi aktifitas/kebiasaan masyarakat/kearifan lokal, sebagai modal sosial (<i>social capital</i>)

Kedalaman Sekala Peta	Tema Peta/Judul Peta	Muatan/Isi Peta
	Pola Ruang Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumahan (luas tanah dan persil bangunan) b. Jenis bangunan c. Fasilitas sosial ekonomi (jenis, jumlah, kondisi) d. Ruang publik/RTH (taman bermain anak, taman lingkungan, taman edukasi dll) e. Identifikasi kawasan-kawasan fungsional disekitar kawasan prioritas yang terindikasi menimbulkan dampak perkembangan kawasan prioritas permukiman (home stay, motel, kios, rumah makan, sanitasi lingkungan pemukiman dan lainnya f. Sebaran lokasi obyek alam, obyek budaya, obyek penelitian dan lain sebagainya) g. Koridor pengamatan flora fauna. h. Identifikasi pengembangan laboratorium alam dan pendidikan. i. Identifikasi rencana pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan. j. Deliniasi potensi hasil hutan non kayu dan hasil hutan kayu, dan k. Lainnya.
	Pola Tata Letak Kawasan Prioritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan kepadatan obyek b. Kondisi masing-masing obyek c. Kerapatan dan luas kawasan prioritas d. Akses dan jarak ke kawasan prioritas e. Dampak positif dan negatif ke kawasan sekitarnya, serta dampak sosial dan budaya, dan f. Lainnya.....?
	Status kepemilikan tanah kawasan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Status kepemilikan tanah (legalitas) b. Status pengelolaan kawasan prioritas c. Permasalahan dan solusi penyelesaian aspek pertanahan dan pengelolaan kawasan prioritas.

Kedalaman Sekala Peta	Tema Peta/Judul Peta	Muatan/Isi Peta
	Struktur Ruang Sarana dan Prasarana	Jaringan jalan, drainase dan pola sirkulasi kendaraan (baik jalan darat maupun sungai/air): <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kondisi dan dimensi jalan dan drainase ❖ Fungsi pelayanan jaringan jalan darat dan sungai ❖ Pola sirkulasi kendaraan (internal dan eksternal) b. Sistem pelayanan penerangan dan komunikasi. c. Kondisi pasar harian, mingguan dan sistem tata niaga. d. Sanitasi : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kondisi pengelolaan sampah ❖ Jumlah produksi dan jenis sampah ❖ Permasalahan/dampak negatif dari pengelolaan sampah eksisting ❖ Kondisi sistem pengelolaan limbah rumah tangga (termasuk MCK) e. Jenis fasilitas kegiatan ekonomi (warung, toko, pasar tradisional, ruko, home industri dan fasilitas ekonomi lainnya f. Kondisi jejaring pemasaran produk <i>home industry</i> g. Kondisi kelembagaan pengelolaan kegiatan ekonomi
	Identifikasi kegiatan disekitar kawasan prioritas yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kawasan prioritas	a. Penebangan hutan (real estate) b. Pencemaran sungai c. Industri pengolahan kayu dan perkebunan, d. Penambangan batu kapur dan marmer e. Hiburan malam, dan f. dan aktiifitas lain yang terindikasi menimbulkan dampak negatif
Catatan:		
a.	Data-data diatas perlu dilengkapi dan disesuaikan dengan kondisi wilayah desa dan kawasan prioritas	
b.	Permasalahan dan potensi sosial, ekonomi, lingkungan/fisik dan kelembagaan diwilayah desa dan kawasan prioritas tercatat lengkap dan dsajikan dalam peta-peta rona/kondisi eksisting	
c.	Hubungan sebab akibat dari munculnya permasalahan/persoalan termasuk pengembangan potensi teridentifikasi secara komprehensif/menyeluruh	

TAHAPAN PELAKSANAAN SURVEY DAN PEMETAAN

Kegiatan survei dan pemetaan merupakan tahap awal penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa dan Kawasan atau Tingkat Tapak. Pelaksanaan survei dan pemetaan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil survei dan pemetaan, laporan tersebut berupa Rona Awal Kawasan Desa dan Kawasan Prioritas.

Hasil survei dan pemetaan merupakan data dasar untuk analisis, perumusan gagasan/visi dan penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa dan kawasan yang selaras dengan rencana-rencana dan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten.

Tabel 5.2: Persiapan Survei dan Pemetaan

No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
1	Pembentukan Tim Survei dan Pemetaan (tata ruang, Kawasan hutan dan kebun, obyek alam permukiman dan lingkungan, prasarana dan sarana, kegiatan ekonomi lokal, kelembagaan dan lain yang dibentuk sesuai kebutuhan)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: Kelompok masyarakat dan perangkat desa. ❖ Peserta: Anggota masyarakat, perwakilan tokoh adat, aparat desa, aparat dan lainnya. ❖ Fasilitator: Lembaga pendamping dan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Tim survei dan pemetaan terbentuk sesuai kebutuhan ❖ Tim survei dan pemetaan disosialisasikan untuk diketahui masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Proses pembentukan Tim survei dan pemetaan secara partisipatif dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat
2	Pengadaan peta dasar dan peta penggunaan tanah eksisting (<i>land use</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: Tim Teknis ❖ Peserta: Perangkat Desa, LSM Pendamping dan Pemda ❖ Fasilitator: Ketua Tim Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peta dasar Desa dengan skala 1:10.000 ❖ Peta dasar Kawasan Prioritas skala 1:5000 	Sumber Peta dasar: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Bakosurtanal/Kantor pertanahan/Dinas Tata Ruang/Bappeda Kabupaten ❖ Google map atau citra satelit
3	Pengumpulan data-data sebelumnya dan RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: Tim ❖ Peserta: Perangkat Desa ❖ Fasilitator: Tim Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Data-data sebelumnya dan RPJM Desa tersedia ❖ Masyarakat memahami dan perlu dilengkapi/disempurnakan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Review untuk melengkapi data-data & Peta tematik untuk menyusun rencana pembangunan desa
4	Pelatihan Survei dan Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: Tim teknis ❖ Peserta: Seluruh anggota tim ❖ Fasilitator: Lembaga pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Seluruh anggota Tim paham pelaksanaan survei dan pemetaan ❖ Lembaga pendamping memfasilitasi dan melaksanakan survei dan pemetaan ❖ Tersusnya rencana kerja dan jadwal pelaksanaan survei dan pemetaan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelatihan Transek dan praktek lapang ❖ Tim teknis Pemerintah Kabupaten dan LSM Pendamping memberikan bimbingan teknis Kegiatan survei dan pemetaan
5	Sosialisasi Hasil Pelatihan Survei dan Pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: Perangkat Desa ❖ Peserta: Seluruh anggota tim ❖ Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan survei dan Pemetaan kawasan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sosialisasi disampaikan dengan cara-cara yang mudah dipahami masyarakat

Tabel 5.3: Pelaksanaan Survei dan Pemetaan

No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
1	Penyusunan ceklist data, rencana kerja survei, pembagian tugas dan wilayah/kawasan kerja setiap tim dan mempersiapkan peralatan survei	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: perangkat desa. ❖ Peserta: Semua anggota tim ❖ Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ceklist data rencana kerja telah selesai ❖ Pembagian kerja disepakati ❖ Alat tulis, GPS, kompas, kamera, peta dasar dan landuse/penggunaan tanah eksisting telah tersedia dan terdistribusi kesetiap tim 	Terpenuhinya dukungan awal pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan
2	<p>Melakukan transek dan pengamatan lapang</p> <p>a. Wilayah Desa, mengamati dan mencatat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Permasalahan dengan tingkat kedalamankawasan/zoning ❖ kondisi sistempelayanan sarana dan prasarana tingkat desa atau kawasan, <p>b. Kawasan prioritas (obyek alam, hutan, kebun, pemukiman dll) mengamati dan mencatat permasalahan dan potensi yang lebih detail/rinci dan terukur</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: Seluruh anggota tim dengan dukungan Tim teknis dan LSM ❖ Peserta: seluruh anggota tim ❖ Fasilitator: Tim teknis bappeda dan LSM Pendamping. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Potensi dan permasalahan wilayah dan kawasan desa teridentifikasi lengkap dan disajikan dalam peta survey ❖ Potensi dan permasalahan kawasan prioritas dan tapak tercatat detail /rinci dan terukur serta disajikan dalam peta survei 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Setiap tim wajib melengkapi catatan peta survei dengan foto yang menggambarkan permasalahan dan potensi desa dan kawasan prioritas ❖ Pelaksanaan survei diselesaikan sesuai jadwal yang disepakati ❖ Tim teknis berkewajiban bimbingan teknis dan mengawasi pelaksanaan survei dan pemetaan
3	Pengolahan Data untuk menyelaraskan/menyatukan hasil pengamatan lapang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pelaksana: Seluruh anggota tim ❖ Peserta: seluruh anggota tim ❖ Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Permasalahan dan potensi yang teridentifikasi oleh tim sudah dikompilasi ❖ Sebab-akibat munculnya permasalahan dan bagaimana mengembangkan potensi dalamkerangka perencanaan pembangunan disepakati ❖ Temuan hasil survey dikompilasi dengan data sebelumnya dan RPJM Desa 	Hasil survei dan pemetaan disepakati bersama

Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka

No	KEGIATAN	PELAKU	HASIL	KETERANGAN
4	Penyajian hasil Survei dan Pemetaan kedalam peta-peta tematik digital dan skalatis yang dilengkapi foto kondisi eksisting	❖ Pelaksana: Anggota Tim ❖ Peserta: Seluruh anggota tim ❖ Fasilitator: Tim teknis Bappeda dan LSM pendamping	❖ Peta-peta tematik telah diselesaikan lengkap dan baik dan siap digunakan sebagai alat analisis perencanaan kawasan Desa dan kawasan prioritas atau tapak	❖ Peta tematik kawasan Desa disajikan dengan sekala ketelitian 1:10.000 ❖ Peta tematik kawasan prioritas dan tapak disajikan dengan sekala ketelitian 1 : 5.000
5	Sosialisasi awal hasil ssurvei dan pemetaan	❖ Pelaksana: Perangkat Desa ❖ Peserta: Seluruh anggota tim ❖ Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	❖ Masyarakat mengetahui proses pelaksanaan survei dan hasil survei dan Pemetaan kawasan Desa	Sosialisasi disampaikan dengan cara-cara yang mudah dipahami masyarakat
6	Konsultasi untuk menyepakati hasil Survei dan Pemetaan dengan tim teknis melalui forum konsultasi ditingkat Kabupaten	❖ Pelaksana: TKPKD Kabupaten ❖ Peserta: SKPD, Tim teknis Bappeda, LSM Pendamping, Tim Survei dan Pemetaan, perangkat Desa dan Kecamatan serta lainnya ❖ Fasilitator: Tim Fasilitator	❖ Hasil Survei dan Pemetaan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang berbatasan ❖ Hasil Survei dan Pemetaan kawasan Desa disepakati ditingkat Kabupaten	Hasil kesepakatan wajib diketahui disepakati penentu kebijakan pembangunan ditingkat Kabupaten (Kepala dinas, Ketua Bappeda dan Bupati)
7	Finalisasi hasil Survei dan Pemetaan Kawasan	❖ Pelaksana: Aparat Desa didampingi Tim teknis Bappeda dan LSM ❖ Peserta: Seluruh tim dan perangkat desa ❖ Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	❖ Hasil Survei dan Pemetaan telah memasukkan hasil-hasil kesepakatan forum konsultasi ditingkat kabupaten	❖ Finalisasi dilakukan dengan bimbingan dan persetujuan tim teknis ❖ Peta-peta tematik hasil survei dan pemetaan disajikan lengkap, informatif, kreatif dan mudah dipahami masyarakat
8	Lokakarya/Sosialisasi akhir hasil Survei dan Pemetaan ditingkat Desa	❖ Pelaksana: Tim dan perangkat Desa ❖ Peserta: Seluruh anggota tim dan masyarakat sekitar ❖ Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	❖ Hasil Srvei dan Pemetaan diketahui, dipahami dan disepakati masyarakat, khususnya warga di kawasan desa	Sosialisasi sebagai antisipasi munculnya dominasi pengaruh kesepakatan warga
9	Desiminasi akhir hasil Survei dan Pemetaan di tingkat Kabupaten	❖ Pelaksana: TKPKD/Tim Teknis Bappeda, LSM ❖ Peserta: Bupati, SKPD, Legislatif, Kecamatan, Desa sebelah, lainnya ❖ Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping Fasilitator	❖ Hasil Pemetaan dipahami dan disepakati jajaran SKPD/Pemerintah Kabupaten	Desiminasi dilakukan dalam bentuk Lokakarya, dll

LAPORAN RONA AWAL KAWASAN DESA DAN KAWASAN PRIORITAS ATAU TAPAK

Beberapa hal terkait laporan rona awal kawasan desa dan kawasan prioritas atau tapak meliputi:

1. Laporan rona awal disusun berdasarkan kesepakatan hasil survei dan pemetaan kawasan Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan/dokumen perencanaan Perencanaan Pembangunan Kawasan Desa.
2. Rona awal merupakan narasi/deskripsi kondisi eksisting Kawasan Desa dan kawasan prioritas atau tingkat tapak yang mengungkap berbagai permasalahan dan potensi sosial, ekonomi, lingkungan/fisik dan kelembagaan pembangunan kawasan Desa secara lengkap, ringkas dan informatif.
3. Penyajian Rona awal meliputi :
 - ❖ Narasi dan peta batas kawasan Desa dan kawasan prioritas atau tingkat tapak.
 - ❖ Narasi dan peta tematik sebaran pola dan struktur ruang kawasan Desa.
 - ❖ Narasi karakteristik sosial masyarakat.
 - ❖ Narasi dan Peta sebaran kegiatan ekonomi lokal dan Kelembagaannya
 - ❖ Narasi dan peta permasalahan kegiatan ekonomi (sumber penghidupan dan kehidupan)
 - ❖ Narasi dan peta permasalahan dan potensi penggunaan tanah/pola ruang kawasan Desa (zona kawasan hutan, kawasan budidaya, kawasan rawan bencana, kawasan obyek alam, karakteristik bentang alam, potensi flora fauna, permukiman, perdagangan, home industri, pertanian dan penggunaan lahan lainnya). Identifikasi juga permasalahan-permasalahan penggunaan tanah disekitar kawasan Desa yang akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan Desa.
 - ❖ Narasi dan peta permasalahan dan potensi pengembangan sarana & prasarana
 - ❖ Narasi dan peta permasalahan Ruang terbuka Hijau dan Ruang Publik
 - ❖ Narasi dan peta daerah rawan bencana
 - ❖ Narasi dan peta status kepemilikan tanah dan pengelolaan kawasan prioritas.
 - ❖ Narasi karakteristik sosial dan peta sebaran potensi kawasan prioritas
 - ❖ Narasi karakteristik/kondisi tata letak struktur dan pola ruang dikawasan prioritas atau tingkat tapak.
 - ❖ Narasi karakteristik dan peta permasalahan sarana dan prasarana kawasan prioritas
4. Deskripsi rona awal yang menguraikan permasalahan selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar untuk analisis dan perumusan visi/gagasan pembangunan kawasan Desa.
5. Antisipasi terjadinya ketidaksesuaian/penyimpangan materi rona awal dengan isi kesepakatan hasil survei dan pemetaan ditingkat Desa dan Kabupaten.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN LOKAL

Pemberdayaan (*empowerment*) yang berasal dari kata dasar “*empower*” bermakna sebagai “*to invest with power, especially legal power or official authority*”, atau “*... taking control over their lives, setting their own agendas, gaining skill, building self-confidence, solving problems and developing selfreliance*”. Pemberdayaan dapat dilakukan terhadap individual, kelompok sosial, maupun terhadap komunitas. Dari sisi paradigma, pemberdayaan lahir sebagai antitesis dari paradigma *developmentalis*.

Payne (1997), menyebutkan pada intinya pemberdayaan adalah “*to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to*

exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients". Pemberdayaan mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama dari pemberdayaan adalah tercapainya "kemandirian". Proses pemberdayaan ini adanya suatu implikasi dalam perubahan pembangunan, lingkungan, dimana sesama kelompok masyarakat saling bahu-membahu dalam mengembangkan karakternya masing-masing.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Hal ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Proses Pembentukan Kelompok Fase-fase berikut memberikan satu ilustrasi praktis tentang proses pembentukan kelompok dalam pemberdayaan masyarakat (Chamala, 1995).

FASE 1: INISIASI

- ❖ Tahap 1: Kesadaran tentang adanya masalah internal & external (oleh pemimpin lokal, warga, petugas atau pihak-pihak lainnya).
- ❖ Tahap 2: Penyatuan perhatian terhadap masalah (diskusi informal diantara pihak-pihak yang sadar akan adanya masalah).
- ❖ Tahap 3: Testing tentang adanya perhatian yang lebih luas (diskusi informal dengan tokoh masyarakat atau instansi terkait).
- ❖ Tahap 4: Mencari dukungan lebih lanjut (khususnya dari tokoh masyarakat, agen pembaharu, dinas, dll).

FASE 2: PEMBENTUKAN

- ❖ Tahap 1: Undang untuk pertemuan (meliputi staf dari instansi terkait dan tokoh masyarakat. Hal yang pokok yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah pemilihan panitia pengarah, yang kemudian bertugas menyusun draf rencana umum dan struktur kelompok).

- ❖ Tahap 2: Mengembangkan struktur kelompok sementara dan rencana umum (dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dan mencari informasi serta bantuan dari pihak-pihak terkait).
- ❖ Tahap 3: Pengesahan struktur dan rencana umum kelompok dalam suatu rapat umum (biasanya panitia pengarah terpilih sebagai pengurus kelompok).

FASE 3: AKSI

- ❖ Tahap 1: Memeriksa rencana umum guna merumuskan tujuan jangka pendek (fokuskan pada satu proyek yang viable).
- ❖ Tahap 2: Mengembangkan rencana kerja dan menetapkan program kerja (misalnya memutuskan apa yang perlu dilakukan, sumberdaya, waktu, koordinasi, dll).
- ❖ Tahap 3: Implementasi rencana kerja (pelatihan, demonstrasi, dll). Tahap 4: Evaluasi dan dokumentasi kemajuan.

FASE 4: PENGEMBANGAN/PEMBUBARAN ATAU RESTRUKTURISASI

- ❖ Tahap 1: Mengembangkan fungsi yang sudah ada (tangani lebih banyak masalah, capai sasaran atau target yang lebih luas, perbanyak inisitif. Dalam hal kelompok tani, tingkatkan jumlah penyaluran saprodi, kurangi kredit macet, dll).
- ❖ Tahap 2: Kembangkan fungsi baru (tidak saja memperbanyak pelayanan buat anggota, tetapi juga kembangkan fungsi "berperan ke atas dan atau ke samping", menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lebih luas).
- ❖ Tahap 3: Perluasan kelompok (mengembangkan jangkauan lokasi atau membentuk subkelompok baru yang sesuai). Sumber : Muktasam, 2002
- ❖ Dengan demikian, pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan partisipatif mengandung tiga unsur penting, yaitu : (1) Peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi proses pembangunan, (2) Orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan (3) Peran pemerintah sebagai fasilitator. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Rasa percaya ini akan tumbuh apabila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang setara. Perbedaan perlakuan atas dasar apapun dapat menumbuhkan kecemburuan dan mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Melalui pembangunan yang partisipatif, masyarakat diharapkan dapat : (1) Mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonomi mereka sendiri mengidentifikasi bidang-bidang yang perlu diperbaiki, (2) Mampu menentukan visi masa depan yang ingin masyarakat wujudkan, (3) Dapat berperan dalam perencanaan masa depan mereka sendiri dalam masyarakatnya tanpa menyerahkannya kepada ahli atau kelompok berkuasa, (4) Dapat menghimpun sumber-sumber daya di dalam masyarakat dan juga di dalam lingkup anggotanya untuk merealisasi tujuan bersama, (5) Dapat memperoleh pengalaman dalam menyatakan, menganalisa situasi dan mengidentifikasi strategi yang tepat dan realistis untuk suatu kehidupan yang baik, (6) Karenanya anggota masyarakat menjadi tokoh individual yang dapat bekerja atas dasar persamaan, (7) Desa dan masyarakat akan menyelesaikan tugas dan proyek swadaya, karena masyarakat tidak tergantung pada bantuan dari luar, yang juga akan menjadi dasar menuju kemandirian, dan (8) Dalam proses ini akan dibangun hubungan yang erat dan integratif diantara anggota masyarakat

DEFORESTASI DAN TEKNIK PENGUKURAN KARBON

5.8.1. PENGANTAR

Laju deforestasi di definisikan sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya. Menurut (FAO 1990; World Bank 1990) bahwa hilangnya tutupan hutan secara permanen ataupun sementara merupakan deforestasi. Secara sederhana, deforestasi adalah istilah untuk menyebutkan perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan, artinya dari suatu wilayah yang sebelumnya berpenutupan tajuk berupa hutan (vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu) menjadi bukan hutan (bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi). Sedangkan degradasi hutan, atau penurunan kualitas hutan, dimaksudkan sebagai perubahan kondisi atau mutu hutan dari hutan alam atau hutan primer menjadi hutan bekas ditebang; atau dari hutan lebat menjadi hutan jarang/rawang. Artinya, pada istilah degradasi tutupan vegetasi tetap pohon; namun dengan kualitas yang berbeda.



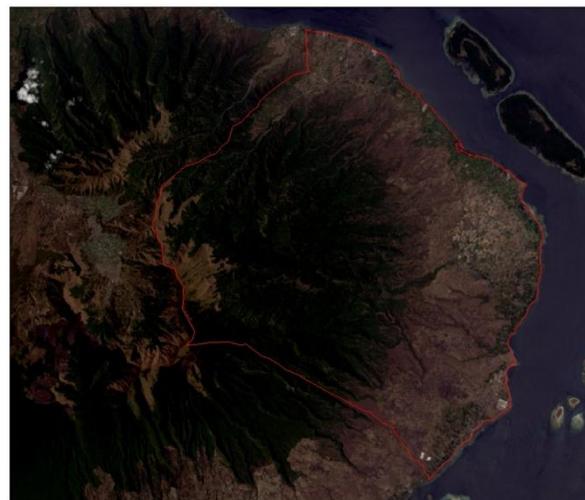
Tahun 1995



Tahun 2015



Tahun 2013



Tahun 2015

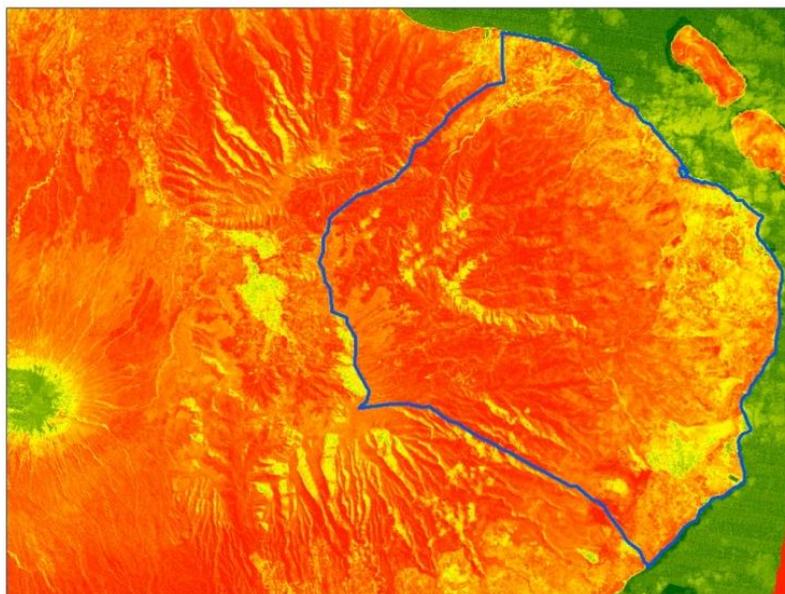
Gambar 5.2: Hasil Rekaman Foto Udara Peta landsat.

Analisa laju Deforestasi bisa di aritkan, suatu cara untuk mengetahui perubahan tutupan hutan dan konfersi lahan pada beberapa tahun, sehingga didapatkan nilai rata-rata perubahan tutupan hutan tiap tahunnya. Pada skama *panvivo* analisa deforestasi dijadika acuan untuk menghitung *Project skenario*, dengan cara mengambil sampel deforestais wilayah di sekitarnya, sehingga mendapatkan persentase perubahan tutupan hutan per tahun. Nilai sampel perubahan tutupan hutan, akan di asumsikan sebagai nilai deforestasi di lokasi projeck. dalam *project skenario* hubungan perusakan hutan di wilayah sekitar yang akan memepengaruhi wilayah projeck d sebut ancaman, yang digambarkan dalam bentuk regresi.

Pendekatan dalam melakukan analisa deforestasi yang digunakan saat ini yang paling efesien adalah pendekatan analisa geospasial. Analisa geospasial adalah suatu metode yang dilakukan para peneliti untuk menganalisa suatu objek di permukaan bumi berdasarkan titik kordinat, pada kasus deofrestasi analsia geospaisal fokuskan pada vegetasi. Gambar 5.2, menunjukan perubahan tutupan vegeasi darit tahun 1995 sampai 2015, hasil foto udara pada tahun tersebut memang tidak terlalu terlihat.

Normalized differce vegetation idex (NDVI) adalah suatu algoritma yang digunakan untuk melakuakn seleksi vegetasi berdasarkan tingkat kehijauan tanaman. Indeks vegetasi adalah besaran nilai kehijauan yang diperoleh dari pengolahan siyal digital data nilai kecerahan atau *brightness* beberapa kanal data sensor satelit. Untuk pemantauan vegetasi, dilakukan proses perbandingan antara tingkat kecerahan kanal *red* dengan kanal cahaya *infrared* yang dekat dengan jaringan mesofil yang terdpd pada daun, akan membuat nilai kecerahan yang diterima sensor satelit pada kanal-kanal tersebut akan berbeda jauh. Nilai dari aloritma tersebut adalah 1 sampai dengan -1. Dari algortima NDVI dapat dilakukan pengkelasan berdasarkan nilai yang dihasilkan.

Terdapat dua metode pengkelasan secara sapasial, 1 pengkelasan terbimbing atau *supervised classification* dan pengkelasan tidak terbimbing sering disebut dengan *unsupercesed classification*.

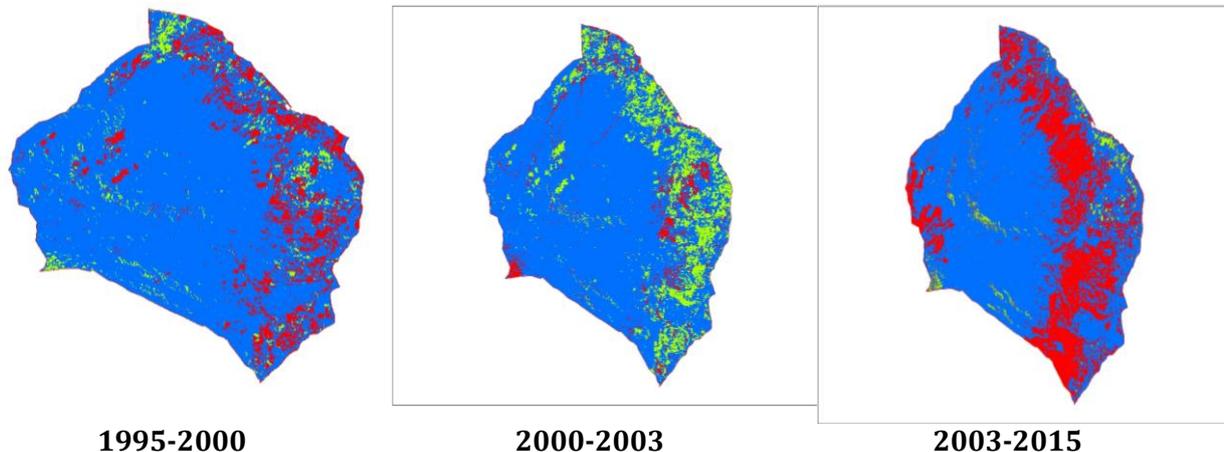


Gambar 5.3: . Hasil Analisa Menggunakan Algoritma NDVI.

Cotuh analisa foto udara menggunakan algoritma NDVI di tunjukan pada gambar 5.3, warna hijau menggambarkan non vegetasi sedangkan warna merah menggambarkan vegetasi, semai kn merah warna pada peta maka semakin lebat vegeasi yang di tujukan.

5.8.2. ANALISIA LUAS HUTAN YANG HILANG

Hasil analisa deforestasi hutan digambarkan pada gambar 5.4, warna merah pada gambar menunjukkan kehilangan utupan vegetasi, warna hijau menerangkan pertumbuhan (*gain*) dan warna biru menunjukkan tidak terjadi perubahan.



1995-2000

2000-2003

2003-2015

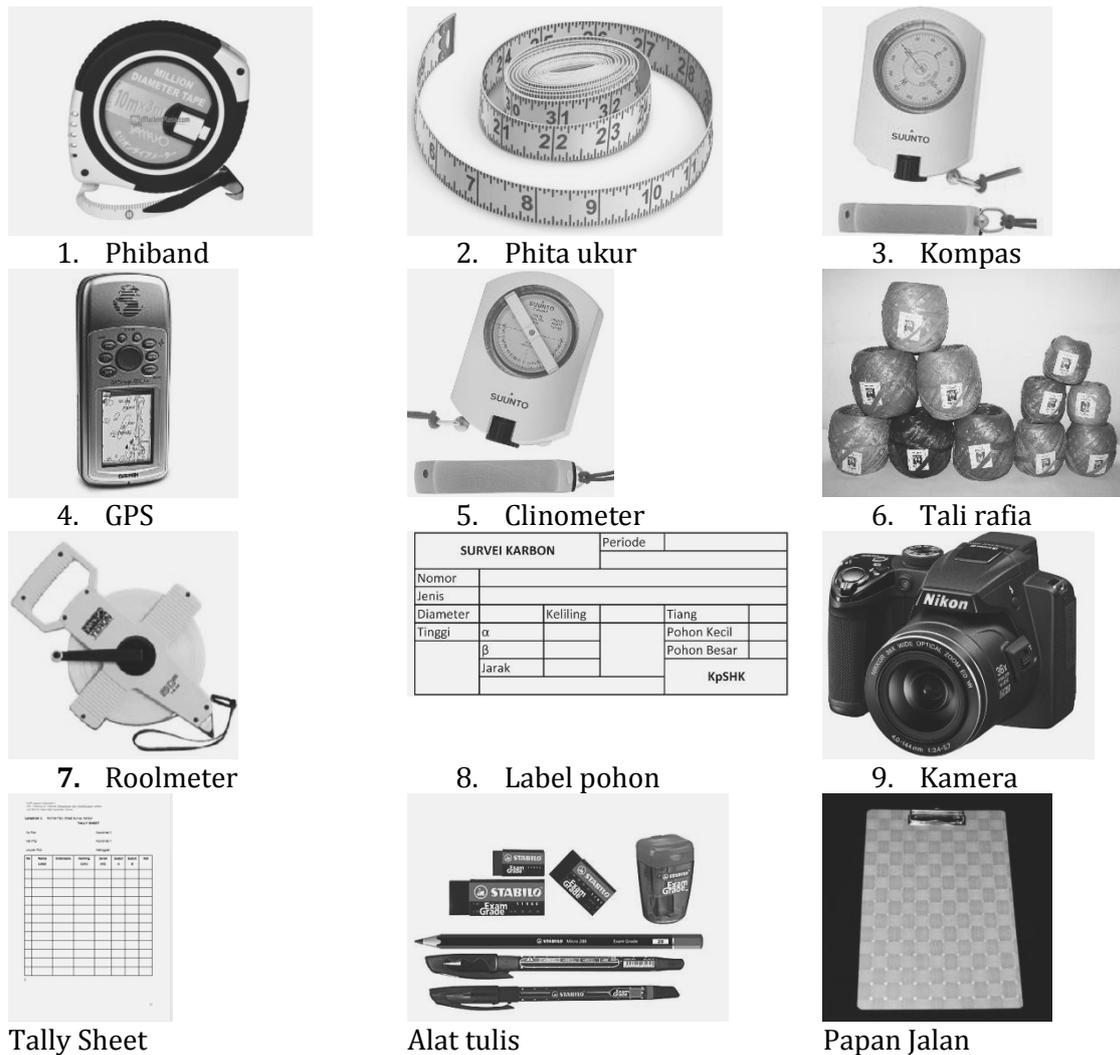
Gambar 5.4: Hasil analisa huta yang tersisa menggunakan fotoudara landsat

5.8.3. PENGENALAN ALAT

Alat-alat dibawah wajib dibawa dalam kegiatan survey penghitungan karbon. Tahapan pengukuran karbon, pembuatan petak ukur, pengitungan diameter dan pengukuran tinggi pohon diterangkan dalam penjelasan seperti dibawah ini :

1. Phiband : alat ini digunakan untuk mengukur dimater pohon
2. Phita ukur : diunakan untuk mengukur diameter pohon
3. Kompas : digunakan unutup membuat petak ukur, diharapkan dalam pembuatan petak ukur lurus .
4. GPS : digunakan untuk mengetahui posisi petak ukur.
5. Clinometer : digunakan untuk mengukur ketinggian pohon dan kelerengan.
6. Tali rafia : digunakan untuk membuat batas petak ukur
7. Rool meter : digunakan untuk membuat petak ukur
8. Label pohon : digunakan untuk membri tanda pohon yang telah diukur
9. Kamera : digunakan sebagai dokumentasi pengukuran
10. Tally sheet : digunakan untuk mengisi data
11. Alat tulis : digunakan untuk menulis data
12. Papan jalan : digunakan sebagai meja dilapangan.

Penjabaran diatas diterangkan pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5: Peralatan Pengukuran Data Lapangan

5.8.4. PENGUKURAN KARBON

Pelaksanaan Lapangan Pembuatan Petak Ukur

Penentuan titik ikat

Pelaksanaan lapangan dimulai dari penentuan titik ikat, titik ikat didapat dari peta kerja yang telah ditentukan. Penentuan titik ikat alternatif dimungkinkan apabila ada informasi yang lebih akurat (akan diterangkan pada pembuatan plot). Mengenai titik ikat tahapan kegiatan penentuan titik ikat meliputi :

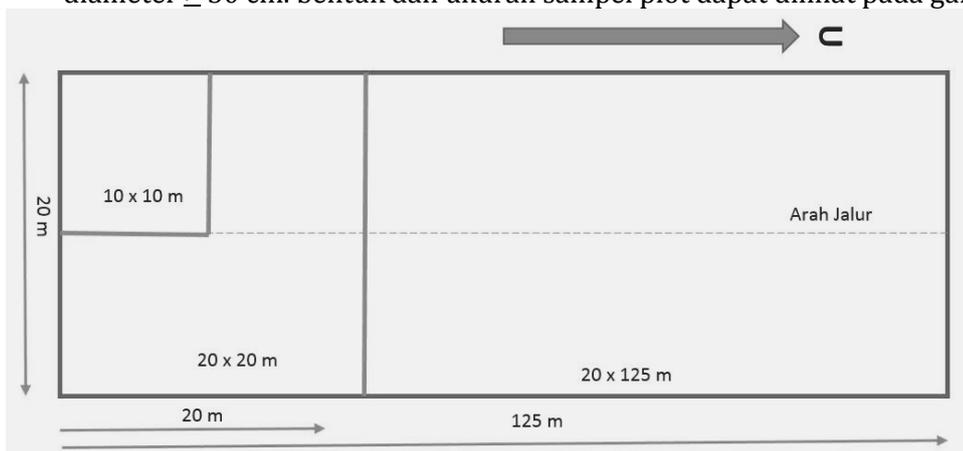
1. Apabila titik ikat telah ditentukan kegiatan yang pertama harus dilaksanakan adalah mencari titik ikat. Pada gambar dua adalah peta kerja yang telah diberikan titik ikat. Proses pencarian titik ikat adalah dengan menggunakan GPS (*Global Position system*)
2. Menggunakan GPS dan memasukkan titik kordinat yang ada pada peta, guna melakukan geo-tagging.

Pembuatan Petak Ukur

Tahapan berikutnya adalah membuat petak ukur pada lokasi yang telah ditentukan titik ikatnya (*plot*). Pembuatan petak ukur seperti yang telah digambarkan pada Gambar 5.6. Pengambilan data dilakukan pada setiap titik (*plot*) dengan petak terkonsentrasi. Petak Ukur diletakkan dalam jalur inventarisasi dengan arah Utara-Selatan. Pada setiap satu plot ukur terdapat 3 sub-plot ukur yang luasnya dibedakan berdasarkan tingkat pertumbuhan pohon. Pada awalnya menentukan petak besar dengan ukuran 20 m x 125 m terlebih dahulu yang mewakili kemudian dibagi lagi menjadi petakan kecil didalamnya dengan ukuran 20 m x 20 m, 10 m x 10 m dan melakukan pengambilan data hanya pada petakan tersebut.

Pengukuran cadangan karbon dilakukan dengan menggunakan metode non destruktif yang dikembangkan oleh SNI 7724:2011. Dalam metode ini ukuran plot sampel dibagi dalam 3 bagian (Gambar 10), yaitu :

- Plot dengan ukuran 10 m x 10 m, digunakan untuk mengukur biomassa *pancang* dengan ukuran diameter 5 cm sampai dengan < 15 cm
- Pot dengan ukuran 20 m x 20 m, digunakan untuk mengukur biomassa tiang dengan ukuran diameter 15 sampai dengan < 30 cm
- Plot dengan ukuran 20 m x 125 m, digunakan untuk mengukur biomassa pohon dengan diameter ≥ 30 cm. bentuk dan ukuran sampel plot dapat dilihat pada gambar 5.6.



Gambar 5.6: Bentuk dan ukuran Petak Ukur

Koordinasi Proyek Plan Vivo

Tata kelola adaptif dan garis tanggung jawab yang jelas merupakan kunci jangka panjang dalam proyek imbal jasa lingkungan *Plan vivo*. Dimana melibatkan *fouder* untuk mendanai pengelolaan lahan memerlukan peraturan yang kuat. Struktur organisasi yang jelas, komando yang baik dan transparansi lembaga. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara transparan proyek jasa lingkungan yang dijalankan. *Plan vivo* mengajukan standar tabel 5.4 menggambarkan standar organisasi yang diajukan oleh *Plan vivo*

Dalam Tabel 5.4 digambarkan struktur organisasi secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian :

1. Administrative, financial and legal.

Tim administrasi finansial dan legal, tugasnya adalah mencatat semua kegiatan proyek yang terjadi, melakukan kesepakatan imbal jasa lingkungan, dan memberikan laporan hasil monitoring. Memanajemen keuangan proyek, dan mengurus proses pembayaran jasa lingkungan

berkaitan dengan projek. Mengatur *Plan vivo* sertivikat dan juga membuat proposal yang akan diajukan ke *plan vivo*. Memberi laporan kepada *Plan vivo* dalam hal melakukan audit, verivikasi dan validasi.

2. Technical

Merancang sekema aktifitas tataguna lahan bersama dengan masyarakat, dan melakukan aktifitas perhitungan karbon. Melakukan asistensi dan pengembangan aktifitas ke masyarakat . memantau perkembangan aktifitas dimasyarakat yang berkaitan dengan *plan vivo* projek. Melakukan pelayanan teknis melakukan suport estimasi karbon dan melakukan pelatihan kepada masyarakat. Menghitung data yang baik.

3. Social

Melakukan pengarahan dalam melakukan pemilihan komuntias lokal, melakukan identifikasi konflik lokal yang terjadi di lokasi yang akan dijadikan projeck. mengarahakan isu tentang mobilisasi projeck.

Tabel 5.4: Standar Organisasi *Plan Vivo*

Theme	Functions
Administrative, financial, legal	<ul style="list-style-type: none"> • Keeping records of <i>plan vivos</i>, PES agreements, monitoring results • Managing project finance and administering payments (PES) • Managing Plan Vivo Certificates in the Plan Vivo registry • Reporting to the Plan Vivo Foundation • Coordinating project audits i.e. validation, verification
Technical	<ul style="list-style-type: none"> • Designing land-use activities with communities and quantifying carbon services of activities • Assisting development of and evaluating <i>plan vivos</i> by participants • Monitoring participants' progress • Providing technical extension support and training • Collecting data as required (e.g. growth data on sample plots)
Social	<ul style="list-style-type: none"> • Advising on the selection of target communities (e.g. assessing local capacity, identifying local conflicts or issues); • Assisting participants in providing evidence of land rights; • Conducting workshops with groups, discussing and communicating project requirements
	<ul style="list-style-type: none"> • Helping groups select representatives to liaise with the project; • Advising on issues such as mobilisation, payments • Facilitating the resolving of disputes or tensions

5.9. BAHAN TAYANG



K.P. SHK

Materi.
PERENCANAAN WILAYAH KELOLA

Disampaikan Oleh : Manager KM (Nurhidayat Ari Moenir)
Rabu, 27 Juli 2016 - Hotel Royal Bogor

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, PSDABM

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

- Pola ruang dan struktur ruang kawasan di tingkat desa - Kabupaten.
- Strategi, kebijakan dan langkah pengelolaan kawasan pada tingkat Desa - Kabupaten.
- Kelembagaan pengelolaan kawasan di tingkat Desa.
- Hak, kewajiban dan peran serta masyarakat

KETENTUAN UMUM PEMETAAN

Survey dan Pemetaan Kawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan survey pengumpulan data potensi dan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berbasis kawasan dan ruang (*spatial*) di tingkat Desa dan kawasan-kawasan prioritas. Survey dan Pemetaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsure-unsur pemerintahan desa, unsure adat, anggota masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. Hasil survey disajikan dalam peta-peta tematik, sebagai bahan dasar perumusan perencanaan pembangunan wilayah Desa ataupun kawasan.

PERSYARATAN

- a) Menindaklanjuti dan melengkapi hasil kesepakatan, khususnya terkait perencanaan pengelolaan kawasan.
- b) Melengkapi produk pemetaan sebelumnya yang dihasilkan sebelumnya, menjadi hasil survei dan pemetaan yang berbasis ruang (*spatial*) dan kawasan. Hasil survei dan pemetaan tersebut disajikan pada peta-peta tematik sesuai kebutuhan.
- c) Ada kemauan masyarakat untuk melakukan kegiatan survei dan pemetaan.
- d) Tersedia atau dapat diadakan peta dasar dan penggunaan tanah eksisting berskala 1:10.000 untuk wilayah Desa dan 1 : 5.000 untuk kawasan prioritas perencanaan pembangunan.
- e) Tersedia peta-peta sarana dan prasarana Desa.
- f) Tersedia dokumen RPJMDes yang dihasilkan melalui survei dan pemetaan perencanaan pembangunan.
- g) Terbentuknya tim survey yang melibatkan organisasi lokal, perangkat desa, Tim Inti Perencanaan dan kelompok peduli lainnya (relawan) yang tergabung dalam kelompok kerja (tata ruang dan lingkungan, permukiman, sarana & prasarana, ekonomi, kelembagaan dan lainnya yang dapat ditambah jumlahnya sesuai kebutuhan).
- h) Adanya dukungan/bantuan dari Pemerintah Kabupaten serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penyelenggaraan kegiatan survei dan pemetaan kawasan, yaitu:
 - Bantuan pengadaan peta dasar, peta rencana tata ruang dan kebijakan-kebijakan pembangunan
 - Bimbingan teknis pelaksanaan Survey data dan pemetaan kawasan.
 - Menyediakan forum konsultasi untuk menyepakati *prosa* dan hasil-hasil survei dan pemetaan kawasan di tingkat Desa dengan rencana-rencana dan kebijakan pembangunan Kabupaten,
 - Menyediakan kegiatan sosialisasi/ujicoba publik hasil survei dan pemetaan Desa / kawasan di tingkat Kabupaten.
- i) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan uji publik hasil survei dan pemetaan kawasan secara lengkap di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, agar hasil survei dan pemetaan tersebut diketahui dan dipahami masyarakat yang lebih luas

JENIS PETA RONA YANG DIHASILKAN

KEDALAMAN	SKALA PETA	TEMA PETA
Tingkat Wilayah Desa	(1 : 10.000)	Pola Penyebaran Pemukiman
Contoh : Peta RBI Kabupaten Bozori	1 : 10.000	Situasi Kelompok Sosial
		Jumlah Penduduk
		Penzonatan Tanah
		Pola Ruang Eksternal
		Struktur Ruang Eksternal
		Jenis Kegiatan sumber ekonomi
		Kelambatan sosial/ kemiskinan lokal
		Pengaruh Rencana dan kebijakan pembangunan kawasan desa
		Kawasan Potensi Rawan Bencana
		Dampak Kehadiran Investasi di Kawasan Desa
		Ruang Utama Desa

KEDALAMAN	SKALA PETA	TEMA PETA
Perencanaan Kawasan Prioritas/Lokasi di tingkat Tapak	(1 : 5.000)	Pola Ruang Desa
		Pola Tata Letak Sebaran Kawasan Prioritas
		Pola Tata Letak Sebaran Kawasan Prioritas
		Struktur Ruang Sarana dan Prasarana
		Identifikasi kegiatan disekitar kawasan prioritas yang mempengaruhi perkembangan pembangunan kawasan prioritas

TAHAPAN PELAKSANAAN SURVEI DAN PEMETAAN

- Kegiatan survei dan pemetaan merupakan tahap awal penyusunan Rencana Pembangunan Wilayah Desa dan Kawasan atau Tingkat Tapak. Pelaksanaan survei dan pemetaan dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil survei dan pemetaan, laporan tersebut berupa Rona Awal Kawasan Desa dan Kawasan Prioritas.
-
- Hasil survei dan pemetaan merupakan data dasar untuk analisis, perumusan gagasan/visi dan penyusunan Perencanaan Desa dan kawasan yang selaras dengan rencana-rencana dan kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten.
-

PERSIAPAN SURVEY DAN PEMETAAN

Kegiatan	Pelaku	Keterangan
Pembentukan Tim Survei dan Pemetaan (tata ruang, Kawasan hutan dan kebun, obyek alam permukiman dan lingkungan, prasarana dan sarana, kegiatan ekonomi lokal, kelembagaan dan lain yang dibentuk sesuai kebutuhan)	Pelaksana: Kelompok masyarakat dan perangkat desa. Peserta: Anggota masyarakat, perwakilan tokoh adat, aparat desa, aparat dan lainnya. Fasilitator: Lembaga pendamping dan lainnya.	Proses pembentukan Tim survei dan pemetaan secara partisipatif dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota masyarakat
Pengadaan peta dasar dan peta penggunaan tanah eksisting (land use)	Pelaksana: Tim Teknis Peserta: Perangkat Desa, LSM Pendamping dan Pemda Fasilitator: Ketua Tim Pelaksana	Sumber Peta dasar: > Bakosurtanal/Kantor pertanahan/Dinas Tata Ruang/Bappeda Kabupaten > Google map atau citra satelit
Pengumpulan data-data sebelumnya	Pelaksana: Peserta: Fasilitator: Tim Pelaksana Fasilitator Desa	Review untuk melengkapi data-data & Peta tematik untuk menyusun rencana pembangunan desa
Pelatihan Survei dan Pemetaan	Pelaksana: Tim teknis Peserta: Seluruh anggota tim Fasilitator: Lembaga pendamping	> Pelatihan Transek dan praktek lapang > Tim teknis Pemerintah Kabupaten dan LSM Pendamping memberikan bimbingan teknis kegiatan survei dan pemetaan
Sosialisasi Hasil Pelatihan Survei dan Pemetaan	Pelaksana: Perangkat Desa Peserta: Seluruh anggota tim Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	Sosialisasi disampaikan dengan cara-cara yang mudah dipahami masyarakat

PELAKSANAAN SURVEI DAN PEMETAAN

Kegiatan	Pelaku	Keterangan
Penyusunan ceklist data, rencana kerja survei, pembagian tugas dan wilayah/kawasan kerja setiap tim dan mempersiapkan peralatan survei	Pelaksana: perangkat desa Peserta: Semua anggota tim Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	Terpenuhinya dukungan awal pelaksanaan kegiatan survei dan pemetaan
Melakukan transek dan pengamatan lapangan	Pelaksana: Seluruh anggota tim dengan dukungan Tim teknis dan LSM Peserta: seluruh anggota tim Fasilitator: Tim teknis bappeda dan LSM Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> > Setiap tim wajib melengkapi catatan gets survei dengan foto yang menggambarkan permasalahan dan potensi desa dan kawasan prioritas > Pelaksanaan survei dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati > Tim teknis berkewajiban memberikan bimbingan teknis dan mengawasi pelaksanaan survei dan pemetaan
Pengolahan Data untuk menyalurkan/ menyatukan hasil pengamatan lapangan	Pelaksana: Seluruh anggota tim Peserta: seluruh anggota tim Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	Hasil survei dan pemetaan disepakati bersama
Penyajian hasil Survei dan Pemetaan kedalam peta tematik digital dan skalatis yang dilengkapi foto kondisi eksisting	Pelaksana: Anggota Tim Peserta: Seluruh anggota tim Fasilitator: Tim teknis Bappeda dan LSM pendamping	<ul style="list-style-type: none"> > Peta tematik kawasan Desa disajikan dengan skala kotilitan 1:10.000 > Peta tematik kawasan prioritas dan tapak disajikan dengan skala kotilitan 1 : 5.000
Sosialisasi awal hasil survei dan pemetaan	Pelaksana: Perangkat Desa Peserta: Seluruh anggota tim Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	Sosialisasi disampaikan dengan cara-cara yang mudah dipahami masyarakat

Kegiatan	Pelaku	Keterangan
Konsultasi untuk menyepakati hasil Survei dan Pemetaan dengan tim teknis melalui forum konsultasi ditingkat Kabupaten	Pelaksana: TKPKD Kabupaten Peserta: SKPD, Tim teknis Bappeda, LSM Pendamping, Tim Survei dan Pemetaan, perangkat Desa dan Kecamatan serta lainnya Fasilitator: Tim Fasilitator	Hasil kesepakatan wajib diketahui disepakati penentu kebijakan pembangunan ditingkat Kabupaten (Kepala dinas, Ketua Bappeda dan Bupati)
Finalisasi hasil Survei dan Pemetaan Kawasan	Pelaksana: Aparat Desa didampingi Tim teknis Bappeda dan LSM Peserta: Seluruh tim dan perangkat desa Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	<ul style="list-style-type: none"> > Finalisasi dilakukan dengan bimbingan dan persetujuan tim teknis > Peta-peta tematik hasil survei dan pemetaan disajikan lengkap, informatif, kreatif dan mudah dipahami masyarakat
Lokakarya/Sosialisasi akhir hasil Survei dan Pemetaan ditingkat Desa	Pelaksana: Tim dan perangkat Desa Peserta: Seluruh anggota tim dan masyarakat sekitar Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping	Sosialisasi sebagai antisipasi munculnya dominasi pengaruh kesepakatan warga
Desiminasi akhir hasil Survei dan Pemetaan di tingkat Kabupaten	Pelaksana: TKPKD/Tim Teknis Bappeda, LSM Peserta: Bupati, SKPD, Legislatif, Kecamatan, Desa sebelah, lainnya Fasilitator: Tim Teknis Bappeda dan LSM Pendamping Fasilitator	> Desiminasi dilakukan dalam bentuk Lokakarya, dll

LAPORAN RONA AWAL KAWASAN (DESA - KAWASAN)

- a) Laporan rona awal disusun berdasarkan kesepakatan hasil survei dan pemetaan kawasan Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan/dokumen perencanaan Perencanaan Pembangunan Kawasan Desa.
- b) Rona awal merupakan narasi/deskripsi kondisi eksisting Kawasan Desa dan kawasan prioritas atau tingkat tapak yang mengungkap berbagai permasalahan dan potensi sosial, ekonomi, lingkungan/fisik dan kelembagaan pembangunan kawasan Desa secara lengkap, ringkas dan informatif.
- c) Penyajian Rona awal meliputi :
 - Narasi dan peta batas kawasan Desa dan kawasan prioritas atau tingkat tapak.
 - Narasi dan peta tematik sebaran pola dan struktur ruang kawasan Desa.
 - Narasi karakteristik sosial masyarakat.
 - Narasi dan Peta sebaran kegiatan ekonomi lokal dan Kelembagaannya
 - Narasi dan peta permasalahan kegiatan ekonomi (sumber penghidupan dan kehidupan)
 - Narasi dan peta permasalahan dan potensi penggunaan tanah/ pola ruang kawasan Desa (zona kawasan hutan, kawasan budidaya, kawasan rawan bencana, kawasan objek alam, karakteristik bentang alam, potensi flora fauna, permukiman, perdagangan, home industri, pertanian dan penggunaan lahan lainnya). Identifikasi juga permasalahan-permasalahan penggunaan tanah disekitar kawasan Desa yang akan menimbulkan dampak terhadap perkembangan Desa.
 - Narasi dan peta permasalahan dan potensi pengembangan sarana & prasarana
 - Narasi dan peta permasalahan Ruang terbuka Hijau dan Ruang Publik
 - Narasi dan peta daerah rawan bencana
 - Narasi dan peta status kepemilikan tanah dan pengelolaan kawasan prioritas.
 - Narasi karakteristik sosial dan peta sebaran potensi kawasan prioritas
 - Narasi karakteristik/kondisi tata letak struktur dan pola ruang di kawasan prioritas atau tingkat tapak.
 - Narasi karakteristik dan peta permasalahan sarana dan prasarana kawasan prioritas
- d) Deskripsi rona awal yang menguraikan permasalahan selanjutnya digunakan sebagai bahan dasar untuk analisis dan perumusan visi/gagasan pembangunan kawasan Desa.
- e) Antisipasi terjadinya ketidaksesuaian/ penyimpangan materi rona awal dengan isi kesepakatan hasil survei dan pemetaan di tingkat Desa dan Kabupaten.

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN LOKAL

- FASE 1: INISIASI Tahap 1: Kesadaran tentang adanya masalah internal & eksternal (oleh pemimpin lokal, warga, petugas atau pihak-pihak lainnya). Tahap 2: Penyatuan perhatian terhadap masalah (diskusi informal diantara pihak-pihak yang sadar akan adanya masalah). Tahap 3: Testing tentang adanya perhatian yang lebih luas (diskusi informal dengan tokoh masyarakat atau instansi terkait). Tahap 4: Mencari dukungan lebih lanjut (khususnya dari tokoh masyarakat, agen pembaharu, dinas, dll).
- FASE 2: PEMBENTUKAN Tahap 1: Undang untuk pertemuan (meliputi staf dari instansi terkait dan tokoh masyarakat. Hal yang pokok yang ingin dicapai dalam tahap ini adalah pemilihan panitia pengarah, yang kemudian bertugas menyusun draf rencana umum dan struktur kelompok). Tahap 2: Mengembangkan struktur kelompok sementara dan rencana umum (dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah, dan mencari informasi serta bantuan dari pihak-pihak terkait). Tahap 3: Pengesahan struktur dan rencana umum kelompok dalam suatu rapat umum (biasanya panitia pengarah terpilih sebagai pengurus kelompok).
- FASE 3: AKSI Tahap 1: Memeriksa rencana umum guna merumuskan tujuan jangka pendek (fokuskan pada satu proyek yang viable). Tahap 2: Mengembangkan rencana kerja dan menetapkan program kerja (misalnya memutuskan apa yang perlu dilakukan, sumberdaya, waktu, koordinasi, dll). Tahap 3: Implementasi rencana kerja (pelatihan, demonstrasi, dll). Tahap 4: Evaluasi dan dokumentasi kemajuan.
- FASE 4: PENGEMBANGAN/PEMBUBARAN ATAU RESTRUKTURISASI Tahap 1: Mengembangkan fungsi yang sudah ada (tangani lebih banyak masalah, capai sasaran atau target yang lebih luas, perbanyak inisiatif. Dalam hal kelompok tani, tingkatkan jumlah penyaluran saprodi, kurangi kredit macet, dll). Tahap 2: Kembangkan fungsi baru (tidak saja memperbanyak pelayanan buat anggota, tetapi juga kembangkan fungsi "berperan ke atas dan atau ke samping", menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang lebih luas. Tahap 3: Perluasan kelompok (mengembangkan jangkauan lokasi atau membentuk subkelompok baru yang sesuai).



**SEKIAN
TERIMA KASIH**



PEMANFAATAN HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF, UPDATING PETA PARTISIPATIF DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF

PELATIHAN ToT FASILITATOR DESA / CO

Hotel Royal Padjajaran Bogor, 27 - 30 Juli 2016

Disampaikan Oleh : Manager KM (Nurhidayat Ari Moenir)
Rabu, 27 Juli 2016 - Hotel Royal Bogor

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, PSDABM

Pendahuluan

Pemetaan partisipatif merupakan alat yang telah digunakan berbagai kelompok masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat, dan gerakan akar rumput dalam kurun waktu 30 tahun terakhir di Indonesia. Peta Partisipatif bukanlah hal statis (kecuali batas wilayah) namun merupakan hal dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat desa

Pemetaan Partisipatif sebagai satu alat (tools) peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengenali dan memahami kondisi wilayahnya serta merencanakan pengelolaan wilayahnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayahnya

Syarat Utamanya :

- adanya partisipasi dari sebanyak mungkin warga masyarakat dalam proses pemetaan.
- Proses dan hasil pemetaan partisipatif bisa digunakan masyarakat sebagai dokumen internal,
- Sebagai alat untuk bernegosiasi dengan berbagai pihak, dan lebih jauh
- meningkatkan kedaulatan masyarakat lokal atas wilayah kelolanya.

NILAI PENTING KAWASAN

- Nilai ilmiah, berkaitan dengan ilmu kebumihan, litologi, struktur geologi dan mineral, situs-situs fosil, arkeologi dan paleontologi, serta tempat berlindung flora dan fauna endemis.
- Nilai sosial budaya, yang mencakup aspek spiritual keagamaan; terutama menyangkut kepentingan ritual, bernilai estetika, rekreasi dan pendidikan.
- Nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi sumber air sungai bawah tanah, penghasil produk Hasil Hutan Bukan Kayu, pariwisata dan jasa lingkungan lainnya.

Substansi Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan

- Sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan secara terpadu.
- Sebagai pedoman untuk meningkatkan upaya perlindungan bentang-alam yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi hidrogeologi, proses geologi, flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya.
- Sebagai upaya perlindungan sumberdaya alam dan hutan

Pemetaan Partisipatif Sebagai Perencanaan Pengelolaan Kawasan

- Pembangunan yang rendah karbon dan pengurangan emisi
- Sebagai arahan awal dalam melakukan penyusunan dan arahan perencanaan Desa maupun RTRW Kabupaten
- Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan Desa maupun RTRW Kabupaten dalam periode 5 tahun

Pelatihan berorientasi pembelajaran

- Pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang ditata dalam bentuk rencana proses pembelajaran pada pelatihan dengan penekanan pada penggunaan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan tujuan pelatihan sehingga setelah pelatihan peserta memperoleh peningkatan kompetensi yang dibutuhkan
- Keterlibatan penuh dari pesertanya (peserta merupakan subyek)
 - Memberikan kebebasan kepada peserta dalam mengeksplorasi pengetahuan
 - Variasi dan keragaman dalam metode belajar
 - Motivasi internal (bukan semata-mata eksternal)
 - Adanya kegembiraan dan kesenangan dalam belajar
 - Integrasi belajar yang lebih menyeluruh ke dalam segenap kehidupan organisasi

Kompetensi Pemetaan Partisipatif

- Pengetahuan
- Keterampilan
- Sikap

Kompetensi Pengetahuan

- Memiliki pengetahuan mengenai hubungan kegiatan pemetaan partisipatif sebagai alat dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
- Memiliki pengetahuan mengenai cara membaca peta dan memperbaharui informasi pada peta secara partisipatif
- Memiliki pengetahuan cara membaca dokumen dan peta rencana tata ruang wilayah desa secara partisipatif
- Memiliki pengetahuan mensinergiskan RTRW Desa dengan RPJM Des
- Memiliki pengetahuan mengenai cara melakukan monitoring dan evaluasi RTRW

Kompetensi Keterampilan

- *Mampu membaca peta partisipatif dan peta lainnya*
- *Mampu melakukan pengambilan data spatial dengan GPS dan non spatial di masyarakat*
- *Mampu mengolah data lapangan menjadi peta manual dalam hal pembaharuan informasi peta partisipatif*
- *Mampu melakukan review RTRW Desa*
- *Mampu melakukan singronisasi dan sinergi antara RTRW Desa dengan RPJM Desa*
- *Mampu melakukan monitoring RTRW Desa*
- *Mampu melakukan evaluasi RTRW Desa*

Kompetensi Sikap

- *Memiliki rencana kerja dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang didapat dalam pelatihan ini*

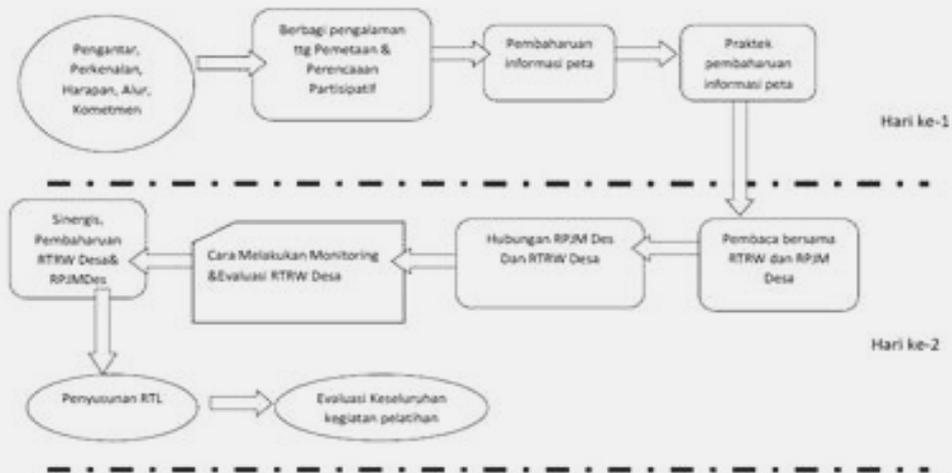
Tujuan Pelatihan Pemetaan

- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan hasil pemetaan partisipatif, melakukan pembaharuan informasi peta partisipatif
- Peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami, monitoring dan evaluasi RTRW untuk pembangunan yang berkelanjutan di tingkat komunitas

Target Pelatihan Pemetaan

- Masyarakat desa / dalam 1 komunitas di wilayah kelola SHK
- Jumlah peserta ideal 1 : 10 (1 fasilitator dengan 10 orang peserta)

Alur Pelatihan



Sekian
Terima Kasih



PLAN VIVO?

- Plan Vivo berbasis di Skotlandia yang telah membuat persyaratan untuk petani kecil dan masyarakat yang ingin mengelola lahan mereka lebih berkelanjutan.
- Plan Vivo telah mengembangkan Standar Plan Vivo, yang merupakan kerangka kerja untuk Imbal Jasa Ekosistem (PES) untuk petani pedesaan dan bergantung pada sumber daya alam untuk mata pencaharian masyarakat.

- Program penurunan emisi karbon berbasis masyarakat
- Dalam proses penurunan emisi karbon ini, menggunakan standar Plan Vivo untuk memudahkan pengukurannya
- Plan Vivo dipilih untuk menghitung besaran emisi karena sudah diterapkan di berbagai negara seperti di Amerika Latin, Afrika dan Asia. Plan Vivo adalah kerangka kerja untuk mendukung masyarakat dalam mengelola sumber daya alam mereka yang lebih berkelanjutan, dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat iklim, mata pencaharian, dan ekosistem

SISTEM PLAN VIVO

- desain berbasis masyarakat
 - Berbagai kegiatan penggunaan lahan : Reboisasi / penghijauan , agroforestry , konservasi hutan dan pemulihan , meningkatkan praktek pertanian
- Menulis Plan Vivos dan mengukur jasa karbon
 - rencana penggunaan lahan : Peserta menyusun rencana Vivos (rencana pengelolaan)
- Perjanjian PES (pembayaran untuk jasa ekosistem)
 - Produsen / kelompok masuk ke dalam perjanjian tertulis dengan koordinator proyek, yang setuju untuk melakukan pembayaran bertahap dan memberikan dukungan teknis terus.
- Pemantauan dan pembayaran
 - Koordinator Proyek Plan Vivo memonitor setiap saat. Ketika peserta setuju untuk memenuhi pemantauan target, pembayaran dapat dilakukan, memberikan insentif lanjutan. indikator pemantauan harus sederhana dan hemat biaya untuk mengukur, dan memungkinkan fungsi-fungsi teknis untuk mengambil tempat di tingkat lokal.



Figure 1: Plan Vivo project registration process

PROYEK IDEA NOTE (PIN)

- Langkah pertama untuk menjadi Proyek Plan Vivo (kita) adalah mengirimkan Proyek Idea Note (PIN) Plan Vivo.
- Pengembang proyek harus mengumpulkan informasi spesifik tentang proyek yang diusulkan dan menyampaikan laporan kepada Plan Vivo Foundation menggunakan template PIN standar Plan Vivo.

VALIDATION - APPROVAL OF TECHNICAL SPECIFICATIONS

Metode yang digunakan.

Spesifikasi teknis meliputi:

- o manajemen yang tepat dan sistem pemantauan dan langkah-langkah apa yang manajemen risiko harus diterapkan.
- o Analisis:
 - Dengan Project (apakah kegiatan akan mungkin tanpa dukungan dari proyek)
 - Kebocoran (apakah kegiatan tersebut akan menggantikan atau menyebabkan emisi karbon di tempat lain)
 - Ketetapan (apakah kegiatan tersebut kemungkinan mengakibatkan perubahan permanen penggunaan lahan dan bagaimana kemungkinan ketetapan dapat dimaksimalkan)
 - Dampak ekologi yang lebih luas, terutama dengan memper timbangkan pengaruh aktivitas pada kondisi tanah dan permukaan air.
- o Mengorganisir pertemuan dengan masyarakat
- o Diskusikan spesies apa yang bisa ditanam
- o SURVEI LOKASI (PLOT INVENTORY) - BIMBIM F

Plan Vivo Technical Guidance Manual

VALIDATION - APPROVAL OF PROJECT DESIGN DOCUMENT (PDD)

- o Proyek Plan Vivo (kita) menyerahkan PDD untuk ditinjau oleh Plan Vivo Foundation sebagai bagian dari proses validasi. Template PDD dapat diakses di www.planvivo.org



VALIDATION - FIELD VISIT

- Validasi berlangsung sbb:
 - Sebuah kunjungan lapangan oleh reviewer ahli, dipilih oleh Plan Vivo Foundation, mengkonfirmasi kita, menerapkan sistem sesuai dengan Standar Plan Vivo;
 - Persetujuan PDD dengan Plan Vivo Foundation;
 - Persetujuan spesifikasi teknis oleh Plan Vivo Foundation.

REGISTRATION

- dipublikasikan di situs Plan Vivo. Sekali terdaftar, proyek dapat masuk ke dalam kontrak penjualan dengan pembeli untuk Sertifikat PlanVivo.

○ TERIMA KASIH



Training of Trainers Pengukuran dan Penghitungan Carbon Unit SHK

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, PSDABM

Latar Belakang

- Deforestasi dan perubahan perubahan iklim merupakan ancaman bagi umat manusia, bencana lingkungan, pencemaran udara, krisis air, longsor, kehilangan keanekaragaman hayati dan masih banyak lagi masalah-masalah lingkungan lainnya mengakibatkan penurunan kualitas hidup baik secara ekonomi maupun kesehatan.
- Penelitian FAO menyatakan pada tahun 1990 tutupan hutan di negri ini telah berkurang dari 74% menjadi 56% dalam jangka waktu 30-40 tahun. (FAO, 1993).
- Namun penjelasan lain menerangkan bahwa deforestasi di pulau-pulau terluar jawa terutama adalah sebagai peningaktan kepadatan penduduk dan pertumbuhan petani kecil/rakyat di kawasan-kawasan ini. Data kepadatan penduduk menunjukan sebagai korelasi negatif yang kuat dengan tutupan hutan (FAO, 1990 : 10. Barbier *et al*, 1993 Fraser, 1996).
- SKEMA KARBON PLANVIVO

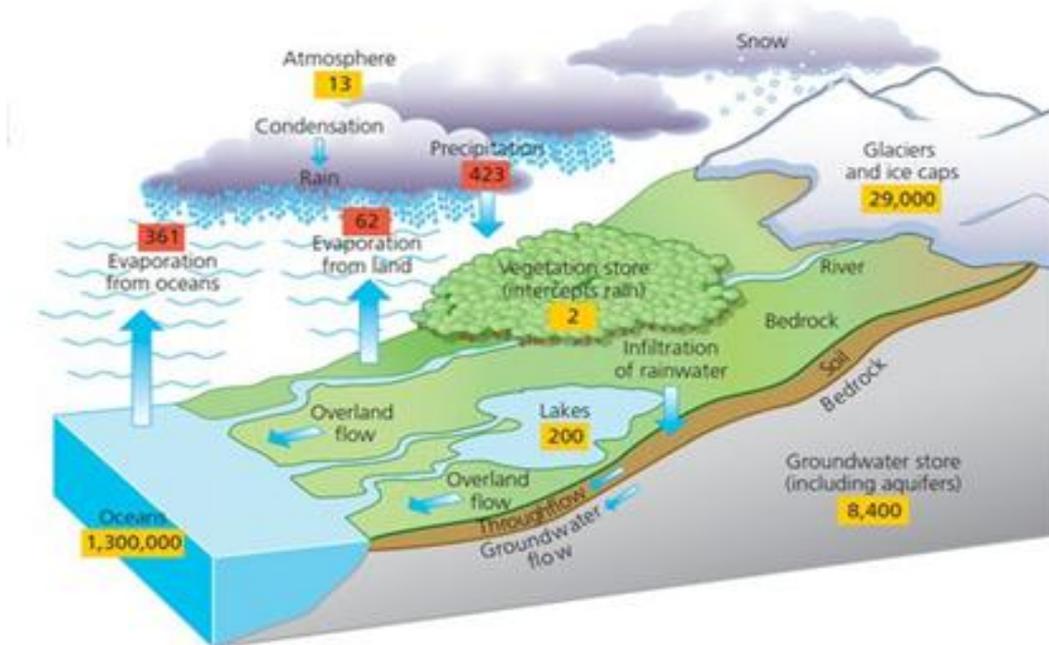
Deforestasi



Bencana



Siklus Hidrologi



Mengapa ini bisa terjadi??

- Pagu Alokasi Anggaran KLHK Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 6.684.537.201.920,- (enam triliun enam ratus delapan puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Sejak 2009 hingga 2013, hutan Indonesia yang hilang luasnya mencapai 4,6 juta hektar, sama dengan luas Provinsi Sumatera Barat. Bahkan dalam 10 tahun ke depan, Forest Watch Indonesia memprediksi hutan di Riau akan hilang, diikuti dengan Kalimantan Tengah dan Jambi

Mengapa ini bisa terjadi??

- Pagu Alokasi Anggaran KLHK Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar Rp. 6.684.537.201.920,- (enam triliun enam ratus delapan puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- Sejak 2009 hingga 2013, hutan Indonesia yang hilang luasnya mencapai 4,6 juta hektar, sama dengan luas Provinsi Sumatera Barat. Bahkan dalam 10 tahun ke depan, Forest Watch Indonesia memprediksi hutan di Riau akan hilang, diikuti dengan Kalimantan Tengah dan Jambi

BPS 2014

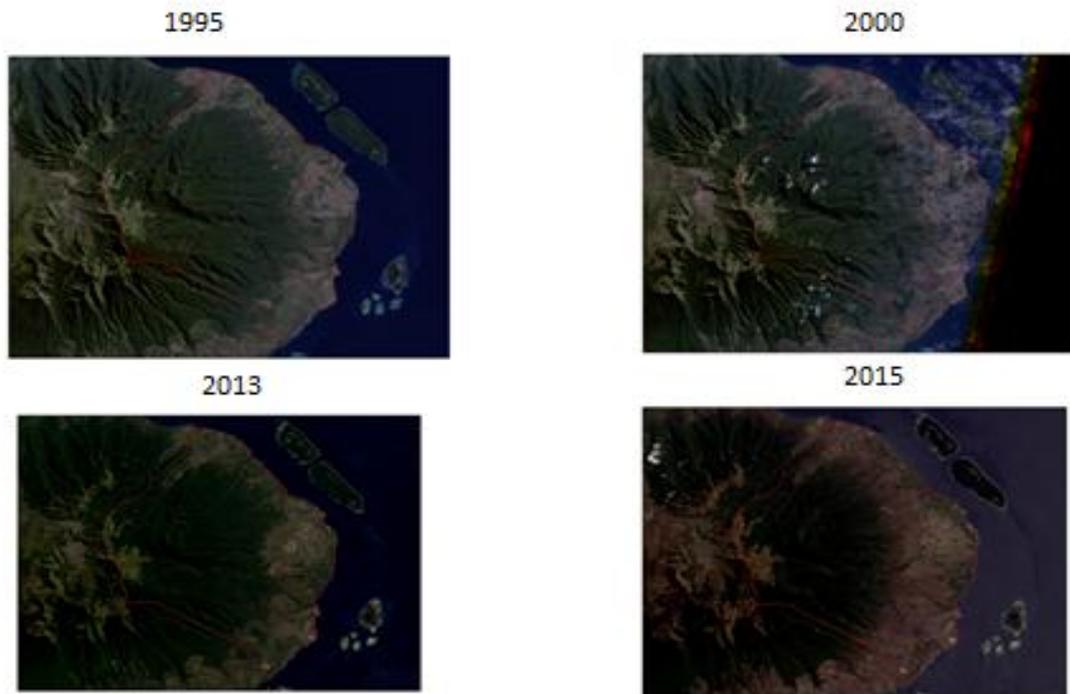
STATISTIK

No	Jabatan	Jumlah
1	JFT Polisi Kehutanan	3.928
2	JFU Polisi Kehutanan	532
3	JFU Jagawana	84
4	JFT Penyuluh Kehutanan	2.933
5	JFU Penyuluh Kehutanan	542
6	JFU Pengendali Ekosistem Hutan	325
TOTAL		8.344

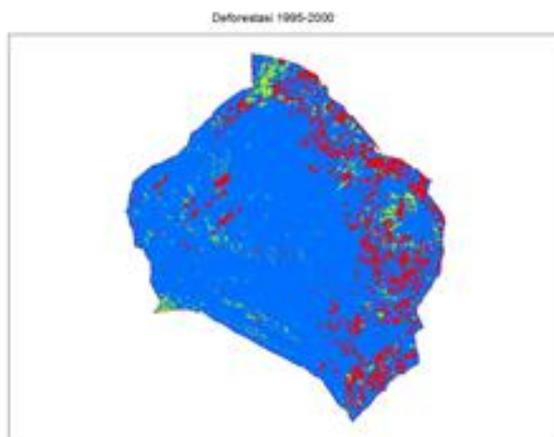
Luas Hutan : 884.950 km²
Luas Wilayah Negara : 1.904.569 km²
Persentase : 46,46%
Lokasi : Benua Asia



Contoh deforestasi NTB



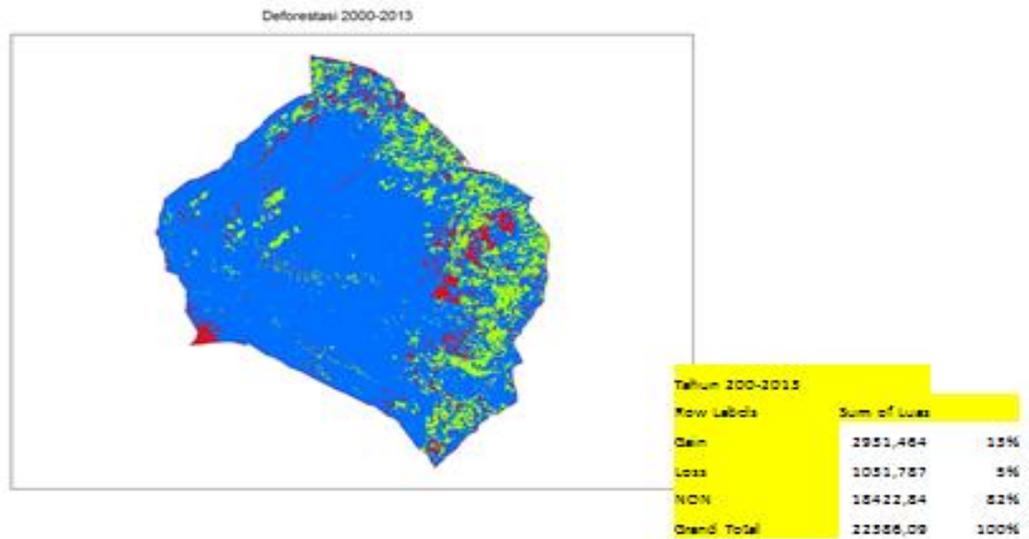
Deforestasi 1995-2000



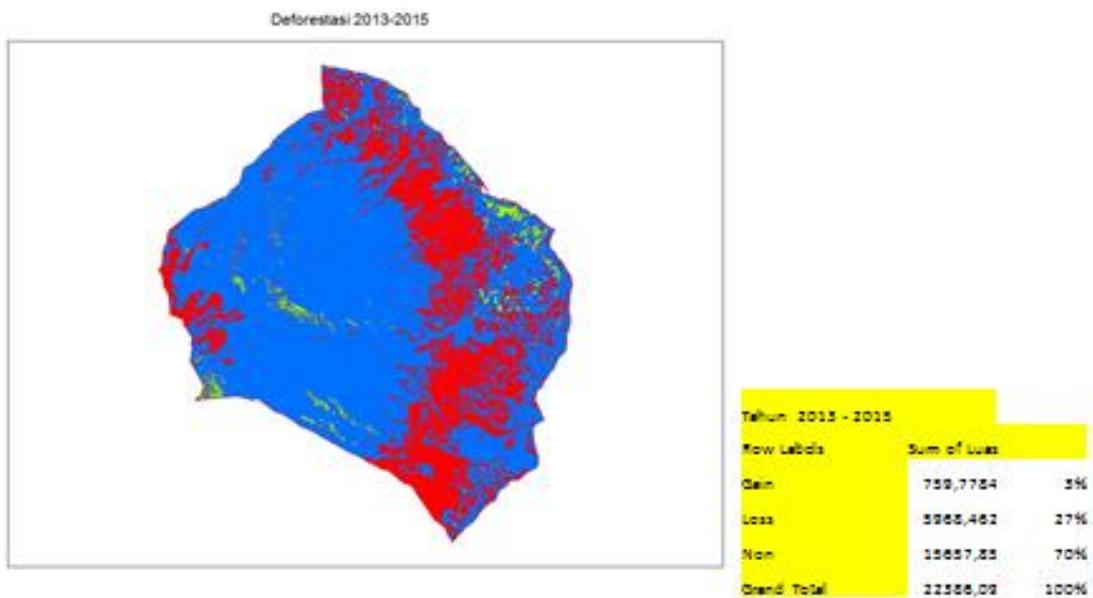
Tahun 1995 - 2000

Row Labels	Sum of Luas Persegi	
Gain	825,8177	4%
Loss	2591,512	12%
NON	18969,18	85%
Grand Total	22386,08	100%

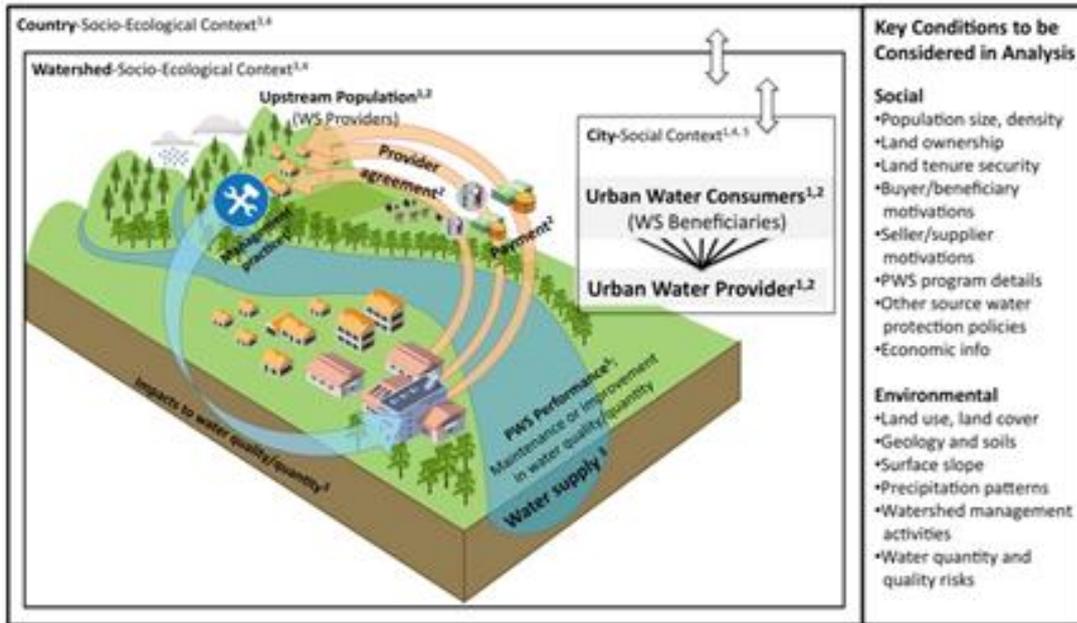
Deforestasi 2000-2013



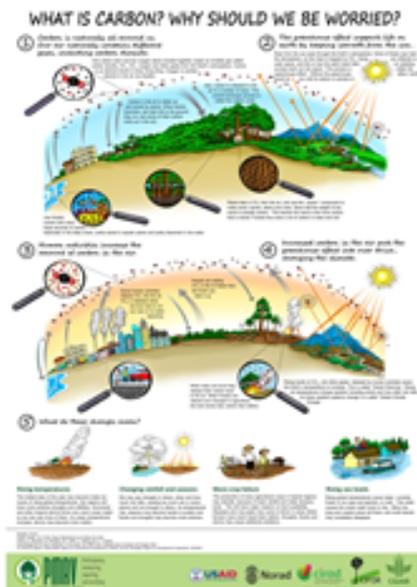
Deforestasi 2013-2015



Jasa Lingkungan Bagi Masyarakat



Skema Karbon Planvivo



Masyarakat Desa (penjaga Hutan)

•Mendapatkan bayaran dari masyarakat Urban.

Jasa Menjaga Hutan

Imbal Jasa.
 Suplai Air Bersih, Peningkatana Kualitas Udara, Ketersediaan air.
 >Bencana Banjir
 >Longsor
 >Sedimentraspot

Sistem Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (SHK), Menggunakan Skema Karbon Plan vivo

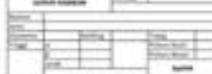
Wilayah kelola SHK menjadi *icon* atau potret keberadaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dari Sistem Hutan Kerakyatan (SHK).

Gambaran inti keberadaan SHK ini ditunjukkan oleh adanya “otonomi” pelaku (Komunitas pelaku) dalam mengelola wilayah hidupnya untuk menjamin kelangsungan hidup dan keberlanjutan ruang hidup mereka.

Dengan melakukan sertifikasi dan monitoring secara berkala yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan jasa lingkungan dari hasil sertifikasi karbon tersebut

Persiapan Pengambilan data pada sertifikasi planvivo

Alat yang digunakan

		
1. Priband	2. Pita ukur	3. Kompas
		
4. GPS	5. Clinometer	6. Tali rafia
		
7. Roolmeter	8. Label pohon	9. Kamera
		
Tally sheet	Alat tulis	Papan jalan

Penggunaan GPS



Membuat way point

>Way point

1. Pilih Mark Waypoint
2. Pilih potion :

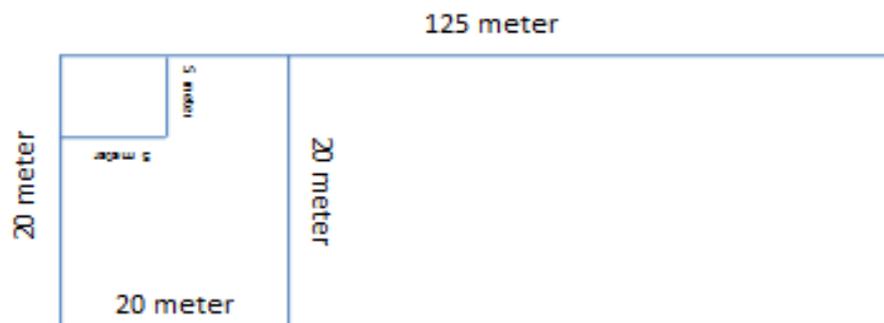
Pili save (maka way point akan disimpan dalam memori)

Cara menyalaakan trak setting

>Track setting

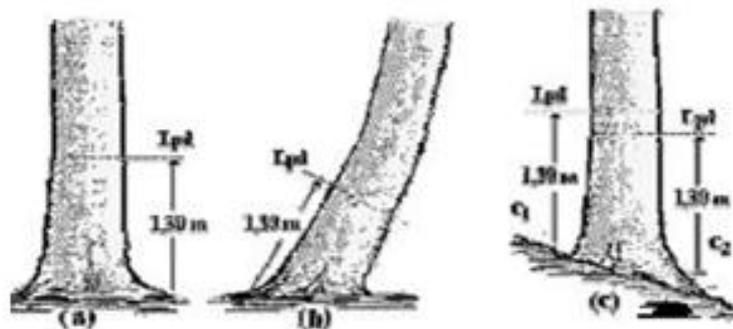
1. Select> Setup > Tracks
 - Tracks Log - trunst track recording on or off
 - Metode perekaman > pilih track recording metode. Auto

Penggunaan meteran, tambang dan rafia (Pembuatan Plot)



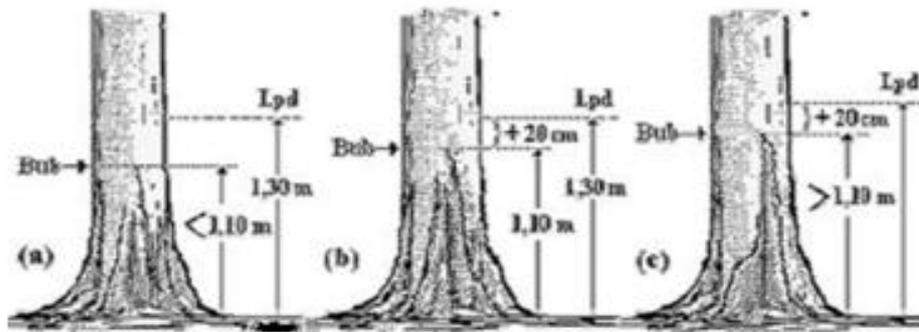
Pengukuran diameter dan tinggi pohon

Kondisi pohon berdiri



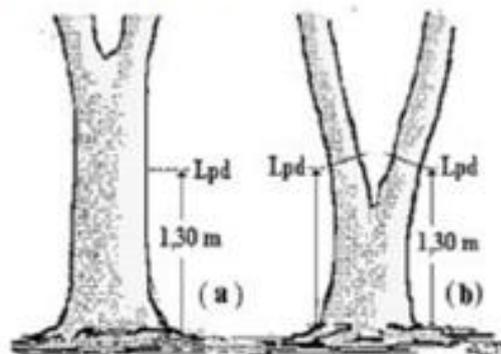
1. Pengukuran pohon di sepakati 1.3 meter dari permukaan tanah
2. Jika Pohon miring maka pengukuran (LDP) di Ukur pada bagian miring batang sebelah atasnya (gambar B)
3. Pada pengukuran untuk kelereng/lahan miring diukur seperti pada (gambar c)

Kondisi pohon berbanir



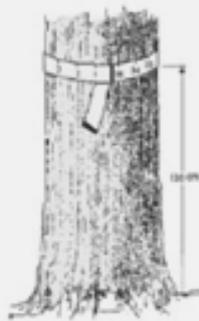
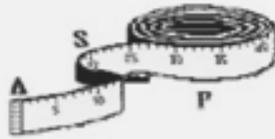
1. Jika Batas Ujung Banir (BUB) Kurang dari 110 cm, maka pengukurannya diukur setinggi 1,3 m dari permukaan tanah (ga
2. Jika (BUB) jika bub tepat setinggi 110 cm maka pengukuran ditambah dengan 20 cm pada (gambar B)
3. Jika Pengukuran bub lebih dari 110 cm maka bub + 20 cm

Kondisi pohon bercabang



1. Jika percabangan lebih dari 1.3 m maka pengukuran akan tetap 1.3 m (Gambar a)
2. Jika tegakan kurang dari 110 cm maka pengukuran dilakukan pada dua batang (gambar b)

Alat ukur diameter



Pengukuran diameter dengan menggunakan pita ukur

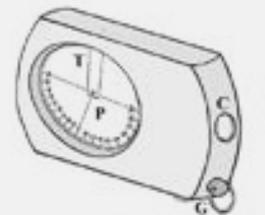
- pita ukur di ikat kan pada batang pohon setinggi 1.3 meter
- Hasil ukurunya adalah keliling
- Untuk mencari diameter maka $D = K/3.14$

Pengukuran tinggi pohon

Alat ukur



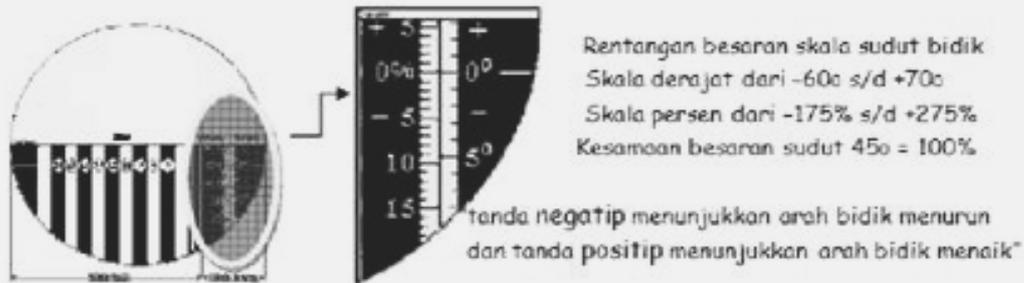
Busur



Spiegel Reloskop

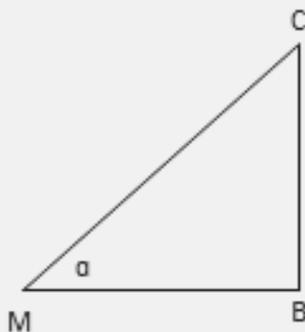


Spiegel Reloskop



Metode Pengukuran

Pengukuran dengan menggunakan rumus phyta goras

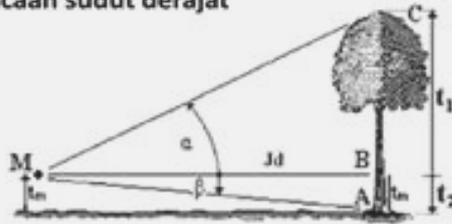


MBC untuk menunjukan
 α
Bahwa $\tan \alpha = BC/MB$;
Maka
 $BC = MB \times \tan \alpha$

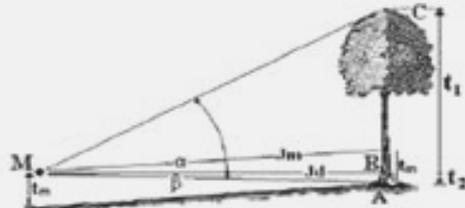
Ba

Pengukuran

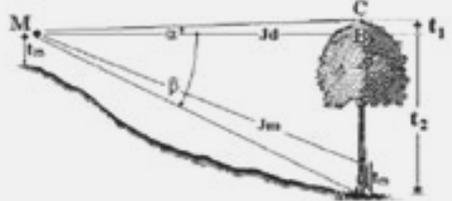
Pembacaan sudut derajat



$$T = (t_1 + t_2) = Jd.tg\alpha + Jd.tg\beta = (tg\alpha + tg\beta).Jd$$



$$T = (t_1 + t_2) = Jd.tg\alpha + Jd.tg\beta = (tg\alpha + tg\beta).Jd$$



$$T = (t_1 + t_2) = Jd.tg\alpha + Jd.tg\beta = (tg\alpha + tg\beta).Jd$$



Perhitungan Karbon

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, PSDABM

Jumlah Plot

Plot Quantity - Aboveground Carbon

The results for generally 30m x 30m plots are shown in the grid below.

RESULTS (CALCULATED) (M3/HA)

Number of plots: 200
 Number of trees: 200
 Number of trees per plot: 200
 Number of trees per hectare: 200
 Number of trees per hectare: 200
 Number of trees per hectare: 200

Plot No	Species	Area	Number of trees	Number of trees per hectare	Number of trees per hectare	Number of trees per hectare
Plot 1	Rapu	100	100	1.00	1.00	1.00
Plot 2						
Plot 3						
Plot 4						
Plot 5						
Plot 6						
Plot 7						
Plot 8						
Plot 9						
Plot 10						

NETWORK CALCULATIONS

RESULTS

Standard Deviation: 200
 Total Area: 200
 Number of plots: 200
 Number of trees: 200
 Number of trees per hectare: 200
 Number of trees per hectare: 200
 Number of trees per hectare: 200

Results - Aboveground Carbon - Number of plots to be used

Plot No	Species	Area	Number of trees	Number of trees per hectare	Number of trees per hectare	Number of trees per hectare
Plot 1	Rapu	100	100	1.00	1.00	1.00
Plot 2						
Plot 3						
Plot 4						
Plot 5						
Plot 6						
Plot 7						
Plot 8						
Plot 9						
Plot 10						

Standard Deviation

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Standard Error

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Confidence Interval

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \cdot SE$$

Standard Error

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Confidence Interval

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \cdot SE$$

Standard Error

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Confidence Interval

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2} \cdot SE$$

-std error 5%
- Luas hutan project

Karbon HD Durian rambun



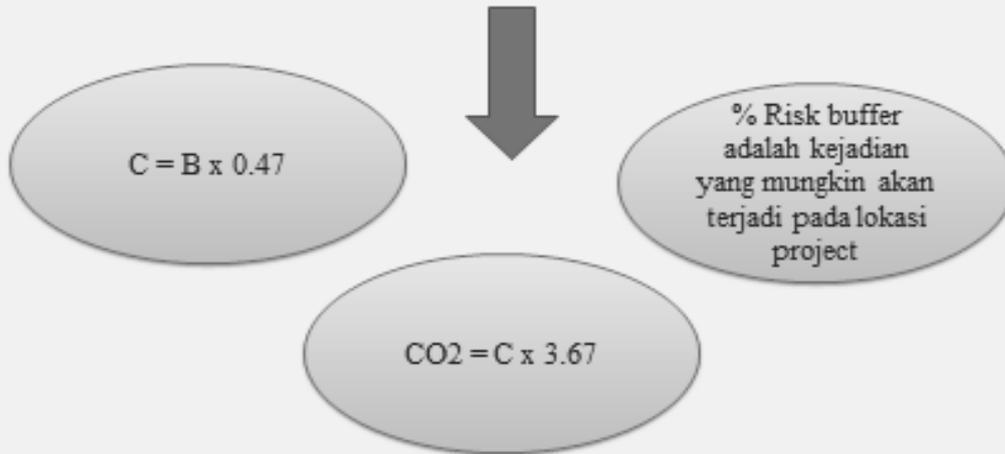
No	Nama Daerah	Famili	Nama Botani	Persamaan alometrik	Diameter (cm)	TT (m)	TBC (m)	BJ (g/m ³)	Biomassa (kg/pohon)
1									
2									
3									

Atlas kayu Indonesia

No	Persamaan Alometrik	Jenis	Lokasi	Referensi
1	$B = 0.11\rho D^{2.62}$	Hutan sekunder campuran	Muara Bungo, Jambi	Ketterings (2001)
2	$B = 0.903 (D^{2H})^{0.684}$	Mahoni	Hutan rakyat, Jawa Tengah	BKPH Jawa-Madura (2009)
3	$B = 0.0124 D^{2.444}$	Karet	Bngkulu	Yulyana (2005)
4	$B = 0.2822 D^{2.0636}$	Kopi	Jawa Timur	Arifin (2001)

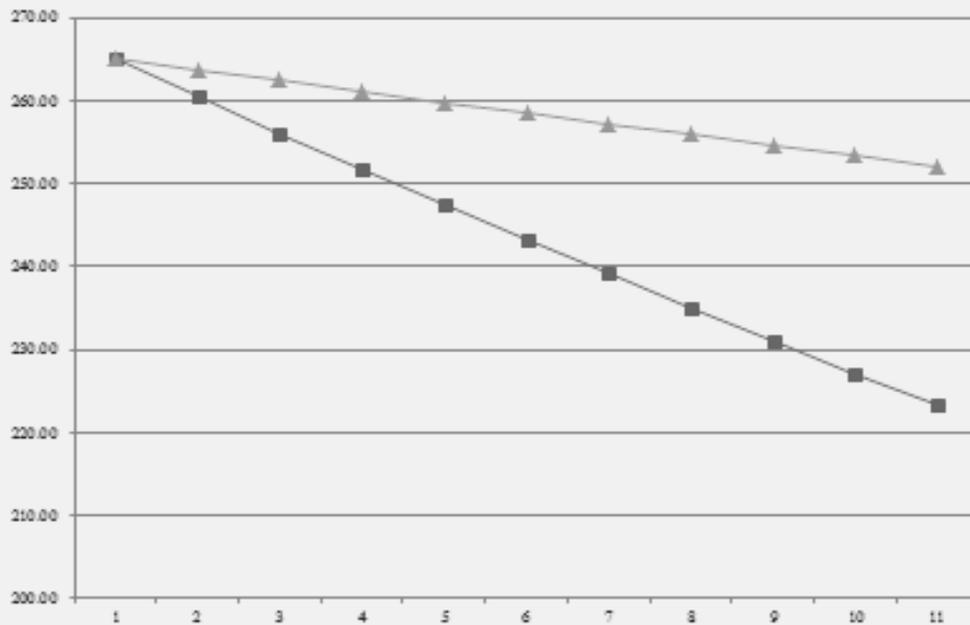
Persamaan alometrik yang dipilih menggunakan pendekatan kesamaan jenis, famili, topografi atau tipe hutan. Agar bias dari perhitungan biomasa bisa diminimalkan

No	Nama Botani	Biomasa (ton/ha)	C (ton/ha)	CO _{2e} (ton/ha)	Risk Buffer (%)
1					
2					
3					



Hutan Desa Talang Tembago dengan luas 5348 ha terjadi kehilang hutan 1.7 % (Baseline) setiap tahun. Berdasarkan informasi tersebut, kita bisa menghitung karbon hutan

Proj	Accumulative Baseline		Proj. Scen	Proj Benefit	Proj Benefit	Net Carbon Benefit
Year	Areal (ha)	Carbon stock (tonnes C)	Carbon stock (tonnes C)	(tonnes C)	(ton CO ₂)	Risk buffer 12% (ton CO ₂)
1	2	3	4	5	6	7
0	5,348	265.10	265.10	-		
1	5,257	260.59	195.55	(65.04)	(238.70)	(210.06)
2	5,168	256.16	126.35	(64.77)	(237.71)	(209.18)
3	5,080	251.80	57.49	(64.50)	(236.72)	(208.31)
4	4,994	247.52	(11.02)	(64.23)	(235.72)	(207.44)
5	4,909	243.32	(79.19)	(63.96)	(234.73)	(206.57)
6	4,825	239.18	(147.01)	(63.69)	(233.75)	(205.70)
7	4,743	235.11	(214.50)	(63.42)	(232.76)	(204.83)
8	4,663	231.12	(281.65)	(63.15)	(231.77)	(203.96)
9	4,583	227.19	(348.47)	(62.89)	(230.79)	(203.10)
10	4,505	223.32	(414.95)	(62.62)	(229.81)	(202.23)
		Net Carbon Benefit	Per annum (co2)			(206.14)



Project Summary	
Propinsi	Jambi
Status Hutan	Hutan Desa
Intervensi	-
Baseline	Unplanned Deforestation
Activities	REDD
Carbon Stock (tonnes C/ha)	265.10
Baseline Rate	1.7 %
Project Scenario	0.5 %
Project Benefit (tonnes CO ₂ e/year)	206.14

●BAB 6

MODUL PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

6.1 DESKRIPSI SINGKAT

Dalam modul Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environment and Social Management System; ESMS*) ditujukan untuk:

- ❖ Menyusun rencana mitigasi untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, dan memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat (termasuk kelompok rentan dan wanita)
- ❖ Memastikan keluhan dan komplain masyarakat atau stakeholder lain, ditanggapi dan dikelola dengan baik
- ❖ Memastikan keterlibatan masyarakat yang akan terkena dampak dalam seluruh siklus proyek
- ❖ Memastikan semua informasi terkait dampak lingkungan dan sosial yang relevan diinformasikan kepada masyarakat

Di samping itu akan disajikan Analisis Bentang Alam dan Kehidupan (*Landscape-Lifescape Analysis*). Analisis situasional antara investasi Proyek Kemakmuran Hijau dengan lingkungan sosial sekitarnya serta lingkungan alam untuk mengidentifikasi risiko dan peluang, yang dapat menginformasikan desain proyek dan implementasi, serta meningkatkan hasil yang berkelanjutan.

Di samping itu, diaparkan pula tentang Kajian Lingkungan Hidup, yang berisi tentang:

- ❖ Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan
- ❖ Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/ LH
- ❖ Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

6.2 TUJUAN PEMBELAJARAN

6.2.1 TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Tujuan Pembelajaran Umum untuk kegiatan pelatihan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMS) adalah memberikan pemahaman kepada fasilitator pentingnya suatu kondisi lingkungan yang lebih baik sebagai prinsip dasar warga Negara dan memberikan keterampilan penggalian data LLA & ESMS

6.2.2 TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) peserta mampu:

1. Memahami kebijakan lingkungan dalam pengelolaan SDA
2. Memahami dampak perubahan lingkungan dari aktivitas yang merusak

3. Memahami kondisi Bentang Alam Pembangunan di wilayahnya serta bentang alam investasi yang akan dilakukan
4. Memahami dan Menguasai Teknik pengumpulan data terkait LLA dan ESMS

6.3 POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Pokok Bahasan dalam pelatihan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, yakni:

1. Kebijakan Lingkungan Hidup (*Environment and Social Management System; ESMS*)
2. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
3. Analisis Bentang Alam dan Kehidupan (*Landscape-Lifescape Analysis; LLA*).
4. Metode Penggalan data dan Analisis LLA dan ESMS

6.4 PERSYARATAN PESERTA

6.4.1 PERSYARATAN PENDIDIKAN PESERTA

Peserta mempunyai pendidikan minimal Diploma dan telah lulus minimal 3 tahun.

6.4.2 PERSYARATAN PENGALAMAN PESERTA

Peserta bersungguh-sungguh untuk belajar dalam kegiatan pelatihan terkait:

- ❖ Kebijakan Lingkungan Hidup (*Environment and Social Management System; ESMS*)
- ❖ Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
- ❖ Analisis Bentang Alam dan Kehidupan (*Landscape-Lifescape Analysis; LLA*).
- ❖ Metode Penggalan data dan Analisis LLA dan ESMS

6.5 BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, flip chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi Lembar Latihan dan Lembar Rencana Dokumentasi.

Di samping itu, alat dan bahan ajar yang diperlukan:

1. Kertas flipchart atau kertas plano
2. Kertas HVS
3. Komputer dan printer
4. Tinta printer
5. Spidol dan ballpoint
6. Kamera foto / Handphone camera
7. Buku Catatan

6.6 METODE PEMBELAJARAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui [1] Diskusi umum, [2] Curah pendapat, dan [3] Penugasan individual

6.7 LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 255 jam pelajaran per hari (T=4.5 jp, P=0jp, PL=0jp) @45 menit, selama 1 hari jangka waktu Training of Trainer (ToT). Untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta maka, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

❖ Langkah 1: Pengkondisian (15 Menit)

1. Penyegaran dan pencairan suasana (*ice-breaking*),
2. Pemandu/pengajar menggali harapan peserta tentang materi dan keterampilan yang ingin dicapai melalui sesi ToT ini,
3. Pemandu/pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan metode yang akan digunakan,
4. Menggali pendapat peserta tentang “Pengelolaan Lingkungan dan Sosial”. Proses pembelajaran menggunakan metode dimana semua peserta terlibat secara aktif,
5. Berdasarkan pendapat peserta, pemandu/pengajar menjelaskan tentang “Pengelolaan Lingkungan dan Sosial”.

❖ Langkah 2: Pengkajian Pokok Bahasan (210 Menit)

1. Pemandu/pengajar menyampaikan pokok bahasan:
 - ❖ Kebijakan Lingkungan Hidup (Environment and Social Management System; ESMS)
 - ❖ Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
 - ❖ Analisis Bentang Alam dan Kehidupan (Landscape-Lifescape Analysis; LLA).
 - ❖ Metode Penggalan data dan Analisis LLA dan ESMS
2. Pemandu/pengajar member kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta.
3. Pemandu/pengajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga antar peserta juga terjadi diskusi dan interaksi yang baik.
4. Pemandu/pengajar menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok tentang:
 - ❖ Kebijakan Lingkungan Hidup (Environment and Social Management System; ESMS)
 - ❖ Pengelolaan Lingkungan dan Sosial
 - ❖ Analisis Bentang Alam dan Kehidupan (Landscape-Lifescape Analysis; LLA).
 - ❖ Metode Penggalan data dan Analisis LLA dan ESMS

❖ Langkah 3: Rangkuman (45 Menit)

1. Pemandu/pengajar merangkum sesi pembelajaran.
2. Peserta dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan pengajar memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari pengajar maupun dari peserta lain.
3. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan.
4. Pemandu/pengajar menutup sesi pembelajaran dengan memastikan bahwa TPU dan TPK sesi telah tercapai.

6.8 URAIAN MATERI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Terdapat beberapa Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni: UUD 1945

- ❖ Pasal 28h ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- ❖ Pasal 33 ayat (1) “Perkonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.
- ❖ Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
- ❖ Pasal 33 ayat (4) “Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berkaitan dengan dasar hukum tersebut, secara khusus dasar hukum Kajian Lingkungan hidup adalah:

- ❖ UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- ❖ PP No.27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan
- ❖ Permen LH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- ❖ Permen LH No. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan AMDAL.
- ❖ Permen LH No 17 Tahun 2012 tentang pedoman pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL
- ❖ PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

Terkait dengan dasar hukum di atas, dapat disarikan bahwa Fungsi Kajian Lingkungan meliputi:

- ❖ Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan
- ❖ Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/ LH
- ❖ Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

Kajian Lingkungan Hidup tersebut bermanfaat untuk

- ❖ Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek
- ❖ Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan
- ❖ Menghemat penggunaan SDA
- ❖ Kemudahan dalam memperoleh kredit bank
- ❖ Untuk memperoleh legalitas kegiatan berwawasan lingkungan berupa Ijin Lingkungan dari Pemda setempat

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan yang melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan. Pengendalian pencemaran lingkungan dilaksanakan dalam rangka Pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: [1] Pencegahan, [2] Penanggulangan, dan [3] Pemulihan. Pengendalian pencemaran

lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam rangka menjaga Baku Mutu Lingkungan, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:[1] memenuhi baku mutu lingkungan hidup, dan [2] mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, meliputi:

- ❖ Mengubah bentuklahan dan bentang alam
- ❖ Eksploitasi SDA
- ❖ Proses Kegiatan yang potensial menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kemerosotan SDA
- ❖ Proses Kegiatan yg hasilnya dpt mempengaruhi lingkungan alam, buatan serta sosial budaya
- ❖ Proses kegiatan yang hasilnya dpt mempengaruhi pelestarian Kawasan KSDA/cagar budaya
- ❖ Introduksi jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik
- ❖ Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- ❖ Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan hidup
- ❖ Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi mempengaruhi pertahanan keamanan negara

Untuk mengidentifikasi adanya dampak lingkungan, terdapat empat (4) tahapan dalam proses kajian lingkungan, yakni:

- ❖ Identifikasi Komponen Rencana Kegiatan dan Rona Lingkungan Awal di Lokasi Rencana Kegiatan (Pada BAI)
- ❖ Proyeksi/prakiraan perubahan rona lingkungan akibat rencana kegiatan (Identifikasi dampak)
- ❖ Evaluasi Dampak lingkungan
- ❖ Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Komponen rencana kegiatan yang dimaksud meliputi: [1] Identifikasi Komponen Rencana Kegiatan yang akan dilakukan di Lokasi Rencana Kegiatan (Pada BAI), [2] Rencana kegiatan biasanya terbagi menjadi tahapan kegiatan seperti ; pra-konstruksi (pra-program), konstruksi (saat program berjalan), dan pasca-konstruksi (setelah program dilaksanakan), dan [3] Uraian secara rinci setiap item kegiatan yang akan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan.

Sedangkan Rona Lingkungan (Komponen Lingkungan), di ana dalam LLA dikenal sebagai Kondisi Bentang Alam, akan meliputi kegiatan: [1] Identifikasikan Komponen Rona Lingkungan Hidup Awal (RLHA) di Lokasi Rencana Kegiatan (Pada BAI), dan [2] Komponen lingkungan yang diidentifikasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen seperti; Geo-fisik-Kimia, Biologi, Sosekbud dan Kesehatan Masyarakat

Untuk kegiatan Prakiraan Perubahan Rona Lingkungan (Identifikasi Dampak) meliputi kegiatan: [1] identifikasi dampak yang mungkin timbul pada setiap komponen lingkungan yang dikarena rencana kegiatan yang akan dilakukan, dan [2] pembuatan matrik identifikasi dampak lingkungan yang timbul akibat adanya rencana kegiatan. Pada kegiatan Evaluasi Dampak akan dilakukan: [1] prakiraan dampak penting dari hasil identifikasi dampak dan [2] evaluasi secara holistik terhadap dampak penting tersebut.

SISTEM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMS)

Tujuan utama dalam sistem pengelolaan dampak lingkungan dan sosial (ESMS0 meliputi:

- ❖ Menyusun rencana mitigasi untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, dan memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat (termasuk kelompok rentan dan wanita)
- ❖ Memastikan keluhan dan komplain masyarakat atau stakeholder lain, ditanggapi dan dikelola dengan baik
- ❖ Memastikan keterlibatan masyarakat yang akan terkena dampak dalam seluruh siklus proyek
- ❖ Memastikan semua informasi terkait dampak lingkungan dan sosial yang relevan diinformasikan kepada masyarakat

Sedangkan alur utama dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial (ESMS0 meliputi:

- ❖ Identifikasi Kategori Proyek/Program
- ❖ Pelingkupan Dampak Lingkungan Dan Sosial
- ❖ Penyiapan Dokumen Kajian Lingkungan (Amdal, Ukl-Upl Atau Sppl)
- ❖ Konsultasi Dan Diskusi Dengan Pihak Terkait (Mca-I Dan Blh Lokasi Kegiatan)
- ❖ Proses Persetujuan Esms Dan Ijin Lingkungan
- ❖ Pelaksanaan Esms, Pemantauan Dan Evaluasi.

Tabel 6.1: Kategori Dampak Lingkungan dalam Pelaksanaan Proyek

Kategori Proyek	Dampak Lingkungan	Mitigasi
Kategori A	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Proyek yang diusulkan memiliki dampak penting negatif terhadap lingkungan yang tidak dapat dirubah, berbeda-beda atau belum tersedia teknologi untuk menanggulangnya. ❖ Dampak dapat mempengaruhi area yang lebih besar dari lokasi atau fasilitas untuk pekerjaan fisik. ❖ Termasuk dalam daftar kegiatan yang tercantum dalam KepmenLH No 05 year 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Harus Dilengkapi AMDAL 	Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Diperlukan Surat Ijin Lingkungan
Kategori B	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Proyek memiliki potensi dampak lingkungan proyek yang diusulkan kurang merugikan dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan proyek kategori A. ❖ Dampak terbatas di lokasi proyek, dan tersedia teknologi untuk penanggulangnya. ❖ Tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang tercantum dalam KepmenLH No 05 year 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Harus Dilengkapi AMDAL 	Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
Kategori C	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jika proyek yang diusulkan memiliki dampak minimal atau tidak memiliki dampak lingkungan yang merugikan. ❖ Tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang tercantum dalam KepmenLH No 05 year 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Harus Dilengkapi AMDAL 	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) Hidup

Dalam kegiatan Identifikasi Dampak Lingkungan dan Sosial, terdapat 4 tahapan, yakni:

- ❖ Penyusunan Uraian Rencana Kegiatan Program
- ❖ Penyusunan Rona Lingkungan Awal (Acuan Analisis Lla)

- ❖ Identifikasi Dampak Yang Timbul Dari Kegiatan (Acuan Cek List Penyaringan Dan Pelingkupan Esme- Proyek Kemakmuran Hijau, Ifc Standar Dan Permen Lh No.5 Tahun 2012)
- ❖ Koordinasi Dan Pelaporan Ke Blh Untuk Penentuan Katagori Proyek/Program (Harus Katagori Tidak Amdal)

ANALISIS BENTANG ALAM DAN KEHIDUPAN (LLA)

Analisis Bentang Alam dan Bentang Kehidupan merupakan analisis situasional antara investasi Proyek Kemakmuran Hijau dengan lingkungan sosial sekitarnya serta lingkungan alam untuk mengidentifikasi risiko dan peluang, yang dapat menginformasikan desain proyek dan implementasi, serta meningkatkan hasil yang berkelanjutan

Analisis Bentang Alam dan Kehidupan diperlukan untuk:

- ❖ Memastikan intervensi sosial untuk memaksimalkan sumber daya manusia, sosial dan modal alam
- ❖ Perlindungan terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan karena kurang informasi sosial dan lingkungan
- ❖ Mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecemburuan sosial yang memecah-belah masyarakat lokal karena merasa dikecualikan dari proyek
- ❖ Memberi masukan penting bagi desain proyek/proposal serta memastikan keberlanjutan proyek

Contoh-comtoh Bentang Alam meliputi:

- ❖ Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sub-DAS
- ❖ Kondisi lahan/lingkungan yang unik (kawasan gambut, danau, taman nasional, kawasan karst (kapur), suaka alam, atau interaksi antar kawasan ini, dll)
- ❖ Batasan kewenangan/administrasi (Kabupaten atau antar Kabupaten, Kecamatan, beberapa kecamatan, beberapa desa)
- ❖ Atau lintas batasan di atas.

Adapaun bentuk analisis Bentang Alam dan Kehidupan meliputi:

- ❖ Bentang Alam Investasi (BAI) (lokasi dimana Proyek Kemakmuran Hijau Melakukan kegiatan Utama)
- ❖ Bentang Alam Pembangunan (BAP) (Lingkungan sekitar yang terkena dampak atau memberi dampak pada investasi Proyek Kemakmuran Hijau)

6.9 BAHAN TAYANG



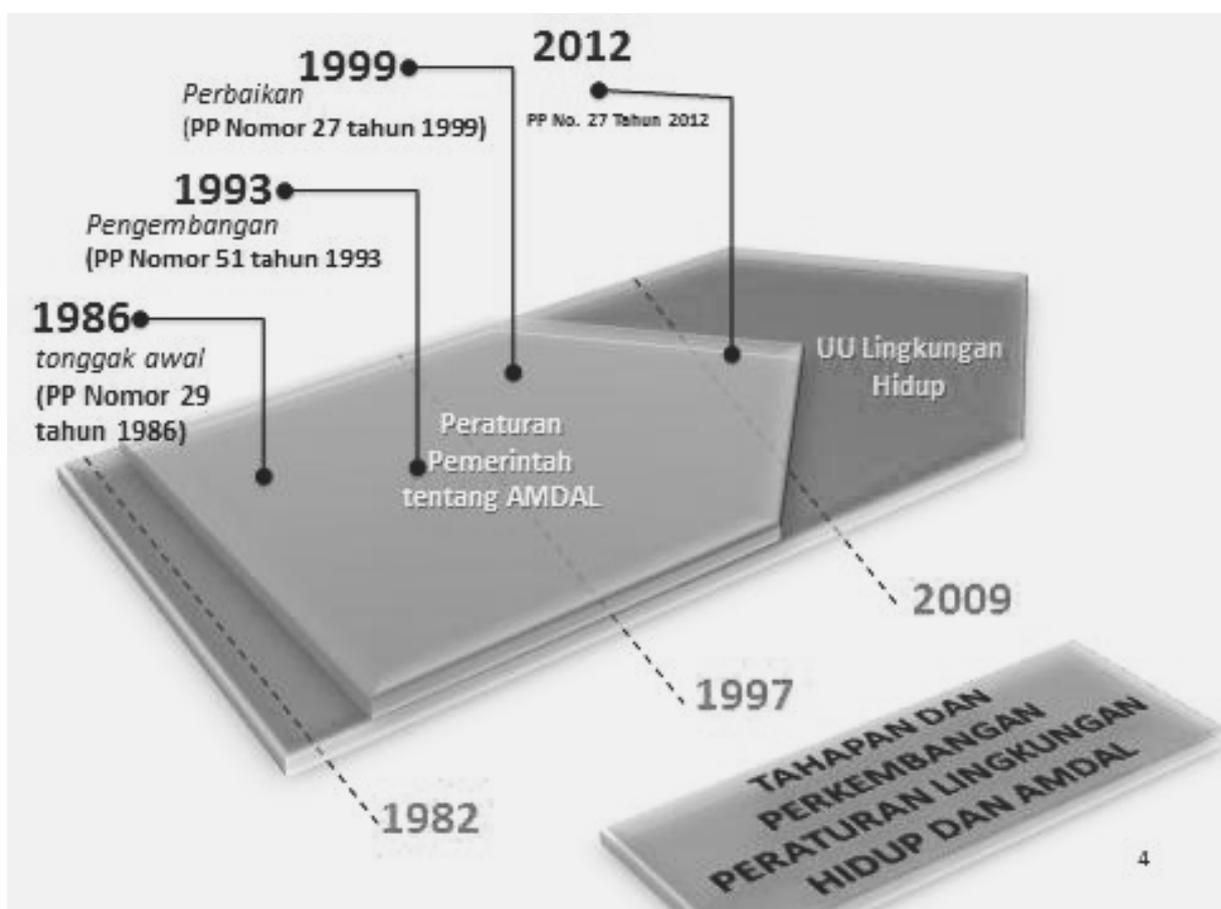
Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan LH

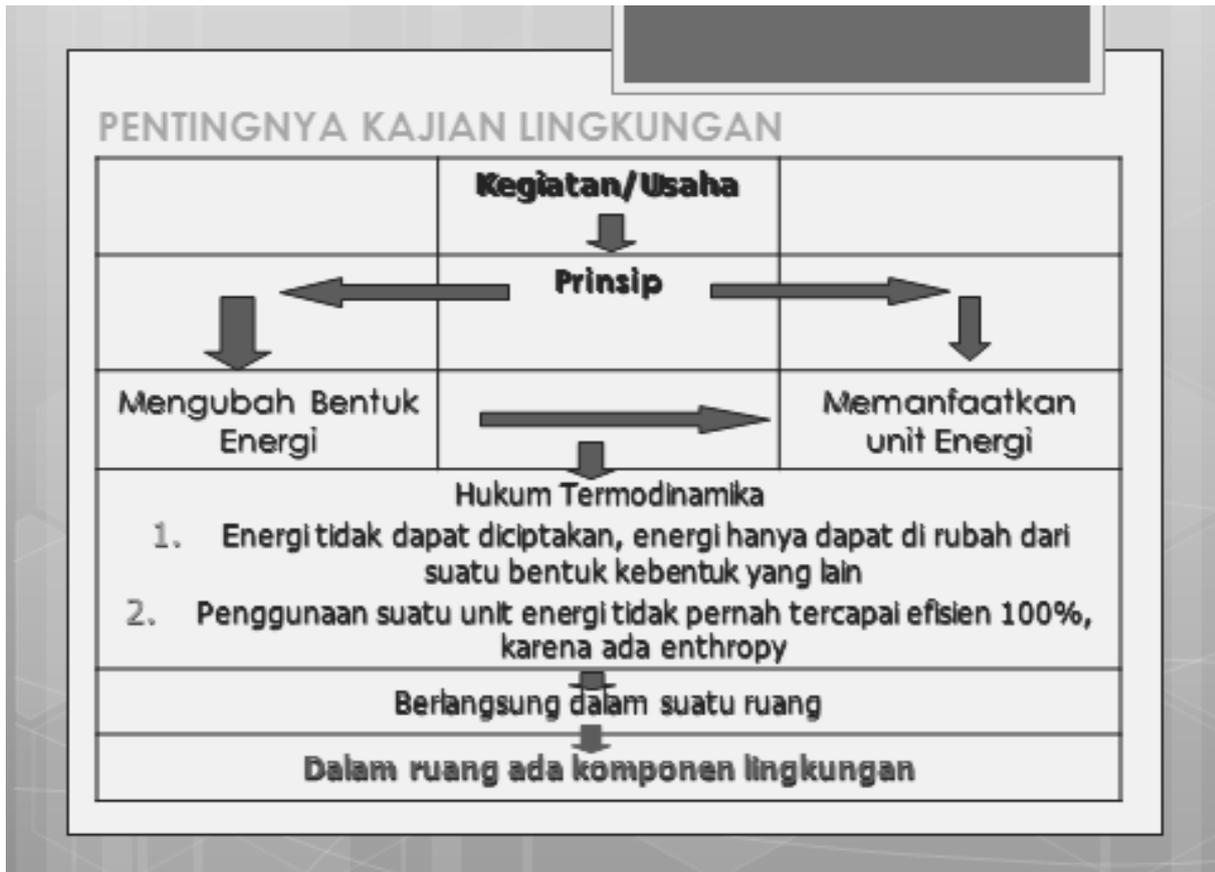
- **UUD 1945**
- **Pasal 28h ayat (1)** "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- **Pasal 33 ayat (1)** "Perkonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".
- **Pasal 33 ayat (3)** "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
- **Pasal 33 ayat (4)** "Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."



DASAR HUKUM KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

- UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- PP No.27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan
- Permen LH No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- Permen LH No. 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau kegiatan yang wajib di lengkapi dengan AMDAL.
- Permen LH No 17 Tahun 2012 tentang pedoman pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL
- PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom





- ## Fungsi Kajian Lingkungan
- Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan
 - Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak/ LH
 - Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

Manfaat Kajian Lingkungan

- Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek
- Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan
- Menghemat penggunaan SDA
- Kemudahan dalam memperoleh kredit bank
- Untuk memperoleh legalitas kegiatan berwawasan lingkungan berupa Ijin Lingkungan dari Pemda setempat.

PENGENDALIAN PENCEMARAN

1. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan yang **melebihi** baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
2. Pengendalian pencemaran lingkungan dilaksanakan dalam rangka **Pelestarian fungsi** lingkungan hidup.
3. Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi:
 - a. Pencegahan
 - b. Penanggulangan
 - c. Pemulihan
4. Pengendalian pencemaran lingkungan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan **kewenangan, peran dan tanggung jawab** masing-masing.

Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)



Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya

Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Baku Mutu Lingkungan

Pasal 20	Konsekuensi
<p>Baku Mutu Lingkungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - baku mutu air - baku mutu air limbah - baku mutu air laut - baku mutu udara ambien - baku mutu emisi - baku mutu gangguan <p>Baku mutu air, air laut dan udara ambien ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah</p> <p>Baku mutu air limbah, emisi dan gangguan ditetapkan dengan Peraturan MENLH</p>	<p>Sesuai dengan definisi Pencemaran Lingkungan, maka jika suatu usaha dan/atau kegiatan melanggar baku mutu air, baku mutu air laut dan baku mutu udara ambien dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun atau dengan denda paling sedikit Rp. 3 milyar dan paling banyak Rp. 10 milyar.</p> <p>Jika melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 3 milyar. Tindak pidana ini hanya dikenakan jika sanksi administratif telah dijatuhkan atau pelanggaran lebih dari satu kali.</p>

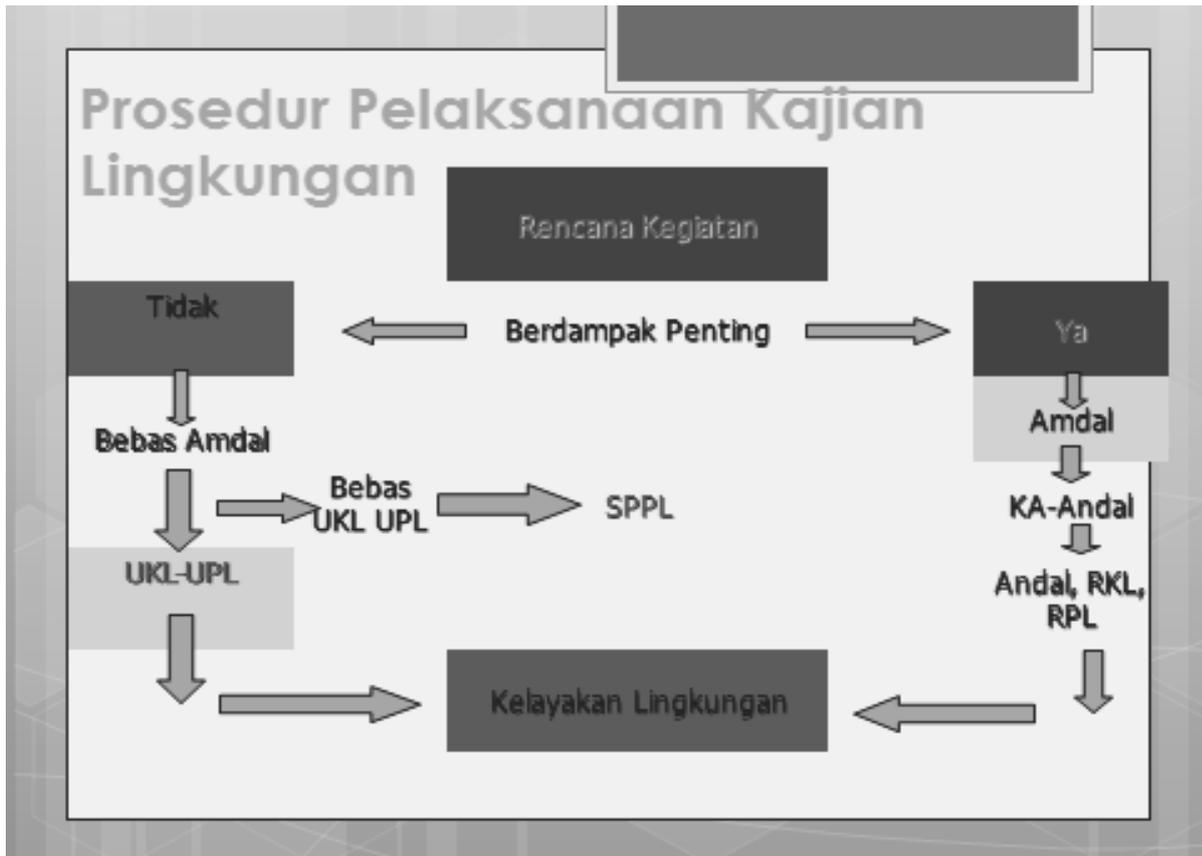
Baku Mutu Lingkungan

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

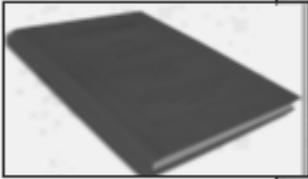
- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup
- b. mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

KEGIATAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN DAMPAK

- Mengubah bentuklahan dan bentang alam
- Eksploitasi SDA
- Proses Kegiatan yang potensial menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kemerosotan SDA
- Proses Kegiatan yg hasilnya dpt mempengaruhi lingkungan alam, buatan serta sosial budaya
- Proses kegiatan yang hasilnya dpt mempengaruhi pelestarian Kawasan KSDA/cagar budaya
- Intoduksi jenis tumbuhan, hewan dan jasad renik
- Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati
- Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar mempengaruhi lingkungan hidup
- Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi mempengaruhi pertahanan keamanan negara

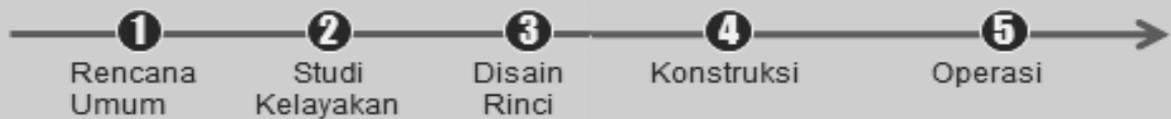


Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009	Kegiatan berdampak penting terhadap LH Batas AMDAL Peraturan MENLH No 5/2012	
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL Pasal 34 UU 32/2009	Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Batas dokumen UKL-UPL Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota	
SPPL Pasal 35 UU 32/2009	Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil	

Penyusunan Dokumen Amdal

Tahap Perencanaan



Amdal disusun oleh **pemrakarsa** pada **tahap perencanaan** suatu usaha dan/atau kegiatan



Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal

Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat:

- ① terkena dampak;
- ② Pemerhati lingkungan hidup
- ③ Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal



Pemrakarsa

10 HARI

[Pengumuman]

Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan

① **Pengumuman**

② **Konsultasi Publik**

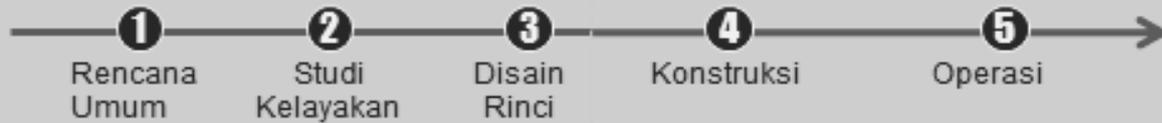


Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota

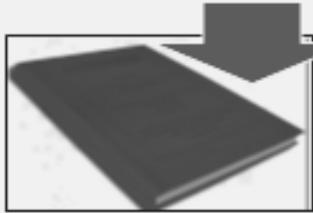
Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Penyusunan UKL-UPL

Tahap Perencanaan



UKL-UPL disusun oleh **pemrakarsa** pada **tahap perencanaan** suatu usaha dan/atau kegiatan



Formulir UKL-UPL

- 1 Identitas pemrakarsa;
- 2 Rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 3 Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
- 4 Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.



1. Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

Sumber: Pasal 14-15 PP 27/2012 Izin Lingkungan

Tahapan Dalam Proses Kajian Lingkungan

- o Identifikasi Komponen Rencana Kegiatan dan Rona Lingkungan Awal di Lokasi Rencana Kegiatan (Pada BAI)
- o Proyeksi/prakiraan perubahan rona lingkungan akibat rencana kegiatan (Identifikasi dampak)
- o Evaluasi Dampak lingkungan
- o Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Komponen Rencana Kegiatan

- Identifikasi Komponen Rencana Kegiatan yang akan dilakukan di Lokasi Rencana Kegiatan (Pada BAI)
- Rencana kegiatan biasanya terbagi menjadi tahapan kegiatan seperti ; pra-konstruksi (pra-program), konstruksi (saat program berjalan), dan pasca-konstruksi (setelah program dilaksanakan)
- Uraikan secara rinci setiap item kegiatan yang akan dilakukan pada setiap tahapan kegiatan.

Rona Lingkungan (Komponen Lingkungan)-(dalam LLA dikenal dengan Kondisi Bentang Alam)

- Identifikasikan Komponen Rona Lingkungan Hidup Awal (RLHA) di Lokasi Rencana Kegiatan (Pada BAI)
- Komponen lingkungan yang diidentifikasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen seperti ; Geo-fisik-Kimia, Biologi, Sosekbud dan Kesehatan Masyarakat
- Uraikan semua item komponen lingkungan tersebut.

KOMPONEN LINGKUNGAN

GEO-FISIK - KIMIA

Kualitas Udara
Kebisingan
Brosi
Larian Air Permukaan
Sedimentasi
Perubahan Bentuk Lahan
Kuantitas Air Tanah dan Air Permukaan
Kualitas Air Tanah dan Air Permukaan
Suplai Air Bersih

BIOLOGI

Flora dan Vegetasi
Fauna dan Satwa Liar
Biota Perairan

SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA

Kesempatan Kerja
Peluang berusaha
Proses sosial (keresahan masyarakat)
Sikap dan persepsi masyarakat
Kreativitas seni dan budaya
Konflik sosial

Peningkatan PAD

KESEHATAN MASYARAKAT

Timbulan sampah
Tingkat kesehatan masyarakat
Sanitasi lingkungan

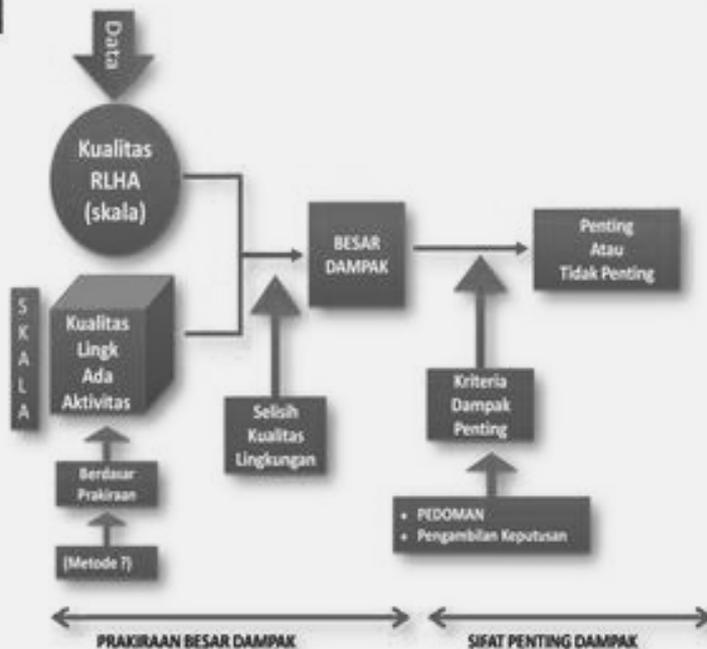
Prakiraan Perubahan Rona Lingkungan (Identifikasi Dampak)

- Identifikasi dampak yang mungkin timbul pada setiap komponen lingkungan yang dikarena rencana kegiatan yang akan dilakukan
- Buat matrik identifikasi dampak lingkungan yang timbul akibat adanya rencana kegiatan.

Evaluasi Dampak

- Lakukan prakiraan dampak penting dari hasil identifikasi dampak
- Lakukan evaluasi secara holistik terhadap dampak penting tersebut.

PRAKIRAAN DAMPAK PENTING



BESARAN DAMPAK

- a. **Prakiraan kondisi lingkungan yang akan datang pada waktu tanpa proyek (Qtp)**
- b. **Prakiraan kondisi lingkungan yang akan datang pada waktu dengan proyek (Qdp)**
- ❖ **Dampak yang diperkirakan adalah:
Qdp – Qtp**

(Soemarwoto, 1989)

$$\text{Besarnya dampak} = KL_p - KL_{TP}$$

- KL_p = kualitas lingkungan saat kegiatan (proyek) berlangsung
- KL_{TP} = kualitas lingkungan saat rona lingkungan awal (mula-mula sebelum adanya proyek)

BESARAN DAMPAK

KRITERIA KEPENTINGAN DAMPAK

Tahap
 Rencana Kegiatan
 Komponen Lingk. Terkena Dampak
 Besar Dampak

KRITERIA KEPENTINGAN DAMPAK	P	TP	ARGUMEN
1. Jumlah manusia terkena dampak	→	→	?
2. Luas persebaran dampak	→	→	→
3. Intensitas dan lamanya dampak	→	→	→
4. Komponen lain terkena dampak	→	→	→
5. Akumulasi dampak	→	→	→
6. Berbalik / tidak berbaliknya dampak	→	→	→
7. Kriteria lain sesuai perkembangan IPTEK	→	→	→

JUMLAH →

7
KRITERIA
DAMPAK
PENTING

No.	Faktor Pemasuk Dampak Penting	Sifat Dampak Dampak	
		Tidak Penting (TP)	Penting (P)
1.	Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan jasa kegiatan	Apabila tidak ada manusia yang terkena dampak.	Apabila setinggi sekitar 2-10% dari jumlah penduduk yang terkena dampak.
2.	Luas wilayah pelestarian dampak	Apabila luas dampak < 0,25 kali luas wilayah studi.	Apabila luas dampak > 0,25 kali luas wilayah studi, karena keterbatasannya di daerah tersebut dalam luasan 0,25 dari luas wilayah studi pementasan yang cukup beragam akan ngga tinggi ketertingannya tinggi, maka dampaknya sudah dianggap penting.
3.	Intensitas dampak	Ringan, populasi terkena dampak tidak sepengaruh	Sedang sampai berat, populasi terkena dampak sepengaruh
	Lamanya dampak berlangsung	Di tahapan kegiatan	Di tahapan kegiatan
4.	Banyaknya komponen lingkungan terkena dampak	Hanya mengenai dampak primer	Menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya
5.	Sifat kumulatif dampak	Karena TP apabila dampak tidak akan terkumulatif.	Karena P apabila dampak akan terkumulatif.
6.	Betah atau tidak betahnya dampak	Dampaknya dapat diulhikan (betah)	Dampaknya tidak dapat diulhikan (tidak betah)
7.	Karena berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Dampak penting negatif yang ditimbulkan dapat dianggulang dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia	Dampak penting negatif yang ditimbulkan tidak dapat dianggulang dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia

- Tentukan Besaran Dampak (M)
- Tentukan Derajat Kepentingan Dampak (I)
- Evaluasi Besaran Dampak dan Derajat Kepentingan Dampak (M dan I)
- Gunakan Kriteria Untuk Pengambilan Keputusan Dampak Penting
- Pengambilan Keputusan Dampak-dampak Yang Masuk kedalam Kategori Dampak Penting, dan yang Tidak Termasuk Kategori Dampak Penting.

EVALUASI SECARA HOLISTIK TERHADAP DAMPAK LINGKUNGAN

o [Contoh Matriks Leopold.xls](#)

o [CONTOH EVALUASI DAMPAK MATRIKS SEDERHANA.docx](#)

o [CONTOH EVALUASI BAGAN ALIR.docx](#)

o [CONTOH EVALUASI BAGAN ALIR.docx](#)

TELAAHAN SECARA KESELURUHAN DAN KETERKAITAN

Rekomendasi RKL – RPL merupakan PEDOMAN PENGELOLAAN L.H

Dampak + maupun - , yang harus dikelola dan dipantau

Pada Tahap:
Pra Konstruksi – Konstruksi – Operasi – Pasca Operasi

Untuk komponen

Geo Fisik kimia	biologi	sosial – ekonomi – budaya	kesehatan masyarakat
------------------------	----------------	----------------------------------	-----------------------------

Fungsi RKL

Meningkatkan Dampak Positif
Mencegah / meminimisasi / mengelola
dampak negatif

Fungsi RPL

Mengevaluasi
Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan



PENGANTAR MATERI

SISTEM PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMS)

TUJUAN ESMS

- * Menyusun rencana mitigasi untuk menghindari atau meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, dan memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat (termasuk kelompok rentan dan wanita)
- * Memastikan keluhan dan komplain masyarakat atau stakeholder lain, ditanggapi dan dikelola dengan baik
- * Memastikan keterlibatan masyarakat yang akan terkena dampak dalam seluruh siklus proyek
- * Memastikan semua informasi terkait dampak lingkungan dan sosial yang relevan diinformasikan kepada masyarakat

ALUR INSTRUMEN ESMS

- * IDENTIFIKASI KATEGORI PROYEK/PROGRAM
- * PELINGKUPAN DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL
- * PENYIAPAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN (Amdal, UKL-UPL atau SPPL)
- * KONSULTASI DAN DISKUSI DENGAN PIHAK TERKAIT (MCA-I DAN BLH LOKASI KEGIATAN)
- * PROSES PERSETUJUAN ESMS DAN IJIN LINGKUNGAN
- * PELAKSANAAN ESMS, PEMANTAUAN DAN EVALUASI.

IDENTIFIKASI DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL

- * PENYUSUNAN URAIAN RENCANA KEGIATAN PROGRAM
- * PENYUSUNAN RONA LINGKUNGAN AWAL (ACUAN ANALISIS LLA)
- * IDENTIFIKASI DAMPAK YANG TIMBUL DARI KEGIATAN (ACUAN CEK LIST PENYARINGAN DAN PELINGKUPAN ESME- PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, IFC STANDAR DAN PERMEN LH NO.5 TAHUN 2012)
- * KOORDINASI DAN PELAPORAN KE BLH UNTUK PENENTUAN KATEGORI PROYEK/ PROGRAM (HARUS KATEGORI TIDAK AMDAL)

KATEGORI PROYEK

Kategori Proyek	Dampak Lingkungan	Mitigasi
Kategori A	<ul style="list-style-type: none"> Proyek yang diusulkan memiliki dampak penting negatif terhadap lingkungan yang tidak dapat dirubah, berbeda-beda atau belum tersedia teknologi untuk menanggulangnya. Dampak dapat mempengaruhi area yang lebih besar dari lokasi atau fasilitas untuk pekerjaan fisik. Termasuk dalam daftar kegiatan yang tercantum dalam KepmenLH No 05 year 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Harus Dilengkapi AMDAL 	Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Diperlukan Surat Ijin Lingkungan
Kategori B	<ul style="list-style-type: none"> Proyek memiliki potensi dampak lingkungan proyek yang diusulkan kurang merugikan dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan proyek kategori A. Dampak terbatas di lokasi proyek, dan tersedia teknologi untuk penanggulangnya. Tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang tercantum dalam KepmenLH No 05 year 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Harus Dilengkapi AMDAL 	Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
Kategori C	<ul style="list-style-type: none"> Jika proyek yang diusulkan memiliki dampak minimal atau tidak memiliki dampak lingkungan yang merugikan. Tidak termasuk dalam daftar kegiatan yang tercantum dalam KepmenLH No 05 year 2012 tentang Jenis Kegiatan yang Harus Dilengkapi AMDAL 	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

IFC PERFORMANCE STANDAR

PS 1	PS2	Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja
	PS3	Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran
	PS4	Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat
	PS5	Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Secara Paksa
	PS6	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan
	PS7	Masyarakat Adat
	PS8	Warisan Budaya

IDENTIFIKASI DAMPAK PROGRAM PSDABM - KPSHK

* IDENTIFIKASI DAMPAK

KOMPONEN/SUB KOMPONEN/ PARAMETER LINGKUNGAN	I		II							III			Komponen kegiatan	
	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2		3
I. KOMPONEN FISIK KIMIA														
1. Kualitas Udara			X							X				
2. Kebisingan			X							X			X	
3. Kelembaban														X
4. Keruburan tanah					X									
5. Erosi					X				X					
6. Sedimentasi					X				X					
7. Debit Airtan Permukaan					X				X					
8. Kualitas Air					X		X	X	X				X	
II. KOMPONEN BIOLOGI														
1. Keanekaragaman jenis tumbuhan					X									
2. Kualitas habitat satwa liar					X									
3. Kelangkaan jenis satwa liar					X									
4. Potensi ledakan populasi HPT					X			X						
5. Kelimpahan dan Keanekaragaman jenis biota perairan					X		X	X						
III. KOMPONEN SOSIAL									X				X	
1. Kesempatan kerja													X	
2. Peluang berusaha													X	
3. Pendapatan masyarakat													X	
4. Pola Pengawasan Lahan												X	X	
5. Pola Pemantauan Lahan												X	X	X
6. Keresahan Sosial														
7. Kememburuan Sosial														
8. Persepsi dan Sikap masyarakat						X				X	X			
IV. KOMPONEN KESEHATAN														
1. Sanitasi Lingkungan					X		X				X			
2. Pola penyakit					X		X							
3. Pelayanan kesehatan														

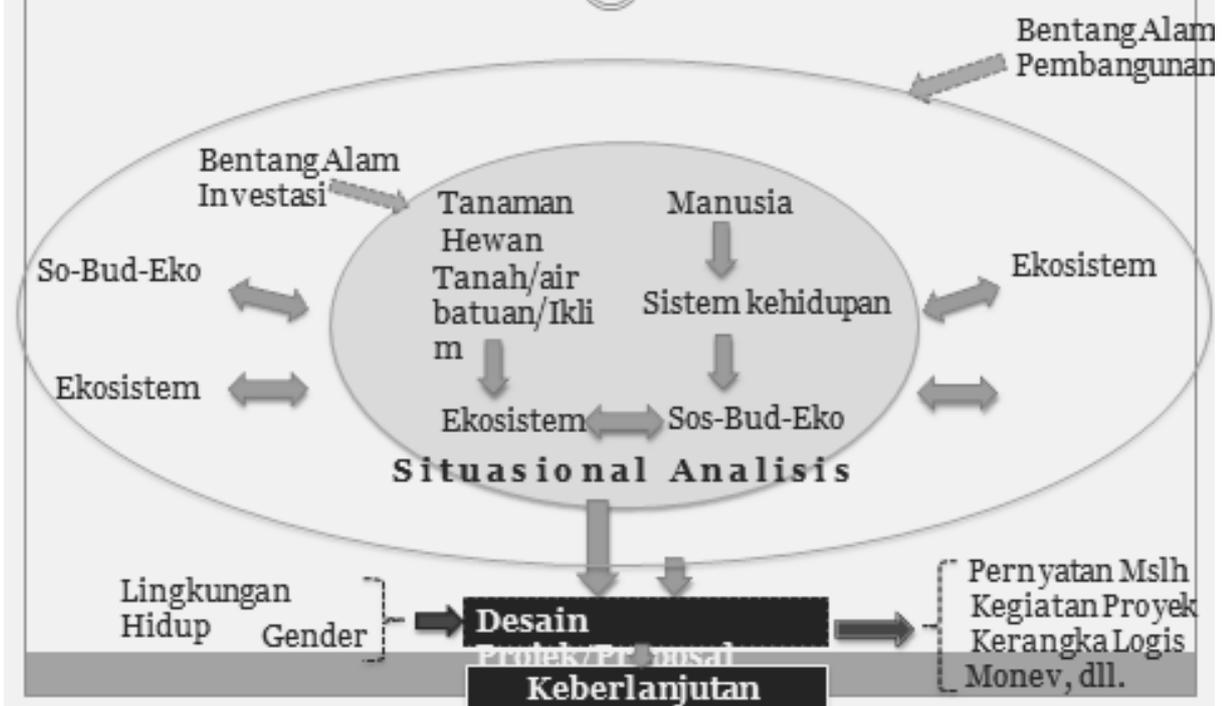
SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH



Analisis Bentang Alam dan Kehidupan Landscape-Lifescape Analysis

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, PSDABM

Apa itu Analisis Bentang Alam dan Bentang Kehidupan



Apa itu Analisis Bentang Alam dan Bentang Kehidupan?

«Analisis situasional antara investasi Proyek Kemakmuran Hijau dengan lingkungan sosial sekitarnya serta lingkungan alam untuk mengidentifikasi risiko dan peluang, yang dapat menginformasikan desain proyek dan implementasi, serta meningkatkan hasil yang berkelanjutan»

Mengapa kita perlu analisis Bentang Alam dan Kehidupan

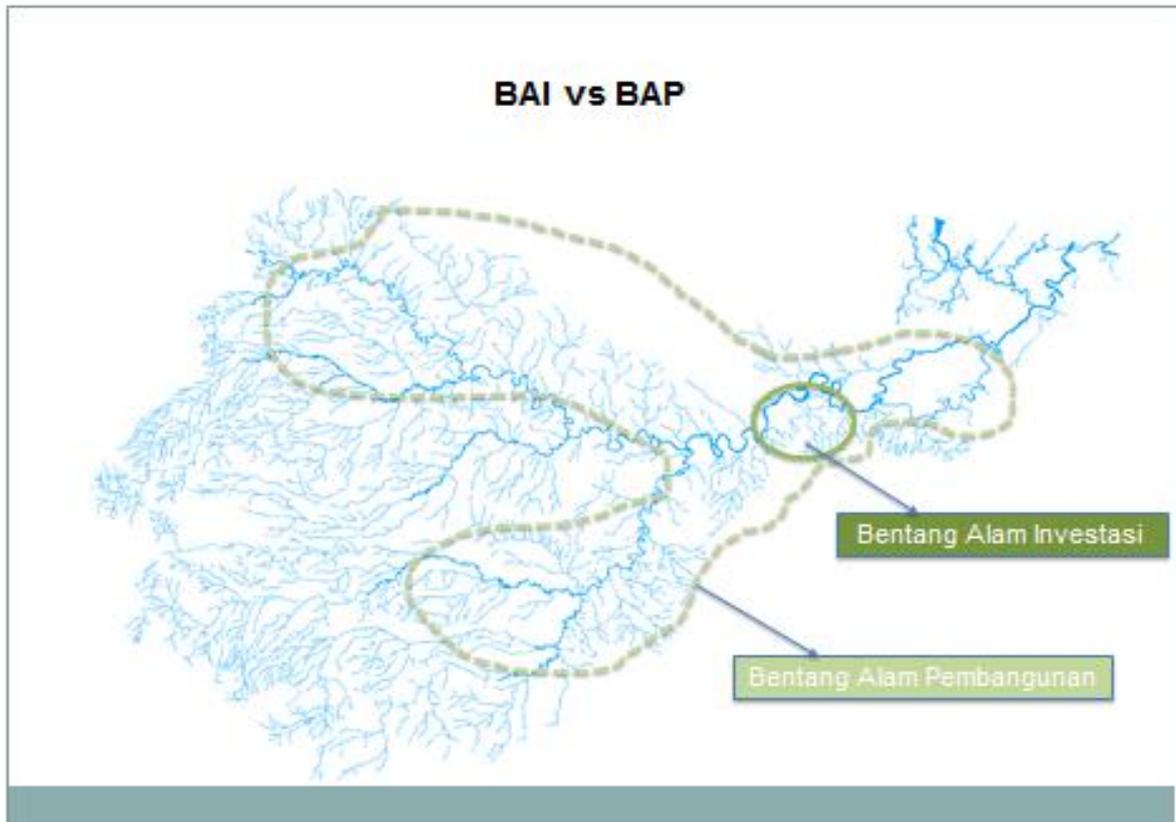
- Memastikan intervensi sosial untuk memaksimalkan sumber daya manusia, sosial dan modal alam
- Perlindungan terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan karena kurang informasi sosial dan lingkungan
- Mengidentifikasi dan mengurangi risiko kecemburuan sosial yang memecah-belah masyarakat lokal karena merasa dikecualikan dari proyek
- Memberi masukan penting bagi desain proyek/proposal serta memastikan keberlanjutan proyek

Contoh Bentang Alam

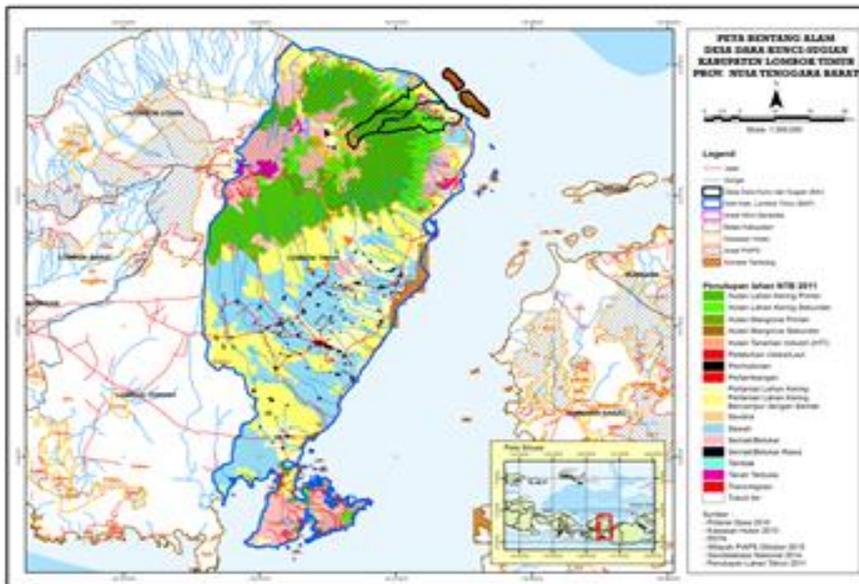
- Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sub-DAS
- Kondisi lahan/lingkungan yang unik (kawasan gambut, danau, taman nasional, kawasan karst (kapur), suaka alam, atau interaksi antar kawasan ini, dll)
- Batasan kewenangan/administrasi (Kabupaten atau antar Kabupaten, Kecamatan, beberapa kecamatan, beberapa desa)
- Atau lintas batasan di atas.

Bentuk analisis Bentang Alam dan Kehidupan

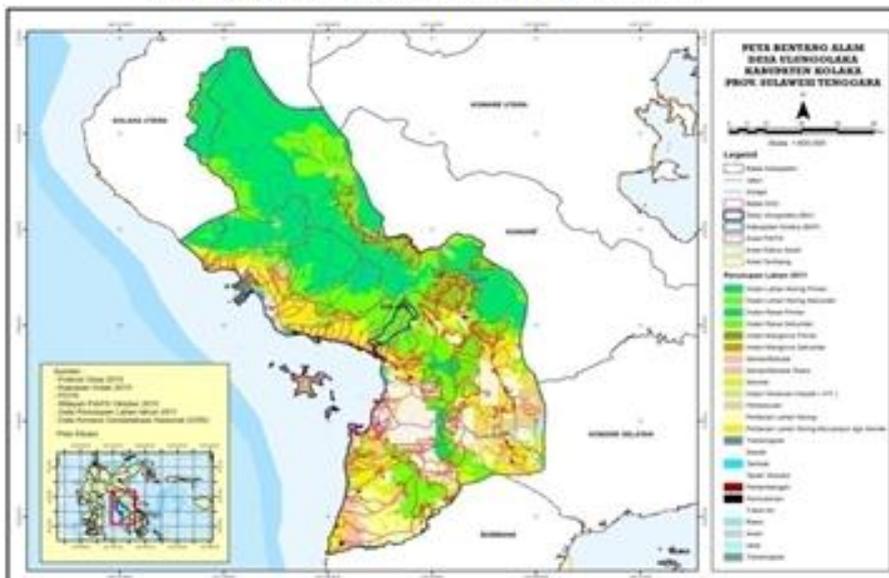
- Bentang Alam Investasi (BAI) (lokasi dimana Proyek Kemakmuran Hijau Melakukan kegiatan Utama)
- Bentang Alam Pembangunan (BAP) (Lingkungan sekitar yang terkena dampak atau memberi dampak pada investasi Proyek Kemakmuran Hijau)



BAI vs BAP DESA SUGIAN DAN DARA KUNCI



BAI vs BAP KELURAHAN SAKULI



Beberapa Petunjuk Praktis

- Kenali Lokasi Kerja/Investasi Proyek (BAI): Letak lokasi proyek (dapat berupa sub DAS, beberapa desa, atau kecamatan)
- Kaitkan dengan Bentang Alam Pembangunan (BAP), yaitu lingkungan sekitar yang akan mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh proyek
- Mulai analisis dari Bentang Alam Investasi (BAI), kemudian meluas ke Bentang Alam Pembangunan (BAP) (atau sebaliknya?)
- Buatlah Peta BAI yang berada di dalam BAP

Analisis Bentang Alam dan Bentang Kehidupan

A. INFORMASI BENTANG ALAM (LANDSCAPE PROYEK)

- Mengidentifikasi karakteristik bio-fisik/lingkungan hidup terdiri dari :
 - kualitas air permukaan, kualitas air bersih, kualitas udara, tingkat kebisingan
 - Biologi (Flora dan fauna)
- Mendeskripsikan penyediaan layanan lingkungan hidup untuk berbagai kegunaan dan fungsi yang dapat melayani populasi lokal, pihak luar, dan jika berlaku, kepada pemangku kepentingan tingkat nasional atau global
- Mendeskripsikan nilai-nilai ekonomi, keuangan dan sosial yang ada pada bentang alam dan potensial biaya pemeliharaan dan peningkatan fungsi-fungsi bentang alam, dengan menyebutkan sumber-sumber utama modal alam dan isu-isu perlindungan

Analisis Bentang Alam dan Bentang Kehidupan

B. SITUASI UMUM SOSIAL EKONOMI PADA BENTANG ALAM PROYEK:

- Struktur sosial:
- Potensi Kerentanan dan kohe si sosial:
- Tren migrasi masuk/keluar dan isu-isu dem oografi:
- Pengembangan man usia dan status/statistik gender:

Analisis Bentang Alam dan Bentang Kehidupan

C. PENILAIAN PENERIMA MANFAAT:

- Deskripsi tentang pemanfaat yang diu sulkan dan bes ar populasinya:
- Kebutuhan dan kendala (alam, fisik, keuangan, sosial dan modal manusia) yang dihadapi oleh penerima manfaat:
- Akses terhadap jasa kredit/keuangan untuk masyarakat dan penerima manfaat:
- Dis-insentif (ketiadaan insentif) yang dihadapi penerima manfaat:
- Peluang bagi masyarakat dan penerima manfaat:
- Pengembangan Kapasitas bagi Masyarakat lokal:

Analisis Bentang Alam dan Kehidupan

D. POLA DAN PELUANG MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT:

- Mata pencaharian utama masyarakat:
- Isu Sosial dan Gender yang berdampak pada pola mata pencaharian dalam kaitannya dengan bentang alam:
- Diversifikasi strategi mata pencaharian masyarakat:
- Potensi kegiatan untuk peningkatan pendapatan keluarga:

Analisis Bentang Alam dan Kehidupan

E. ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

- Pemangku kepentingan dan peran/pengaruh mereka terhadap proyek/penerima manfaat:
- Bagaimana lembaga politik, administratif, sosial dan budaya – termasuk dari luar wilayah setempat – mempengaruhi pemangku kepentingan lokal dalam mengakses dan mengendalikan sumber daya alam dan potensi manfaat yang didapat dari investasi ini:

Analisis Bentang Alam dan Kehidupan

F. Bentang Alam Investasi GP

DAMPAK DAN SINERGI INVESTASI GP PADA BENTANG ALAM

- Kegiatan-kegiatan GP/MCAI lainnya yang berpotensi berdampak pada proyek dan L-L, jika ada
- Proyek atau program regional non-GP/MCAI yang berpotensi berdampak pada proyek dan L-L
- Peluang bagi proyek untuk menciptakan sinergi positif melalui koordinasi tepat dengan yang tersebut di atas

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH

○BAB 7

MODUL PENGEMBANGAN PERHUTANAN RAKYAT

7.1. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam konteks budidaya tanaman hutan, terdapat tiga (3) komponen utama dalam pengembangan perhutanan rakyat, yakni pembenihan atau pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Agar para petani hutan dapat dan mempunyai kapasitas yang memadai, maka pelatihan teknis pembibitan, penanaman dan pemeliharaan menjadi hal penting.

7.2. TUJUAN PEMBELAJARAN

7.2.1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Tujuan Pembelajaran Umum untuk kegiatan pelatihan Pengembangan Perhutanan Rakyat adalah memberikan pemahaman kepada peserta mengenai tahapan dan metode pembibitan jenis tanaman hutan yang akan dilakukan dalam pengembangan PSDABM MCAI – KPSHK.

7.2.2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) peserta mampu:

1. Memahami dan terampil dalam proses dan teknik melakukan pembibitan
2. Memahami dan terampil dalam teknik penanaman tanaman hutan
3. Memahami dan terampil dalam aspek budidaya, termasuk pemeliharaan dan Monitoring, evaluation and verification (MRV)

7.3. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Pokok Bahasan dalam pelatihan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, yakni:

1. Teknik Pembibitan
2. Teknik Penanaman
3. Teknik Budidaya/Pemeliharaan

7.4. PERSYARATAN PESERTA

7.4.1. PERSYARATAN PENDIDIKAN PESERTA

Peserta mempunyai pendidikan minimal Diploma dan telah lulus minimal 3 tahun.

7.4.2. PERSYARATAN PENGALAMAN PESERTA

Peserta bersungguh-sungguh untuk belajar dalam kegiatan pelatihan terkait:

- ❖ Teknik Pembibitan
- ❖ Teknik Penanaman
- ❖ Teknik Budidaya/Pemeliharaan

7.5. BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, flip chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi Lembar Latihan dan Lembar Rencana Dokumentasi.

Di samping itu, alat dan bahan ajar yang diperlukan:

1. Kertas flipchart atau kertas plano
2. Kertas HVS
3. Komputer dan printer
4. Tinta printer
5. Spidol dan ballpoint
6. Kamera foto / Handphone camera
7. Buku Catatan

7.6. METODE PEMBELAJARAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui [1] Diskusi umum, [2] Curah pendapat, dan [3] Penugasan individual

7.7. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 5 jam pelajaran per hari (T=5 jp, P=0jp, PL=0jp) @45 menit, selama 1 hari jangka waktu Training of Trainer (ToT). Untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta maka, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

- ❖ **Langkah 1: Pengkondisian (15 Menit)**
 1. Penyebaran dan pencairan suasana (*ice-breaking*),
 2. Pemandu/pengajar menggali harapan peserta tentang materi dan keterampilan yang ingin dicapai melalui sesi ToT ini,
 3. Pemandu/pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan metode yang akan digunakan,
 4. Menggali pendapat peserta tentang “Pembibitan, Penanaman dan Pemeliharaan”. Proses pembelajaran menggunakan metode dimana semua peserta terlibat secara aktif,
 5. Berdasarkan pendapat peserta, pemandu/pengajar menjelaskan tentang “Pembibitan dan Penanaman”.
- ❖ **Langkah 2: Pengkajian Pokok Bahasan (180 Menit)**
 1. Pemandu/pengajar menyampaikan pokok bahasan:
 - ❖ Teknik Pembibitan

- ❖ Teknik Penanaman
 - ❖ Teknik Budidaya/Pemeliharaan
2. Pemandu/pengajar member kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta.
 3. Pemandu/pengajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga antar peserta juga terjadi diskusi dan interaksi yang baik.
 4. Pemandu/pengajar menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok tentang:
 - ❖ Teknik Pembibitan
 - ❖ Teknik Penanaman
 - ❖ Teknik Budidaya/Pemeliharaan
- ❖ **Langkah 3: Rangkuman (45 Menit)**
1. Pemandu/pengajar merangkum sesi pembelajaran.
 2. Peserta dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan pengajar memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari pengajar maupun dari peserta lain.
 3. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan.
 4. Pemandu/pengajar menutup sesi pembelajaran dengan memastikan bahwa TPU dan TPK sesi telah tercapai.

7.8. URAIAN MATERI

PENGANTAR

Latar Belakang

Ketersediaan bibit berkualitas merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan penanaman dan budidaya tanaman. Bibit yang berkualitas dapat ditandai oleh kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan baru, dapat tumbuh dengan baik jika ditanam dilapangan, sehat dan seragam. Oleh karena itu bibit tersebut harus memenuhi standart *mutu genetik* dan *mutu fisiologis*.

Jika persediaan bibit mencukupi kebutuhan, maka kegiatan penanaman pohon dalam rangka membangun hutan atau dalam rangka rehabilitasi lahan kritis akan berjalan lancar. Demikian juga jika bibit pohon yang tersedia berkualitas baik, maka tingkat keberhasilan penanaman akan semakin tinggi.

Di dalam kegiatan pengelolaan hutan, khususnya dalam kegiatan pembinaan hutan perlu diketahui bahwa kegiatan persemaian merupakan tahapan yang akan menentukan terwujudnya penanaman pohon dalam kawasan hutan atau reboisasi kawasan hutan. Oleh karena itu, persemaian selalu dimasukkan di dalam perencanaan dalam pengelolaan hutan, apalagi dalam pengelolaan hutan produksi mutlak dibangun persemaian untuk merealisasikan penanaman kembali.

Tujuan

Untuk mencapai keberhasilan penanaman pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi HKm (Hutan Kemasyarakatan) di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur, serta Rehabilitasi DAS

(Daerah Aliran Sungai) di Kabupaten Kolaka dengan penanaman pohon yang sesuai rencana kerja.

ALUR PEMBUATAN PERSEMAIAN

Persemaian (*Nursery*) adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih (atau bahan lain dari tanaman) menjadi bibit/semai yang siap ditanam di lapangan. Kegiatan di persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan dari kegiatan penanaman hutan karena itu sangat penting dan merupakan kunci pertama di dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman hutan.

Penanaman benih ke lapangan dapat dilakukan secara langsung (*direct planting*) dan secara tidak langsung yang berarti harus disemaikan terlebih dahulu di tempat persemaian. Penanaman secara langsung ke lapangan biasanya dilakukan apabila biji-biji (benih) tersebut berukuran besar dan jumlah persediaannya melimpah. Meskipun ukuran benih besar tetapi kalau jumlahnya terbatas, maka benih tersebut seyogyanya disemaikan terlebih dulu.

Penetapan Lokasi Pembibitan

a. Lokasi pembibitan

Untuk mengurangi resiko kerusakan bibit ke lokasi penanaman, diperlukan persemaian dan tempat pengumpulan sementara (TPS) yang baik dan memiliki standart mutu. Pembuatan persemaian dilakukan jika kebutuhan bibit diperoleh dengan cara membuat bibit (baik secara vegetatif maupun generatif), sedangkan TPS disediakan jika kebutuhan bibit dari luar/membeli bibit dari para penangkar bibit.

Agar diperoleh bibit dan hasil penanaman yang baik, maka lokasi pembibitan sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- ❖ Diutamakan lahan datar-landai, namun jika tidak terdapat lahan datar/landai maka areal untuk pembibitan dapat dibuat dalam bentuk teras-teras.
- ❖ Lokasi pembibitan dekat dengan lokasi penanaman, untuk mengurangi resiko kerusakan bibit saat pengangkutan dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman.
- ❖ Lokasi pembibitan bebas konflik kepemilikan lahan, karena kebun bibit yang akan dibuat bersifat semi-permanen hingga permanen, maka sebaiknya lokasi tidak memiliki permasalahan kepemilikan lahan dikemudian hari.
- ❖ Lokasi pembibitan aman dari gangguan alam (banjir, tanah longsor, angin), hewan ternak, hewan liar, dan kemungkinan gangguan manusia.
- ❖ Lokasi pembibitan dekat dengan sumber air
- ❖ Lokasi pembibitan dekat dengan akses jalan yang baik atau setidaknya mudah dijangkau.
- ❖ Lokasi pembibitan dekat dengan tenaga kerja .

b. Bahan dan Peralatan Pembibitan

Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembibitan tanaman diuraikan sebagai berikut:

- Bahan
Benih yang akan digunakan, pestisida (fungisida dan insektisida), pasir halus, topsoil (lapisan tanah atas), Pupuk kandang, sekam padi (dibuat arang sekam), plastik bening, paranet (naungan 65%), polybag setandar ukuran diameter 12cm, untuk benih besar maka dapat digunakan polybag ukuran lebih besar misalnya 15cm.

- Peralatan
Cangkul, sekop, ember plastik, gembor, sarung tangan, masker timbangan, gelas ukur, handsprayer, selang air, gerobag dorong, karung, peralatan pengairan, tangki air, ayakan pasir, terpal, golok, gunting stek.

Fasilitas Persemaian

Untuk membangun kebun bibit maka perlu disiapkan fasilitas pendukung sebagai berikut:

Tempat Penyemaian Benih

Pada dasarnya tempat penyemaian benih dapat dilakukan berdasarkan kelompok ukuran benih, yaitu

1. Penyemaian benih ukuran besar, ukuran >2cm, seperti : nangka, durian, alpukat, mangga dengan cara disemai langsung dimedia polybag.
2. Penyemaian benih ukuran sedang (1-2 cm, seperti mahoni, khaya, kayu afrika, mindi) kecil (0,5-1 cm, seperti : sengan, surren, akasia, gaharu), dan halus (<0,5 cm, Seperti : Jabon, ekaliptus, duabanga) dengan cara disemai dahulu pada media semai/ perkecambahan.

Tempat untuk menyemai benih dapat dibuat dalam beberapa bentuk yaitu:

Bedeng Tabur. dibuat dalam bentuk bedengan dengan ukuran 1m x 4m, bedeng dibatasi oleh bambu atau papan kayu setebal 20 cm. Media semai diletakkan pada bedengan untuk menyemai/ menabur benih, oleh sebab itu bedengan ini bisa juga disebut dengan istilah bedeng tabur. Atap bedeng tabur dapat dibuat dari rumbia agar tidak terkena hujan langsung, sedangkan tiangnya dibuat dari bambu dengan ketinggian sekitar 100cm. Media penyemaian dimasukkan kedalam bedeng tabur hingga kedalaman sekitar 10-15cm. Bedeng tabur digunakan untuk menyemai benih- benih ukuran sedang, seperti : mahoni, sirsak, kayu afrika, gmelia, meranti, karet, coklat dan lain sebagainya.

Bedeng Sapih. Bedeng sapih merupakan bedengan yang digunakan sebagai tempat menyusun polybag berisi media tumbuh yang selanjutnya digunakan untuk penyapihan semai dan dipelihara hingga menjadi bibit siap tanam. Bedeng sapih dibuat dengan ukuran 1m x 5m , batas bedeng menggunakan bambu jarak antar bedeng 1m. Bedeng sapih sebaiknya dibuat memanjang menurut arah utara – selatan dengan tujuan agar ketika matahari terbit hingga terbenam dari arah timur ke barat dapat memberikan cahaya secara merata kepada bibit-bibit yang ditata dalam bedeng sapih.

Alur Pembibitan

Metode Pembibitan dapat dilakukan menurut dua cara, yaitu secara generatif (dari benih) dan vegetatif. Untuk melakukan pembibitan secara vegetatif diperlukan keterampilan khusus, sehingga jika masyarakat belum memiliki pengalaman metode vegetatif, ada baiknya pada tahap awal pembibitan dilakukan secara generatif. Jika metode generatif yang dipilih maka langkah selanjutnya yang sangat penting dilakukan adalah pengadaan benih, karena tanpa tersedianya benih pembibitan tidak akan berjalan. Untuk mengadakan benih harus mengetahui musim benih. Oleh sebab itu bibit akan diproduksi harus disesuaikan dengan ketersediaan benih.

Berdasarkan fungsinya maka tanaman pohon dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu : (1) Tanaman Kayu-kayuan dan (2) Tanaman Multi Purpose Tree Species (MPTS)/tanaman selain penghasil kayu. Berdasarkan kesesuaian tempat tumbuh dan usulan masyarakat, maka dapat

ditetapkan jenis-jenis yang akan dikembangkan. Hasil analisis data biofisik akan memberikan informasi daftar jenis tanaman yang sesuai tumbuh pada lokasi yang akan direhabilitasi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan dengan masyarakat untuk menetapkan jenis yang akan dikembangkan. Contoh tanaman yang masuk kelompok kayu-kayuan: mahoni, suren, sengan, jati, uru, kayu kuku, jabon. adapun contoh tanaman MPTS : durian, manggis, karet, gaharu, dll.

Pengadaan Benih

Jika telah disepakati bahwa pembibitan dilakukan dengan cara membuat bibit, maka perlu dilakukan sosialisasi dalam rangka pengadaan benih. Pengadaan benih merupakan kunci penting bagi keberhasilan pembuatan bibit. Benih- benih tertentu tidak bisa tersedia setiap saat, namun harus disesuaikan dengan musim benih. Sebagai informasi di Sumatera Barat benih mahoni dan suren dapat dikumpulkan pada bulan Mei-Juni, benih nangka dan alpukat bisa dikumpul setiap saat, benih durian bisa dikumpulkan pada bulan Juni-Juli, dan manggis (Juli)

Pengadaan Benih dari Luar

Benih dari luar dikumpulkan khususnya untuk jenis-jenis yang bukan merupakan tanaman asli setempat ataupun unggulan lokal. Pengumpulan benih dari luar dilakukan ketika ketersediaan benih di lokasi setempat tidak ada. Benih dikumpulkan dikumpulkan dari beberapa areal sumber benih yang tersebar di lokasi

Beberapa Tips apabila membeli benih benih bersertifikat :

1. Amati dengan teliti dokumen pembelian (masa berlaku sertifikat, data hasil ujinya dan keasliannya)
2. Periksa kemasan benihnya (tercantum nama/logo penjualnya), kalo kemasannya sudah terbuka minta diganti dengan benih yang kemasannya masih utuh.
3. Periksa dan amati secara seksama kondisi benihnya (fisik dan warnanya)
4. Untuk memastikan kebenarannya klarifikasi ke BPTH (022)7912525
5. Apabila prosentase tumbuhnya kurang memuaskan harap memberitahukan kepada pengada /penjual benih nya

Pengadaan Benih dari Pohon Induk Desa

Agar pohon yang ditanam menghasilkan kualitas yang baik, sebaiknya benih dikumpulkan dari pohon induk yang telah diketahui keunggulan sifatnya, misalnya benih durian diambil dari pohon durian yang telah diketahui memiliki sifat unggul : buah manis, daging tebal. buah besar, buah banyak. Jenis-jenis tanaman unggul biasanya tersebar di desa atau beberapa desa lain, oleh sebab itu menunjuk pohon induk desa yang kelas benihnya akan digunakan untuk pembibitan merupakan langkah awal yang sangat baik ketika akan membangun Kebun Bibit Desa. Untuk beberapa benih lain seperti jenis kayu-kayuan (mahoni, suren, jati, jabon, sengan, dll.) dapat diperoleh atau di sumber-sumber benih di Jawa atau luar Jawa.

Penyemaian Benih

Perlakuan Benih Sebelum Penyemaian

Beberapa benih meskipun telah ditabur di media kecambah, terkadang menunjukkan proses perkecambahan yang lama. Hal ini disebabkan oleh sifat benih yang disebutkan dengan *dormansi benih*, yaitu sifat yang menunjukkan suatu keadaan dimana benih-benih sehat (*viable*) gagal berkecambah ketika berada dalam kondisi yang secara normal baik untuk perkecambahan.

Agar benih dapat segera berkecambah, maka perlu dilakukan perlakuan awal yang disebut dengan "pematahan dormansi". Pematahan dormansi dimaksudkan agar benih yang awalnya sulit berkecambah menjadi cepat berkecambah dengan terlebih dahulu dilakukan perlakuan-perlakuan pendahuluan.

Setiap jenis memiliki cara khusus untuk mempercepat proses perkecambahan, antara lain dengan melakukan perendaman di dalam air baik panas maupun dingin (misalnya sengon, akasia, ekaliptus), direndam dan dijemur (jati), disangrai (jati) dengan bantuan jamur dekomposer (panggal buaya), memecahkan kulit benih (sirsak). Berikut ini adalah contoh teknik mempercepat perkecambahan benih *ortodoks* :

Beberapa jenis benih lain akan memerlukan perlakuan yang berbeda untuk mempercepat perkecambahannya. Pada prinsip perkecambahan adalah bagaimana proses memasukkan air ke dalam benih (embrio). Karena awal dari proses perkecambahan akan terjadi pematahan dormansi antara lain bertujuan untuk membantu proses memasukan air ke dalam benih.

Untuk jenis-jenis yang bersifat rekalsitran seperti benih meranti, maka proses perkecambahan benihnya akan lebih mudah dan cepat jika dibandingkan dengan kelompok benih ortodoks. Proses perkecambahan akan terjadi segera setelah benih masak dan disiram air dalam media semai yang lembab tanpa melalui proses perlakuan awal.

Penyiapan Media Kecambah

Media semai/kecambah/tabur adalah beberapa istilah yang sama yang pada intinya merupakan media yang digunakan oleh benih untuk memulai proses pertumbuhan dan perkembangan hingga terjadi proses perkecambahan benih yang ditandai oleh keluarnya akar dan bagian vegetatif tanaman lainnya. Akar yang keluar sebagai hasil proses perkecambahan selanjutnya akan memulai menyerap air dan hara yang digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan hingga tanaman dewasa. Berikut gambar beberapa jenis media yang umum digunakan.

Prinsip media kecambah adalah memberikan lingkungan yang sesuai untuk terjadinya perkecambahan benih, untuk itu media kecambah harus bersifat : (1) porous, sehingga memudahkan semai untuk disapir dan meminimalkan kerusakan akar saat penyapihan, (2) selalu lembab, (3) tidak tergenang air, dan (4) tidak kering, (5) steril dari kemungkinan penyakit.

Teknik Penyemaian Benih

Tahapan penyemaian benih antara lain dilakukan sebagai berikut :

- ❖ Siapkan media semai kemudian masukkan ke dalam bak tabur, bak kecambah plastik, atau bak kecambah plastik, atau bak kecambah papan kayu
- ❖ Basahkan media dengan air, tetapi tidak sampai becek
- ❖ Untuk benih kecil dan halus, penyemaian dilakukan dengan cara menabur benih secara merata pada media kecambah, kemudian benih yang telah ditabur ditutup secara tipis
- ❖ Untuk benih ukuran sedang, maka penyemaian dilakukan dengan cara menanam benih hingga kedalaman $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ bagian benih. Bagian yang dipendam adalah bagian tempat keluarnya akar. Jika posisi ini terbalik, maka saat akar keluar tidak mengenai media kecambah sehingga bisa menyebabkan semai mati akibat akar tidak menyerap air dari media.
- ❖ Selanjutnya media semai dijaga kelembapannya. Agar proses perkecambahan tetap dapat berjalan baik, maka pemberian air pada media kecambah jangan sampai menyebabkan kondisi media becek. Namun hanya sebatas untuk melembapkan kondisi lingkungan media.

Media yang becek akan menyebabkan pembusukan benih, sebaliknya media yang kering akan mematikan benih yang telah berkecambah karena kekurangan air.

Penyapihan

Penyiapan Media Sapih

Komposisi media tumbuh bibit akan ikut menentukan bagaimana bibit tumbuh, karena berhubungan dengan kesesuaian media dan ketersediaan unsur hara yang dikandung dalam media tersebut untuk pertumbuhan tanaman. Umumnya media tumbuh bibit merupakan kombinasi antara tanah, kompos, dan pasir. Namun demikian terdapat jenis-jenis bahan lain yang dapat digunakan sebagai campuran media tumbuh antara lain : serbuk gergaji, arang sekam, arang kayu, dll.

Pemberian tanah dalam media tumbuh tanaman di samping berfungsi sebagai penyedia hara juga berperan sebagai pengikat air, pemberian kompos dimaksudkan untuk memasok nutrisi bagi pertumbuhan tanaman, sedangkan pasir untuk meningkatkan porositas media.

Teknik Penyapihan

Penyapihan adalah proses memindahkan semai dari bak tabur/kecambah ke dalam media sapih di dalam polybag. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan proses penyapihan. Kerusakan antara lain dapat disebabkan oleh : kerusakan akar atau kerusakan batang

Pemeliharaan bibit

Beberapa kegiatan utama dalam pemeliharaan bibit di persemaian yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan penyiraman secara rutin pagi (jam 8) dan sore hari (jam 4), khususnya jika tidak hujan. Selanjutnya bibit dipelihara hingga siap tanam (sekitar 4-5 bulan untuk jenis mahoni, suren, nangka, durian, 6 bulan untuk jenis manggis, pala,dll. Setiap 2 - 4 minggu lakukan penggeseran posisi bibit di bedeng sapih agar akar tidak terlalu dalam menembus tanah karena dapat menyebabkan kelayuan hingga kematian bibit angkutan dari persemaian ke lokasi penanaman. Melakukan pencegahan jika terjadi tanda-tanda serangan penyakit atau hama tanaman dengan menggunakan petisida, sangat disarankan menggunakan jenis pestisida organik.

Seleksi Bibit Sebelum Penanaman

Untuk meningkatkan keberhasilan tanaman, maka sebelum penanaman perlu dilakukan seleksi bibit. Bibit yang layak ditanam harus memenuhi kriteria sebagai berikut

- ❖ pangkal batang telah berkayu dan memenuhi tinggi minimal 30 cm
- ❖ bibit sehat dan seragam
- ❖ media perakaran kompak, artinya jika polybag dilepas maka media tanaman tidak hancur/lepas tetapi yang hancur akan menyebabkan banyak akar putus sehingga dapat menyebabkan kematian saat ditanam di lapangan
- ❖ batang bibit lurus dan tidak bercabang
- ❖ bagian pucuk bibit tidak patah atau mati, karena akan menyebabkan banyak tumbuh trubusan
- ❖ bibit tidak sedang memiliki daun muda karena jika ditanam umumnya akan layu dan mati, dan hal ini dapat menyebabkan tumbuhnya trubusan.

Ciri Ciri Bibit Sehat, sebagai berikut:

- ❖ Pertumbuhan Bibit Seragam
- ❖ Tahan Saat Dipindah
- ❖ Tumbuh Lebih Cepat
- ❖ Memiliki Akar Yang Banyak
- ❖ Kokoh dan Menghijau
- ❖ Tahan Terhadap Hama
- ❖ Tahan Terhadap Perubahan Iklim
- ❖ Produktivitas Tinggi

Waktu Pelaksanaan Pembibitan

Kegiatan pembibitan yang meliputi pembangunan persemaian dan proses pembibitan dapat dimulai 5 - 6 bulan tersebut jika penanaman dilaksanakan pada bulan Desember, maka pembibitan sebaiknya sudah dimulai sejak bulan Mei. Contoh tata waktu pelaksanaan pembibitan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.1: Jadwal Pembibitan dan Pembibitan

No	Kegiatan	Bulan Ke-						
		Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengadaan Benih	x						
2	Pengadaan Bahan dan Alat Persemaian	x						
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persemaian	x						
4	Penyemaian Benih	x	x					
5	Penyapihan Semai ke Media Polybag		x	x				
6	Pemeliharaan Bibit di Persemaian			x	x	x	x	x
7	Seleksi Bibit sebelum Penanaman						x	x

PENANAMAN

Kegiatan Penanaman dilakukan pada saat musim penghujan/sesuai jadwal. Tahapan kegiatan penanaman dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penanaman diawali dengan pembersihan lahan dan pengolahan tanah jika diperlukan. Selanjutnya pemasangan ajir disesuaikan dengan jarak tanam yang disyaratkan. Tiang ajir ditancapkan cukup dalam (+/- 30 cm) dan terbuat dari bambu yang kuat.
2. Pembuatan lubang tanam dengan ukuran lebar mata cangkul dan kedalaman minimal 30 cm dengan ukuran lubang 30 x 30 x 30 cm, 40 x 40 x 40 cm, atau 50 x 50 x 50 cm.
3. Pemberaan tanah asal selama ± 1 minggu dan pencampuran tanah asal dalam lubang tanam dengan pupuk kompos dengan perbandingan 2:1
4. Polybag dirobek secara hati-hati agar media tidak hancur dan akar tidak rusak, kemudian bibit dimasukkan dalam lubang dan ditimbun tanah bekas galian. Polybag tidak boleh ditinggalkan di area penanaman, harus dikumpulkan dan dibuang pada tempatnya.
5. Bibit diikat ke ajir menggunakan tali rafia pada satu titik agar posisi bibit tegak dan stabil
6. Penanaman harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat
7. Setiap bibit yang di tanam di berikan label yang berisi kode jenis dan nomor pohon

Pelaksanaan penanaman harus dikoordinasikan dengan Korwil dan didampingi oleh tenaga pendamping (mitra lokal) serta dilakukan dibawah pengawasan Lembaga Nasional (KpSHK).

PEMELIHARAAN

Pemeliharaan tanaman harus dilaksanakan untuk melindungi tanaman dari kerusakan dan gangguan gulma ataupun hama sehingga menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhannya. Pemeliharaan harus dilakukan selama 18 (delapan belas) bulan terhitung setelah masa kontrak selesai. Pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi setempat meliputi kegiatan penyulaman yang bertujuan untuk mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh sehat. Kegiatan pemeliharaan melibatkan kelompok masyarakat.

Penyiangan di lakukan untuk memberantas gulma di sekitar pohon, dilakukan setiap bulan pada tanaman yang belum menghasilkan, pada tanaman yang sudah menghasilkan penyiangan dilakukan apabila gulma telah mengganggu tanaman pokok.

Pompa air digunakan untuk memberikan kecukupan kebutuhan air di setiap penanaman, lebih diutamakan penempatan pompa air di wilayah penanaman yang jauh dari sumber air atau wilayah garapan yang kering. Pemberian pupuk dilakukan untuk memasok kebutuhan nutrisi tanaman saat ditanam dilapangan sesuai kebutuhan nutrisi masing-masing jenis tanaman yang ditanam. Jika kondisi kemarau maka dapat diaplikasikan biosorb sebagai cadangan air dalam tanah dan Legume Cover Crop (LCC) untuk penanaman dilapangan.

Pemangkasan ranting tua tanaman yang sudah ditanam dilapangan bertujuan untuk merangsang perkembangan tanaman dari segi kesehatan tanaman.

Dalam kegiatan ini KpSHK membantu kelancaran kegiatan dengan menyediakan dana kegiatan, dukungan administrasi, petunjuk teknis dan pendamping lapangan. Peralatan yang di gunakan oleh petani/kelompok tani dalam kegiatan ini di dukung oleh KpsHK berupa pacul, garpu, alat peyiraman, alat pengangkut barang dan parang yang merupakan inventaris MCAI, material seperti bibit disediakan untuk mendukung rehabilitasi lahan dan DAS. Personil yang terlibat di dalam kegiatan ini adalah petani/ketua kelompok tani yang mendapat bantuan, fasilitator desa yang sudah di tunjuk di awal, Koordinator Wilayah yang membatu mengawasi dan melaporkan kegiatan serta KpSHK yang memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan target.

7.9. BAHAN TAYANG



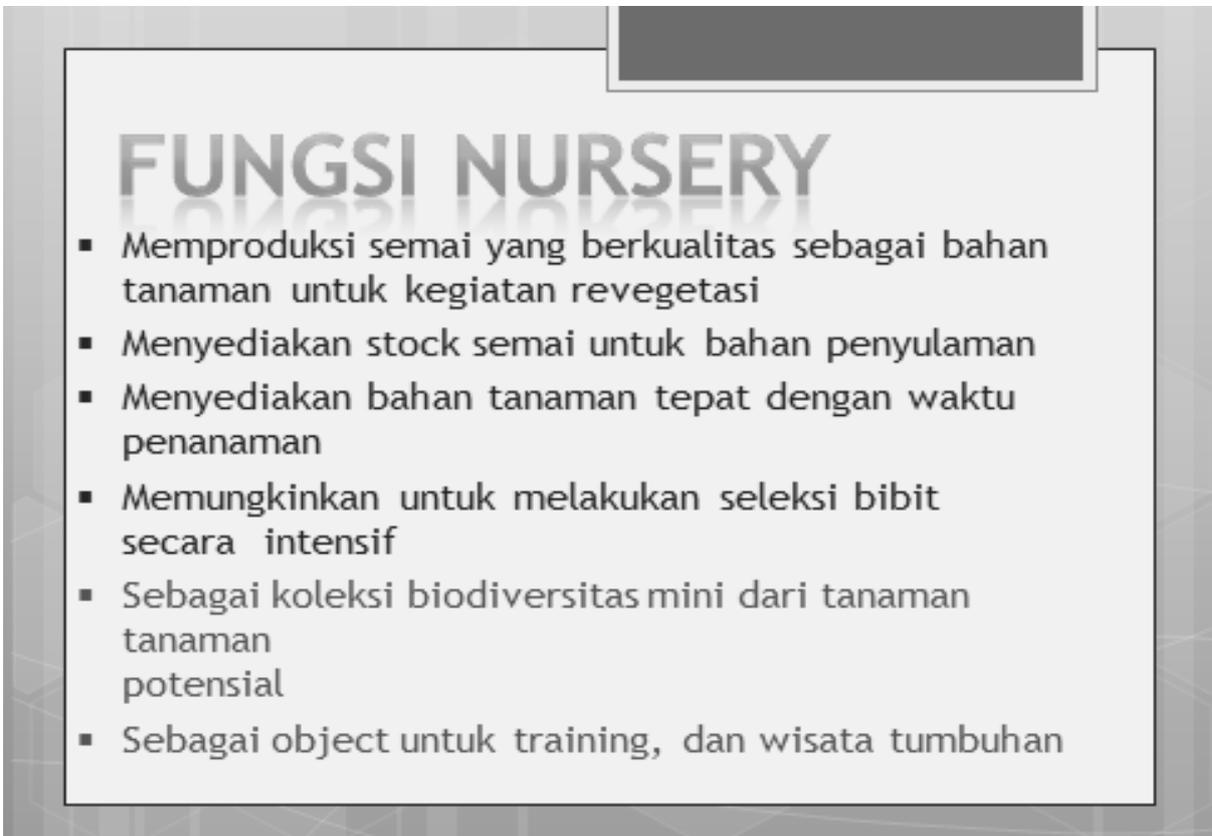
Slide 1: Pembangungan Nursery Untuk Perbanyak Bibit

K.P. SHK



Pembangungan
Nursery
Untuk Perbanyak
Bibit

PROYEK KEMAKMURAN HIJAU, PSDABM



Slide 2: FUNGSI NURSERY

FUNGSI NURSERY

- Memproduksi semai yang berkualitas sebagai bahan tanaman untuk kegiatan revegetasi
- Menyediakan stock semai untuk bahan penyulaman
- Menyediakan bahan tanaman tepat dengan waktu penanaman
- Memungkinkan untuk melakukan seleksi bibit secara intensif
- Sebagai koleksi biodiversitas mini dari tanaman tanaman potensial
- Sebagai object untuk training, dan wisata tumbuhan

BLACK SHADED NURSERY



EMERGENCY NURSERY



SEEDLING FROM SEED



PERSYARATAN NURSERY

- Lahan datar, stabil, tidak tergenang air
- Bebas dari gangguan (penduduk, hewan)
- Terdapat sumber air
- Aksesibilitas mudah
- Tersedia tenaga kerja
- Relatif dekat dengan tempat penanaman

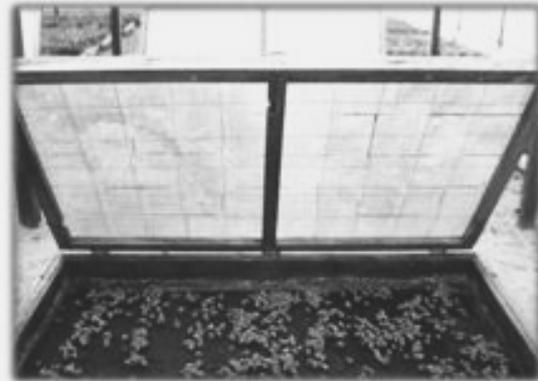
MANAGEMENT NURSERY

- Pendataan jenis dan jumlah semai yang diproduksi
- Pendataan jumlah dan jenis yang ditanam
- Melakukan pekerjaan rutin pembibitan
 - Penyemaian, pembuatan potting media, potting
 - Penyusunan di bedeng saph, labeling, pencatataan
- Melakukan pemeliharaan
 - Penyiraman, pemupukan, control hama penyakit
 - Hardening bibit, seleksi/pemisahan, pemangkasan akar
 - Pengaturan cahaya dan kontrol kelembaban
- Inventori dan penyediaan material

NURSERY FACILITIES

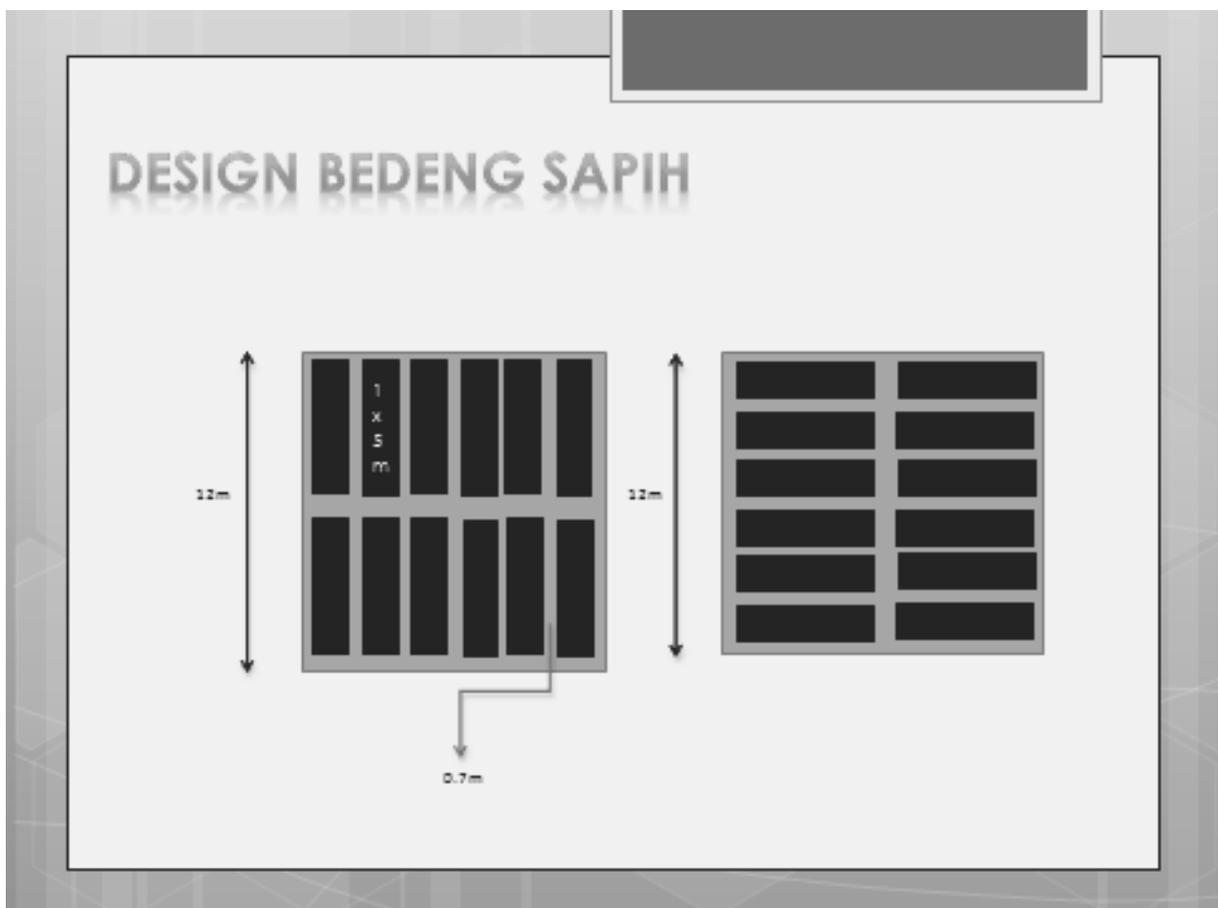
- Germinator box (for germinating seed)
- Incubator box (for recovering wildling)
- Seedling bed and Nethouse (seedling development and maintenance)
- Water tank (water storage for irrigation)
- Storage room (nursery materials and equipments)
- Soil mixing (preparing and producing potting media)
- Nursery office (administration and guarding))

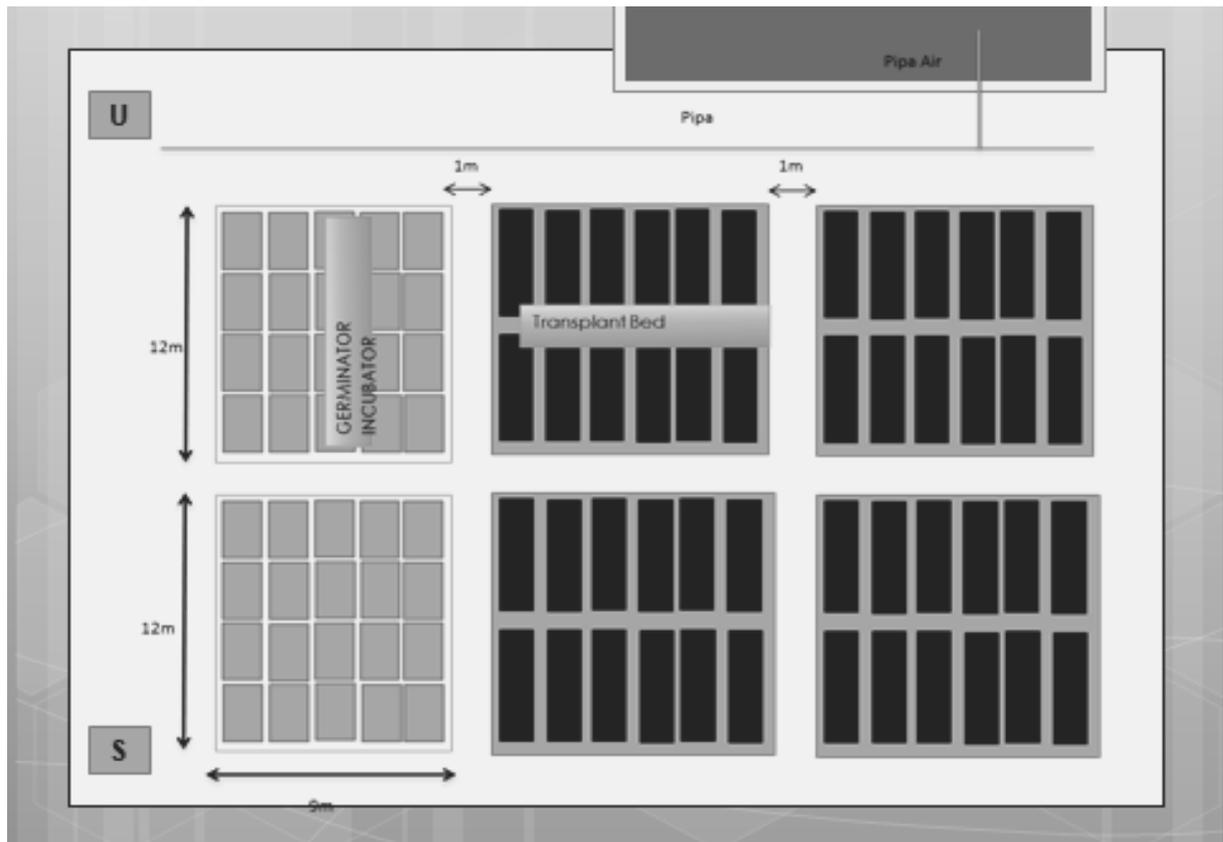
GERMINATOR



INCUBATOR







TEKNIK PEMBUATAN PERSEMAIAN

DEFINISI DAN TUJUAN

Defenisi

Persemaian adalah suatu bidang lahan yang digunakan untuk menghasilkan bibit pohon tertentu yang memenuhi persyaratan umur, ukuran dan kualitas tertentu yang cukup untuk ditanam dilapangan penanaman.

tujuan

Untuk menyediakan bibit pohon yang berkualitas baik dengan jumlah yang cukup dan dapat tersedia pada waktu yang diperlukan (waktu tanam).

TAHAPAN PEMBUATAN PERSEMAIAN

1. Perencanaan persemaian
2. Pengadaan alat dan bahan
3. Pelaksanaan pembuatan persemaian
4. Pemeliharaan persemaian
5. Seleksi bibit

PERENCANAAN PERSEMAIAN

1. Penentuan tipe persemaian
2. Menghitung jumlah bibit yang harus dihasilkan
3. Menentukan luas persemaian
4. Menentukan macam bibit yang akan dihasilkan
5. Memilih lokasi persemaian
6. Menentukan sistem penyiraman persemaian
7. Membuat lay out (tata letak) persemaian

TIPE TIPE PERSEMAIAN

1. Persemaian sementara:

dibuat berpindah – pindah mendekati lahan penanaman.

- keuntungan:
 - a) Keadaan lingkungan sama dengan keadaan lingkungan penanaman.
 - b) Biaya angkutan bibit lebih murah.
 - c) Kesuburan tanah lebih terjamin.
- Kerugian
 - a) Biaya pembuatan mahal.
 - b) Sulit memperoleh tenaga kerja.

2. Persemaian tetap:

Dibuat secara tetap di suatu lahan untuk jangka panjang.

- Keuntungan :
 - a. Dapat dibangun prasarana permanen
 - b. Tenaga kerja menjadi terlatih.
 - c. Biaya lebih murah (dalam jangka panjang).
 - d. Pengelolaan persemaian lebih intensif.
- Kerugian :
 - a. Kesuburan tanah dapat menurun.
 - b. Sumber media semai sering jauh dari persemaian.
 - c. Ongkos angkut bibit mahal.
 - d. Keadaan lingkungan persemaian bisa berbeda dengan lingkungan penanaman.

PEMILIHAN LOKASI PERSEMAIAN

Faktor-faktor yang dipertimbangkan

- 1) Pasokan air
- 2) Luas areal calon persemaian
- 3) Letak persemaian terhadap SDM
- 4) Aksesibilitas
- 5) Topografi
- 6) Kondisi tanah

RENCANA SISTEM IRIGASI (PENYIRAMAN)

1. Irigasi permukaan
 - Irigasi genangan
 - Irigasi saluran
2. Irigasi atas
 - Embrat (gembor)
 - Spraying
 - Sprinkling

PEMBUATAN LAY OUT PERSEMAIAN

- Pengaturan tata letak komponen-komponen persemaian :
 - ❖ Kantor
 - ❖ Gudang
 - ❖ Tempat media semai
 - ❖ Bedeng tabur
 - ❖ Bedeng saph
 - ❖ Inkubator
 - ❖ Rumah bibit (nethouse)
 - ❖ Jaringan irigasi

RENCANA JADWAL

TUJUAN :

- Semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- Memudahkan pengawasan dan pelaporan

PERTIMBANGAN DALAM PEMBUATAN JADWAL KEGIATAN

- Waktu penanaman bibit di lapangan
- Lamanya perawatan bibit di persemaian
- Jumlah bibit yang harus dihasilkan

PELAKSANAAN PEMBUATAN PERSEMAIAN

I. PERSIAPAN LAPANGAN

1. Pemancangan batas dan pengukuran luas
2. Pemagaran areal
3. Pembuatan kantor, gudang, dsb.
4. Pembersihan lapangan
5. Pengolahan tanah
6. Pembuatan jalan pemeriksaan
7. Pembuatan bedeng tabur/bak kecambah dan bedeng saphi
8. Pembuatan sistem irigasi
9. Pembuatan papan pengenal persemaian
10. Pembuatan papan tanda pengenal bedengan
11. Pengadaan bahan tanaman, media semai, polybag, dsb

PENGADAAN BAHAN TANAMAN

1. Penaburan benih
2. Pengisian kantong plastik (polybag)
3. Penyapihan

PEMELIHARAAN PERSEMAIAN

1. Pemberian naungan
2. Penyiraman
3. Penyiangan
4. Penyulaman
5. Pemupukan
6. Pemangkasan akar
7. Pemberantasan hama dan penyakit
8. Hardening-off

SELEKSI BIBIT

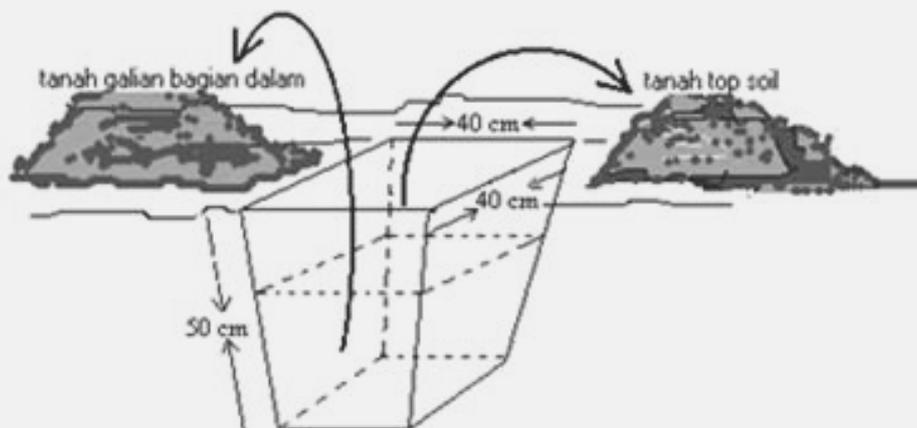
1. Bibit cukup umur
2. Memenuhi persyaratan tinggi minimal
3. Tumbuh sehat
4. Bebas dari serangan hama dan penyakit

PENANAMAN POHON

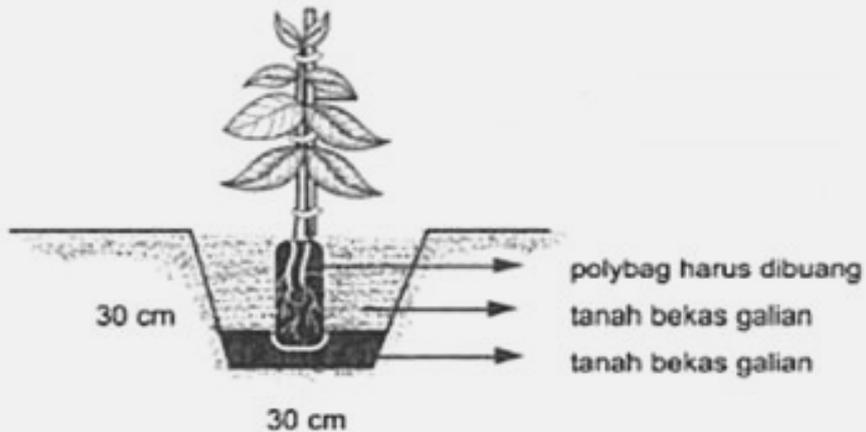
Persiapan penanaman

- Pengukuran batas lokasi
- Pembersihan lahan
- Pengelolaan tanah
- Pembuatan dan pemasangan ajir

Pembuatan lobang tanaman



Penanaman



PEMELIHARAAN TANAMAN

- Penyulaman
- Penyiangan dan pendangiran
- Pemangkasan
- Pemupukan
- Penjarangan
- Pengendalian hama penyakit
- Pengendalian bahaya kebakaran

Daftar pustaka

Kusuma,C., Sri.W., Ivan. H., Prijanto.P., Cahya.P.,Tatang.T., Adi, T., Yunasfi dan Hamzah., 2003. *Teknik Rehabilitasi Mangrove*. Fakultas kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Yadi Setiadi. 2013. *Pembangunan Nursery Untuk Perbanyak Bibit*. Faculty of forestry. Bogor

Permenhut No. P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Direktorat jendral Rehabilitasi Lahan dan Penuhutan Sosial, Departemen Kehutanan.

Ujang Susep Irayan dan Edi Purwanto. 2012. *Manual Pembuatan Persemaian dan Teknik Pembibitan*. Operation Wallacea trust.

Indriyanto. 2013. *Teknik dan Manajemen Persemaian*. Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Agus Kardian dan Agus Ruhnayat., *Mimba Budidaya dan Pemanfaatan*. Jakarta. Penebar Swadaya. 2003.

Wiratno, dkk., *Budidaya Tanaman Mimba*. Balai Penelitian Tanaman Obat. 2001.

TERIMA KASIH

○BAB 8

MODUL PERAN GENDER DALAM PSDABM

8.1. DESKRIPSI SINGKAT

Dalam rangka mendukung kesuksesan program Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM), maka peran gender sangat penting. Peran aktif ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Agar perempuan dan kelompok perempuan dapat berperan dan mempunyai kapasitas yang memadai, maka pelatihan teknis dan perspektif dan pengarusutamaan gender menjadi penting.

8.2. TUJUAN PEMBELAJARAN

8.2.1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Tujuan Pembelajaran Umum untuk kegiatan pelatihan “Peran Gender dalam PSDABM” adalah Memberikan pemahaman kepada fasilitator pentingnya peran perempuan/kaum minoritas dalam pembangunan ekonomi kerakyatan.

8.2.2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) peserta mampu memahami dan terampil terkait peran gender dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi PSDABM serta usulan proyek

8.3. POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN

Pokok Bahasan dalam pelatihan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, yakni:

1. Peran Gender dalam Perencanaan Proyek
2. Peran Gender dalam Pelaksanaan Proyek
3. Peran Gender dalam Monitoring dan Evaluasi Proyek
4. Peran Gender dalam Usulan Proyek

8.4. PERSYARATAN PESERTA

8.4.1. PERSYARATAN PENDIDIKAN PESERTA

Peserta mempunyai pendidikan minimal Diploma dan telah lulus minimal 3 tahun.

8.4.2. PERSYARATAN PENGALAMAN PESERTA

Peserta bersungguh-sungguh untuk belajar dalam kegiatan pelatihan terkait:

1. Peran Gender dalam Perencanaan Proyek

2. Peran Gender dalam Pelaksanaan Proyek
3. Peran Gender dalam Monitoring dan Evaluasi Proyek
4. Peran Gender dalam Usulan Proyek

8.5. BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, flip chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan diskusi kelompok, dan modul. Media pembelajaran meliputi Lembar Latihan dan Lembar Rencana Dokumentasi.

Di samping itu, alat dan bahan ajar yang diperlukan:

1. Kertas flipchart atau kertas plano
2. Kertas HVS
3. Komputer dan printer
4. Tinta printer
5. Spidol dan ballpoint
6. Kamera foto / Handphone camera
7. Buku Catatan

8.6. METODE PEMBELAJARAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui [1] Diskusi umum, [2] Curah pendapat, dan [3] Penugasan individual

8.7. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 2 jam pelajaran per hari (T=5jp, P=0jp, PL=0jp) @45 menit, selama 1 hari jangka waktu Training of Trainer (ToT). Untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta maka, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

❖ Langkah 1: Pengkondisian (15 Menit)

1. Penyebaran dan pencairan suasana (*ice-breaking*),
2. Pemandu/pengajar menggali harapan peserta tentang materi dan keterampilan yang ingin dicapai melalui sesi ToT ini,
3. Pemandu/pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan metode yang akan digunakan,
4. Menggali pendapat peserta tentang “Peran Gender dalam PSDABM”. Proses pembelajaran menggunakan metode dimana semua peserta terlibat secara aktif,
5. Berdasarkan pendapat peserta, pemandu/pengajar menjelaskan tentang “Pembibitan dan Penanaman”.

❖ Langkah 2: Pengkajian Pokok Bahasan (120 Menit)

1. Pemandu/pengajar menyampaikan pokok bahasan:
 - ❖ Peran Gender dalam Perencanaan Proyek
 - ❖ Peran Gender dalam Pelaksanaan Proyek
 - ❖ Peran Gender dalam Monitoring dan Evaluasi Proyek
 - ❖ Peran Gender dalam Usulan Proyek

2. Pemandu/pengajar member kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta.
3. Pemandu/pengajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga antar peserta juga terjadi diskusi dan interaksi yang baik.
4. Pemandu/pengajar menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok tentang:
 - ❖ Peran Gender dalam Perencanaan Proyek
 - ❖ Peran Gender dalam Pelaksanaan Proyek
 - ❖ Peran Gender dalam Monitoring dan Evaluasi Proyek
 - ❖ Peran Gender dalam Usulan Proyek

❖ **Langkah 3: Rangkuman(45 Menit)**

1. Pemandu/pengajar merangkum sesi pembelajaran.
2. Peserta dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan pengajar memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari pengajar maupun dari peserta lain.
3. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan.
4. Pemandu/pengajar menutup sesi pembelajaran dengan memastikan bahwa TPU dan TPK sesi telah tercapai.

8.8. URAIAN MATERI

PERENCANAAN

Dalam penilaian dan rancangan program, kita tidak bisa meminta satu orang anggota tim untuk menanggapi “aspek perempuan” secara terpisah. Hal ini mengakibatkan komponen-komponen perempuan yang tidak sustainable masuk ke dalam program.

Orientasi kelompok sasaran dan gender harus dimasukkan dalam acuan-acuan yang mesti dilaksanakan oleh perencana, terpadu dan mengikat secara sistematis. Analisis kelompok sasaran (gender) tidak bisa disusun tanpa melibatkan mereka yang bertanggung jawab dalam aspek – aspek yang lebih teknis dari strategi proyek. Pertanyaan - pertanyaan yang dikemukakan untuk menguraikan dan menjelaskan maksud dan tujuan mesti spesifik gender.

Dari awal, Penanggungjawab dan program menejer harus memastikan bahwa staf dan mitra - mitra setempat memahami mengapa pengujian aspek – aspek spesifik gender, indikator – indikator dan dampak – dampak itu penting.

Ketika sebuah tujuan sudah ditetapkan, harus ada indikator untuk mengukur kemajuan, keberhasilan, atau kegagalan program. Membedakan tujuan – tujuan dan indikator – indikator berdasarkan gender adalah satu - satunya cara untuk memastikan bahwa ada kaidah yang mengikat untuk mencatat dampak - dampak proyek yang khas gender, sehingga memudahkan jalannya proyek. Tujuan – tujuan dan indikator – indikatornya dibuat untuk mengukur hasil - hasil, sasaran proyek dan semua tujuan, serta setiap kegiatan proyek.

8.8.1. TUJUAN DAN INDIKATOR

Tujuan dan indikator tersebut harus pepadat dalam hal:

- ❖ Kelompok-kelompok sasaran (siapa?)
- ❖ Lokasi
- ❖ Kualitas (apa? Seberapa bagus?)
- ❖ Jangka waktu
- ❖ Kuantitas
- ❖ **Realistis:** situasi yang dikehendaki mungkin dicapai
- ❖ **Bisadiuji:** dengan sumberdaya yang tersedia, dan dengan usaha sekecil mungkin.
- ❖ **Expresif:** menghususkan tujuan – tujuan pokok pada berbagai tahap perencanaan yang satu sama lain berdiri sendiri. Indikator – indikator pada satu tahap perencanaan bisa membatasi diri pada tujuan-tujuan pada tahap itu saja.

Indikator kualitatif sama pentingnya dengan indikator kuantitatif, bukan hanya berapa banyak jumlah anggota perempuan yang terdaftar dalam pengelolaan program, tetapi jabatan apa yang mereka tempati dan apakah mereka mempunyai kewenangan membuat keputusan yang sama sebagaimana laki-laki.

8.8.2. PERTANYAAN KUNCI DALAM PERENCANAAN

Berdasarkan pertanyaan kunci dibawah ini, kita bisa menentukan sejauh mana kita berhasil menggunakan pendekatan gender dalam strategi proyek,

- ❖ Apakah laki – laki dan perempuan memperoleh manfaat yang sama besarnya?
- ❖ Apakah perempuan dan laki – laki secara aktif terlibat dalam perencanaan proyek, atau

- pembuatan keputusan? Apa peran mereka masing - masing?
- ❖ Apakah indikator – indikator yang dirumuskan sudah sesuai dengan pedoman - pedoman khas gender, sehingga berbagai dampak proyek bagi laki – laki dan perempuan bisa ditentukan?
 - ❖ Apakah hasil – hasil dan kegiatan – kegiatan sudah dirumuskan menurut pedoman - pedoman khas gender?
 - ❖ Apakah kegiatan – kegiatan sudah direncanakan sedemikian rupa misalnya menghilangkan hambatan partisipasi perempuan?
 - ❖ Apakah perempuan dan laki – laki sudah merasa puas dimana masalah isu keamanan dan perlindungan ditangani secara memadai?
 - ❖ Apakah proyek memberi sumbangan nyata bagi perbaikan kondisi ekonomi dan sosial perempuan?
 - ❖ Apakah sudah diambil langkah –langkah untuk memastikan bahwa jumlah staf proyek perempuan memadai telah ikut serta dan memperoleh manfaat?
 - ❖ Ketika anggota kelompok sasaran perempuan tidak bisa ditangani secara langsung oleh staf laki - laki, apakah ada rencana untuk mempekerjakan ahli – ahli perempuan?
 - ❖ Jika staf yang ada tidak cukup terlatih untuk memberi saran dan membantu kelompok sasaran perempuan, apakah sudah ada rencana untuk mengadakan pelatihan untuk menangani hal ini?

PELAKSANAAN

Isu – isu gender dalam pelaksanaan program terutama adalah tentang siapa melakukan apa, dan bagaimana mereka melakukannya.

- ❖ Apakah jumlah perempuan yang menjadi anggota tim pemberdayaan sebanding dengan jumlah perempuan yang diberdayakan?
- ❖ Apakah perempuan terlihat bekerja di sektor non tradisional? Jika tidak, apakah ada rencana untuk melatih perempuan dalam jenis pekerjaan ini?
- ❖ Upaya – upaya apa yang sedang dibuat untuk memaksimalkan pekerjaan dan pelatihan perempuan dalam komunitas/perempuan setempat?
- ❖ Apakah setiap orang tahu dan paham dengan efek – efek dari pola perilaku gender?
- ❖ Apakah kapasitas perempuan diakui?
- ❖ Apakah masalah keamanan dan perlindungan terhadap perempuan diperhatikan?
- ❖ Apakah laki – laki dan perempuan (tediri dari masyarakat di area program dan staf) terus mengikuti kemajuan yang dicapai dan mengetahui keputusan – keputusan yang diambil?

PEMANTAUAN

Pemantauan berarti pengamatan dan dokumentasi yang sistematis terhadap pelaksanaan program berdasarkan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Pemantauan dan evaluasi sering kali dilakukan sebagai satu tahap untuk mengarahkan rencana bantuan, agar bisa dipastikan adanya perbaikan dan pembelajaran terus - menerus. Partisipasi kelompok sasaran adalah penting.

Dalam melakukan tinjauan program, usahakan untuk selalu membedakan hasil dan dampak menurut jenis kelamin, hal ini tidak mungkin jika tidak digunakan istilah yang tepat dalam

rencana program. Ungkapan umum untuk hasil, seperti “persediaan pangan yang meningkat bagi petani dan keluarganya,” tidak akan banyak menjelaskan pada kita siapa yang memperoleh manfaat dari peningkatan tersebut, dan apakah peningkatan itu akan benar – benar memperbaiki keadaan dan kualitas hidup bagi semua anggota keluarga.

Pertanyaan Kunci untuk memeriksa orientasi gender selama tinjauan kemajuan proyek, meliputi:

- ❖ Apakah perencanaan dan pelaksanaan proyek didasarkan atas analisis situasi dimana laki – laki dan perempuan dengan latar belakang sosial dan usia yang berbeda bisa berbicara dan mengemukakan pandangan mereka sendiri?
- ❖ Akomodasi apa yang dibuat untuk memastikan partisipasi perempuan?
- ❖ Apakah perbedaan gender secara khusus dimasukkan dalam strategi proyek?
- ❖ Sejauh mana dampak – dampak spesifik gender dari proyek itu dikaji dan dirancang menurut pedoman – pedoman yang telah ditetapkan, misalnya dalam analisis kerangka logis?
- ❖ Sejauh mana dampak – dampak spesifik gender (yang di sengaja atau tidak) diamati selama pelaksanaan program/proyek, dan langkah – langkah apa, jika memang ada, yang sudah/akan diambil untuk memperbaiki atau mengimbangi dampak – dampak tersebut.

EVALUASI

Evaluasi berarti penilaian internal akan informasi yang dikumpulkan selama pemantauan, untuk menentukan apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana dan tujuan – tujuannya atau tidak.

Evaluasi yang berguna adalah berupa penilaian dan komentar mengenai kualitas dan sejauh mana perempuan dan laki – laki mempengaruhi rencana proyek. Kelompok sasaran sebaiknya tidak menjadi sumber informasi, tetapi umpan balik mereka semestinya mempengaruhi arah dan pola program selanjutnya.

Evaluasi mesti menjelaskan seberapa besar proses tersebut telah membantu masyarakat (laki – laki dan perempuan target program) dalam menilai dan mengarahkan aktivitas mereka sendiri.

Dampak – dampak spesifik gender yang direncanakan dan yang tidak direncanakan mesti dicatat. Perhatikan pula bagaimana isu – isu gender dalam program bantuan bisa mempengaruhi:

- ❖ Keadaan pangan
- ❖ Pekerjaan
- ❖ Pendapatan
- ❖ Beban kerja
- ❖ Kesehatan
- ❖ Akses pada dan control terhadap sumber daya
- ❖ Kemampuan organisasi
- ❖ Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- ❖ Jaminan diri
- ❖ Mobilitas
- ❖ Status sosial

Dalam evaluasi, seperti tahap - tahap lainnya, tersedianya kesempatan bagi perempuan untuk bisa berbicara dengan sesama kaumnya adalah penting, karenanya diperlukan staf proyek

perempuan dengan jumlah yang memadai. Sebagaimana musyawarah - musyawarah lainnya, evaluasi menuntut perencanaan tambahan yang disesuaikan dengan jadwal perempuan.

MENILAI USULAN PROYEK

Penyaringan awal usulan proyek mesti sejalan dengan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan, termasuk gender. Hanya jika hasilnya positif, maka bisa dilanjutkan ketahap berikutnya, yaitu penilaian konsep proyek.

Pertanyaan – pertanyaan kunci yang harus dijawab dan dijelaskan dalam proposal meliputi:

Maksud dan Tujuan

- ❖ Apakah persamaan gender disebutkan?
- ❖ Jika hasil - hasilnya menggunakan istilah-istilah seperti pemberdayaan atau keberlanjutan, bagaimana istilah tersebut didefinisikan?

Perencanaan

- ❖ Keadaan dan situasi seperti apa yang ingin dicapai oleh usulan program? Siapa yang akan memperoleh manfaatnya?
- ❖ Siapa yang dipengaruhi oleh situasi ini? Apakah hanya laki-laki? [perempuan dan laki-laki? Perempuan saja? Apakah pemuda juga terkena dampaknya?
- ❖ Sub-sub kelompok homogeny apa yang ada (dalam hubungannya dengan penghasilan, usia, akses pada sumber daya)
- ❖ Apakah laki-laki dan perempuan diminta menjawab bagaimana mereka ,lihat masalah, dan apakah muncul pendapat dari mereka?
- ❖ Potensi-potensi apa yang dimiliki oleh berbagai sub kelompok tersebut dalam bertindak?
- ❖ Apakah kelompok sasaran digambarkan secara jelas dan dijelaskan secara rinci?
- ❖ Apakah peran ganda perempuan diperhatikan?
- ❖ Pola-pola apa yang dibuat untuk melibatkan mereka?
- ❖ Apakah tujuan, hasil dan kegiatan utama direncanakan sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan laki-laki dan perempuan?
- ❖ Bukti-bukti apa yang ada untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan akan berpartisipasi secara aktif?
- ❖ Siapa yang akan membuat keputusan dalam hal akses pada program dan manfaat-manfaatnya?
- ❖ Bagaimana program tersebut bisa membantu meningkatkan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam bertindak/ membuat keputusan mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka?
- ❖ Bagaimana program itu bisa menambah pengetahuan tentang hak-hak dan meningkatkan kemampuan mereka dalam membicarakan hak-hak tersebut?
- ❖ Bagaimana program tersebut bisa membangun dan meningkatkan kemampuan perempuan dan laki-laki dalam mendukung hasil-hasil proyek di luar bantuan
- ❖ Bagaimana kesempatan/hambatan yang ada diubah dimasukkan ke dalam rencana?

Evaluasi

- ❖ Apakah indikator yang ditetapkan memperhatikan peran social/gender
- ❖ Bagaimana dampak – dampak spesifik gender akan diukur?

Usahakan untuk menentukan kemungkinan timbulnya dampak - dampak spesifik gender dalam usulan proyek. Kategori – kategori dibawah ini mungkin membantu:

- a. Proyek hanya menangani perempuan
- b. Perempuan akan dilibatkan secara nyata dalam rencana program dan mereka bisa mendapatkan manfaatnya
- c. Informasi mengenai perempuan tidak benar. Terdapat resiko – resiko yang merugikan perempuan ketika kepentingan dan kebutuhan mereka tidak diperhatikan secara memadai dalam rencana proyek, dan perempuan mungkin tidak akan memperoleh manfaat
- d. Perempuan tidak memperoleh manfaat secara memadai. Dampak – dampak negative pada perempuan mungkin lebih besar daripada upaya –upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Usulan program harus dihentikan (dibatalkan)
- e. Kelompok – kelompok sasaran dan dampak – dampak spesifik gender dalam lingkungan tidak bisa diukur secara langsung.

Usulan program dalam kategori bisa diperbaiki dengan menawarkan saran rencana proyek, membantu melakukan analisis situasi dan analisis kelompok sasaran yang dibedakan menurut gender. Selalu dibutuhkan waktu dan keahlian yang memadai untuk melakukan analisis ini dengan baik, dan fase pertama dari situasi darurat tidak mesti merupakan waktu yang paling tepat untuk mengadakan pelatihan semacam ini.

- ❖ Informasi tentang lembaga – lembaga mitra yang diusulkan mesti menjawab,
- ❖ Apakah lembaga tersebut bisa melaksanakan proyek sebagaimana yang digariskan?
- ❖ Apakah lembaga tersebut bisa mengadopsi prosedur – prosedur yang spesifik gender?
- ❖ Bagaimana perilaku lembaga terhadap pendekatan gender?
- ❖ Apakah akan muncul resistensi atau perlawanan pada upaya melibatkan perempuan secara aktif?
- ❖ Apakah lembaga mempunyai keahlian yang diperlukan dalam bidang ini?

METODE PARTISIPATIF

Metode – metode partisipatif lisan memberi kesempatan bagi penduduk yang tidak bisa baca tulis (sebagian besar adalah kaum perempuan) untuk terlibat dalam menentukan prioritas dan merencanakan tindakan.

Waktu dan mobilitas geografis yang terbatas yang dimiliki perempuan harus selalu diperhatikan dan dipertimbangkan ketika meminta partisipasi perempuan. Beban kerja, tanggung jawab mengurus rumah tangga dan anak menjadikan mereka pada umumnya tidak mempunyai banyak waktu untuk menghadiri dan mengikuti pertemuan, jadi mesti ditemukan cara – cara yang memungkinkan keikutsertaan mereka.

Metode partisipatif menuntut:

- ❖ Perilaku individu yang positif dalam kedudukannya sebagai penasehat luar
- ❖ Keterampilan/keahlian komunikasi yang sangat bagus
- ❖ Kesiediaan untuk melibatkan masyarakat yang dibantu secara serius, memperlakukan mereka sebagai rekanan yang kompeten, bertanggungjawab
- ❖ Kesiediaan untuk belajar dari mereka
- ❖ Melibatkan perempuan sebagai fasilitator, karena mereka akan lebih mudah membangun hubungan dengan penduduk perempuan
- ❖ Sebagai pra syarat, pemahaman yang menyeluruh akan kondisi sosial dan ekonomi yang

terjadi saat itu. Kondisi sosial yang ada harus dipertimbangkan berdasarkan pedoman khusus gender, dengan mengenali perbedaan – perbedaan dalam:

- ✓ Pembagian kerja dan beban kerja
- ✓ Sumber - sumber pendapatan
- ✓ Komitmen untuk ikut serta dan ikut andil
- ✓ Akses pada/control terhadap sumber daya fisik (tanah, uang, pinjaman, tenaga kerja, dan sebagainya)
- ✓ Akses pada sumber daya lainnya (pendidikan, informasi, bantuan konsultasi)
- ✓ Mobilitas
 - ✓ Bentuk – bentuk organisasi dan partisipasi dalam lembaga – lembaga dan badan – badan formal dan informal.

MASALAH YANG PERLU DIPIKIRKAN LEBIH LANJUT

8.9. BAHAN TAYANG

ALUR PROSES

PELATIHAN PERSPEKTIF GENDER

PENDUAN FASILITATOR & TRAINER

PEMBUKAAN

Sambutan (30 Menit)

1. Ucapan selamat datang oleh Wakil lembaga penyelenggara training:
 - Penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan pelatihan
 - Penjelasan mengenai proses persiapan: peserta dan pemilihan peserta, serta lainnya
2. Kata Sambutan Pejabat Dinas Setempat

Perkenalan (20 Menit)

1. Fasilitator menjelaskan proses perkenalan, di mana peserta menyebutkan nama, asal lembaga dan diminta membuat gambar tentang peristiwa masa kecil dimana pertama kali mereka mengetahui kalau diri mereka adalah laki-laki atau perempuan *(misalkan pada saat ingin memanjat pohon, kemudian dilarang oleh orangtua, karena anak perempuan tidak pantas memanjat pohon).*
2. Peserta, panitia dan fasilitator menuliskan harapannya dalam training gender dasar ini.
3. Semua yang hadir (peserta, fasilitator, panitia, termasuk perekam proses) memperkenalkan dirinya satu per-satu mulai dari penjelasan gambar

Penjelasan Alur Proses dan Kontrak Belajar (10 Menit)

1. Fasilitator menjelaskan alur pelatihan, termasuk latar belakang pilihan materi, topik-topik yang akan disampaikan dan metode metode yang akan digunakan
2. Fasilitator membuka kesempatan bagi peserta untuk bertanya mengenai hal-hal yang ingin diketahuinya secara lebih jelas
3. Fasilitator membuka kesempatan bagi peserta untuk memberikan usulan perubahan alur, penambahan/pengurangan materi, termasuk waktu yang dialokasikan untuk satu materi.
4. Kontrak Belajar (Kesepakatan & Aturan Main)

Materi Pengantar

Presentasi (10 Menit)

- Presentasi Pengantar dari Fasilitator
- Penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan pelatihan

Topik 1 PERBEDAAN SEKS DAN GENDER

waktu	120 Menit dengan Metode : Eksplorasi pengalaman peserta, Diskusi & Presentasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memahami pengertian seks (jenis kelamin biologis) dan gender (jenis kelamin sosial) • Dapat memahami bahwa konsep gender yang berlaku dalam masyarakat dapat berubah sesuai konteks waktu, tempat, dan budaya • Dapat memahami identitas, stratifikasi dan peran gender dalam masyarakat • Dapat memahami dan menghargai secara positif peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator meminta peserta untuk menulis di kertas meta plan tentang apa yang terpikir secara spontan apabila mendengar kata 'perempuan' dan 'laki-laki'? Silahkan menyebutkan 2 hal mengenai laki-laki dan perempuan tentang sifatnya, pekerjaannya atau ciri biologisnya. • Fasilitator meminta peserta membacakan apa yang ditulisnya, dan menempelkan di papan tulis/ dinding • Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan mengenai apa yang dapat dipertukarkan dari apa yang ditulisnya, dan melihat apa yang tidak dapat dipertukarkan • Peserta mendiskusikan perbedaan seks dan gender (Disko)
Presentasi (Trainer / Pemateri)	<p>Presentasi 1 :</p> <p>Pemutaran Video Kacamata Gender Perbedaan Seks & Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trainer Mempresentasikan slide Perbedaan Seks & Gender • menyimpulkan bersama-sama tentang pengertian seks dan gender serta perbedaan keduanya.

Topik 2 Kenapa Gender Dipersoalkan

waktu	60 Menit dengan Metode : Eksplorasi pengalaman peserta, Penggalan Pendapat Peserta , Diskusi & Presentasi
Tujuan	Peserta memahami mengapa gender dipersoalkan
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator menanyakan kepada peserta tentang mengapa gender dipersoalkan. • Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta di kertas Flipchart. • Fasilitator mengajak peserta untuk mendiskusikan secara bersama-sama seluruh jawaban di kertas flipchat. • Untuk menguji pemahaman peserta, fasilitator membuat permainan pernyataan setuju dan tidak setuju terhadap kalimat tertentu yang bacakan dan menanyakan pendapat peserta tentang pernyataan tersebut. • Metode permainannya, peserta membuat dua barisan. Setelah mendengar pernyataan yang dibacakan fasilitator, bagi yang setuju akan pindah ke sebelah kanan, yang tidak setuju pindah ke sebelah kiri dan yang ragu-ragu berdiri di tengah. Kemudian fasilitator akan menanyakan alasan pilihan tersebut.
Presentasi (Trainer / Pemateri)	<p>Presentasi 2 : Kenapa Gender di Persoalkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trainer Mempresentasikan slide tentang Persoalan Gender

Topik 3 Bentuk-bentuk Ketidakadilan Gender

waktu	90 Menit dengan Metode : Diskusi Kelompok & Presentasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan dan melestarikan terjadinya ketidakadilan gender • Dapat memahami bahwa faktor-faktor penyebab ketidakadilan gender tersebut sangat kompleks dan saling berkaitan satu sama lain • Mulai terbuka bahwa ada faktor-faktor yang selama ini tidak pernah diperhitungkan sebagai hal penyebab ketidakadilan gender ternyata memainkan peran cukup penting seperti penafsiran Budaya yang tidak berpihak pada perempuan dan nilai-nilai dalam masyarakat yang menomorkan laki-laki.
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator meminta peserta untuk menonton "Film Impossible Dream" • Fasilitator membagi peserta ke dalam 4-5 kelompok diskusi (pembagian kelompok dengan menggunakan permainan kapal karam) • Peserta dibagi dalam dua barisan kemudian menyanyikan lagu sambil mengerakkan tubuh seperti mengayuh perahu ke kiri dan ke kanan, kemudian bait lagu ombak datang perahu bergoyang, tangan diletakkan dipinggir lalu bergoyang ke kiri dan ke kanan. • Fasilitator mengucapkan Perahu Karam, sekoci diturunkan 4 (Maksudnya peserta dibagi dalam 4 kelompok). Peserta mencari kelompoknya, bagi peserta yang tidak mendapatkan kelompok, maka peserta mendapatkan hukuman (misalnya menuliskan 5 tidak adilan yang dilihat/ diamati/ dirasakan). • Fasilitator meminta peserta untuk berdiskusi tentang bentuk-bentuk ketidak adilan gender dan dampaknya di ranah keluarga, kampung/komunitas, tempat kerja dan Negara. • Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan membahasnya bersama. • Fasilitator mengkategorikan hasil diskusi peserta ke dalam 5 bentuk bentuk ketidakadilan gender
Presentasi (Trainer / Pemateri)	<p>Presentasi 3 : Materi bentuk-bentuk ketidakadilan gender.</p> <p>Trainer Mempresentasikan slide tentang ketidak adilah Gender</p>

Topik 4 Implikasi Konstruksi Gender Dalam Persoalan Sosial di....

waktu	120 Menit dengan Metode : Curah Pendapat , DiskusiKelompok & Presentasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta memahami hubungan dari situasi Gender dengan persoalan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitator Membagi Peserta menjadi 4 Kelompok ❖ Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada peserta tentang Peran Gender didalam Pengelolaan usaha.....(dengan panduan 2 format di kertas metaplan yang menggambarkan peran laki – laki dan perempuan dalam usaha yakni menggambarkan peran produksi dan peran sosial), menggunakan tabel Analisis Kegiatan ❖ Masing Kelompok mempresentasikan hasil diskusi
Presentasi (Trainer / Pemateri)	<p>Presentasi 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implikasi Konstruksi Gender Dalam Persoalan Sosial • (bisa melihat beberapa study kasus tentang ketimpangan gender di keluarga)

Topik 5 Pengarustamaan Gender di Bidang.....

waktu	90 Menit dengan Metode : Diskusi Kelompok, Curah Pendapat & Presentasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta paham tentang konsep PUG • Dapat mendeskripsikan keuntungan pengarusutamaan gender. • Peserta paham tentang tujuan PUG • Peserta mampu menggambarkan hambatan-hambatan dalam melaksanakan PUG di
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator mengajukan pertanyaan mengapa penting PUG dalam kehidupan sehari-hari atau dalam usaha.....? • Peserta menulis 2 kalimat di kertas flipchart yang dibagikan oleh panitia • Fasilitator dibantu panitia menempelkan jawaban peserta di kertas plano dengan pengkategorian jawaban dari bias gender • Menyimpulkan secara bersama – sama dengan peserta
Presentasi (Trainer / Pemateri)	<p>Presentasi 5 : Tentang PUG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Latar Belakang Pengarusutamaan Gender • Pengertian PUG • Dasar Hukum / Kebijakan PUG • Keuntungan Menggunakan PUG • Cakupan dan batasan PUG • Tujuan PUG • Hambatan Pelaksanaan PUG

Topik 6 Sejarah Perjuangan melawan Ketidakadilan Terhadap Perempuan

waktu	90 Menit dengan Metode : Diskusi Kelompok, Curah Pendapat & Presentasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui sejarah perjuangan melawan ketidakadilan terhadap perempuan, yang merupakan sejarah gerakan perempuan mulai dari masa penjajahan sampai masa sekarang. Memahami posisi/peran peserta dalam dinamika gerakan perempuan Indonesia saat ini.
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitator menyiapkan kertas metaplan, kemudian menuliskan periodisasi gerakan perempuan secara berurutan dari kolom yang paling kanan : <ul style="list-style-type: none"> Masa penjajahan belanda Masa penjajahan Jepang Masa orde lama (1945-1965) Masa Orde Baru (1965-21 Mei 1998) Masa Post Orde Baru (21 Mei 1998-Sekarang) Fasilitator meminta peserta untuk mengambil 5 buah metaplan , kemudian peserta diminta menuliskan apa yang mereka ketahui tentang peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh dan hal-hal yang berhubungan dengan gerakan perempuan di setiap periode. Misalnya untuk periode penjajahan Belanda, seorang peserta menulis di metapalannya " Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta" atau untuk periode masa post Orba, ia menulis 'isu kekerasan terhadap perempuan menjadi signifikan" Fasilitator memintalah kepada peserta untuk membacakan dan menjelaskan secara singkat tulisan yang ada dalam metapalannya. Kemudian mintalah peserta menempelkan metaplan tersebut di kertas plano atau di papan tulis yang sudah disediakan sesuai dengan periodenya.
Presentasi (Trainer / Pemateri)	<p>Presentasi 6 : sejarah Perjuangan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> mengali pendapat peserta tentang sejarah perjuangan melawan ketidakadilan gender (sejarah gerakan perempuan) Menampilkan periodisasi perjuangan perempuan di Indonesia

Topik 7 Sasaran Strategis dan praktis gender dalam..... (Sektor atau bidang usaha bersama, misalnya pertanian atau perkebunan)

waktu	90 Menit dengan Metode : Diskusi Kelompok, Curah Pendapat & Presentasi
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Peserta memahami tentang langkah-langkah dalam mengimplementasikan PUG dalam usaha atau sektor (Misalnya pertanian atau kebun) Memahami sasaran, dan ruang lingkup PUG dalam usaha atau sektor.....
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitator Mengajukan Pertanyaan Kunci antara lain ✓ Apakah program di Kelompok Tani / Kelembagaan Kebun anda sudah menunjukkan kebutuhan perempuan dan laki-laki ? ✓ Apakah program yang dilaksanakan Kelompok Tani / Kelembagaan kebun sudah ditargetkan bagi perempuan dan laki-laki? Jika sudah, berikan contohnya, jika belum, upaya apa yang dapat dilakukan agar program tersebut mengakomodir kepentingan laki-laki dan perempuan. ✓ Apakah sudah ada program untuk intervensi (karena adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat) ✦ Peserta mempresentasikan hasil diskusinya.
Presentasi	<p>Presentasi 7 : Sasaran dan praktis Gender di Perkebunan Kelapa Sewit</p> <p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelibatan Perempuan dalam kelembagaan kelompok tani / kopersi Peningkatan Kapasitas SDM tentang teknis budidaya atau pertanian terhadap laki – laki maupun perempuan dll

Topik 8
Praktik kesetaraan gender dalam.....

waktu	90 Menit dengan Metode : Diskusi dan Mereview hasil diskusi topik 4
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Memahami kesetaraan diperlukan didalam pengelolaan pertanian atau kebun untuk keberlanjutan usaha tani ❖ Peserta Memahami Praktek Pembagian Peran yang adil didalam aktivitas pertanian (atau manajemen perkebunan)
Kegiatan (Fasilitator)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Fasilitator Mengajak mereview hasil diskusi <i>di Topik 4</i> ❖ Mintalah pada peserta untuk mengeluarkan pendapat dan hal apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga petani sawit untuk mewujudkan kesetaraan gender didalam pengelolaan usaha tani mereka
Presentasi	Menyimpulkan dari hasil diskusi

●BAB 9

MODUL PEMBERDAYAAN EKONOMI

9.1. DESKRIPSI SINGKAT

Program Hibah Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM), khususnya “Peningkatan Akses Kelola Dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan Bagi Masyarakat Desa Hutan Secara Lestari Di Lombok Timur, Lombok Utara Dan Kolaka”, secara khusus bertujuan untuk “meningkatkan kualitas layanan ekosistem hutan untuk kesejahteraan masyarakat pinggir hutan”. sesuai kerangka logis yang tercantum dalam Green Prosperity Program (Program Kemakmuran Hijau).

Secara garis besar, sasaran program ini terdiri dari 2 komponen adalah [1] Komponen 1: *Peningkatan akses kelola dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat (Outcome A.1)* dan [2] Komponen 2: *Peningkatan tata kelola hutan oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari (Outcome A.2).*

Dalam Komponen Peningkatan akses kelola dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat, output yang akan dicapai meliputi:

- ❖ **Output A.1.1** : *Kesepahaman antar pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat dan para pihak terkait tujuan utama proyek.* Indikator pada output ini adalah: dokumen kesepahaman dan kerjasama para pihak. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan: (A.1.1.1) Persiapan pelaksanaan proyek di tingkat manajemen proyek nasional - regional; (A.1.1.2) Sosialisasi implementasi proyek ke pemangku kepentingan utama; (A.1.1.3) Perumusan kesepahaman kerjasama implemtasi proyek antar pemangku kepentingan utama.
- ❖ **Output A.1.2** : *Peta tata guna lahan dan dokumen perencanaan wilayah kelola hutan oleh masyarakat.* Indikator pada output ini adalah: (a) Peta tata batas dan tata guna lahan wilayah kelola masyarakat; (b) Dokumen perencanaan wilayah kelola masyarakat. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan: (A.1.2.1) Pemetaan tata guna lahan tradisional secara partisipatif. Melalui training pemetaan partisipatif, transek dan penggambaran peta tata guna lahan, batas desa dan wilayah kelola hutan, dan survey baseline landscape and lifescape.
- ❖ **Output A.1.3** : *Akses kelola hutan skema perhutanan sosial dan ijin pemanfaatan hasil hutan.* Indikator pada output ini adalah: Dokumen **usulan** ijin pemanfaatan hasil hutan IUPHHK-HKm dan usulan baru (perluasan) perhutanan sosial. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan: (A.1.3.1) Perumusan dokumen rencana pengelolaan dan perijinan perhutanan sosial; (A.1.3.2) Pengusulan ijin kelola dan pemanfaatan hasil hutan; (A.1.3.3) Dialog dan Lobby Kebijakan.

Sedangkan Komponen Peningkatan tata kelola hutan oleh masyarakat berdasarkan prinsip hutan lestari ouput yang diharapkan meliputi:

- ❖ **Output A.2.1** : *Peningkatan kapasitas manajerial dan jaringan kader kelompok pengelola hutan.* Indikator pada output ini adalah dokumen kesepahaman dan kerjasama para pihak. Indikator pada output ini adalah: (a) Kader/pengurus kelompok perempuan pengelola hutan yang dilatih melalui proyek GP; (b) Kader/pengurus kelompok tani hutan yang dilatih melalui proyek GP. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan:

(A.2.1.1) ToT kader kelompok perempuan (A.2.1.2) ToT kader kelompok tani pengelola hutan.

- ❖ **Output A.2.2** : *Tersedianya produk dan potensi pasar komoditi unggulan HHK, HHBK dan Imbal Jasa Ligkungan.* Indikator pada output ini adalah: Jenis komoditi unggulan HHK, HHBK dan Imbal Jasa Ligkungan yang dapat dipasarkan. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan: (A.2.2.1) Pendampingan kelompok usaha pengelola hutan; (A.2.2.2) Penerapan teknologi pasca panen; (A.2.2.3) Promosi dan pengembangan jaringan pasar.
- ❖ **Output A.2.3** : *Rehabilitasi lahan dan DAS di wilayah kelola hutan masyarakat.* Indikator pada output ini adalah: (a) Jumlah hektar yang ditargetkan untuk perlindungan melalui rehabilitasi lahan HKm yang didanai GP; (b) Perkiraan kenaikan jumlah carbon stock dari lahan HKm seluas 641 ha. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan adalah Pembibitan dan penanaman tanaman kayu dan MPTS (menggunakan sistem MRV Penanaman sesuai Lampiran 14.C. SOP Pembibitan dan Penanaman KPSHK), dengan rincian aktivitas sebagai berikut (A.2.3.1) Perencanaan Rehabilitasi Hutan/Lahan. (A.2.3.2) Pembibitan. (A.2.3.3) Penanaman.
- ❖ **Output A.2.4** : *Penerapan Prinsip Tata Kelola Hutan Lestari Rendah Emisi Standard Plan Vivo.* Indikator pada output ini adalah Dokumen sertifikasi Plan Vivo di lahan HKm. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan adalah (A.2.4.1) Registrasi Proyek Idea Note (PIN) dan Proyek Design Document (PDD) Carbon Reduction Standar Plan Vivo --Tahapan Plan Vivo Penyusunan PIN dan PDD, berbasis pengukuran dan penghitungan carbon secara berkala dari deforestasi dan degradasi suatu unit kelola hutan. Hasil pengukuran dan penghitungan potensi reduksi emisi carbon dengan standard Plan Vivo pada lokasi project akan menjadi input data dalam melakukan analisis dan pemantauan ESMS.

Modul Training of trainier (ToT) Fasilitator Desa PSDABM yang berjudul: "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan melalui Pengembangan Produk Unggulan berbasis Kelompok", terkait dengan Komponen 2 (Outcome 2), khususnya untuk mencapai target **Output A.2.2** : *Tersedianya produk dan potensi pasar komoditi unggulan HHK, HHBK dan Imbal Jasa Ligkungan.*

Indikator pada output ini adalah: Jenis komoditi unggulan HHK, HHBK dan Imbal Jasa Ligkungan yang dapat dipasarkan. Untuk mencapai output ini maka kegiatan utama yang akan dilakukan: (A.2.2.1) Pendampingan kelompok usaha pengelola hutan; (A.2.2.2) Penerapan teknologi pasca panen; (A.2.2.3) Promosi dan pengembangan jaringan pasar.

Agar para fasilitator desa dapat melakukan kegiatan pendampingan masyarakat hutan secara efektif, yakni terkait dengan [1] Pendampingan kelompok usaha pengelola hutan, [2] Penerapan teknologi pasca panen, dan [2] Promosi dan pengembangan jaringan pasar melalui pengembangan produk unggulan, maka dilakukan kegiatan ToT dengan memberikan beberapa 6 materi pokok Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan, yang meliputi: [1] Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan, [2] Ekonomi Sumberdaya Hutan, [3] Identifikasi Produk Unggulan, [4] Identifikasi Kelayakan Usaha, [5] Proses Penyusunan Perencanaan Usaha, dan [6] Pengembangan Usaha melalui Pengembangan Teknologi dan Perluasan Pasar.

9.2. TUJUAN PEMBELAJARAN

9.2.1. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Setelah mengikuti materi Training of Trainier (ToT) ini, Fasilitator Desa mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada

kelompok masyarakat hutan dalam rangka proses pemberdayaan ekonomi untuk dapat mengidentifikasi produk unggulan, menyusun kelayakan dan perencanaan usaha serta mengidentifikasi potensi pengembangan usaha melalui pengembangan teknologi pasca panen dan pengembangan pasar

9.2.2. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Setelah mengikuti Training of Trainer (ToT) ini, peserta mampu:

1. Mengidentifikasi, Menjelaskan dan Mendampingi Masyarakat Hutan dalam Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan
2. Mengidentifikasi, Menjelaskan dan Mendampingi Masyarakat Hutan dalam Proses Identifikasi Produk Unggulan HHK dan HHBK yang dapat Dikembangkan pada Masyarakat Hutan
3. Mengidentifikasi, Menjelaskan dan Mendampingi Masyarakat Hutan dalam Proses Kelayakan Usaha berdasarkan pengelolaan Sumberdaya Hutan
4. Mengidentifikasi, Menjelaskan dan Mendampingi Masyarakat Hutan dalam Proses Perencanaan Usaha Kegiatan pengelolaan Sumberdaya Hutan
5. Mengidentifikasi, Menjelaskan dan Mendampingi Masyarakat Hutan dalam proses Pengembangan Usaha melalui Pengembangan Teknologi dan Pasar.

9.3. POKOK BAHASAN DAN SUB POKO BAHASAN

Pokok Bahasan dalam Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi terdapat 5 utama, yakni:

1. Pokok Bahasan 1: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan
2. Pokok Bahasan 2: Identifikasi Produk Unggulan
3. Pokok Bahasan 3: Identifikasi Kelayakan Usaha
4. Pokok Bahasan 4: Proses Perencanaan Usaha
5. Pokok Bahasan 5: Pengembangan Usaha melalui Pengembangan Teknologi dan Perluasan Pasar

Pada Pokok Bahasan 1, terdiri dari

- a. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- b. Praktik Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
- c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan melalui Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
- d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan menuju Penghidupan yang Berkelanjutan

Pada Pokok Bahasan 2, terdiri dari

- a. Pengembangan Wilayah Kawasan
- b. Penentuan Produk Unggulan
- c. Teknik Penentuan Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Kawasan

Pada Pokok Bahasan 3, terdiri dari

- a. Proses dan Tahapan Kelayakan Usaha
- b. Analisis Pasar dan Pemasaran
- c. Analisis teknis dan Teknologis
- d. Analisis Manajemen Operasional

- e. Analisis Aspek Keuangan
- f. Analisis Dampak

Pada Pojok Bahasan 4, terdiri dari

- a. Tahapan Penyusunan Perencanaan Usaha
- b. Analisis Keuangan Perencanaan usaha
- c. Rencana Aksi Perencanaan usaha – Investment Plan dan Funding Plan

Pada Pojok Bahasan 5, terdiri dari

- a. Pengembangan Usaha
- b. Pengembangan teknologi
- c. Pengembangan Pasar

9.4. PERSYARATAN PESERTA

9.4.1. PERSYARATAN PENDIDIKAN PESERTA

Peserta mempunyai pendidikan minimal Diploma dan telah lulus minimal 3 tahun.

9.4.2. PERSYARATAN PENGALAMAN PESERTA

Peserta telah mengikuti pelatihan terkait: [1] Pendokumentasian wilayah SHK, [2] Pengorganisasian Kelompok serta Kemampuan Memfasilitasi Pertemuan, [3] Pengetahuan melakukan Pemetaan Partisipatif dan perencanaan tata ruang Desa Serta Inventory Plot, [4] Pengetahuan untuk penilaian Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, [5] Pengetahuan penggalan data LLA & ESMS, [6] Pengetahuan Dalam Melakukan Pengembangan Agroforestry, dan [7] Peran Perempuan, kelompok minoritas lainnya dalam pembangunan desa.

9.5. BAHAN PEMBELAJARAN

Bahan tayang (slide ppt, film dokumenter), LCD projector, komputer/laptop, flip chart, spidol, metaplan, kain tempel, panduan penugasan, panduan diskusi kelompok, dan modul.

9.6. METODE PEMBELAJARAN

Kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran melalui Ceramah Tanya jawab (CTJ), paparan/presentasi, curah pendapat, diskusi, dan penugasan.

9.7. LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Jumlah jam yang digunakan dalam modul ini adalah sebanyak 4 jam pelajaran per hari (T=3jp, P=0jp, PL=0jp) @45menit, selama 1 hari jangka waktu Training of Trainer (ToT). Untuk mempermudah proses pembelajaran dan meningkatkan partisipasi seluruh peserta maka, dilakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut:

❖ **Langkah 1: Pengkondisian (15 Menit)**

1. Penyegaran dan pencairan suasana (*ice-breaking*),
2. Pemandu/pengajar menggali harapan peserta tentang materi dan keterampilan yang ingin dicapai melalui sesi ToT ini,
3. Pemandu/pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok bahasan dan metode yang akan digunakan,
4. Menggali pendapat peserta tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan melalui Pengembangan Produk Unggulan” dan mendiskusikannya. Proses pembelajaran menggunakan metode dimana semua peserta terlibat secara aktif,
5. Berdasarkan pendapat peserta, pemandu/pengajar menjelaskan tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan melalui Pengembangan Produk Unggulan”.

❖ **Langkah 2: Pengkajian Pokok Bahasan (180 Menit)**

1. Pemandu/pengajar menyampaikan pokok bahasan:
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan,
 - Ekonomi Sumberdaya Hutan
 - Identifikasi Produk Unggulan
 - Identifikasi Kelayakan Usaha
 - Proses Penyusunan Perencanaan Usaha,
 - Pengembangan Usaha melalui Pengembangan Teknologi dan Perluasan Pasar.
2. Pemandu/pengajar member kesempatan kepada peserta untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan memberikan jawaban dan klarifikasi atas pertanyaan-pertanyaan peserta.
3. Pemandu/pengajar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya sehingga antar peserta juga terjadi diskusi dan interaksi yang baik.
4. Pemandu/pengajar menugaskan peserta untuk melakukan diskusi kelompok tentang:
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Hutan dan Kegiatan Ekonomi Sumberdaya Hutan
 - Identifikasi Produk Unggulan dan Proses Penentuan Kelayakan Usaha
 - Proses Penyusunan Perencanaan Usaha dan Identifikasi pengembangan Usaha melalui Pengembangan Teknologi dan Pasar

❖ **Langkah 3: Rangkuman (15 Menit)**

1. Pemandu/pengajar merangkum sesi pembelajaran.
2. Peserta dipersilahkan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas, dan pengajar memfasilitasi pemberian jawaban, baik dari pengajar maupun dari peserta lain.
3. Meminta komentar, penilaian, saran bahkan kritik dari peserta pada kertas evaluasi yang telah disediakan.
4. Pemandu/pengajar menutup sesi pembelajaran dengan memastikan bahwa TPU dan TPK sesi telah tercapai.

9.8. URAIAN MATERI

9.8.1. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT HUTAN

KONSEP PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan. Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman *renaissance*, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan determinisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan determinisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar. Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Karena kekurangtepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu **masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai**. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*). Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan.

Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. **Pandangan kedua**, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia

yang tidak berkuasa atau yang dikuasi. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. **Pandangan ketiga**, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *Power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah *chaos* dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*. Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan.

Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. **Konsep pertama**, pemberdayaan yang hanya berkuat di 'daun' dan 'ranting' atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigm*. **Konsep kedua**, pemberdayaan yang hanya berkuat di 'batang' atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *naïve paradigm*. **Konsep ketiga**, pemberdayaan yang hanya berkuat di 'akar' atau pemberdayaan struktural. Karena tidakberdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan social budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dansosial budaya, maka stuktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*.

Karena kesalah-pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah. Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Fiedmann,³ pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan social adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa

depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa **pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.** Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan.

Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik. Tesis ini, kalau diterima, akan menuntut kepada kita semua, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multidimensi.

Dari berbagai tulisan konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur,

- meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
 5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial
 6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

PRAKTIK PEMBERDAYAAN

Secara umum, pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia memiliki kemiripan dimensi pendekatan, seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendamping eksitu.

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu tidak salah, kalau dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Ada dua hal yang perlu kita cermati bersama. **Pertama**, bahwa lemahnya ekonomi masyarakat tunadaya ini bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga masyarakat yang tidak memiliki factor produksi, atau masyarakat yang pendapatannya hanya dari upah/gaji. Karena tidak mungkin semua anggota masyarakat tunadaya dapat dan memiliki talenta untuk dijadikan pengusaha, maka bantuan modal tidak akan dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat

pekerja. Dalam praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, tampaknya pemberdayaan untuk masyarakat pekerja ini perlu dipikirkan bersama.

Kedua, yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat; (2) bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten atau ekonomi *kere*. Tiga hal ini penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

Affirmative action untuk masyarakat dalam pengembangan ekonomi, melalui mekanisme pasar ini jauh lebih baik, bila dibanding dengan pemberian dana bergulir. Ini relevan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat yang akan menjadikan ekonomi rakyat sebagai ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing, dan modern.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Pengalaman empirik dengan adanya pendamping eksitu, ternyata menyebabkan biaya transaksi bantuan modal menjadi sangat mahal. Selain itu, pendamping eksitu yang diberi upah, ternyata juga masih membutuhkan biaya pelatihan yang tidak kecil. Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlanjutan pendampingan, sudah saatnya untuk dipikirkan pendamping insitu, bukan pendamping eksitu yang sifatnya sementara. Sebab proses pemberdayaan bukan proses satu dua tahun, tetapi proses puluhan tahun.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain.

Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. Pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi. Tetapi pendekatan kelompok jarang berhasil. Pada tahun 80-an ada NGO besar di Jakarta yang pernah memiliki dampingan kelompok usaha ekonomi sampai lebih dari dua ribu kelompok usaha bersama. Ketika kelompok tersebut didampingi oleh fasilitator dan diberi bantuan modal bergulir, aktivitas ekonomi melalui kelompok berjalan cukup baik. Tetapi ketika ditinggalkan pendampingnya dan tidak ada lagi bantuan modal, maka kelompok-kelompok ini akhirnya bubar.

Dengan demikian, pengertian pengembangan kelembagaan ekonomi, perlu didefinisikan kembali. Kalau pendekatan kelompok dimaksudkan untuk tujuan akumulasi modal atau membangun kelembagaan keuangan tersendiri, maka itu tidak mudah untuk mencapainya. Yang paling realistis adalah bila pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Ketiga aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT HUTAN MELALUI PHBM

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dalam kerangka *community forestry* (kehutanan masyarakat) merupakan salah satu strategi pengelolaan sumberdaya hutan menuju pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*). Beberapa kerangka kelembagaan pengelolaan

hutan berbasis masyarakat telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan diatur melalui beberapa mekanisme seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD). Disamping itu juga masih ada pengelolaan hutan adat di wilayah adat, serta model desa konservasi di sekitar hutan konservasi. Bentuk-bentuk pengelolaan hutan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memanfaatkan hutan untuk memberdayakan masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan dengan meningkatkan keterlibatannya agar kesejahteraannya meningkat.

Namun demikian, dalam perkembangannya, praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat cenderung berjalan lambat bahkan praktik pengelolaan hutan adat menjadi terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan sektoral dan investasi skala besar yang seringkali tidak konsisten dan saling berbenturan. Namun demikian, bentuk PHBM yang berjalan hingga saat ini dapat bertahan dan menunjukkan kemampuannya dalam mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan, mencegah konflik, dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diharapkan dapat menjadi titik masuk (*entry point*) akselerasi pembangunan PHBM mengingat besarnya jumlah penduduk yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang mencapai 20% dari total jumlah penduduk Indonesia. KPH sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak diharapkan mampu memberikan ruang yang cukup besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan baik hutan negara, hutan adat, maupun hutan hak secara efektif dan efisien.

Terkait dengan perkembangan PHBM ke depan, pengembangan jasa lingkungan merupakan suatu alternatif yang dapat diimplementasikan dalam praktek pemanfaatan hutan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kegiatan dalam **pemanfaatan jasa lingkungan** ini antara lain adalah pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan/penyimpanan karbon. Atas kegiatan tersebut, bisa diterapkan suatu mekanisme pembayaran yang disebut dengan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan kepada pihak penyedia jasa lingkungan.

1. Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

Kegiatan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) dilaksanakan berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum, dan (3) mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengembangan HKm dan HD juga dilatarbelakangi oleh keadaan kondisi sosial dimana tercatat bahwa Indonesia memiliki luas hutan sekitar 137,09 juta ha yang di dalamnya terdapat 19.410 desa di sekitar hutan, dan terdapat sekitar 48,8 juta jiwa yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan dan 10,2 juta jiwa kategori miskin. Kondisi tersebut memberi dampak menstimulir kondisi kehidupan sosial di sekitar hutan kurang kondusif untuk pekestarian SDA dan menyebabkan kerusakan hutan sekitar 1 juta ha/th dan permasalahan tenurial lain menjadi tidak mudah untuk diselesaikan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan diharapkan menjadi suatu solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi berbagai dampak tersebut.

Terkait dengan kegiatan tersebut, kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat setempat dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola sumberdaya hutan antara lain adalah: UU 41 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007, P.37/Menhut-II/2007, P.07/V-Set/2009, P.49/Menhut-II/2008, P.11/V-Set/2-10, dan P.39/menhut- II/2013. Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah kawasan hutan negara yang

pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam pemanfaatan sumberdaya hutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Sementara Hutan Desa (HD) adalah hutan negara yang dikelola oleh lembaga desa yang bertujuan untuk mensejahterakan kesejahteraan desa. Persyaratan lokasi untuk penetapan HKm adalah: hutan lindung (HL) dan hutan produksi (HP), belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, lokasi yang dicanangkan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Pelaksana HKm adalah masyarakat setempat yang telah berbentuk kelompok. Secara fungsional kelompok masyarakat tidak bertanggung jawab kepada kepala desa dan bentuk kelembagaannya diarahkan menjadi koperasi.

Hutan Desa adalah kawasan hutan negara HL dan HP, belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan, dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, lembaga desa ditetapkan dengan Perdes dan pelaksanaannya adalah semua penduduk desa. Secara fungsional lembaga desa berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. Selanjutnya bentuk kelembagaan hutan desa diarahkan untuk menjadi BUMD.

Ada beberapa tahapan dalam proses pembangunan HKm -HD, antara lain yaitu: (1) usulan, (2) penetapan areal kerja, (3) fasilitasi, (4) penertiban IUPHKM/HPHD, (5) penyusunan rencana kerja, dan (6) pengelolaan HKm/DH. Selanjutnya bagi pemegang IUPHKM/HPHD baik pada HL dan HP dikenakan kewajiban, yaitu: melakukan penataan batas areal kerja, menyusun rencana kerja, melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, membayar PSDH dan menyampaikan laporan kegiatan. Selain itu juga ada hak yang dapat diperoleh seperti mendapat fasilitasi, memanfaatkan HHBK, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan kawasan, dan memungut HHK dan HHBK (khusus di HP). Sementara itu kewajiban-kewajiban pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HKm/HD antara lain adalah: membayar PSDH dan iuran izin, menyusun RK pemanfaatan HHK, melakukan penataan batas areal pemanfaatan HHK, Melakukan pengamanan areal tebangan, mencegah kebakaran, tidak menebang pohon yang bukan hasil tanaman. Pemberian sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan pencabutan izin yang dikenakan apabila melakukan pelanggaran, memindahtangankan, mengagunkan, digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, dan merubah status dan fungsi hutan.

Berdasarkan peranannya, pemerintah pusat daerah dalam pembangunan Hkm dan HD berperan dalam: menetapkan peraturan pelaksanaan, melakukan verifikasi usulan HKm, menetapkan areal kerja, fasilitasi pengembangan usaha, dan pengawasan dan pengendalian. Sementara itu pemerintah daerah memiliki peranan menyiapkan kelompok/lembaga desa, menyampaikan usulan kepada Menhut, menetapkan ijin HKm, membina kelompok/lembaga desa, fasilitasi pengembangan usaha, dan pengawasan dan pengendalian. Selain itu ada juga LSM yang berperan dalam memfasilitasi percepatan pelaksanaan proses-proses pada semua tingkatan (kelompok, masyarakat, lembaga desa, pemda dan pusat). Dengan sinerginya peranan antara pusat dan daerah serta LSM diharapkan antara lain: HKm dapat menjadi prioritas pembangunan di daerah, meningkatnya pendampingan dari parapihak yang saat ini banyak dibantu oleh LSM, dan adanya dukungan dari semua pihak untuk fasilitasi dan penyebar luasan informasi ke masyarakat. Sasaran akhir yang ingin dicapai dalam pengembangan HKm-HD antara lain adalah pengembangan industri kecil perkayuan (*pro-growth*), meningkatkan pendapatan masyarakat (*pro-poor*), perbaikan mutu lingkungan (*pro-environment*), menciptakan lapangan kerja (*pro-jobs*), mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan kritis (*pro-green economy*), dan menjadi media penyuluhan yang efektif dalam pelestarian hutan. Sejauh ini progres HKm secara nasional hingga Bulan Juni 2014 adalah dari 2 juta ha target tahun 2010 - 2014, yang diusulkan adalah

823.293 ha, namun realisasi IUPHKm baru mencapai 80.834 ha. Sementara itu, dari target pembangunan Hutan Desa pada tahun yang sama 500.000 ha, yang diusulkan adalah 815.942 ha dan yang terrealisasi adalah 67.737 ha. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: (1) secara nasional pencapaian target Hkm masih sangat rendah, (2) kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat setempat untuk mengelola sumberdaya belum dimanfaatkan secara maksimal, (3) peran para pihak belum maksimal, (4) masyarakat dan pemerintah daerah banyak yang belum memahami Hkm, (5) kurangnya tenaga pendamping bagi masyarakat, (6) Program HKM belum menjadi program prioritas daerah, (7) Inisiatif pemda dalam memfasilitasi usulan belum maksimal, dan (8) penetapan areal kerja dan IUPHKm belum sesuai dengan target waktu.

2. Pengelolaan Model Desa Konservasi dan Zona Pemanfaatan di Kawasan Konservasi

Pembentukan TN diinisiasi oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan dalam prosesnya banyak sekali konflik yang merebak dan berkepanjangan sehingga memerlukan solusi alternatif. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan Model Desa Konservasi (MDK) menjadi penting untuk diwujudkan. Saat ini tercatat ada 31.600 desa di kawasan hutan dengan jumlah penduduk sekitar 38 juta dan 10,8 juta diantaranya adalah tergolong dalam orang miskin.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan pembangunan MDK antara lain adalah Pasal 70 UU No. 41/1999 yang menyatakan bahwa masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, dan pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna; PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam pasal 49 tentang Pemberdayaan masyarakat; dan Permenhut No. 39/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan. Sementara itu, tiga pilar konservasi yang mendukung kegiatan pokok dalam pemberdayaan masyarakat adalah perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari. Desa Konservasi memiliki pengertian desa yang dalam penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat sehari-hari sejalan dengan upaya dan kegiatan konservasi baik konservasi sumber daya alam hutan, tanah dan air.

Pembangunan MDK ini bertujuan: (1) pemberdayaan masyarakat, (2) penataan ruang/wilayah pedesaan berbasis konservasi, dan (3) pengembangan ekonomi pedesaan berbasis konservasi. Jenis kegiatan dalam Desa Konservasi antara lain adalah: penguatan kapasitas masyarakat, pembentukan dan penguatan kapasitas kelompok, dan penggalian dan pengembangan aktivitas atau usaha berbasis hayati.

3. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) memiliki tujuan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan berazaskan keterpaduan, manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dimana kepenguasaan hutan tetap oleh negara. Program HTR ini memiliki manfaat yaitu: (1) eksistensi kawasan, (2) optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi, (3) memberikan akses legal kepada masyarakat, (4) rakyat ikut mengelola hutan sebagai pemegang ijin, dan (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

Pembangunan HTR memiliki kriteria antara lain yaitu: pencadangan hanya diberikan pada areal hutan produksi (HP) tidak pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan atau Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi yang tidak produktif, belum dibebani izin/hak lain, tidak terdapat tanaman reboisasi dan rehabilitasi, jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60

tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35 tahun, luas ijin perorangan maksimal 15 ha, dan luas ijin koperasi maksimal 700 ha. Dalam kegiatannya pembangunan HTR terdiri atas 3 pola, yaitu pola mandiri (HTR dibangun oleh pemegang IUPHHK-HTR dengan biaya sendiri (modal sendiri atau pinjaman/BLU)), pola developer (HTR dibangun oleh developer (koperasi/BUMN/S/D) atas permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR, pola kemitraan (HTR dibangun bersama mitra koperasi/BUMN/S/D) berdasarkan kesepakatan bersama difasilitasi oleh pemerintah/pemda.

Hingga tahun 2014 ini, luas realisasi IUPHHK-HTR hanya sekitar 200.000 ha dari sekitar 700.000 ha luas pencadangan. Fakta tersebut menunjukkan perkembangan HTR yang lambat dan beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam program ini antara lain: pencadangan tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan ijin, budidaya dan inovasi masyarakat dalam menanam masih rendah, kesulitan permodalan dan kemitraan belum berjalan dengan efektif, kelembagaan belum mantap, dan persaingan semakin ketat (harga jual kayu rendah). Namun demikian telah dilakukan beberapa upaya untuk mensukseskan program HTR seperti penyusunan/revisi aturan, koordinasi dan sinergitas antara pusat dan daerah, mendorong industri pengolahan kayu berbasis HTR (khususnya di luar Jawa), dukungan anggaran APBN, APBD, pihak lain yang tidak mengikat, pemegang IUPHHK-HTI/HA/RE wajib membina HTR, pengelola hutan, pemegang izin, dan KPH wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan, mendorong KPH sebagai operator pengelolaan dan pemanfaatan hutan berbasis ekosistem, developer yang profesional, kemitraan yang saling menguntungkan, dan pembangunan HTR model/demplot. Sejauh ini telah diupayakan pembangunan HTR dalam KPH di 20 provinsi di Indonesia.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Negara dan Hutan Adat

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini belum mencapai pengelolaan hutan yang lestari dan adil. Selain itu politik kehutanan juga terkesan memarginalkan peran masyarakat desa hutan dalam pembangunan kehutanan. Hal tersebut mengakibatkan konflik penguasaan hutan terjadi di berbagai kawasan hutan. Dengan demikian merupakan suatu tantangan bagaimana untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan adil, bersamaan dengan mensejahterakan masyarakat lokal.

Berdasarkan sisi kebijakan, pandangan pemerintah tentang posisi masyarakat desa hutan (di dalam/sekitar hutan) mengalami pergeseran. Hal ini menyebabkan kebijakan pemerintah tentang peran masyarakat desa hutan juga turut mengalami pergeseran terkait dengan peran masyarakat sebagai pemungut hasil hutan, sebagai tenaga kerja upahan, sebagai penerima bagi hasil, maupun sebagai pengelola hutan. Selain hal tersebut, bukti nyata terjadinya pergeseran pandangan pemerintah juga semakin terlihat pasca dikeluarkannya Keputusan MK No. 35 Tahun 2012, dimana sebelumnya Hutan Adat termasuk ke dalam Hutan Negara sama seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Namun pasca dikeluarkannya MK No. 35 Tahun 2012, posisi Hutan Adat tidak lagi termasuk dalam Hutan Negara. Keputusan MK No. 35/PUUX/2012 ini perlu ditindaklanjuti segera secara sistematis di tingkat provinsi, kabupaten dan tapak, dan harus dapat mengelola konflik antar kelompok masyarakat.

Menurut Kartodiharjo (2014), arah kebijakan pengelolaan Hutan Negara dan Hutan Adat dalam era KPH adalah bahwa pemerintah pusat dan pemda memastikan lokasi dan menyelesaikan ijin (pelaksanaan PP 38/2007), sehingga calon pemegang ijin tidak perlu mendapat rekomendasi Bupati/Gubernur, tapi diselesaikan oleh pemerintah melalui rangkaian KPH-Dinas Kehutanan-Bupati-Gubernur. KPH menentukan calon lokasi ijin (yang disahkan dalam Rencana Jangka Panjang/RJP) dan rencana tahunan. Lokasi ini sekaligus sebagai penetapan areal kerja (working area) oleh Direktorat Jendral Planologi. Bila sudah ada KPH, pembuatan pertimbangan teknis

dapat dilimpahkan kepada KPH. KPH perlu mendapat tembusan permohonan IUPHHK dan tembusan permohonan perluasan IUPHHK.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan negara dan hutan adat perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun secara umum. Bentuk peningkatan kapasitas individu antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), pengalaman (*experiences*), daya cipta (*inovativeness*), dan hasrat/cita-cita (*desire*). Sementara itu, untuk peningkatan kapasitas masyarakat secara umum perlu ditingkatkan penyaluran informasi, penegakan norma, pemeliharaan saling percaya, dan jaringan sosial.

5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Hutan Lindung dan Konservasi

Dasar hukum pengembangan jasa lingkungan di Indonesia antara lain adalah: UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan; PP No. 6 tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA; PP No. 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Hutan Lindung; Permenhut No.48/Menhut-II/2010 jo Permenhut No. P04/2012 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat dan Taman Wisata Alam; Permenhut No. P64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan air dan energi air di SM, TN, Tahura dan TWA; Permenhut No. P20/2012 tentang penyuluhan karbon hutan; Permenhut No. P22/2012 tentang pedoman kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung; dan Perdirjen (01, 02, 03/2012) pedoman penyusunan RPPA, RKL & RKT, Penandaan batas areal IPPA, penyusunan desain tapak.

Pengertian Jasa Lingkungan atau Jasa Ekosistem adalah hasil atau implikasi dari dinamika bentang alam berupa jasa (yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia) yang dapat dikategorikan sebagai keindahan dan fenomena alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, fungsi hidrologi, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan berbagai jasa lainnya. Berdasarkan PP No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA, bentuk pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi antara lain adalah: (1) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam, (2) pemanfaatan panas bumi (tahap usulan revisi), dan (3) pemanfaatan jasa ketinggian (tahap usulan revisi). Sementara itu berdasarkan PP No. 36 tahun 2007 Jo PP No. 3 tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, pasal 25 ayat (1), pemanfaatan jasa lingkungan di hutan lindung antara lain adalah: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT HUTAN MENUJU PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN

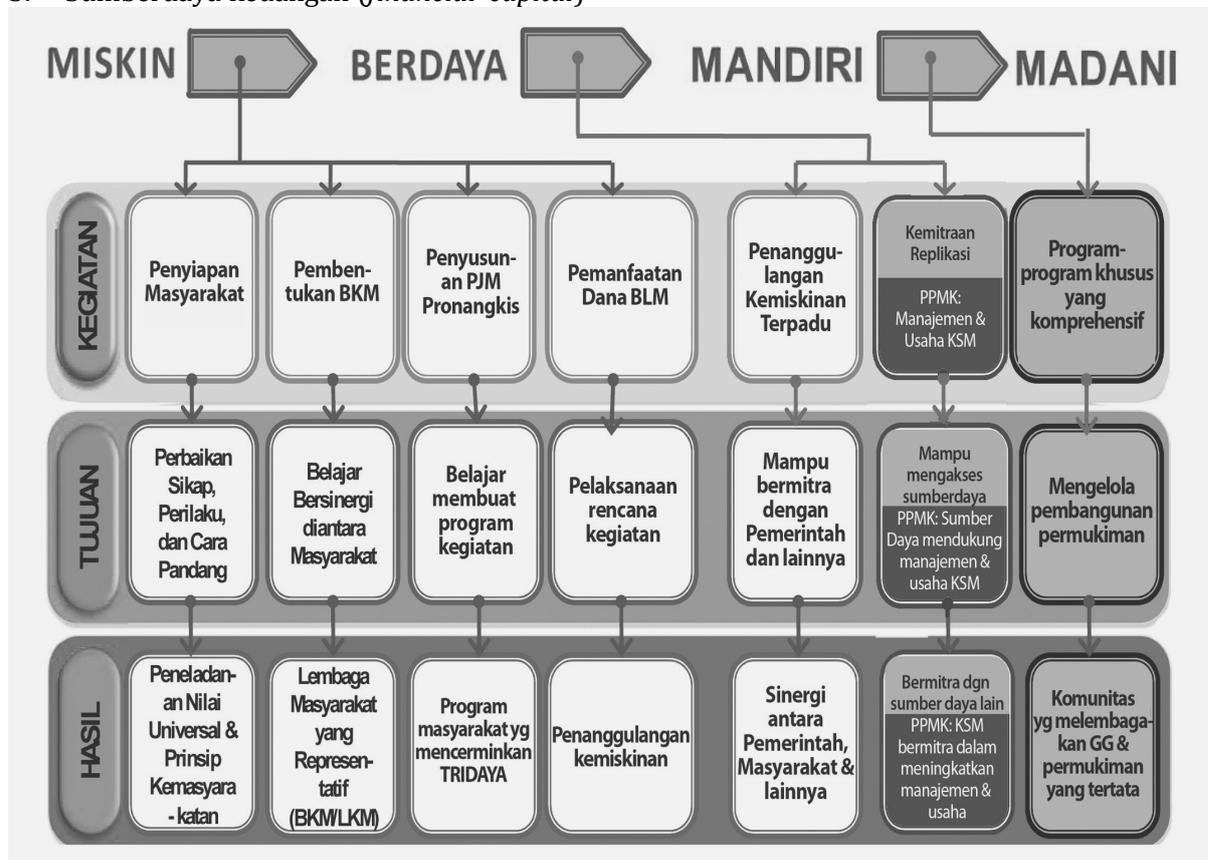
Pendampingan masyarakat dilakukan untuk mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat TIDAK BERDAYA menuju BERDAYA, MANDIRI dan menuju MADANI. Tahap transformasi ini dicirikan oleh terjadinya kemitraan sinergis antara Pemerintah dengan Masyarakat, yang didukung oleh dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil lainnya (*Public Private Partnership/PPP*). Pengalaman berbagai program penanggulangan kemiskinan, diperoleh pembelajaran bahwa untuk dapat terjadinya suatu “gerakan bersama” dalam menanggulangi

kemiskinan diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat dan pemerintah meliputi pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

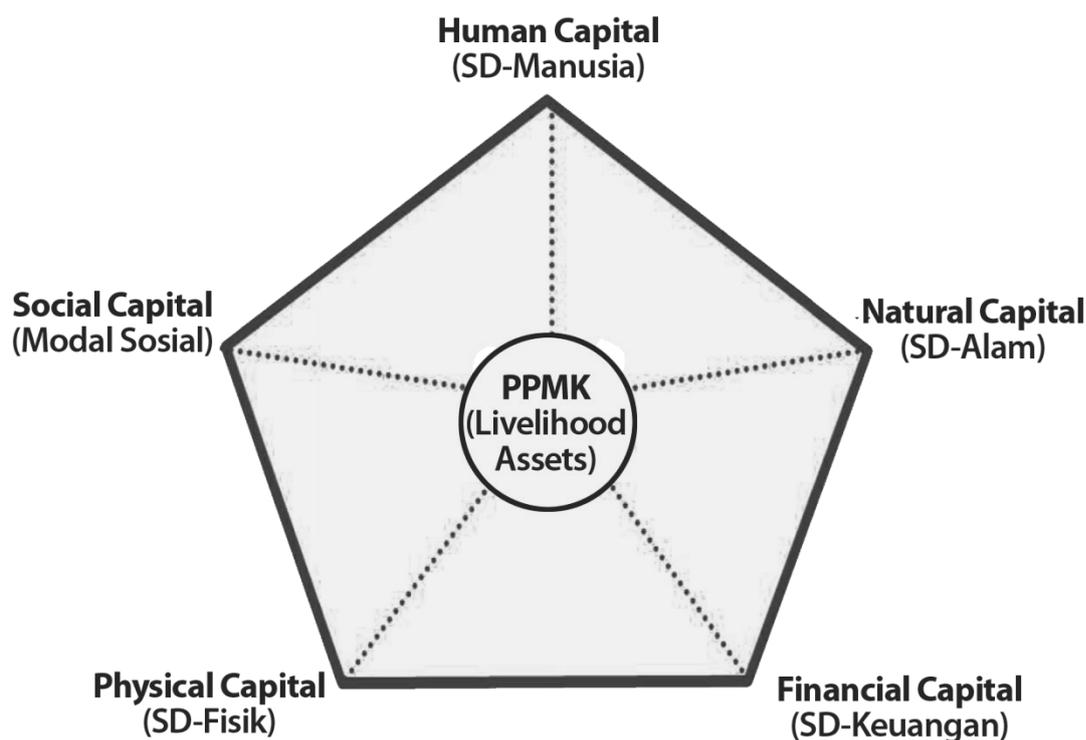
Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) merupakan intervensi pada pengembangan kegiatan-kegiatan produktif masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan penghidupan masyarakat miskin dengan pendekatan pendampingan berbasis kelompok (Kelompok Swadaya Masyarakat, KSM). **Oleh karena itu pendampingan difokuskan pada penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha KSM.**

Strategi pendampingan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha KSM dalam PPMK dilakukan melalui prinsip pengembangan lima asset sumber penghidupan manusia, yakni:

1. Modal sumberdaya manusia (*human capital*),
2. Modal sosial (*social capital*),
3. Sumberdaya alam (*natural capital*),
4. Sumberdaya fisik (*physical capital*) dan
5. Sumberdaya keuangan (*financial capital*)



Gambar 9.1: Pemberdayaan Ekonomi sebagai bagian Proses Transformasi Sosial



Gambar 9.2: Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Penghidupan

Strategi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan tersebut, berorientasi pada penguatan “kapasitas kewirausahaan” masyarakat miskin agar mampu mengoptimalkan kreativitas dan inovasi serta semangat kewirausahaannya. Untuk itu dilakukan serangkaian kegiatan penyadaran maupun penguatan kapasitas anggota KSM, sehingga terbangun sumber daya manusia yang tangguh di KSM dampingan tersebut (*Human Capital*).

Sumber Daya Manusia yang tangguh memerlukan dukungan modal sosial (*social capital*), melalui proses inklusi dan partisipasi masyarakat. Proses ini memerlukan dukungan stakeholders diantaranya BKM, Unit Pengelola, relawan serta pihak swasta dan pemerintah lokal, sehingga mampu mendukung pengembangan KSM

Asset sumberdaya fisik (*physical capital*) merupakan bagian penting dalam peningkatan penghidupan masyarakat. Sumberdaya fisik dalam bentuk pengembangan infrastruktur produktif yang mendukung peningkatan penghidupan masyarakat, antara lain kios kerajinan, pasar, tempat pelelangan ikan, sandaran perahu, irigasi sederhana, jalan ke sentra produksi dan lain-lain.

Pengelolaan asset sumber daya alam (*natural capital*) adalah kemampuan KSM dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan baku, produksi, budidaya yang menunjang keberlanjutan kegiatan produktif untuk meningkatkan penghidupan warga miskin.

Pengelolaan asset sumber daya keuangan (*financial capital*) pada hakekatnya mengelola kemampuan KSM dalam pemupukan modal sendiri serta memperluas akses terhadap pelayanan berbagai lembaga keuangan.

Melalui integrasi dan pengokohan pilar-pilar peningkatan penghidupan masyarakat di atas, diharapkan dapat menciptakan KSM-KSM Mandiri yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif dan kreatif yang berkelanjutan (*sustainability*) sehingga secara langsung KSM benar-benar berorientasi dan berperan sebagai peningkatan penghidupan masyarakat miskin yang menjadi anggota-anggota KSM tersebut.

9.8.2. PENENTUAN PRODUK UNGGULAN

PENGEMBANGAN POTENSI WILAYAH KAWASAN

Berdasarkan pada komponen pembangunan yang ada, maka prinsip pengembangan kawasan dapat diidentifikasi sebagai sesuai dengan potensi yang ada, baik potensi ekonomi maupun potensi non-ekonomi yang lain. Beberapa criteria dan identifikasi potensi yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan pengembangan suatu wilayah atau kawasan.

Dalam upaya pengembangan kawasan maka potensi yang ada dapat dinilai secara sendiri maupun bersama, sehingga suatu kawasan bernilai atau mempunyai potensi untuk dikembangkan. Dalam konteks kawasan tertinggal, maka sangat mungkin kawasan dimaksud mempunyai satu atau beberapa criteria potensi yang disebut, sehingga mempunyai dasar untuk berkembang.

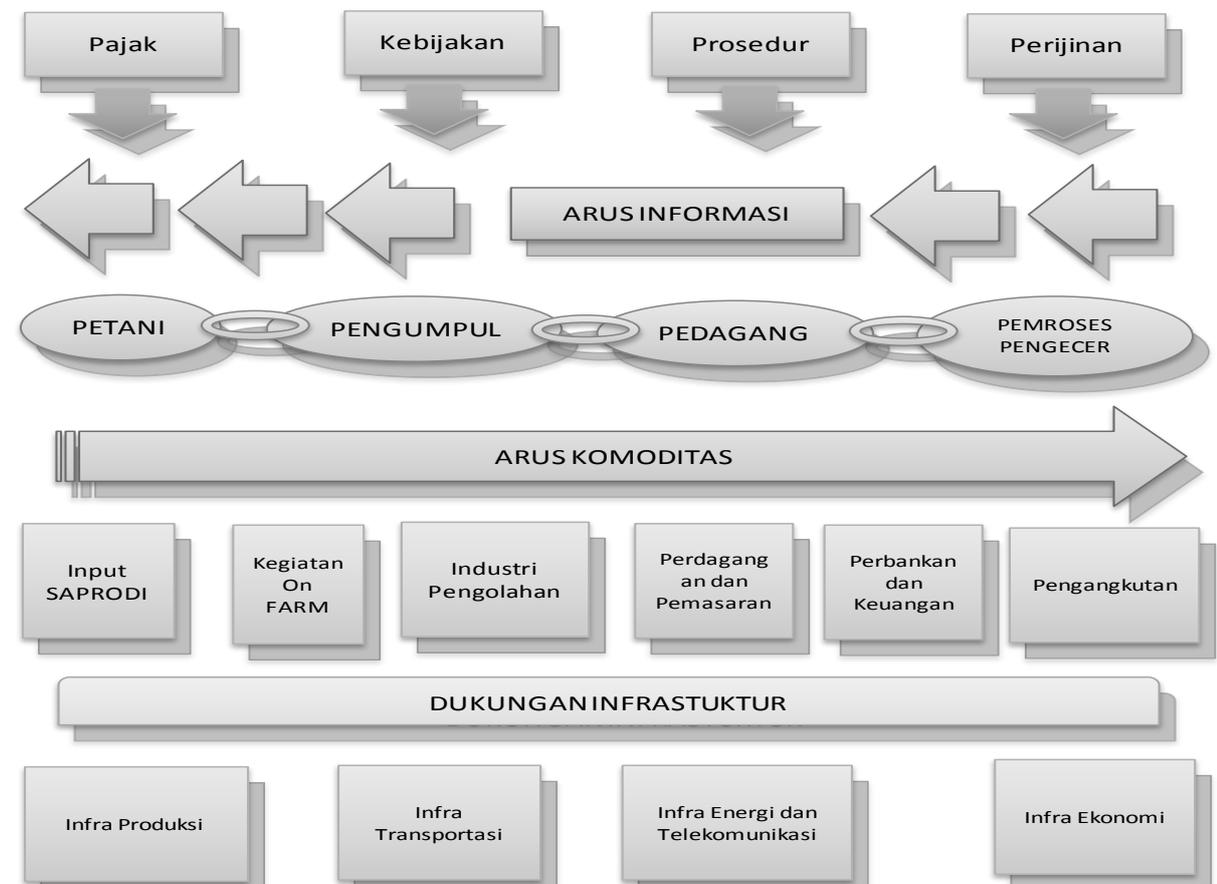
Tabel 9.1: Nilai dan Potensi dalam Pembangunan Kawasan

NILAI DAN POTENSI	KRITERIA
Pertahanan dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional; b. kawasan dengan peruntukan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya. c. wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.
Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> a. potensi ekonomi cepat tumbuh; b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; b. potensi ekspor; c. dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi; d. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; e. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; d. tempat perlindungan peninggalan budaya; e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau b. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
Pendayagunaan SDA atau Teknologi Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi dan posisi geografis sumber daya alam strategis, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir; b. sumber daya alam strategis; c. fungsi sebagai pusat pemanfaatan dan pengembangan teknologi tinggi d. fungsi sebagai lokasi dan posisi geografis penggunaan teknologi strategis lain.
Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati; b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi

NILAI DAN POTENSI	KRITERIA
	dan/ atau dilestarikan; c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian; d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; f. kawasan rawan bencana alam; atau g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

PENDEKATAN KONSEP PRODUK UNGGULAN DALAM KAWASAN

Konsep Pengembangan Produk Unggulan adalah konsep dimana satu kawasan mempunyai suatu produk unggulan. Suatu produk dapat disebut unggulan apabila produk tersebut dapat menjadi andalan masyarakat, atau melibatkan masyarakat banyak dalam keseluruhan rantai pemasarannya, dan produk tersebut juga berbasis sumberdaya lokal, dan memiliki peluang pasar yang cukup besar, didalam maupun luar kabupaten. Ciri produk unggulan dengan kombinasi keunggulan yang ada bisa menjadi spesifik bagi kabupaten, dan oleh karena itu dapat memiliki competitive advantage untuk terus dikembangkan. Dengan demikian, prinsip produk unggulan ini adalah merupakan sumber ekonomi unggulan, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Pemilihan suatu produk menjadi unggulan, maka diharapkan seluruh upaya dan perencanaan pembangunan termasuk investasi dilakukan dengan focus untuk meningkatkan aktivitas produksi yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir. Semua aktivitas produksi berada dalam suatu sistem rantai pasokan.



Gambar 9.3: Produk Unggulan dengan Keterkaitan Berbagai Kegiatan Ekonomi dan Komponen Pendukung

Konsep pengembangan produk unggulan bukan merupakan pengembangan satu produk secara terpisah; tetapi pengembangan produk unggulan memerlukan dukungan dan campur tangan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Dalam suatu rantai produksi maka keterlibatan berbagai sektor akan nyata, yaitu dari mulai sumberdaya produksi dengan berbagai infrastruktur pendukungnya, sektor distribusi dan pemasaran juga dengan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk pengolahan, dan juga dukungan sektor pembiayaan. Dengan demikian, pengembangan produk unggulan mengasumsikan adanya sinergi pengembangan berbagai sektor terkait yang relevan. Hal ini juga berarti bahwa sinergi akan menciptakan berbagai kegiatan ekonomi pada rantai pasokan, yang saling terkait dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi kawasan (tertinggal) secara keseluruhan.

Dengan memperhatikan keterkaitan kegiatan yang ada, maka semua unsur terlibat dalam pengembangan Pukab, baik unsur pemerintah maupun unsur swasta dengan peran yang dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing. Keterkaitan ini menciptakan kerjasama pemerintah dan swasta untuk mendukung pengembangan seluruh masyarakat.

PENDEKATAN DAN KRITERIA PRODUK UNGGULAN

Suatu komoditas dianggap unggul dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (1) sisi permintaan (*demand driven*) dan (2) sisi penawaran (*supply demand*). Dari sisi permintaan, kriteria yang digunakan untuk menetapkan komoditas unggulan adalah besarnya permintaan dan pertumbuhan permintaan pasar, baik pasar domestik maupun luar negeri. Sisi penawaran lebih melihat potensi, kapasitas pengembangan dan kesesuaian untuk pengembangan komoditas tersebut. Dari sisi ini biasanya digunakan indikator produksi, produktivitas, luas dan kesesuaian lahan, dan ada potensi pengembangan.

Di sisi lain pengembangan produk, dapat dibagi menjadi tiga (3), yakni (1) Komoditas unggulan, (2) Komoditas andalan dan (3) Komoditas binaan/penunjang. **Komoditas unggulan** menurut Pemkab Jember ini adalah komoditas yang paling menguntungkan bagi petani untuk dikembangkan. Kriteria penentuan komoditas unggulan di sini adalah: mempunyai prospek pasar, sumber daya alam yang cukup, serta sifat-sifat unggul lainnya seperti luas areal dan animo petani. **Komoditas andalan** adalah komoditas yang menjadi tumpuan hidup/penghasilan utama petani serta disesuaikan dengan agroekosistem (AES).

Komoditas binaan/penunjang adalah komoditas yang dapat dipadukan pengusaannya dengan komoditas unggulan yang dikembangkan di suatu lokasi/sentra pengembangan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (lahan, tenaga kerja, sarana/ prasarana) dan peningkatan pendapatan petani melalui peningkatan produksi maupun keterpaduan pengusaannya akan meningkatkan efisiensi /saling memanfaatkan.

Ditjen Cipta Karya (1998) menetapkan kriteria komoditas unggulan sebagai berikut :

1. Potensi pengembangan yang meliputi kuantitas, kualitas dan kesesuaian lokasi,
2. Adanya peranan komoditas dalam menggerakkan ekonomi daerah yang dibagi menjadi dampak lokal, wilayah lain dan regional.
3. Pertumbuhan permintaan pasar yang dibagi menjadi permintaan ekspor, antar wilayah dan permintaan lokal.

Dari perspektif waktu pengembangan komoditas, terdapat dua macam komoditas, yaitu (1) komoditas unggulan, dan (2) komoditas prospektif. Komoditas unggulan adalah komoditas yang berdasarkan peran dan ketersediaan saat ini dapat diunggulkan. Sementara komoditas prospektif adalah komoditas yang saat ini belum berperan atau belum dikembangkan, namun di masa yang akan datang merupakan komoditas yang dapat diunggulkan.

BPPT menggunakan 17 kriteria untuk menetapkan komoditas unggulan yang dikaitkan dengan komponen teknologi. Ketujuh belas kriteria tersebut adalah (1) ketersediaan input, (2) teknik produksi saat ini, (3) skala usaha/produksi saat ini, (4) kemampuan pekerja, (5) kemampuan menyerap tenaga kerja di masa yang akan datang, (6) jumlah turunan produk olahan, (7) jangkauan pasar, (8) daya saing komoditas sejenis, (9) dukungan keamanan, (10) dukungan budaya (multietnis), (11) dukungan informasi peluang pasar, (12) dukungan kelembagaan, (13) fasilitas insentif, (14) fasilitas/insentif dari pemerintah, (15) perkiraan kontribusi terhadap pendapatan, (16) prospek pengembangan ke depan, dan (17) dampak terhadap lingkungan.

Faktor yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam penetapan komoditas unggulan adalah minat dan atau komitmen *stakeholder* untuk mengembangkan komoditas unggulan. Komitmen dunia usaha dan masyarakat ditunjukkan dari minat maupun realisasi investasi yang telah dilakukan terhadap komoditas-komoditas tertentu. Komitmen dan minat investasi dunia usaha dan masyarakat ini menjadi inti dari upaya pengembangan daerah melalui pengembangan komoditas unggulan. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan komoditas unggulan dituangkan melalui program-program pembangunan fasilitas pendukung pengembangan spasial, sektoral maupun infrastruktur untuk menggiring dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan produksi yang terkait dengan pengusahaan komoditas unggulan.

Berdasarkan uraian mengenai konsep komoditas unggulan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa suatu produk dapat disebut unggulan bila mempunyai karakteristik berikut:

1. **Komoditas unggulan yang diprioritaskan** pengembangannya oleh pemerintah daerah untuk mendukung tujuan pembangunan daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten;
2. **Kriteria komoditas unggulan** tersebut terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. **Permintaan dan penawaran** terhadap komoditas tersebut:
 - ❖ Adanya pasar (*demand*) dengan indikator volume pasar skala regional kabupaten dan provinsi, nasional, atau internasional;
 - ❖ Adanya potensi sisi sediaan (*supply*) dengan indikator: kesesuaian dan ketersediaan lahan (luasan sentra produksi), jumlah produksi dan tingkat produktivitas (merupakan sektor basis dan sektor dominan dalam skala kabupaten);
 - b. **Aspek pengembangan komoditas** tersebut dengan indikator adanya:
 - ❖ lahan untuk pengembangan areal produksi,
 - ❖ penguasaan teknologi (tepat guna),
 - ❖ modal usaha tani,
 - ❖ sumberdaya manusia secara kuantitas dan kualitas,
 - ❖ dukungan sarana dan prasarana produksi
 - c. **Dukungan stakeholder** (pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri) yang terkait dengan pengembangan komoditas tersebut dengan indikator adanya dukungan dari :
 - ❖ pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dan penyediaan/pembangunan dan pengembangan sarana prasarana (infrastruktur) kawasan yang mendukung kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan,
 - ❖ swasta sebagai investor pengembangan rantai ekonomi agribisnis di hilir (industri olahan),
 - ❖ masyarakat (tani), terutama dari sisi minat dalam pengembangan komoditas unggulan tersebut, terutama harga komoditas bernilai signifikan.

KAWASAN PENGEMBANGAN BERBASIS AGRIBISNIS

Dalam rangka pengembangan suatu kawasan dengan produk unggulan pertanian tertentu atau produk unggulan bersifat agribisnis; maka kawasan dapat berkembang secara terintegrasi. Dalam hal ini (Douglas, 1986) mengemukakan bahwa kawasan tersebut harus membentuk satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen-elemen ruang sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan ekonomi (juga sebagai Pusat Pertumbuhan) yang berfungsi sebagai:
 - a. Pusat perdagangan dan transportasi agribisnis (*agribusiness/ transport center*).
 - b. Penyedia jasa pendukung kegiatan agribisnis (*agribusiness support services*). Pasar konsumen produk non-pertanian (*non agricultural consumers market*).
 - c. Pusat industri pertanian (*agro-based industri*).
 - d. Penyedia pekerjaan non pertanian (*non-agricultural employment*).
 - e. Pusat agribisnis dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman di kabupaten (RTRW Kabupaten).
2. Unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai : Pusat produksi pertanian (*agricultural production*) :
 - a. Intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*)
 - b. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand for non-agricultural goods and services*). Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversification*)
 - c. Adanya sektor/komoditas unggulan dan agribisnis sebagai sektor basis: Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya
 - d. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal)
 - e. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor
3. Unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai : Pusat produksi pertanian (*agricultural production*)
 - a. Intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*).
 - b. Pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand for non-agricultural goods and services*). Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversification*).
 - c. Adanya sektor/komoditas unggulan dan agribisnis sebagai sektor basis: Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya.
 - d. Kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar (sesuai dengan kearifan lokal).
 - e. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor
4. Dukungan sistem infrastruktur. Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan berbasis ekonomi sumberdaya lokal unggulan, diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi)
5. Dukungan Kelembagaan
 - a. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dengan fasilitasi Pemerintah Pusat
 - b. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan
6. Dukungan Pembiayaan

Melalui keterkaitan tersebut, maka kawasan produksi pertanian dapat berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) sehingga pembangunan kawasan dapat dipacu dan dapat tercipta peluang lapangan kerja yang ada. Suatu kawasan dengan agribisnis sebagai sektor basis, di dalamnya terdapat banyak peluang yang tercipta/diciptakan sebagai rantai kegiatan ekonomi ikutannya dari hulu sampai hilir sebagaimana terlihat pada **Gambar 2**. Dengan demikian berbagai peluang investasi baik di sektor primer maupun sekunder dapat dikembangkan.

Setiap sektor atau daerah yang direncanakan sebagai kawasan investasi harus mempunyai pertimbangan ekonomis.



Gambar94: Rantai Kegiatan Ekonomi dan Ikutannya

KOMPONEN DAN PROSES PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PRODUK UNGGULAN

Berdasarkan pendekatan yang ada, maka komponen kegiatan pengembangan wilayah dapat dijelaskan sesuai dengan kaitan dan fungsinya, yaitu seperti yang dipaparkan pada **Tabel 9.2**.

Tabel 9.2: Komponen dan Proses Pengembangan Wilayah

KOMPONEN	PROSES
Teknologi Pendayagunaan Potensi SDA dan SDM	(i) Identifikasi tipe desa/wilayah; (ii) Identifikasi potensi unggulan; (iii) Inventarisasi teknologi (dari tahap produksi hulu sampai hilir); (iv) Identifikasi kemungkinan pengembangan diversifikasi produk unggulan; (v) Identifikasi kemungkinan peningkatan kualitas produksi; (vi) Identifikasi kebutuhan pengembangan teknologi, baik untuk pengembangan diversifikasi maupun peningkatan kualitas produk; (vii) Inventarisasi status tingkatan pengembangan penguasaan teknologi; (viii) Identifikasi kebutuhan pengembangan penguasaan teknologi oleh SDM baik untuk pengembangan diversifikasi maupun peningkatan kualitas produk.
Infrastruktur Dasar	(i) Identifikasi tipe desa/wilayah; (ii) Inventarisasi infrastruktur dasar yang ada (jalan, air bersih, listrik); (iii) Analisis rencana perkembangan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan; (iv) Identifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dasar; (v) Pembuatan proposal pengembangan; dan (vi) Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk pembinaan dan pengembangan infrastruktur dasar.
Infrastruktur Ekonomi	(i) Identifikasi tipe desa/wilayah; (ii) Inventarisasi infrastruktur ekonomi yang ada (perbankan/lembaga permodalan, pasar, pertokoan, sistem transportasi, telekomunikasi); (iii) Analisis rencana perkembangan kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan; (iv) Identifikasi kebutuhan pengembangan infrastruktur ekonomi yang diperlukan;

KOMPONEN	PROSES
	(v) Pembuatan proposal pengembangan; dan (vi) Koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk pengembangan infrastruktur ekonomi.
Kelembagaan dan Organisasi	(i) Identifikasi tipe desa/wilayah; (ii) Inventarisasi program/rencana pengembangan teknologi dan/atau program/rencana pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang akan dijalankan; (iii) Identifikasi kebijakan (policy) dan peraturan/ perundangan yang perlu dikembangkan untuk menunjang keterlaksanaan semua program/rencana yang akan dilaksanakan termaksud pada butir (ii) diatas; (iv) Identifikasi lembaga-lembaga terkait untuk keterlaksanaan program/rencana tersebut, dengan kemungkinan mengusulkan lembaga-lembaga baru; dan (v) Merumuskan mekanisme kerja untuk setiap program/rencana yang akan dilaksanakan di antara lembaga-lembaga terkait diatas.

Kerangka Proses perencanaan dan pengembangan wilayah ini selanjutnya diterjemahkan dalam kerangka kerja dalam melakukan identifikasi dan pengembangan produk unggulan.

PENENTUAN PRODUK UNGGULAN

PENENTUAN WILAYAH PRODUK UNGGULAN

Analisis produk unggulan, atau bisa juga disebut analisis pengembangan wilayah, adalah analisis untuk memilih produk atau komoditi yang sesuai pada daerah atau lokasi studi. Disebut analisis pengembangan wilayah karena analisis dilakukan dengan dasar menilai potensi wilayah untuk pengembangan suatu produk atau komoditi. Pemilihan dan penentuan produk unggulan selain ditentukan oleh potensi biofisik lokasi, juga ditentukan oleh kesesuaian penataan wilayah dan ketersediaan infrastruktur. Beberapa analisis yang digunakan diantaranya:

- ❖ **Analisis Kesesuaian Lahan dan Potensi Pengembangan.**
Analisis untuk menilai potensi wilayah pengembangan dilakukan dengan menilai kesesuaian lahan biofisik, agroklimat dan hidrologi dengan produk atau komoditi potensial tertentu. Termasuk dalam analisis juga dilakukan penilaian kemampuan daya dukung lahan. Analisis untuk menilai potensi juga dilengkapi dengan penilaian faktor kendala yang mungkin ada untuk pengembangan produk atau komoditi tertentu, termasuk perlunya pengelolaan lingkungan budidaya. Hasil dari analisis adalah pemilihan produk atau komoditi yang sesuai dan potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kriteria kondisi biofisik alam.
- ❖ **Analisis Zonasi dan Tata Ruang Wilayah.**
Analisis zonasi dan tata ruang diarahkan untuk mengetahui sebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada di wilayah, termasuk lokasi potensial wilayah kabupaten. Pemilihan dan penentuan produk unggulan akan mempertimbangkan kesesuaian zonasi dan tata ruang wilayah.
- ❖ **Analisis Kebutuhan Infrastruktur.**
Analisis kebutuhan infrastruktur ditujukan untuk menilai kondisi dan ketersediaan infrastruktur yang ada dan menilai kebutuhan infrastruktur tertentu untuk mendukung pengembangan produk unggulan yang telah terpilih.

PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN

Analisis Pengembangan produk unggulan adalah analisis yang ditujukan untuk menguraikan pengembangan, terutama pengembangan ekonomi, dari produk unggulan yang terpilih. Analisis juga diarahkan untuk menilai pengembangan produk atau komoditi menjadi produk turunan yang lain.

- ❖ **Analisis Kelayakan Usaha**
Analisis kelayakan usaha digunakan untuk menilai potensi pengembangan komoditi atau produk terpilih menjadi produk turunan yang lain, dan menilai kelayakan ekonomi dari masing-masing produk turunan.
- ❖ **Analisis Kelembagaan Ekonomi**
Analisis Kelembagaan ekonomi adalah menilai keberadaan kelembagaan social ekonomi masyarakat yang mendukung pengembangan produk unggulan. Termasuk dalam analisis kelembagaan adalah menilai mekanisme kerja dan kemampuan manajemen masyarakat. Analisis kelembagaan ini menilai kelembagaan yang ada dapat mendukung pengembangan produk dan kebutuhan terhadap pengembangan kelembagaan tertentu.
- ❖ **Analisis Sosial Budaya**
Analisis sosial budaya terutama diarahkan untuk menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Analisis sosial ekonomi digunakan untuk menilai rencana dan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi pengembangan produk.

TEKNIK PENENTUAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN BERBASIS KAWASAN

1. PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Pemilihan kawasan adalah untuk menentukan kawasan tertentu yang potensial bagi pengembangan produk unggulan; atau dalam hal ini adalah untuk memilih dan menentukan wilayah pusat produk atau pusat pengembangan. Pemilihan dan penentuan kawasan dilakukan dengan penentuan batas (delinasi).

Analisis pemilihan kawasan sebagai pusat pengembangan adalah dengan pendekatan batas administrasi kecamatan. Dalam pemilihan dan penentuan lokasi kecamatan sebagai kawasan untuk produk unggulan dilakukan beberapa tahapan.

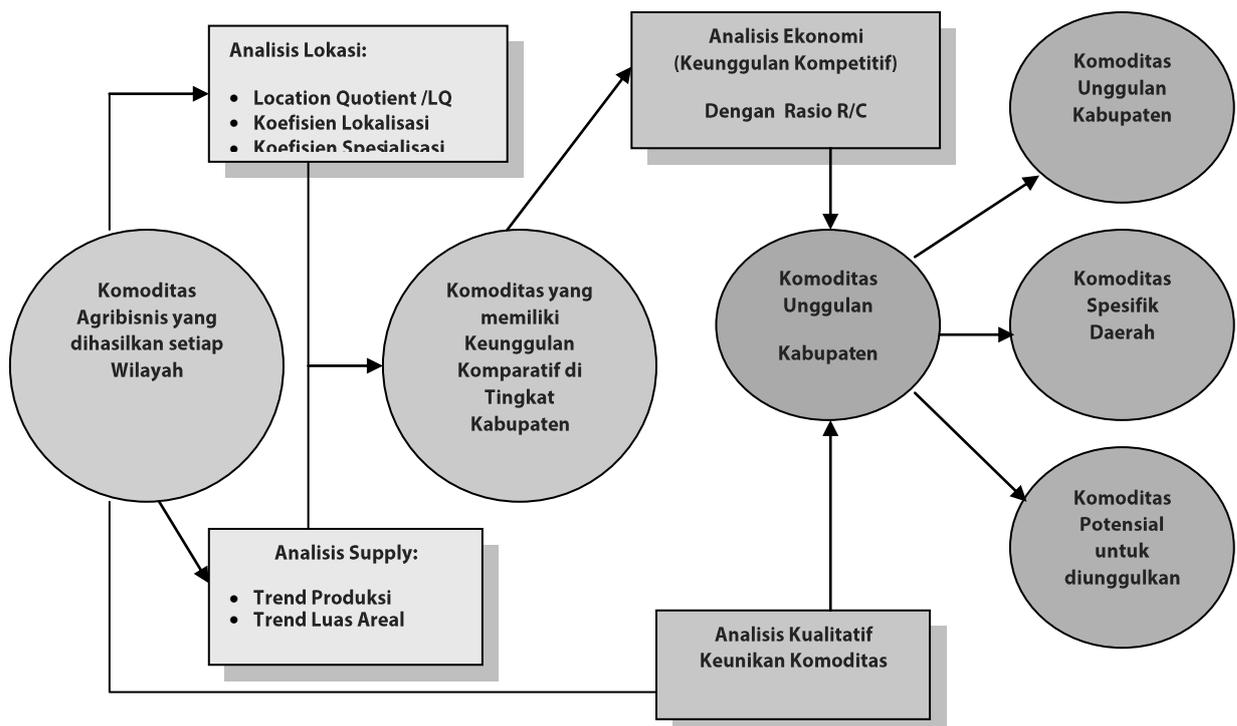
- (1) Identifikasi kawasan-kawasan yang secara fungsional mempunyai potensi dan layak dikembangkan sebagai kawasan potensial dan pusat pertumbuhan
- (2) Menentukan batas ruang kawasan secara fungsional, yaitu (1) terintegrasi dalam satu atau beberapa hamparan yang secara skala ekonomi wilayah, layak dikembangkan sebagai suatu kawasan berbasis agribisnis (hulu-hilir) sesuai dengan komoditas unggulannya.
- (3) Melakukan Integrasi kawasan-kawasan secara fungsional tersebut ke dalam ruang wilayah administrasi kecamatan.

2. PEMILIHAN PRODUK UNGGULAN

Analisis produk unggulan dilakukan terutama dengan menilai potensi suatu produk dibandingkan dengan produk lainnya. Perbandingan potensi ini dapat dilakukan dengan analisis Location Quotient (LQ) yang dilengkapi dengan analisis keunggulan kompetitif dan analisis lain terkait yang relevan.

1. Analisis kuantitatif untuk setiap kecamatan dengan parameter *supply side* dan analisis lokasi dengan menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ), Koefisien Lokalisasi (Lo), dan Koefisien Spesialisasi (KS). Koefisien LQ menunjukkan perbandingan kemampuan suatu daerah (kecamatan) untuk menghasilkan suatu komoditas dibandingkan dengan produksi komoditas tersebut secara lebih luas (kabupaten). Nilai LQ akan memberikan indikasi kemampuan suatu daerah dalam memproduksi suatu komoditas, yaitu mampu mensuplai daerah lain, harus mendatangkan dari daerah lain, atau seimbang. Analisis LQ tersebut, selanjutnya perlu didukung oleh analisis koefisien lokalisasi (Lo) dan koefisien spesialisasi

- (KS) yang akan memperlihatkan keunggulan komparatif masing-masing komoditas di setiap kecamatan. Koefisien lokalisasi (Lo) akan memperlihatkan indeks relatif pemusatan perusahaan suatu komoditas di daerah tertentu, sedangkan koefisien spesialisasi (KS) akan memperlihatkan indeks relative tingkat spesialisasi suatu daerah dalam menghasilkan suatu komoditas.
2. Analisis keunggulan kompetitif pada tingkat kabupaten untuk semua komoditas yang diunggulkan (mempunyai keunggulan komparatif) di tingkat kecamatan dengan menggunakan perhitungan rasio penerimaan/nilai produksi kecamatan dalam skala kabupaten.
 3. Kelemahan dari metode kuantitatif diatas adalah bahwa hasil analisis sangat tergantung kepada besarnya nilai data produksi dan luas tanam suatu komoditas. Hal ini menyebabkan suatu komoditas yang telah menjadi kekhasan atau keunikan (spesifik) di suatu wilayah akan tersisihkan karena luas areal dan produksinya relatif kecil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka seluruh komoditas unggulan yang terpilih kemudian diseleksi kembali dengan menggunakan kriteria kualitatif, yaitu daya tarik serta daya saing agribisnis dari setiap komoditas. Melalui analisis tersebut maka seluruh komoditas unggulan, pada akhirnya, dapat klasifikasi ke dalam kategori: Komoditas Unggulan Prioritas I, II, III dan IV.
 4. Seleksi kembali dilakukan secara kualitatif dengan memperhatikan utamanya orientasi pasar, daya saing serta tingkat komersialisasi *existing* dari komoditas tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dipisahkan menjadi: Komoditas Unggulan, Komoditas Potensial untuk diunggulkan, dan komoditas spesifik lokasi kecamatan di wilayah Kabupaten.



Gambar 9.5: Metode Seleksi Komoditas Unggulan

a. Analisis Supply

Analisis *supply* adalah analisis terhadap tingkat kemampuan satu daerah dalam menyediakan berbagai komoditas yang dihasilkan berdasarkan *trend* produksi dan luas tanam selama kurun waktu (tahun) tertentu. Analisis *supply* dilaksanakan untuk setiap kelompok komoditas agribisnis tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Analisis ini dilakukan untuk melihat tingkat kemampuan daerah dalam memproduksi suatu komoditas yang sangat ditentukan oleh pembinaan dan orientasi pengelolaan dari masing-masing pelaku usahatani. Adapun variable, nilai parameter dan skala serta bobotnya seperti terlihat pada **Tabel 9.3**.

Tabel 9.3: Pengukuran Kekuatan Supply Komoditas Pertanian

Parameter	Variabel	Nilai Paramter	Skala	Bobot
Supply	Trend Produksi	a. Meningkatkan b. Tetap c. Menurun	3 2 1	3
	Trend luas areal	a. Meningkatkan b. Tetap c. Menurun	3 2 1	3

b. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis LQ merupakan salah satu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non-basis. Dengan kata lain, nilai LQ akan memberikan indikasi kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan suatu komoditas, apakah mempunyai potensi untuk mensupply daerah lain, mendatangkan dari daerah lain, atau dalam keadaan seimbang (Isard, 1960). Secara matematis formula LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = (p_i/p_t) / P_i/P_t$$

Keterangan:

LQ = Location Quotient

p_i = Produksi/luas areal komoditas i pada tingkat kecamatan.

p_t = Produksi/luas areal total komoditas pada tingkat kecamatan.

P_i = Produksi/luas areal komoditas i pada tingkat kabupaten.

P_t = Produksi/luas areal total komoditas pada tingkat kabupaten.

Kriteria:

$LQ > 1$: sektor basis; artinya komoditas i di suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif

$LQ = 1$: sektor non-basis; artinya komoditas i di suatu wilayah tidak memiliki keunggulan, produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri.

$LQ < 1$: sektor non-basis; artinya komoditas i di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri hingga diperlukan pasokan dari luar.

c. Analisis Kuosien Lokalisasi (Lo)

Kuosien lokalisasi merupakan ukuran relatif konsentrasi pengembangan komoditas tertentu di suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lebih luas dengan besaran tertentu (Warpani, 2000). Hasil perhitungan analisis ini akan menunjukkan apakah pengembangan suatu komoditas terkonsentrasi di wilayah tertentu atau tersebar di beberapa wilayah. Dalam kerangka pengembangan sentra kawasan agri-bisnis, perusahaan suatu komoditas yang menyebar tentunya akan menyulitkan usaha untuk mendorong usahatani secara komersial (Natawidjaja *et al.*, 2002). Secara matematis formulanya adalah sebagai berikut:

$$Lo = (pi/Pi) - (pt/Pt) \times 100\%$$

Setelah diperoleh hasil perhitungan maka hasil perhitungan yang bernilai positif saja dijumlahkan searah dengan komoditas yang diselidiki, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Bila $0 < Lo < 1$, artinya perusahaan komoditas tersebut menyebar.
- b. Bila $Lo = 1$, artinya usaha komoditas tersebut terkonsentrasi di suatu daerah.

d. Analisis Kuosien Spesialisasi (KS)

Koefisien spesialisasi merupakan ukuran relatif suatu daerah dalam melakukan pengkhususan untuk menanam komoditas tertentu dan dihitung berdasarkan formula (Warpani, 2000):

$$KS = (pi/pt - Pi/Pt) \times 100\%$$

Setelah diperoleh hasil perhitungan maka hasil perhitungan yang bernilai positif saja dijumlahkan searah dengan daerah yang diselidiki, dengan kriteria:

- a. Bila $0 < KS < 1$, artinya bahwa daerah tersebut tidak menspesialisasikan untuk menanam komoditas tertentu.
- b. Bila $KS = 1$, artinya bahwa daerah tersebut telah menspesialisasikan untuk menanam komoditas tertentu.

c. Analisis Revenue-Cost Rasio (R/C Ratio)

Untuk setiap komoditas yang diunggulkan pada setiap kecamatan berdasarkan analisis keunggulan komparatif setelah ditambahkan faktor koreksi dan faktor kekhasan komoditas, kemudian diteliti keunggulan kompetitifnya pada tingkat kabupaten dengan menggunakan analisis rasio *Revenue/Cost* (Gittinger, 1982).

$$R/C \text{ Rasio} = \frac{\text{Revenue}}{\text{Cost}}$$

d. Analisis Daya Tarik dan Daya Saing Agribisnis

Dalam menentukan prioritas komoditas unggulan maka digunakan analisis matriks daya tarik dan daya saing agribisnis (Natawidjaja *et al.*, 2002). Analisis ini mengga-bungkan daya tarik agribisnis sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi keber-adaan sistem agribisnis komoditas unggulan tertentu dan daya saing agribisnis sebagai faktor internal yang mencerminkan kondisi sistem agribisnis komoditas unggulan tertentu.

Faktor daya tarik agribisnis terdiri dari aspek:

1. Ukuran Pasar: besarnya permintaan pasar terhadap komoditas unggulan (lokal, regional, nasional, internasional)
2. Pertumbuhan Pasar: *Trend* besarnya perubahan permintaan pasar setiap tahun, baik domestik maupun ekspor.
3. Marjin Laba: besarnya keuntungan dari usaha komoditas unggulan.
4. Tingkat Kompetisi: Tingkat persaingan pasar yang dilihat dari jumlah pelaku dan jumlah daerah yang mengusahakan komoditas unggulan, baik regional, nasional, maupun internasional.
5. Pengaruh Inflasi: Pengaruh perubahan inflasi dan kurs uang terhadap keberlang-sungan usaha komoditas unggulan.
6. Kondisi Sosial, Politik dan Hukum: Pengaruh adanya perubahan sosial, politik dan hukum pada tingkat nasional dan internasional yang mempengaruhi kelangsungan usaha

komoditas unggulan.

7. Kebutuhan Modal: Besarnya kebutuhan modal yang diperlukan untuk melaksanakan usaha komoditas unggulan.

Sedangkan faktor daya saing agribisnis kabupaten, provinsi, di tatanan nasional dan internasional, meliputi aspek:

1. Pangsa pasar: besarnya permintaan pasar (dalam negeri dan ekspor) terhadap komoditas unggulan.
2. Pertumbuhan pangsa pasar: pertumbuhan periodik permintaan pasar setiap tahun, baik domestik maupun ekspor, yang dapat dipenuhi kabupaten.
3. Kualitas komoditas unggulan: Kualitas komoditas unggulan yang dihasilkan.
4. Citra komoditas unggulan: persepsi konsumen terhadap komoditas unggulan.
5. Jaringan pemasaran: jangkauan pasar komoditas unggulan.
6. Efektifitas promosi: ada atau tidak adanya promosi; dan tingkat efektifitas promosi (bila ada) komoditas unggulan.
7. Kondisi harga: mekanisme penetapan harga komoditas unggulan.
8. Efisiensi biaya: biaya produksi komoditas unggulan.

Tabel 9.4: Penetapan Komoditas Unggulan (Terpilih)

No	Kriteria/Indikator	Bobot	Skor Komoditas Unggulan			
			A	B	C	D
1	Karakteristik Produksi :	0.4				
	a. Komoditas basis (produksi & tenaga kerja: LQ > 1					
	b. Kontinuitas produksi (<i>Shift Share</i>)/trend produksi (menurun/meningkat)					
	c. Mempunyai Kekhususan (Koefisien Spesialisasi)					
2	Keunggulan Kompetitif (<i>Revenue/Cost ratio</i>)	0.10				
3	Daya Tarik :	0.25				
	Ukuran pasar					
	Pertumbuhan pasar					
	Margin laba					
	Tingkat kompetisi					
	Pengaruh inflasi					
	Kondisi sosial, politik dan hukum					
	Kebutuhan modal					
4	Daya Saing :	0.25				
	Pangsa pasar					
	Pertumbuhan pangsa pasar					
	Kualitas komoditas unggulan					
	Citra komoditas unggulan					
	Jaringan pemasaran					
	Efektifitas promosi					
	Kondisi harga					
Efisiensi biaya						
Total Skor		1,00				

Selain hal-hal di atas, dari sisi sediaan pada saat menentukan komoditas unggulan dan lokasi kawasan berbasis komoditas unggulan, perlu juga mempertimbangkan:

- (1) Aspek kontinuitas produksi komoditas, yang dilakukan dengan teknik analisis *shift share* berdasarkan produksi dan tenaga kerja, menggunakan data sekunder dan observasi lapangan;

- (2) Analisis kesesuaian dan daya dukung/ketersediaan lahan untuk pengembangan, dapat dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan/atau melakukan analisis dengan model FAO/Rapport (data sekunder di atas peta GIS skala 1:25.000);
- (3) Daya tampung tenaga kerja (eksisting dan peluang) yang dihitung berdasarkan luas lahan ekonomis/KK; \sum luas lahan produktif/ \sum KK penduduk (data sekunder);
- (4) Penguasaan teknologi oleh masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya/tersedia teknologi saprodi, mudah dan murah, diperoleh dari data sekunder, hasil RRA/ FGD, dan observasi di level komunitas;
- (5) Ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana prasarana pendukung kegiatan agribisnis, yang diperoleh dari data sekunder, hasil RRA/FGD, dan observasi di level komunitas;
- (6) Tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial-budaya dan kebijakan/regulasi.

Dengan langkah-langkah dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka penentuan akhir komoditas unggulan dilakukan dengan cara mengakumu-lasikan nilai-nilai (skor) yang diperoleh pada setiap komponen kriteia/indikator, dikalikan dengan pembobotan.

Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) jenis komoditas unggulan, maka perlu dibuat klasifikasi komoditas unggulan I, II, III, dst. sesuai jenis tanaman komoditas (pangan-palawija, perkebunan, peternakan, dan perikanan)..

9.8.3. IDENTIFIKASI KELAYAKAN PRODUK UNGGULAN

PROSES DAN TAHAPAN KELAYAKAN USAHA

Analisis pengembangan produk dilakukan dalam dua tahapan berurutan, yaitu analisis untuk kelayakan usaha (*Feasibility*), dan kemudian diikuti analisis untuk perencanaan usaha (*Business Plan*).



Gambar 9.6: Kajian Kelayakan Bisnis



Gambar 9.7: Tahapan Kajian Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan usaha yang direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari berbagai aspek. Hasil dari studi ini menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk menerima atau menolak suatu gagasan bisnis yang direncanakan, juga memberikan rekomendasi yang relevan.

Business Plan (perencanaan bisnis) adalah gambaran detail tentang bisnis yang akan dibangun atau dikembangkan, yang dibuat secara komprehensif, efisien dan efektif. Rencana bisnis yang disusun secara baik dan cermat akan dapat menjadi acuan bagi pelaku bisnis dalam dunia usaha yang sarat persaingan. Tahap pertama dalam menyusun perencanaan bisnis adalah melakukan studi kelayakan bisnis.

ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

Analisis aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk memahami seberapa besar potensi pasar yang tersedia, berapa bagian yang dapat diraih oleh perusahaan atau usaha yang diusulkan, serta strategi pemasaran yang direncanakan untuk memperebutkan konsumen. Pengkajian mengenai aspek pasar dilakukan dengan menganalisis permintaan, penawaran, harga, bentuk pasar, program pemasaran, pesaing dan perkiraan penjualan. Dalam analisis pasar ada beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati, diantaranya: [1] kebutuhan dan keinginan konsumen, [2] segmentasi pasar, [3] target, [4] nilai tambah, [5] masa hidup produk, [6] struktur pasar, dan [7] persaingan dan strategi pesaing.

ANALISIS TEKNIS DAN TEKNOLOGIS

Aspek teknis bertujuan untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi, perencanaan yang telah dilakukan dapat dilaksanakan secara layak atau tidak. Pada aspek teknis dan teknologis dipaparkan beberapa faktor yaitu penentuan kapasitas produksi, tata letak pabrik, serta pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk produksi.

Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk memproduksi dalam waktu tertentu. Tata letak (*layout*) atau disebut juga tata ruang yaitu penempatan fasilitas-fasilitas yang dipakai di dalam pabrik, seperti letak mesin-mesin, letak alat-alat produksi, jalur pengangkutan, dan seterusnya. Letak dari berbagai fasilitas tersebut harus dikaji agar proses produksi dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Penilaian aspek teknis dilakukan dengan menganalisis apakah dari segi pembangunan usaha dan segi implementasinya secara teknis dapat dilaksanakan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui pula rancangan awal penaksiran biaya investasi dari usaha ini. Hal-hal yang perlu dianalisis dari aspek teknis ini antara lain:

- a. Lokasi operasi, dimana usaha didirikan dengan pertimbangan lokasi dan lahan usaha
- b. Skala usaha/luas produksi atau volume produksi, ditetapkan untuk mencapai suatu tingkatan skala ekonomis
- c. Mesin serta alat pembantu mesin, dengan melihat kriteria pemilihannya
- d. Proses produksi dan tata letak, termasuk bangunan dan fasilitas lainnya.
- e. Bahan baku dan bahan penolong.

ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL

Manajemen operasional merupakan suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, *staffing*, koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Analisis manajemen operasional meliputi deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan, persyaratan untuk melakukan pekerjaan tersebut, serta struktur organisasi perusahaan.

Aspek manajemen operasional juga perlu mengkaji mengenai legalitas atau aspek yuridis dari suatu perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakini apakah secara yuridis perencanaan usaha yang telah dibuat dapat dinyatakan layak atau tidak layak dihadapan pihak yang berwajib dan masyarakat.

Tujuan analisis kelayakan usaha dari aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan, sehingga pada akhirnya rencana usaha dapat dikatakan layak atau tidak layak. Hal yang perlu dianalisis dalam aspek manajemen, yaitu manajemen dalam operasi, yaitu bentuk organisasi, kebutuhan SDM, jumlah tenaga kerja yang digunakan, dan sistem penggajian.

ANALISIS ASPEK KEUANGAN

Aspek finansial membicarakan tentang bagaimana menghitung kebutuhan dana, baik kebutuhan dana untuk aktiva tetap maupun dana untuk modal kerja. Analisis aspek finansial juga membicarakan mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan

jumlah dana tersebut, sekaligus pengalokasiannya secara efisien sehingga memberikan tingkat keuntungan yang menjanjikan. Beberapa hal yang dibahas dalam analisis aspek finansial antara lain penentuan kebutuhan dan pengalokasian dana, serta kriteria penilaian investasi.

Penentuan suatu keputusan investasi dilihat dari kriteria penilaian investasi. Kriteria penilaian investasi digunakan untuk menilai apakah suatu usaha layak untuk dilaksanakan apabila dipandang dari aspek profitabilitas komersialnya. Pada umumnya ada beberapa metode yang biasa dipertimbangkan untuk dipakai dalam penilaian aliran kas dari suatu investasi, yaitu metode *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Net Benefit/Cost* (Net B/C), *Break Even Point* (BEP), dan *Payback Period* (PBP).

c. Net Present Value (NPV) atau Nilai Bersih Sekarang.

Nilai bersih sekarang sebuah proposal investasi sama dengan nilai bersih sekarang arus kas tahunan setelah pajak dikurangi dengan pengeluaran awal investasi. Nilai bersih sekarang usaha memberikan ukuran nilai bersih proposal investasi dalam nilai uang pada saat sekarang. Oleh karena semua arus kas didiskontokan kembali ke masa sekarang, membandingkan selisih antara nilai sekarang arus kas tahunan dan pengeluaran investasi menjadi tepat.

Perbedaan antara nilai sekarang arus kas tahunan dan pengeluaran awal menentukan nilai bersih atas penerimaan proposal investasi dalam nilai uang pada saat sekarang. Jika NPV proyek lebih besar atau sama dengan nol, maka proyek tersebut diterima, dan jika ada nilai negatif muncul dalam penerimaan proyek, maka proyek tersebut ditolak. Jika nilai bersih sekarang dari proyek nol, maka proyek tersebut memberikan pengembalian yang sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan.

Net Present Value (NPV) atau Nilai Bersih Sekarang.

$$NVP = \sum_{t=1}^n \frac{ACF_t}{(1+k)^t} \pm IO$$

Keterangan:

ACF _t	= arus kas tahunan setelah pajak pada periode t
k	= tingkat diskonto yang tepat
IO	= pengeluaran kas awal
n	= periode analisis usaha

Kriteria :

$NPV \geq 0,0$: usaha layak
$NPV < 0,0$: usaha tidak layak.

b. Internal Rate of Return (IRR) atau Tingkat Pengembalian Internal.

Tingkat pengembalian internal adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang arus kas bersih masa depan proyek dengan pengeluaran awal proyek. Kriteria penilaiannya yaitu jika IRR yang didapat ternyata lebih besar dari *discount faktor* yang ditentukan maka investasi dapat diterima.

$$IO = \sum_{t=1}^n \frac{ACF_t}{(1+IRR)^t}$$

Keterangan:

ACFt = arus kas tahunan setelah pajak pada periode t
 IRR = tingkat pengembalian internal
 IO = pengeluaran kas awal
 n = periode analisis usaha

Kriteria :

IRR ≥ tingkat pengembalian yang berlaku : usaha layak
 IRR < tingkat pengembalian yang berlaku : usaha tidak layak.

d. Net Benefit/Cost (Net B/C) atau Rasio Keuntungan/Biaya sama dengan Profitability Index (PI) atau Indeks Keuntungan.

Rasio keuntungan/biaya atau indeks keuntungan adalah rasio nilai sekarang dari arus kas bersih pada masa depan terhadap pengeluaran awalnya. Jika kriteria nilai bersih investasi sekarang memberikan ukuran kelayakan proyek dalam nilai uang yang absolut, maka indeks keuntungan memberikan ukuran relatif dari keuntungan bersih masa depannya terhadap biaya awal.

$$PI = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{ACFt}{(1+k)^t}}{IO}$$

Keterangan:

ACFt = arus kas tahunan setelah pajak pada periode t
 k = tingkat diskonto yang tepat
 IO = pengeluaran kas awal
 n = periode analisis usaha

Kriteria :

PI ≥ 1,0 : usaha layak
 PI < 1,0 : usaha tidak layak.

e. Break Even Point (BEP) atau Titik Impas.

Titik impas adalah suatu kondisi pada saat tingkat produksi atau besarnya pendapatan sama dengan besarnya pengeluaran perusahaan sehingga pada saat itu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Perhitungan BEP dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah:

$$BEP = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Harga} - \text{Biaya Variabel}}$$

e. Masa Pengembalian Investasi atau Payback Period (PBP)

Setelah mendapatkan nilai sekarang dari keuntungan bersih maka dapat ditentukan pada tahun ke berapa total biaya investasi dapat tertutupi oleh keuntungan. Semakin cepat tingkat pengembalian usaha maka akan semakin baik.

$$PBP = \frac{\text{Biaya Investasi Awal}}{\text{Arus Kas Masuk}} \times 1 \text{ tahun}$$

Kriteria :

PBP > periode pembayaran maksimum: usaha tidak layak
 PBP < periode pembayaran maksimum: usaha layak

ANALISIS DAMPAK

Pendirian suatu usaha perlu dinilai dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Jika banyak *benefit* atau manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan, maka pendirian usaha tersebut memiliki dampak yang baik, sehingga dapat dinyatakan layak apabila didirikan. Namun, bila yang terjadi sebaliknya, *benefit* atau manfaat yang dirasakan oleh lingkungan dan masyarakat sedikit atau bahkan merugikan, maka usaha tersebut dapat dinyatakan tidak layak. Dalam konteks yang lebih luas yaitu dampaknya terhadap ekonomi kawasan, maka perlu dinilai dampak kegiatan usaha terhadap [1] tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi lain, [2] penyerapan tenaga kerja di kawasan, dan pada akhirnya pada [3] peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

9.8.4. PERENCANAAN PRODUK UNGGULAN

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA USAHA

Perencanaan yang dibuat harus menjelaskan : [1] deskripsi industri, perusahaan, dan produk, [2] gambaran pasar yang akan digarap dan strateginya; segmentasi, target pasar, strategi *product, price, place, promotion* (4P), [3] penetapan kapasitas produksi, bahan, teknologi dan proses produksinya, kebutuhan lahan dan bangunan, dan penetapan lokasi dan tata letak, [4] struktur organisasi, jumlah dan kualifikasi personil, serta pelatihan-pelatihan yang diperlukan, serta [5] perkiraan biaya dan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Perencanaan bisnis suatu usaha (komoditas) yang dibuat dengan detail akan menjadi acuan dalam menyusun *action plan* bagi suatu perusahaan sebagai unit usaha. Dalam konteks yang lebih luas, informasi rencana bisnis usaha (komoditas) akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang rencana aksi pengembangan ekonomi kawasan berbasis komoditas termasuk dalam menarik investor.

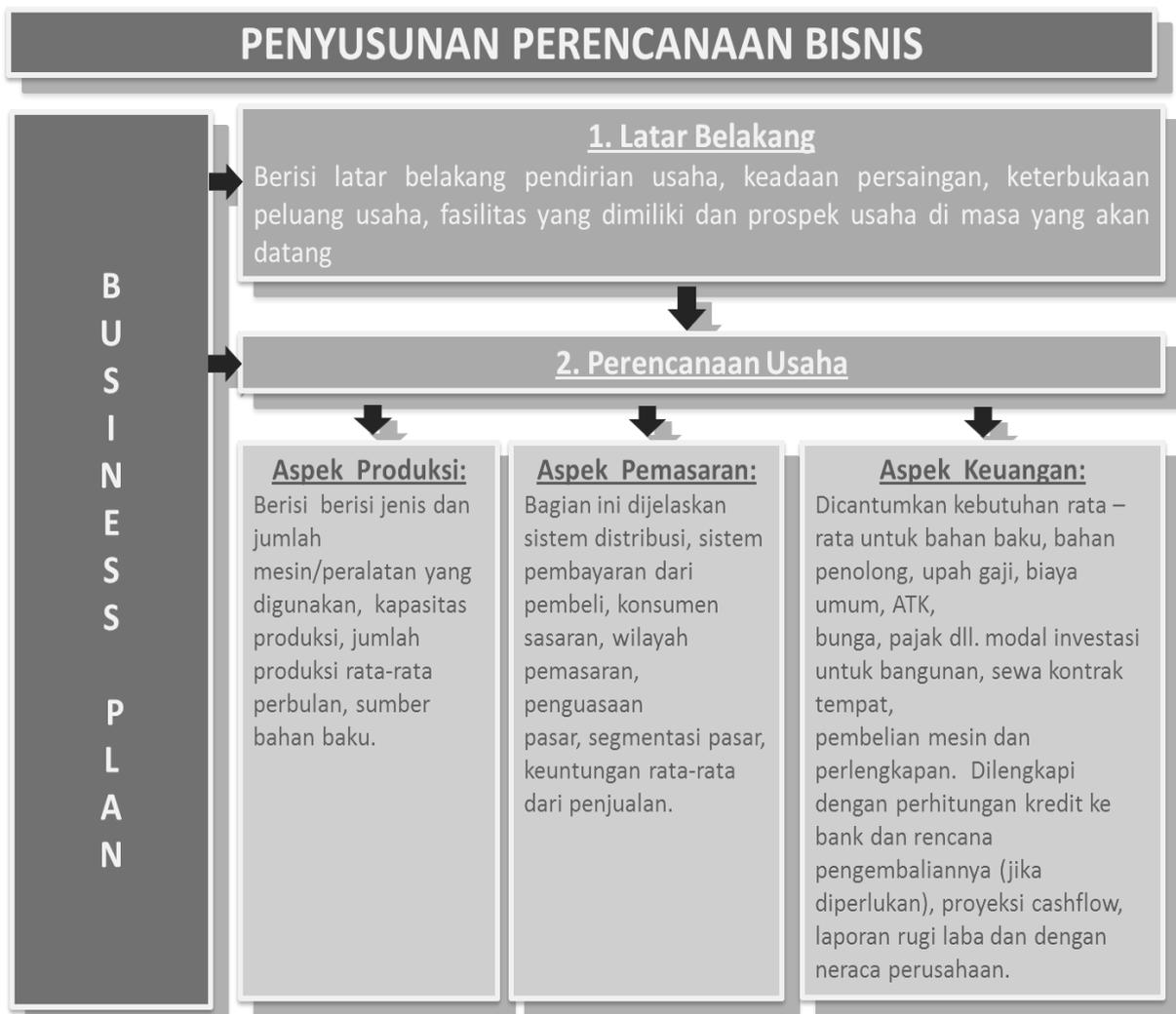
Tiga kegiatan utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Business Plan, yakni [1] Rencana Investasi, [2] Rencana Operasional, dan [3] Rencana Pembiayaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penyusunan Business Plan ini akan diidentifikasi seluruh kegiatan investasi, operasional dan pembiayaan dengan menggunakan pendekatan arus kas, rugi laba dan neraca. Periode laporan keuangan yang akan dibuat dalam bulanan dan tahunan dalam jangka waktu 5 tahun.

Tahapan Penyusunan Perencanaan usaha/Business Plan meliputi:

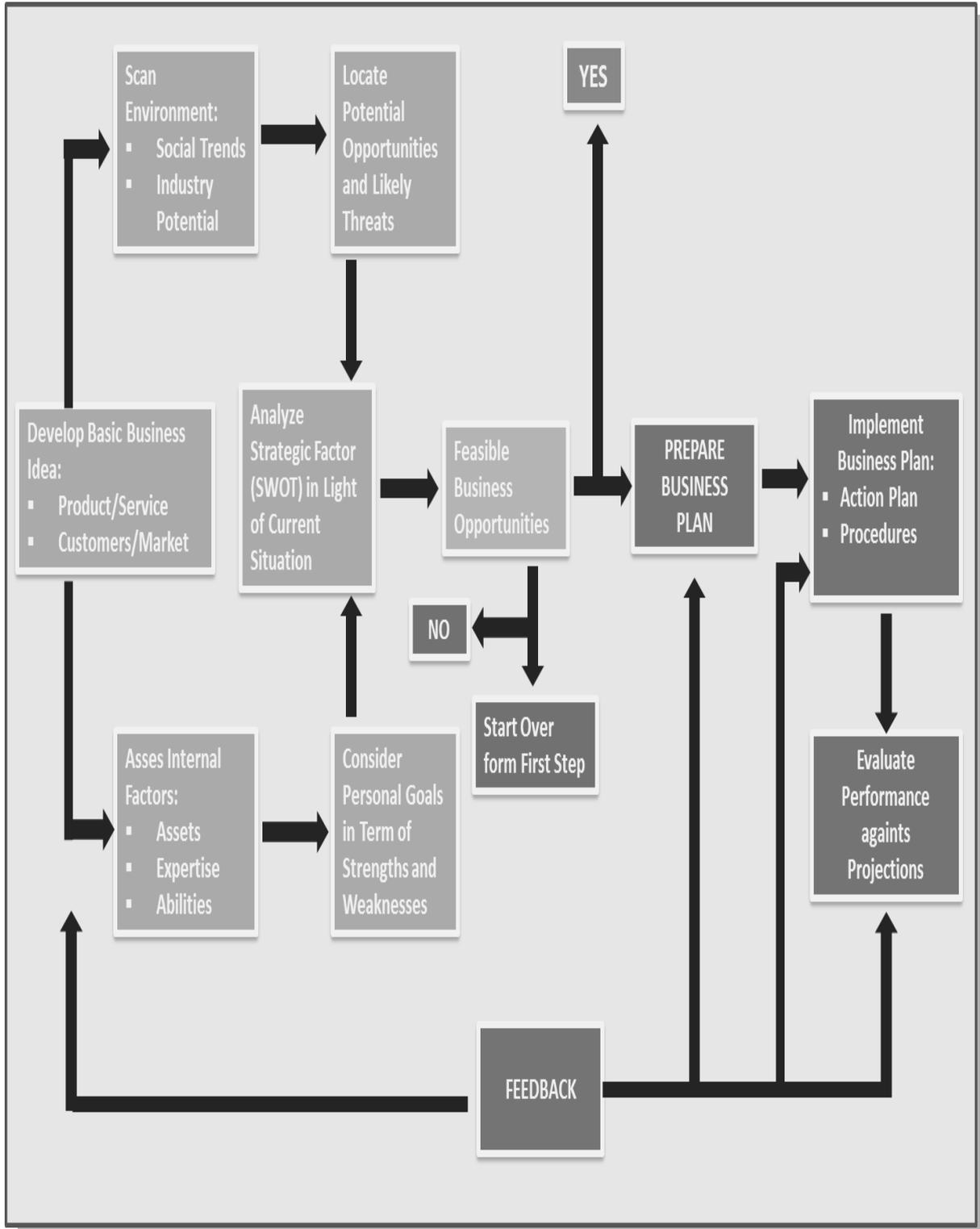
- a. Informasi yang dikumpulkan oleh pengusaha pada tahap studi kelayakan merupakan bahan yang sangat berharga bagi proses penyusunan *business plan*. Perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan penyusunan *business plan* adalah terletak pada aspek manajemen strategis.
- b. Dalam studi kelayakan usaha analisis lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Dalam menyusun *business plan* pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut di dalam susunan portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang.
- c. Pada **Gambar 1.** komponen-komponen rencana bisnis yang harus dibuat oleh perusahaan/pengusaha antara lain meliputi :
 1. Pengembangan visi, misi, tujuan dan strategi dari usaha baru tersebut.

2. Mengembangkan manajemen perusahaan yang menyangkut kegiatan penetapan direksi perusahaan, para manajer utama perusahaan.
3. Mengembangkan lingkungan internal yang mencakup pengembangan struktur organisasi, pengembangan budaya perusahaan, dan sumber daya utama organisasi/resources.
4. Mengembangkan proyeksi kinerja perusahaan yang mencakup antara lain perhitungan titik impas (BEP), perkiraan penjualan, harga pokok produksi dan penjualan.

Mengembangkan berbagai laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, arus kas, dan menetapkan perkiraan pengembalian investasi (*payback period*).

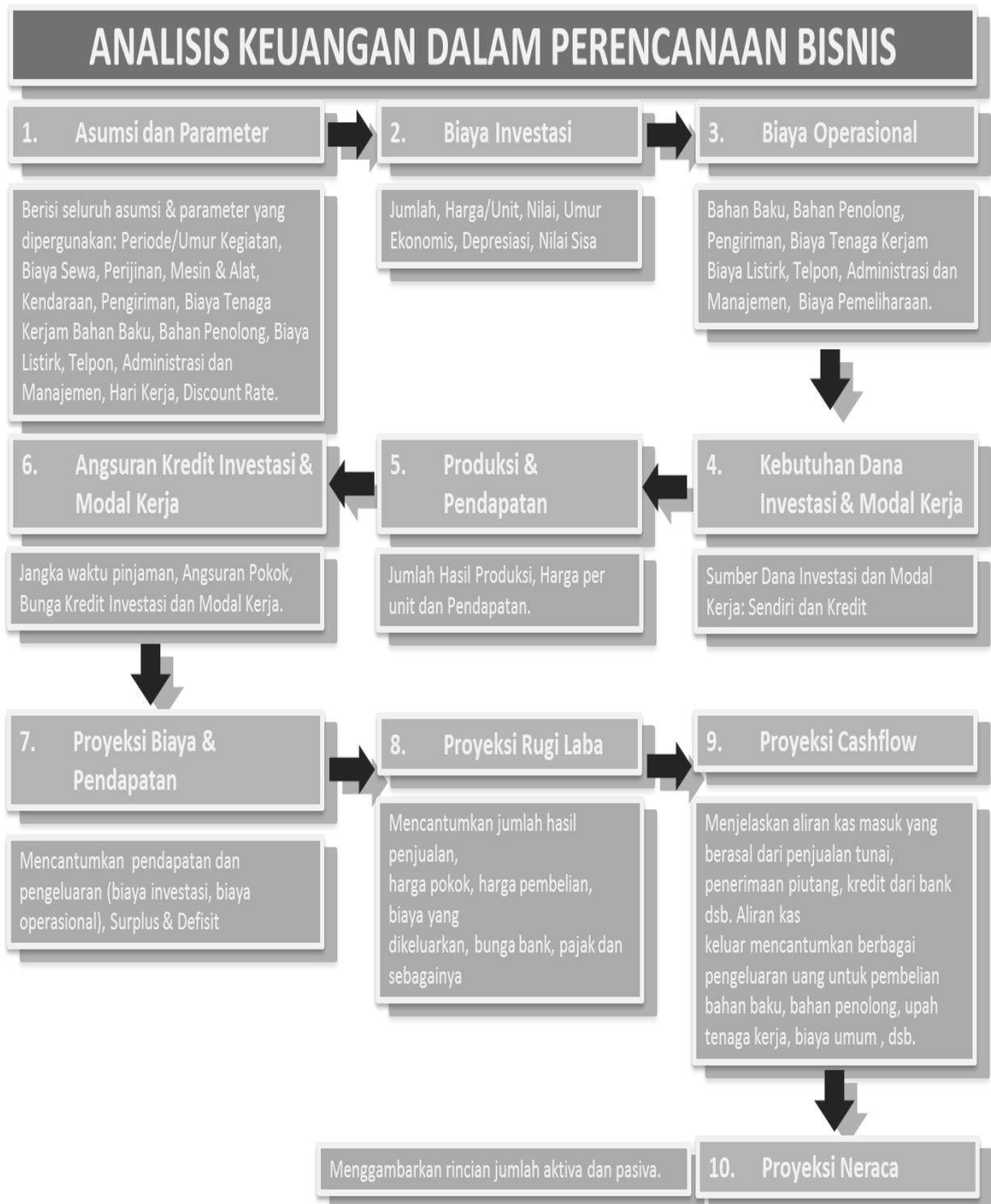


Gambar 9.8: Penyusunan Perencanaan Bisnis



Gambar 9.9: Kedudukan Business Plan dalam Manajemen Strategis

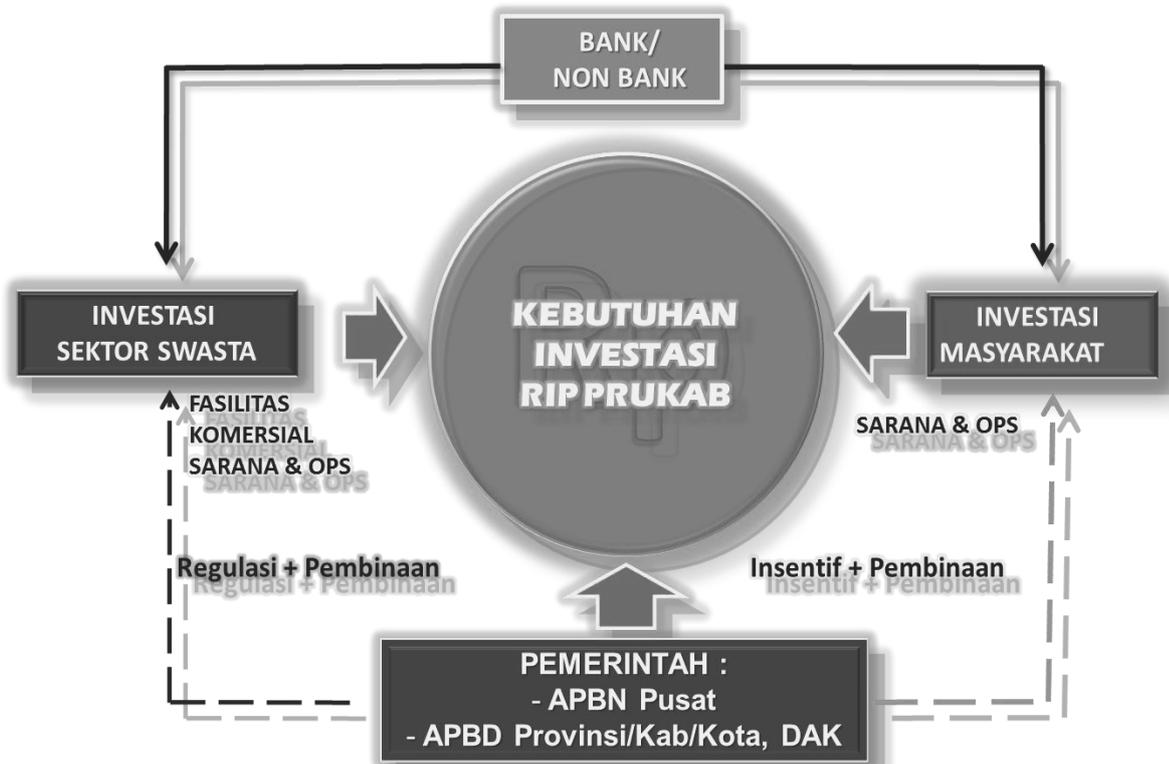
ANALISIS KEUANGAN PERENCANAAN USAHA



Gambar 9.10: Analisis Keuangan dalam Perencanaan Usaha

RENCANA AKSI PERENCANAAN USAHA

Berdasarkan hasil Perencanaan Bisnis dapat disusun Rencana Tindak (*Action Plan*), baik dari sisi masyarakat, sektor swasta maupun pemerintah berdasarkan tujuan pengembangan Kawasan. Rencana tindak dari Perencanaan usaha meliputi Investment Plan dan Funding Plan.:



Gambar 9.11. Perencanaan Bisnis dan Action Plan – Rencana Investasi

9.8.5. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PERLUASAN PASAR

PENGEMBANGAN USAHA

Definisi Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha didefinisikan sebagai sejumlah upaya dan proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang pertumbuhan usaha. Dalam modul ini, pengembangan usaha ditekankan melalui pengembangan teknologi dan pasar. Pengembangan teknologi akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Sedangkan pengembangan pasar akan memperluas jangkauan pemasaran produk. Pada akhirnya diharapkan pengembangan produk unggulan dapat terus bertumbuh sehingga mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha di masyarakat hutan.

Pengembangan usaha perlu terus dilakukan sehingga usaha mempunyai daya saing yang semakin baik dan mampu bertahan di pasar. Pengembangan usaha akan memperluas kapasitas yang bertumpu pada pengembangan teknologi dan pasar. Pengembangan teknologi

diimplementasikan melalui penerapan teknologi baru tepat guna yang lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengembangan pasar diarahkan untuk menemukan pasar-pasar baru potensial dan mengembangkan pasar yang sudah ada sebelumnya.

Unsur-unsur penting dalam pengembangan usaha dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu unsur yang berasal dari dalam (internal) dan unsur yang berasal dari luar (eksternal). Unsur yang berasal dari dalam terkait kompetensi kelompok usaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Sedangkan unsur yang berasal dari luar terkait dengan perkembangan informasi, kondisi lingkungan sekitar, dan dukungan dari pihak luar kelompok usaha.

Aspek-aspek Pengembangan Usaha

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha dikelompokkan ke dalam 3 hal yaitu :

(1) Aspek Strategi

Aspek strategi ini antara lain dilakukan dengan (1) meneliti kesenjangan harapan konsumen dengan produk yang ada, (2) mengembangkan produk dan teknologi baru yang bertumpu untuk memenuhi kesenjangan tersebut, (3) menciptakan pasar baru, dan (4) menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen.

(2) Aspek manajemen pemasaran

Aspek ini antara lain dilakukan dengan (1) menembus dan menguasai pangsa pasar, (2) mengolah situasi/pejuang pasar yang ada dengan teliti, (3) memasarkan produk dengan jaringan yang luas, dan (4) membuat strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dengan cara memasang iklan dan sebagainya.

(3) Aspek penjualan

Aspek ini contohnya dengan (1) merancang kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan, (2) menentukan volume produk yang akan dijual, (3) memperhatikan tingkat keamanan dalam proses penjualan barang, dan (4) menjual produk dengan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang baik.

Salah satu strategi penting dalam pengembangan usaha adalah pengembangan produk baru. Terdapat 6 (enam) pengertian dalam pengembangan produk baru yaitu :

- (1) **Benar-benar baru.** Adalah produk yang benar-benar baru hasil inovasi serta menciptakan pasar yang benar-benar baru
- (2) **Lini produk baru.** Adalah produk yang baru bagi usaha tetapi tidak bagi pasar karena sudah ada produk serupa di pasar
- (3) **Tambahan untuk lini produk yang sudah ada.** Adalah tambahan terhadap varian produk dari lini produk yang sudah ada. Hal lain juga terdapat upaya untuk memperluas segmen pasar dari produk yang ada
- (4) **Perbaikan atau revisi dari produk yang ada.** Produk baru jenis ini merupakan perbaikan kinerja produk lama melalui penerapan teknologi baru yang akan memperbaiki persepsi pelanggan
- (5) **Reposisi.** Adalah produk lama yang ditargetkan untuk aplikasi baru dan segmen pasar baru
- (6) **Penurunan biaya.** Adalah modifikasi produk dengan kinerja yang sama tetapi dengan biaya yang lebih rendah.

Permasalahan dan Solusi dalam Pengembangan Usaha

Permasalahan yang umumnya dihadapi dalam pengembangan usaha antara lain:

- (1) **Faktor kurangnya permodalan**
Permodalan merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan kelompok karena pada umumnya merupakan usaha kecil yang bertumpu pada modal usaha kelompok yang terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
- (2) **Kesulitan dalam pemasaran produk**
Kesulitan dalam memasarkan produk disebabkan oleh kurangnya kreativitas membuka dan memperluas pasar. Akibatnya bisa terjadi kelebihan produksi yang dapat merugikan usaha kelompok
- (3) **Persaingan usaha yang semakin ketat**
Persaingan usaha yang semakin ketat harus diantisipasi sehingga kelompok usaha dapat bersaing dengan pengusaha lain
- (4) **Kesulitan bahan baku**
Kesulitan bahan baku merupakan faktor krusial yang dapat mengganggu dalam proses pengembangan usaha. Jika tidak ada dukungan bahan baku yang cukup maka kelompok usaha tidak akan mampu mengembangkan usaha dengan baik.
- (5) **Kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli**
Kesulitan ini berasal dari kemampuan sumberdaya yang terbatas. Keterbatasan keahlian teknis dan tenaga ahli menghambat dalam mengembangkan inovasi usaha.

Adapun solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

- (1) Memperluas sumber modal dari luar dengan berbagai cara yang memungkinkan. Antara lain melalui jalur hibah, kerjasama, maupun pinjaman pihak ketiga/perbankan
- (2) Membuat saluran pemasaran yang luas. Antara lain dengan cara mengidentifikasi pasar-pasar baru yang potensial
- (3) Menerapkan strategi usaha yang terus berkembang. Antara lain dengan membuat diversifikasi produk, menemukan produk baru, dan menemukan teknologi baru
- (4) Memilih lokasi usaha yang strategis dengan mempertimbangkan kemudahan memperoleh bahan baku. Selain itu juga memperluas sumber-sumber perolehan bahan baku
- (5) Melakukan upaya peningkatan keahlian. Antara lain dengan merekrut tenaga baru yang kompeten maupun dengan mengembangkan tenaga yang ada dengan pelatihan, sehingga bisa didapatkan tenaga yang benar-benar ahli di bidangnya.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Definisi Pengembangan Teknologi

Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pengembangan teknologi adalah upaya terus menerus untuk meningkatkan cara dan sarana sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang

semakin berkembang. Dari serangkaian upaya pengembangan teknologi akan dihasilkan perkembangan teknologi yang selaras dengan perkembangan kebutuhan.

Saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat. Dari yang sederhana hingga yang rumit dan kompleks. Dalam bentuk yang paling sederhana perkembangan teknologi dihasilkan dari perkembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam.

Perkembangan teknologi bukan hanya dititikberatkan pada fungsi teknologi tetapi juga diperhitungkan seberapa efektif teknologi tersebut dapat memudahkan usaha manusia.

Ada tiga klasifikasi dasar dari perkembangan teknologi yaitu :

- (1) Perkembangan teknologi yang bersifat netral
Terjadi bila tingkat output yang lebih tinggi dicapai dengan kuantitas dan kombinasi faktor input yang sama
- (2) Perkembangan teknologi yang hemat tenaga kerja
Terjadi bila teknologi yang diaplikasikan dapat lebih menghemat tenaga kerja dalam memproduksi output yang sama
- (3) Perkembangan teknologi yang hemat modal
Terjadi bila teknologi yang digunakan mampu menghemat kebutuhan modal

Pengembangan Teknologi Kelompok Usaha

Pengembangan teknologi kelompok usaha ditinjau dari pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem, keseluruhan subsistem saling mempengaruhi untuk mencapai keberhasilan usaha. Subsistem tersebut meliputi : (1) subsistem sarana produksi (input), (2) subsistem produksi, (3) subsistem pengolahan hasil, (4) subsistem pemasaran, dan (5) subsistem pendukung dan penunjang.

Pada subsistem input perlu dikembangkan teknologi yang dapat mengefisienkan penggunaan sumberdaya dan meningkatkan keunggulan kualitas input. Sedangkan dalam subsistem produksi perlu dikembangkan teknologi yang tepat guna untuk menghasilkan output yang lebih baik dengan pemakaian sumberdaya yang efisien. Selain itu juga perlu dikembangkan teknologi yang mampu menjaga keberlangsungan kemampuan produksi secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Pada subsistem pemasaran perlu dikembangkan cara-cara pemasaran dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebaik mungkin, seperti pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan pada subsistem pendukung dan penunjang diperlukan dukungan pelatihan, fasilitasi, dan pendampingan dalam mengaplikasikan teknologi yang tepat guna secara berkelanjutan.

Pada uraian berikut diberikan contoh pengembangan teknologi berbasis produksi budidaya hasil kehutanan.

Teknologi Subsistem Input

Sumberdaya lahan dan agroklimat. Perlu ditelaah dengan baik kondisi sumberdaya lahan dan agroklimat sehingga dapat dikembangkan cara budidaya yang sesuai. Juga dapat diidentifikasi cara-cara inovatif dalam penyiapan sumberdaya lahan.

Varietas unggul. Perlu diidentifikasi dan dikembangkan varietas yang mempunyai sifat unggul sehingga dapat meningkatkan produktifitas. Pengembangan varietas unggul sangat memerlukan dukungan teknologi yang aplikatif.

Teknologi Subsistem Budidaya

Teknologi budidaya. Perlu dikembangkan teknologi budidaya yang sesuai dan berkelanjutan dengan cara-cara aplikatif yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Teknologi ini antara lain meliputi pengaturan jarak tanam, aplikasi pemupukan organik, perbaikan pola tanam, dan pengembangan plasma nutfah.

Teknologi Subsistem Pengolahan

Teknologi pengolahan. Hasil pertanian/kehutanan umumnya tidak tahan lama disimpan. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengolahan untuk memperpanjang masa simpan sekaligus meningkatkan nilai tambahnya. Perlu dilakukan identifikasi potensi pengolahan produk yang dapat dikembangkan. Potensi pengolahan harus memperhatikan ketersediaan dukungan sumberdaya manusia, alat, maupun teknologinya. Teknologi yang dikembangkan harus teknologi tepat guna.

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang untuk suatu masyarakat tertentu agar dapat dicocokkan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, serta ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Teknologi tepat guna dibuat sederhana agar pengguna dapat dengan mudah memakai alat hasil penerapan teknologi tersebut. Teknologi tepat guna mempunyai tujuan:

- Menghemat sumber daya
- Mudah dirawat
- Mudah digunakan
- Mempercepat waktu kerja

Teknologi Subsistem Pemasaran

Teknologi Informasi (TI). Pengembangan teknologi informasi dikembangkan dalam kegiatan pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Sehingga dapat digunakan sebagai informasi strategis untuk pengambilan keputusan bisnis.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang proses bisnis dan pemasaran usaha adalah untuk : (1) komunikasi, (2) promosi, dan (3) riset. TI dimanfaatkan sebagai media komunikasi dengan berbagai pihak seperti dengan pemasok dan pembeli antara lain melalui penggunaan email. Media internet juga dapat digunakan sebagai sarana promosi jasa atau produk yang dihasilkan oleh kelompok. Promosi bisa dilakukan melalui website, mailing list, maupun sarana chatting. Sedangkan untuk riset, internet juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan riset dan perbandingan. Kelompok dapat memanfaatkan internet untuk riset agar bisa mengetahui seberapa jauh keunggulan produknya dibanding produk sejenis lain yang sudah ada. Fungsi riset disini juga bisa digunakan untuk mencari formula baru untuk memperkuat mutu dari produk atau jasa.

Teknologi Subsistem Pendukung dan Penunjang/Kelembagaan

Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan terutama untuk pengembangan teknologi harus banyak dilakukan. Hasil-hasil penelitian berupa paket teknologi harus sebanyak mungkin dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Perlu dilakukan pendidikan, pelatihan dan bimbingan langsung kepada petani dengan model pembinaan *community base organization (CBO)* yang dapat dijadikan media untuk memotivasi dan peningkatan pengetahuan petani.

PENGEMBANGAN PASAR

Definisi Pengembangan Pasar

Pengembangan pasar merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian upaya perusahaan untuk mencapai pertumbuhan. Pengembangan pasar yang dimaksud dalam modul ini meliputi serangkaian kegiatan untuk mengembangkan pasar yang sudah ada maupun pengembangan pasar baru.

Strategi Pengembangan Pasar

Strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pasar antara lain :

Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk saat ini

Strategi ini adalah mengelola potensi produk lama untuk dikembangkan di pasar lama karena bisa jadi masih banyak yang bisa digarap di pasar yang lama. Caranya dapat dicapai dengan kombinasi strategi harga yang kompetitif, iklan, promosi penjualan dan optimalisasi tenaga penjualan.

Merestrukturisasi pasar yang matang dengan mengusir pesaing

Strategi ini mengatur kembali pasar untuk mempersempit ruang gerak pesaing. Untuk itu diperlukan promosi yang jauh lebih agresif, didukung oleh strategi harga yang dirancang untuk membuat pasar tidak menarik bagi pesaing.

Meningkatkan volume penggunaan oleh pengguna yang sudah ada

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan volume pembelian oleh pelanggan lama. Cara yang ditempuh diarahkan pada membangun dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Peningkatan loyalitas pelanggan akan meningkatkan volume pembelian pelanggan.

Mengembangkan jangkauan geografis pasar

Strategi ini dilakukan dengan membuka pasar tambahan melalui perluasan area geografis pemasaran. Perluasan geografis pemasaran antara lain dapat dilakukan secara regional, nasional maupun internasional.

Mengembangkan dimensi produk baru atau kemasan baru

Strategi ini diarahkan untuk menarik pangsa pasar yang lain dengan jalan mengembangkan versi produk. Misalnya produk ditawarkan dengan kemasan yang lebih baik, cara pelayanan yang lebih istimewa, atau dengan memasang iklan pada media yang lain.

Mengembangkan jalur distribusi baru

Strategi ini dilakukan dengan membuka dan mengembangkan jalur distribusi baru. Sehingga produk diharapkan dapat menyebar lebih banyak dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Mengembangkan kebijakan harga yang berbeda-beda

Strategi ini dilakukan untuk menarik pelanggan baru yang berbeda dengan menerapkan kebijakan harga yang berbeda. Selain bertujuan untuk menarik pelanggan baru, kebijakan harga yang berbeda juga dapat menciptakan segmen pasar yang baru.

9.9. BAHAN TAYANG



K.P. SHK MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT-INDONESIA
PROYEK KEMAKMURAN HIJAU

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN
MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN
BERBASIS KOMUNITAS**

HERMAN SUPRIYANTO

PROGRAM HIBAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERBASIS MASYARAKAT (PSDABM):
"Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara
Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka"

HOTEL ROYAL PADJADJARAN, 27-30 Juli 2016

Output A.2.2 : Tersedianya produk dan potensi pasar komoditi unggulan HHK, HHBK dan Imbal Jasa Lingkungan.

Indikator pada output ini adalah: Jenis komoditi unggulan HHK, HHBK dan Imbal Jasa Lingkungan yang dapat dipasarkan.

Kegiatan utama yang akan dilakukan:

- (A.2.2.1) Pendampingan kelompok usaha pengelola hutan;
- (A.2.2.2) Penerapan teknologi pasca panen;
- (A.2.2.3) Promosi dan pengembangan jaringan pasar.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dalam kerangka *community forestry* (kehutanan masyarakat) merupakan salah satu strategi pengelolaan sumberdaya hutan menuju pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*).

Beberapa kerangka kelembagaan pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 tahun 2008 tentang "Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan".

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan diatur melalui beberapa mekanisme seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Desa (HD). Disamping itu juga masih ada pengelolaan hutan adat di wilayah adat, serta model desa konservasi di sekitar hutan konservasi.

Bentuk-bentuk pengelolaan hutan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memanfaatkan hutan untuk memberdayakan masyarakat baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan dengan meningkatkan keterlibatannya agar kesejahteraannya meningkat.

Terkait dengan perkembangan PHBM ke depan, pengembangan jasa lingkungan merupakan suatu alternatif yang dapat diimplementasikan dalam praktek pemanfaatan hutan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Kegiatan dalam pemanfaatan jasa lingkungan ini antara lain adalah pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penyerapan/penyimpanan karbon.

Atas kegiatan tersebut, bisa diterapkan suatu mekanisme pembayaran yang disebut dengan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan kepada pihak penyedia jasa lingkungan.

SESI 1 :

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

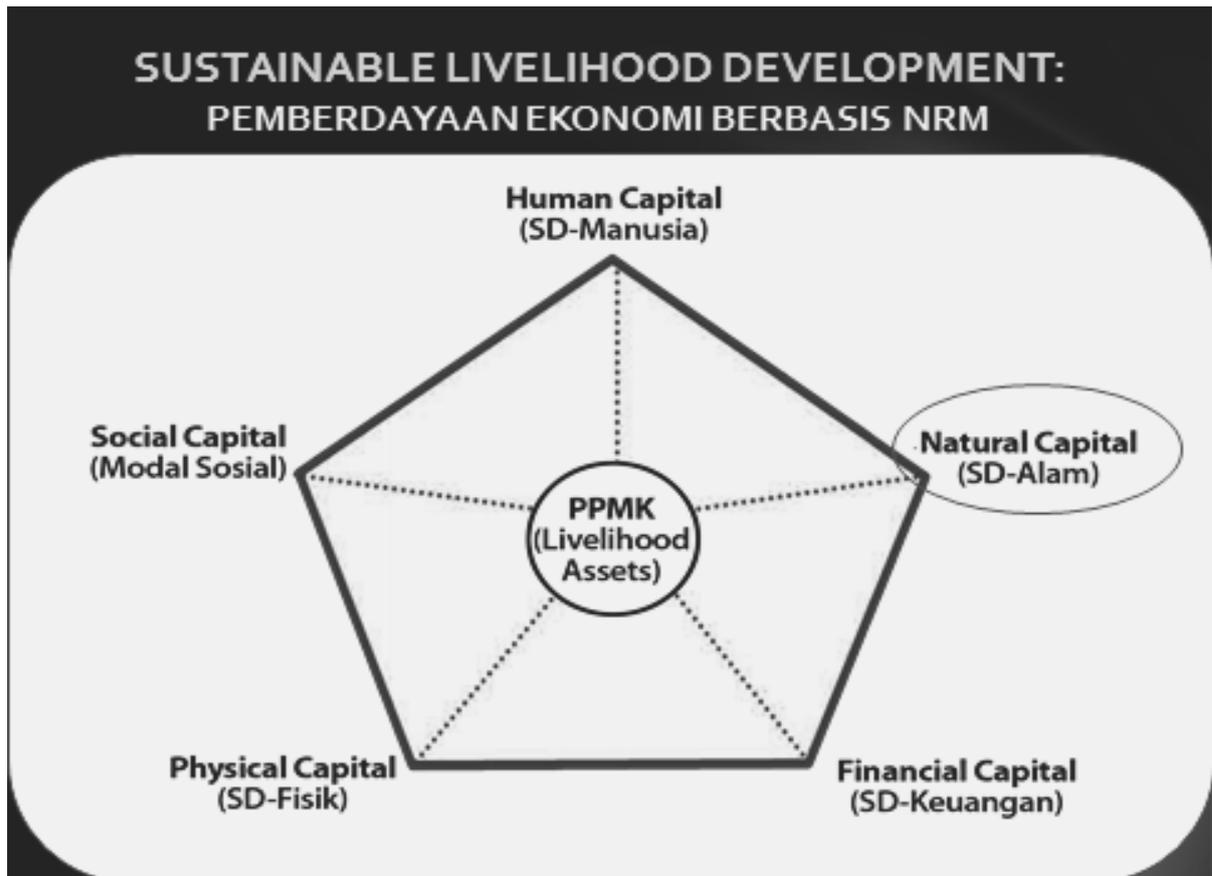
Penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.



Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.

PRAKTIK PEMBERDAYAAN

- Bantuan modal bergulir;
- Bantuan pembangunan prasarana;
- Pengembangan kelembagaan lokal;
- Penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan
- Fasilitasi dari pendamping
- DII



DISKUSI :

APA YANG AKAN DIBERDAYAKAN?

APA BENTUK PROSES PEMBERDAYAAN?

BAGAIMANA MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUTAN?

BAGAIMANA ARAH DAN PROSES PEMBERDAYAAN?

APA KOMPONEN PEMBERDAYAAN YANG DOMINAN?

SESI 2 : IDENTIFIKASI PRODUK UNGGULAN

PENETAPAN KOMODITAS UNGGULAN

No	Kriteria/Indikator	Bobot	Skor Komoditas Unggulan			
			A	B	C	D
1	Karakteristik Produksi :	0.4				
	a. Komoditas basis (produksi & tenaga kerja: LQ > 1)					
	b. Kontinuitas produksi (<i>Shift Share</i>)/trend produksi (menurun/meningkat)					
	a. Mempunyai Keahlian (Koefisien Spesialisasi)					
2	Keunggulan Kompetitif (<i>Revenue/Cost ratio</i>)	0.10				
3	Daya Tarik :	0.25				
	Ukuran pasar					
	Pertumbuhan pasar					
	Margin laba					
	Tingkat kompetisi					
	Pengaruh inflasi					
	Kondisi sosial, politik dan hukum					
	Kebutuhan modal					
4	Daya Saing :	0.25				
	Pangsa pasar					
	Pertumbuhan pangsa pasar					
	Kualitas komoditas unggulan					
	Citra komoditas unggulan					
	Jaringan pemasaran					
	Efektifitas promosi					
	Kondisi harga					
Efisiensi biaya						
Total Skor		1,00				

ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN

Analisis Kelayakan Usaha

Analisis kelayakan usaha digunakan untuk menilai potensi pengembangan komoditi atau produk terpilih menjadi produk turunan yang lain, dan menilai kelayakan ekonomi dari masing-masing produk turunan.

Analisis Kelembagaan Ekonomi

Analisis Kelembagaan ekonomi adalah menilai keberadaan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat yang mendukung pengembangan produk unggulan. Termasuk dalam analisis kelembagaan adalah menilai mekanisme kerja dan kemampuan manajemen masyarakat. Analisis kelembagaan ini menilai kelembagaan yang ada dapat mendukung pengembangan produk dan kebutuhan terhadap pengembangan kelembagaan tertentu.

Analisis Sosial Budaya

Analisis sosial budaya terutama diarahkan untuk menilai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Analisis sosial ekonomi digunakan untuk menilai rencana dan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi pengembangan produk.

DISKUSI :

APA SAJA KOMODITAS UNGGULAN HHK?

APA SAJA KOMODITAS UNGGULAN HHBK?

APA SAJA KOMODITAS UNGGULAN IMBAL JASA LINGKUNGAN YANG DAPAT DIPASARKAN?

SESI 3 :

ANALISIS KELAYAKAN USAHA DAN PERENCANAAN USAHA

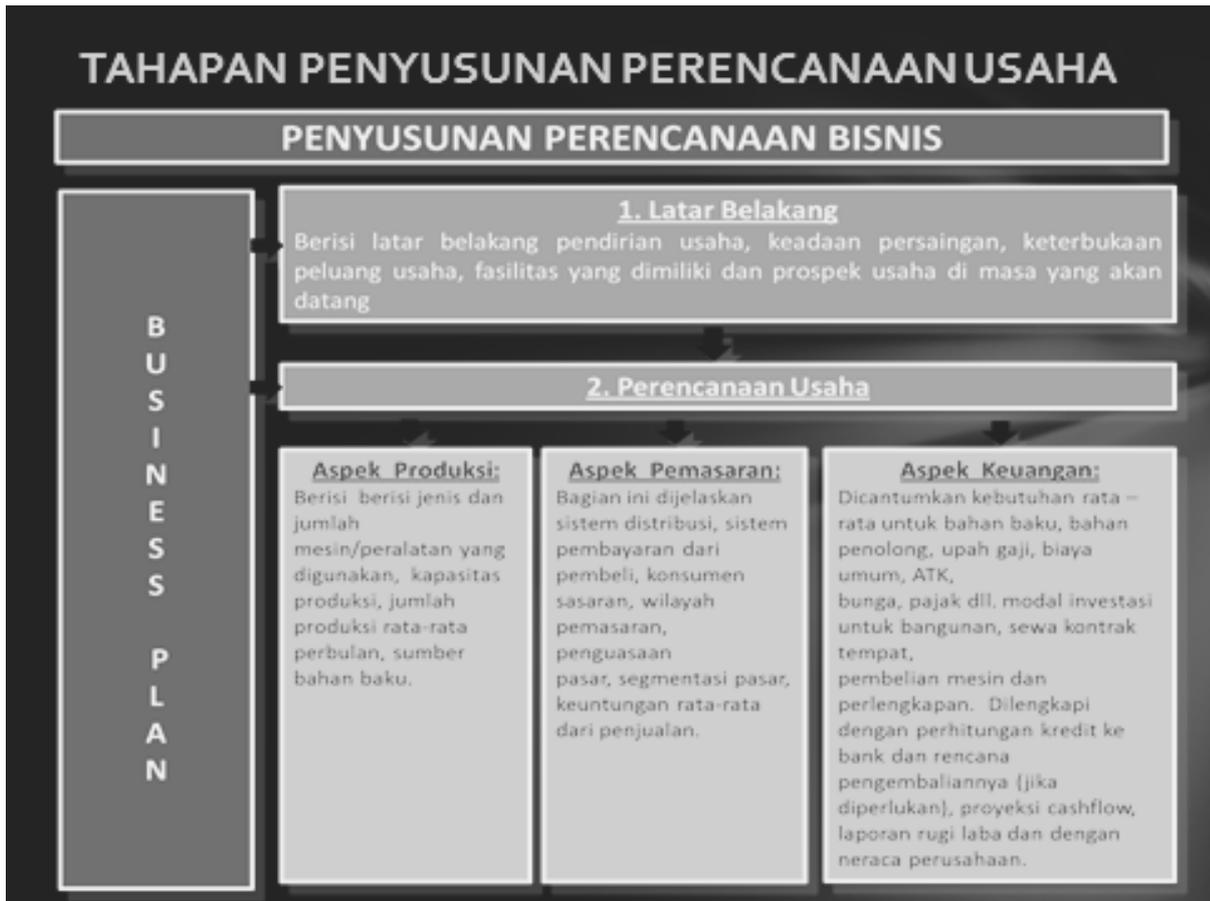
KELAYAKAN USAHA DAN PERENCANAAN USAHA

Studi kelayakan bisnis merupakan gambaran kegiatan usaha yang direncanakan, sesuai dengan kondisi, potensi, serta peluang yang tersedia dari berbagai aspek. Hasil dari studi ini menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan untuk menerima atau menolak suatu gagasan bisnis yang direncanakan, juga memberikan rekomendasi yang relevan.

Tujuan analisis kelayakan usaha dari aspek manajemen adalah untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi usaha dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan, sehingga pada akhirnya rencana usaha dapat dikatakan layak atau tidak layak

Business Plan (perencanaan bisnis) adalah gambaran detail tentang bisnis yang akan dibangun atau dikembangkan, yang dibuat secara komprehensif, efisien dan efektif. Rencana bisnis yang disusun secara baik dan cermat akan dapat menjadi acuan bagi pelaku bisnis dalam dunia usaha yang sarat persaingan







DISKUSI :

APA SAJA KOMODITAS UNGGULAN HHK YANG LAYAK DIUSAHAKAN?

APA SAJA KOMODITAS UNGGULAN HHBK YANG LAYAK DIUSAHAKAN?

APA SAJA KOMODITAS UNGGULAN HHK YANG AKAN DIUSAHAKAN MASYARAKAT?

APA SAJA KOMODITAS UNGGULAN HHBK YANG AKAN DIUSAHAKAN MASYARAKAT?

SESI 4 :

PENGEMBANGAN USAHA: TEKNOLOGI DAN PASAR

PENGEMBANGAN USAHA

Pengembangan usaha merupakan upaya dan proses yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan peluang pertumbuhan usaha.

Pengembangan teknologi akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Sedangkan pengembangan pasar akan memperluas jangkauan pemasaran produk.

Pada akhirnya diharapkan pengembangan produk unggulan dapat terus bertumbuh sehingga mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha di masyarakat hutan.

PERMASALAHAN PENGEMBANGAN USAHA

- Faktor kurangnya permodalan.** Permodalan merupakan faktor penting yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan kelompok karena pada umumnya merupakan usaha kecil yang bertumpu pada modal usaha kelompok yang terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
- Kesulitan dalam pemasaran produk.** Kesulitan dalam memasarkan produk disebabkan oleh kurangnya kreativitas membuka dan memperluas pasar. Akibatnya bisa terjadi kelebihan produksi yang dapat merugikan usaha kelompok
- Persaingan usaha yang semakin ketat.** Persaingan usaha yang semakin ketat harus diantisipasi sehingga kelompok usaha dapat bersaing dengan pengusaha lain
- Kesulitan bahan baku.** Kesulitan bahan baku merupakan faktor krusial yang dapat mengganggu dalam proses pengembangan usaha. Jika tidak ada dukungan bahan baku yang cukup maka kelompok usaha tidak akan mampu mengembangkan usaha dengan baik.
- Kurangnya keahlian teknis dan tenaga ahli.** Kesulitan ini berasal dari kemampuan sumberdaya yang terbatas. Keterbatasan keahlian teknis dan tenaga ahli menghambat dalam mengembangkan inovasi usaha.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

- Teknologi Subsistem Input: Sumberdaya lahan dan agroklimat dan Varietas unggul.**
- Teknologi Subsistem Budidaya: Teknologi budidaya.**
- Teknologi Subsistem Pengolahan**
- Teknologi Subsistem Pemasaran**
- Teknologi Subsistem Pendukung dan Penunjang/Kelembagaan: Pendidikan dan pelatihan.**



Pengembangan teknologi akan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

- ❑ Teknologi Subsistem Input: Sumberdaya lahan dan agroklimat dan Varietas unggul.
- ❑ Teknologi Subsistem Budidaya: Teknologi budidaya.
- ❑ Teknologi Subsistem Pengolahan
- ❑ Teknologi Subsistem Pemasaran
- ❑ Teknologi Subsistem Pendukung dan Penunjang/Kelembagaan: Pendidikan dan pelatihan.



PENGEMBANGAN PASAR

- ❑ Mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar produk saat ini
- ❑ Merestrukturisasi pasar yang matang
- ❑ Meningkatkan volume penggunaan oleh pengguna yang sudah ada
- ❑ Mengembangkan jangkauan geografis pasar
- ❑ Mengembangkan dimensi produk baru atau kemasan baru
- ❑ Mengembangkan jalur distribusi baru
- ❑ Mengembangkan kebijakan harga yang berbeda-beda



Pengembangan pasar merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk yang merupakan salah satu bagian upaya perusahaan untuk mencapai pertumbuhan.

AGENDA SELANJUTNYA??

- ❖ BASELINE SURVEY PENDAPATAN PETANI, KEGIATAN UTAMA, KEPEMILIKAN ASET, AKSES AND POLA PENGGUNAAN LAHAN SERTA PRODUKTIVITAS LAHAN (SENSUS VS SAMPLE)
- ❖ SURVEY PERANAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA
- ❖ PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN DAN PERENCANAAN USAHA SECARA PARTISIPATIF: [1] IDENTIFIKASI DAN PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN HHK & HHBK, DAN IMBAL JASA LINGKUNGAN SERTA [2] PENGEMBANGAN USAHA KOMODITAS UNGGULAN HHK & HHBK, DAN IMBAL JASA LINGKUNGAN
- ❖ IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PELATIHAN/PENDAMPINGAN: [1] FINANCIAL ASSISTANCE DAN [2] TECHNICAL ASSISTANCE
- ❖ PENDAMPINGAN MASYARAKAT SECARA REGULAR
- ❖ KEBUTUHAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
- ❖ KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PASAR
- ❖ LONGITUDINAL SURVEY : Sensus VS Sample (TERKAIT PIN PLAN VIVO DAN ERR)

SENSUS ATAU SAMPLE?

$$n = \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 p(1-p)N}{d^2(N-1) + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 p(1-p)}$$

Where:

Z : scale of Z value (from standardized normal distribution) at confident interval 95% or $\alpha = 5\%$, the value is 1.96

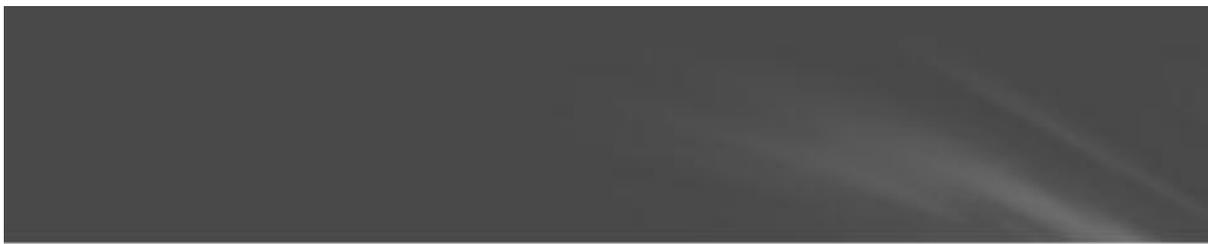
d : margin error indicating the accuracy

p : proportion of indicator (approx. by $p = 0.5$)

N: Number of population = **1,991 farmers**



Wilayah Kelola Sistem Hutan Kerakyatan (SHK)	Lokasi Desa (BAD)	POPULASI	SAMPLE	
			ME 5%	ME 3%
HKm Sambelia	Dara Kunci	216	36	76
HKm Sambelia	Sugian	221	36	78
HKm Santong	Santong	285	47	101
Unitkelola I	Dara Kunci	86	14	30
Unitkelola II	Dara Kunci	200	33	71
Unitkelola III	Sugian	150	25	53
Unitkelola IV	Santong	513	85	181
Unitkelola V	Sakuli	150	25	53
Kelompok Perempuan	Dara Kunci dan Sugian	100	16	35
Kelompok Perempuan	Santong	20	3	7
Kelompok Perempuan	Sakuli	50	8	18
Jumlah	-	1,991	328	704



●BAB 10

PENUTUP

Modul Acuan untuk Fasilitator Desa, merupakan modul yang disusun untuk diberikan melalui *Training of Trainer (ToT)* kepada Team Fasilitator Desa untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pendampingan masyarakat desa hutan. Modul-Modul ini kemudian harus diramu oleh Fasilitator Desa untuk menyusun kurikulum, silabus dan modul untuk pelatihan bagi masyarakat hutan desa. Tentunya, modul ini harus diramu dengan bahasa, gambar ataupun symbol-simbol yang mudah dimengerti dan dicerna masyarakat hutan.

Walupun modul ini pada mulanya diramu atas prakarsa untuk mendukung pelaksanaan ***Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka*** pada **Program Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat (PSDABM)** yang dibiayai MCA-Indonesia, namun modul ini dapat diadaptasi dan diadopsi oleh siapapun yang mempunyai konsern terhadap pengembangan hutan rakyat, yang penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Namun demikian, tidak ada gading yang tak retak, di mana kumpulan modul-modul pelatihan ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Tentunya, dalam proses perjalanan fasilitator Desa dan KpSHK mendampingi masyarakat dalam kegiatan ***Proyek Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan bagi Masyarakat Desa Hutan secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka*** pada **Program Pengelolaan Sumber Daya Alam berbasis Masyarakat (PSDABM)** yang dibiayai MCA-Indonesia, akan diperoleh proses pembelajaran di lapang, yang kemudian, tentunya, akan menyempurnakan modul-modul pelatihan yang telah disusun.

Semoga modul ini, dapat menjadi salah satu titik sumbangsih KpSHK untuk mencapai tujuan penyejahteraan masyarakat hutan dan mendukung kelestarian hutan: **Hutan Rakyat, Hutan Lestari, Rakyat Berdaulat, Bangsa Mandiri.**

●BAB 11

DAFTAR BACAAN

- Awang, S.A. dkk. 2008. Panduan pemberdayaan Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH). CIRAD, CIFOR dan PKHR
- Bahan Jurnalisme Warga Oxfam. Pelatihan Jurnalisme warga. Sembalun. Lombok Timur
- Budhi Prasetyo, A. 2011. Seba-serbi Hutan Desa.
- Djauhari Moh *et al.*. Modul Pendokumentasian SHK. KPSHK. Bogor
- Hutomo, MY. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi:
- I Made S Utama dkk. 2011. Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan Kearifan Lokal. Tropical Plant Curriculum Project. USAID, Texas A&M University dan Universitas Udayana.
- Jusuf, Y dan Rauf, F. 2011. Studi Pengusulan Hutan Desa di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. Jurnal Hutan dan Masyarakat. Volume. 6, No.2, Agustus 2011.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Pedoman Teknis Peningkatan penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK). PNPM Mandiri Perkotaan, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- KPSHK. Modul Pendokumentasian SHK.
- Moeliono Ilya, Djohani Rianingsih. 2007. Kaji tindak Partisipatif untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat (PSABM) pada Skala Kawasan. Studio Driya Media. Bandung
- Moeliono Ilya, Nur Tjahjo. 2007. Studio Driya Media. Bandung
- Nanang, M dan Devung, GS. 2004. Panduan Pengembangan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Institute for Global Environmental Strategies. Kanagawa, Japan.
- Partnership for Governance Reforms, 2011. Mendorong Percepatan Program kehutanan Masyarakat dan Hutan Desa. Partnership Policy Paper No. 4/2011.
- Puspajak, 2014. Pelatihan Pembangunan dan pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat untuk Memanfaatkan Jasa Lingkungan Hutan. Laporan Kegiatan, 26-27 Juni 2014. Didukung oleh the ACIAR Project FST/2012/040 "Enhancing Smallholder Benefits from Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia".
- Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta.
- Tjahjo Nur, Moeliono Ilya. Dari Akar Rumput. World Neighbors dan Studio Driya Media. Bandung.

○BAB 12

BIOGRAFI



Mohammad Djauhari, lahir 19 Januari 1973 Direktur Konsorsium Pensukung Sistem Kehutanan (KPSHK). Sejak 1998, bekerja di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang meliputi: [1] LATIN 1998 - 2003, [2] WALHI 2003 - 2006 dan [3] KPSHK 2006 - sekarang. Mempunyai pengalaman dalam Community Based Natural Resources Management (CBNRM) Project, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa pengalaman proyek, antara lain: [1] “Indonesian Focal Point” (Coordinator) pada Lesson Learn on CBNRM in Thailand, Philipine and Indonesia-SPARK Program, [2] Inventory of CBFMs (Community Based Forest Management System) in Peatland Forest Area in Sumatra (Riau, South Sumatra, Jambi, West Sumatra), [3] SIRG (Sistem Informasi Rawa Gambut-Peat Information System) in three provinces in Sumatera (West Sumatera, South Sumatera, and Jambi), dan [4] Rattan Monitoring Unit-Rattanation (Connecting all stakeholders in rattan sector in Indonesia) in East Kalimantan, Central Kalimantan and Central Sulawesi.



Afrinal Sya'af Lubis, lahir di Sukabumi 27 Februari 1975, sarjana lulusan Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor (IPB) mempunyai pengalaman kerja sebagai [1] Manager Divisi Unit Carbon SHK, KpSHK. Bogor; Konsultan ISPO. Gap Analisis dan Penyusunan Dokumen Prinsip & Kriteria ISPO. PT.BHC (Bumi Hijau Cemerlang). Jakarta; [2] Konsultan ISPO. Gap Analisis dan Penyusunan Dokumen Prinsip & Kriteria ISPO. PT. Focus QE (Quality of Environment). Jakarta; [3] Media Specialist SHK, KpSHK. Bogor; [4] Surveyor, Kajian Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air Limbah Domestik. Tangerang. PT.Aditya Engineering Consultant; [5] Manager Ecovillage SHK, KpSHK. Bogor; [6] Instruktur Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 Pabrik Gula (PTPN) Program Direktorat Jenderal Industri Agro - Kementerian Perindustrian RI. PT.Focus QE (Quality of Environment). Jakarta; [7] Konsultan Penyusunan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dan SNI Gula (PTPN). Program Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian RI. PT.Focus QE. Jakarta; [8] Tim Ahli Survei Pengukuran Carbon Gambut Aceh, Konsultan - Pemda Aceh; [9] Administrasi. General Contractor PT.Tetra Suci Pratama, Jakarta; [10] Administrasi. General Contractor PT.Regan Matsuda, Jakarta; [11] Manager Kebun, Yayasan Mitra Petani Sejahtera, Indramayu. PT.Regan Matsuda, Jakarta; dan [12] Tim P4M2T (Program Pendampingan Penyuluhan Pertanian Menuju Masyarakat Tani Sejahtera), Indramayu. IPB.



Dewi Mutiara, lahir di Bandung, 25 Maret 1978. Sarjana Agribisnis Institut Pertanian Bogor 2000. Jabatan terkini sebagai manager keuangan. Beberapa pengalaman kerja meliputi : [1] Finance Officer for Project ICCO - KpSHK 2014 - 2015, [2] Cashier for Project UNDP - ICCO - KpSHK 2014-2015, dan [3] Finance Officer for Project ICCO - KpSHK 2013 - 2015. Beberapa pelatihan yang pernah diikuti meliputi : [1] Workshop Penulisan Modul REA (*Rapid Ecosystem Assessment*) SHK. KpSHK-ICCO. Bogor. Januari 2015; [1] Wokshop Nasional Mendorong Inisiatif Imbal Jasa Lingkungan Karbon Berbasis Masyarakat. Kerjasama UNDP-KpSHK-KLHK. Bogor. Agustus 2015; [3] Workshop Nasional Meningkatkan Komitmen

Bersama Mendorong Pendanaan Perubahan Iklim Melalui Skema Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Hutan dan Lahan. Kerjasama Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DPPI) dan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK). Jakarta. Agustus 2015; [4] Pelatihan Manajemen Keuangan, Pendukung Keberlanjutan Keuangan Lembaga. Samdhana Institute dan Yayasan Satu Nama, Yogyakarta. November 2015; [5] Loklatih Penyusunan Proposal Dana Hibah PSDABM (Sulbar-Sulsel-Sulteng) GP-MCAI. Mataram NTB. Januari 2016; dan [6] Pelatihan Pajak Penghasilan Pasal 21 Komprehensif PER-14/PJ/2013 - January 2016 .



Herman Supriyanto, lahir di Jember 27 September 1972, mempunyai pengalaman sebagai peneliti, konsultan dan manajemen proyek sejak 1994 di bidang Sosial Ekonomi pada sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur dengan latar belakang pendidikan S1 dan S2 di Institut Pertanian Bogor (IPB). Pengalaman kerja sebagai Peneliti diawali pada *Center for Economic and Social Studies* (CESS), sedangkan pengalaman menjadi konsultan diawali dari HIVOS Belanda dan PT. FACET Matra Indonesia. Sedangkan pengalaman dalam manajemen proyek, ketika menjadi Direktur PT. Multi Area Conindo (MACON) dan PT. Inersia Ampak Engineers dan Komisaris Utama PT. Multi Area Desentralisasi Pembangunan. Selanjutnya, berbagai pengalaman penelitian, jasa konsultasi dan manajemen proyek telah dilakukan di berbagai lembaga *Consulting Firm, Research Center, Private Sector, Central and Local Government, NGO, Universities, and International Funding Agencies*, baik proyek yang didanai pemerintah melalui APBN dan APBD, sektor swasta nasional dan internasional, sampai dengan proyek-proyek yang didanai *Islamic Development Bank (IDB), JICA, Asian Development Bank (ADB)* dan *World Bank (WB)*. Pekerjaan-perkerjaan tersebut mulai dari kegiatan *project study; research; preparation; appraisal; formulation and design; implementation and management; advisory maupun monitoring and evaluation*.



Joko Waluyo, Sarjana Agronomy Institut Pertanian Bogor, 1993. Beberapa pengalaman kerja sejak tahun 2013, meliputi: [1] 1997-2002, Head Division, Executive National Walhi, Jakarta - [2] 1998-2004, National Coordinator, Sawit Watch, Bogor - [3] 2002-2005, National Coordinator, Consortium for Supporting Community Based Forest Management (KpSHK), Bogor. - [4] 2006-2008, Facilitator, Independent, Indonesia. - [5] 2006, Consultant, Assessing Impact for MFPs Multi-Stakeholder Flora in Papua, DFID, Papua. - [6] 2006, Consultant, Assessing Impact for Indonesia Biodiversity Foundation Kehati Program in Kalimantan, Kehati, Kalimantan. - [7] 2008, Consultant, FGP Expansion in Papua Barat, Kemitraan, Papua Barat. Development of regional based partnership in supporting community based forest management (CBFM) in Papua Barat. - [8] 2009, Consultant, FGP CSO Facilitation in Sumatera and Kalimantan, Kemitraan, Sumatera and Kalimantan. Facilitating CSOs in Sumatera and Kalimantan to combat climate change. - [9] 2010-2011, Project Manager, Central Kalimantan Support Project, Kemitraan, Central Kalimantan. - [10] 2011-2013, Consultant, Local Capacity Building for Forest Governance. Provide technical assistance in planning, implementing, and monitoring evaluation of program implementation conducted by Kemitraan's partners (local government and CSOs) in 6 provinces i.e. Aceh, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Papua, and West Papua. Other Training (relevant training): The Art of Vibrant Facilitation, 2005, Inspirit Inc, Denpasar. - Conflict Resolution, 2004, Sawit Watch, Bogor. - Environmental Advocacy, 1997, Walhi, Bengkulu. - Community Organizing, 1994, Bernala Intitute, Bogor. - Participatory Rural Appraisal, 1993, Bernala Institute, Bogor.



M. Noor Asikin Ngile, lahir Kotabaru, 2 Oktober 1973. Sarjana Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 1997. Beberapa pengalaman kerja sejak tahun 2013, meliputi: [1] 2001 Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan – Banjarmasin - [2] 2000 Kordinator Jaringan Advokasi Tambang dan Lingkungan hidup Kalimantan - Banjarmasin. - [3] 2003 Devisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi – Jakarta. - [4] 2007 Simpul Nasional Advokasi Lingkungan Hidup Masyarakat Pinggir Hutan KIKIS – Jakarta. - [5] 2005 Kordinator Nasional Program Registrasi Kawasan Kelola Rakyat / KpSHK – Bogor. - [6] 2008 Kordinator Nasional Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan Bogor. [7] 2009 Komite Eksekutif Gerakan Anti kemiskinan Struktural / KIKIS - Jakarta. [8] 2009 Pendampingan Masyarakat Adat Wamena - Papua. - [09] 2013 Dosen Hukum Lingkungan Universitas Saijaan Kotabaru – Kotabaru Kalsel. - [10] Sampai sekarang Direktur LBH Saijaan – Kotabaru Kalsel dan Direktur Saijaan Foundation – Kotabaru Kalsel.



Ita Natalia, lahir 26 Desember 1969, lulusan Sarjana Kehutanan, Universitas Tanjungpura Pontianak, mempunyai pengalaman kerja sebagai Fasilitator dan Konsultan dengan spesifik keahlian pada bidang Pemetaan Sosial untuk Gender, Masyarakat Adat dan Hak-hak Pertanahan, monitoring Evaluasi dan berbagai hubungankerja dengan berbagai Pemangku Kepentingan. Saat ini, dia bekerja sebagai Medio Consultant pada AidEnvironemnt Asia, yang sebelumnya pernah bekerja di The Samdhana Tnstitute sebagai Project Leader dan Focal Point, bekerja di Indonesian Participatory Mapping Network (JKPP) sebagai Sekretaris Nasional, Yayasan KEHATI sebagai Fasilitator, PPSDAK sebagai Koordinator Fasilitator dan Direktur Beberapa pelatihan yang pernah diikuti meliputi: [1] Global Reporting Initiative, GRI G4; the GRI Certified Training Course, 2014; [2] Training of trainers for community facilitators and organizers, and program planning, conducted by INSIST in Yogyakarta 1999; [3] Joint Forest Management Course, conducted by IIFM in India 1998; [4] Training of trainers for community mapping, Indonesia 1996; dan Facilitator for training and workshop.



Nurhidayat Munir, lahir di Depok, 26 Juni 1980, lulusan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, mempunyai pengalaman kerja sebagai Peneliti Sektor Kehutanan. Beberapa pengalaman penelitian meliputi: [1] Penelitian Valuasi Ekonomi – Ekologi SDA yang Hilang Akibat Konversi di Perkebunan Sawit (Studi Kasus Kecamatan Manis Mata), dengan Buku “*Air Mata Manis Mata*”, 2004 – 2005; [2] Ground check wilayah perbatasan di Ketungau Hulu, Sintang, Kalbar 2005; [3] Ground check potensi wilayah perbatasan di jalur Perkebunan Kelapa Sawit dan DAS Ketungan, Sintang, Kalbar 2006; [4] Ground check kawasan SOB Kalimantan Barat; [5] Ketua Tim Peneliti Lapangan “Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Nanga Mahap” Sekadau, Kalbar, 2007; [6] Tim Monitoring CERD Sawit Perbatasan 2008 – 2009 di Kalimantan Barat; [7] Koordinator pelaksana program QMS (IUCN – WALHI – WWF – Sawit Watch) dalam Pengelolaan DAS Kapuas, 2006 - 2007; [8] Koordinator program Pengelolaan DAS Kapuas (IUCN NPA – WALHI – WWF – Sawit Watch), 2009 – 2010; [9] Koordinator program pengembangan model SLUP (JKPP – SW – Oxvam Novib), 2011 – 2012; [10] Tim analisis kebijakan Task 3. Land Use and Spatial Planning Need Assessment di Sulawesi Barat (Abt Associates Inc.) 2013; [11] Program Manager Implementation of Plan Vivo Standards in Community Based Forest Mangament (SHK) Units, ICCO – KpSHK, 2014 – 2015; [12] Spatial and Forest Management Manager “Sub-national REDD+ Small Scale Program in East Kalimantan” ICCO – UNDP, Januari 2015 – Juni 2015. Di samping itu, pengalaman berorganisasi meliputi: [1] WALHI Kalbar; [2] Seknas JKPP, [3] Program Manager

Sustainable Land Use Planning (SLUP) kerjasama Oxvam Novib –Sawit Watch – JKPP, [4] Abt associates Inc.; [5] ICCO – KpSHK.



Andi Inda Fatinaware, lahir di Makasar, 28 Agustus 1973, yang mempunyai pengalaman kerja sebagai peneliti, konsultan dan manajemen di Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Perkumpulan Sawit Watch, Yappika Jakarta, Perkumpulan Jurnal Celebes, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan Sphere Institute of South Sulawesi (SITUS). Pengalaman berorganisasi di berapa lembaga meliputi: [1] Badan Pengawas Sawit Watch. 2012 – 2016; [2] Dewan Pengawas Nasional Solidaritas Perempuan. 2008 – 2012; [3] Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sulawesi Selatan. 2006 – 2009; [4] Presidium Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia, Sulawesi Selatan. 2006 – 2011; [5] Dewan Pengawas Komunitas Solidaritas Perempuan. Anging Mammiri. 2003-2006 and 2006-2009; [6] Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia; dan [7] Perkumpulan Jurnal Celebes.



Pipin Noviati Sadikin, lahir 28 November 1971, lulusan Universitas Padjadjaran dan Institut Pertanian Bogor, yang mempunyai pengalaman kerja sebagai pengajar, trainer, writer & Editor, dan program development, di beberapa lembaga, antara lain: [1] KONSEPSI-Mataram, [2] IPB Language Center (LSI), [3] Blue Green Lombok Holidays-Travel Agent, [4] Mitra Samya, Mataram, [5] Universitas Mataram, [6] AMIKOM-ASMI, [6] Lombok Network Holiday (Travel Agent), dan [7] Studio Dria Media-NGO. Beberapa pengalaman melaksanakan kegiatan proyek meliputi: [1] Profile Writing for FORCES Program, WWF NTB ; [2] Carrying Capacity for Trekking Activity Tourism in Taman Nasional Gunung Rinjani ; [3] Proposal Preparation for Several Programs KONSEPSI - Mataram (Ford Foundation and MCAI); [4] *Facilitation Training of Communication Media Development of PES Program in Mataram (WWF NTB)*; [5] Coach for the Pilot Project on Public Awareness of Solid Waste Management Program at Kelurahan Merdeka Bandung, for GTZ, BAPPEDA Bandung, PD Kebersihan Bandung, and Studio Driya Media Bandung; [6] Facilitation Training of Public Awareness of Solid Waste Management Program in Bandung; [7] Using Media Training of Literacy Resource Center (SPPM) at SDM Bandung; [8] Strategic Communication, PCI, in Jakarta and Sumatra Barat; [9] Using Internet Training for NTCDC (Nusa Tenggara Consortium Development of Community) in Denpasar; [10] Co-trainer for the Classical PRA (Participative Rural Appraisal) Training in SDM Bandung; [11] Media Evaluator for NTCDC (Nusa Tenggara Consortium Development of Community); [12] Media Evaluator for AusAids (HIV/AIDS Media); [13] Organizer Team as Documentation Division in 2002 Capacity Building Workshop of Literacy Resource Centers For Girls and Women in Asia and the Pacific for ACCU UNESCO, serta pengalaman lain pada organisasi Internasional. Di NTCDC dan NTFP.



Sutisna, lahir di Tasikmalaya 10 September 1970, Sarjana Agronomi dan Master Ilmu Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), mempunyai pengalaman kerja sebagai *freelance consultant*, khususnya dengan bidang keahlian *Environmental Specialist* dan *Community Development* di berbagai proyek sejak tahun 1996, baik proyek-proyek yang dibiayai pemerintah maupun swasta. Banyak kegiatan AMDAL yang telah diselesaikan serta berbagai kegiatan survey social-ekonomi-lingkungan.



kegiatan AMDAL yang telah diselesaikan serta berbagai kegiatan survey sosial-ekonomi-lingkungan.



Bayu Saputro, lahir di Bogor 29 Juni 1988, lulusan Diploma Manajemen Informatika, Institut Pertanian Bogor (IPB), yang mempunyai pengalaman bekerja di [1] Divisi Gspatial Information System (GIS), KpSHK; [2] Pembuatan Peta Hasil dan Survei HCVA (High Conservation Value Area) dan HCS (High Carbon Stock) PT. Karunia Alam Makmur, Prov. Sulawesi Tengah. Pekerjaan utamanya adalah pelaksanaan survey dan pembuatan peta.



Muhammad Fachrudin, lahir di Jakarta 20 Oktober 1976, Sarjana Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, 2005. Beberapa pengalaman kerja sejak tahun 2005, meliputi: [1] Praktek Kerja Lapang di Balai Riset dan Observasi Kelautan (BROK) Jembrana Bali, Juli 2008; [2] Designer grafis di Cakra Buana Candramukti, sejak April 2007 s/d Juli 2009; [3] Survei Kapal Kurang dari 30 Gt. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Survayor Indonesia; [4] Desain Rumah Penyuluhan dan Pamflet Penyuluhan untuk proyek Word Bank dan COREMAP II pada Januari – Maret 2012; [5] PT. Kumala Kreasindo Maret (Estimator)-- Juni 2012; dan [6] PT. Mora quarto Multimedia (Cepat.net) (planning). Beberapa keahlian teknis yang dikuasai meliputi: [1] Algoritma dan Bahasa Pemrograman (Bahasa C); [2] Rancangan alat dengan Google Sketch up, Photoshop, Autocad dan Coreldraw; [3] Kemampuan Internet; [4] Dasar-dasar elektronika; [5] Arc GIS; [6] AutoCad; dan [7] Google Sketch up.



Muhammad Zaki Albahrawi, lahir di Medan 8 Februari 1992, Sarjana Pertanian, Departemen Program Keahlian Teknologi Industri Benih, Institut Pertanian Bogor, 2013. Beberapa pengalaman kerja sejak tahun 2013, meliputi: [1] PT. Indonesia Berkebun Juni 2013 — Agustus 2014, sebagai Manajer Perencanaan dan Pengembangan; [2] PT. Geodata November 2014 — Desember 2014 sebagai Surveyor; [3] PT. Tulada Konsulan Januari 2013 — April 2013 sebagai Data entry dan Surveyor; [4] Mandiri Consultant Mei 2013 — Mei 2013 sebagai surveyor.

